INKLUSI SOSIAL

INKLUSI SOSIAL

Sepuluh Kisah Peduli Masyarakat Adat
dan Lokal Terpencil Nusantara

Buku ini didedikasikan untuk anggota keluarga
Program Peduli yang telah pergi mendahului:

Beta Muslimah, Nia Ramdhaniaty, Satriyanto & Yohanes Balubun

untuk semua yang mencintai kerja-kerja kemanusiaan,
sebuah pekerjaan yang kadang sulit dicerna oleh logika

dan untuk semua yang membela Indonesia,
sebuah negeri inklusi yang menjadi

SUKU TALANG MAMAK
SUKU ANAK DALAM
DAYAK KENYAH LEPOQ JALAN
MASYARAKAT KAHAYYA
MASYARAKAT TOBALO & TOGARIBO
DAYAK OHOKNG
SUKU SAWANG
SUKU TOPO UMA
ACEH
SUMBAR
KALBAR
SULUT
SULBAR
SUMSEL
KALSEL
SUKU MENTAWAI
PAJENAGER
SULSEL
SULTRA
JATENG
JATIM
BANTEN
JABAR
JOGJA
BALI
NTB
CINA BENTENG
SUKU BADUY & KESEPUHAN
GUMANTAR, MEKARSARI
MASYARAKAT ADAT SUMBA TIMUR
SUKU BOTI & SUKU BAJO

WILAYAH KERJA PROGRAM PEDULI

14 Provinsi
22 Kabupaten
67 Desa/ 2 Kelurahan
20 Komunitas Adat
14 Mitra/CSO
21.968 Pemanfaat Langsung

DAFTAR ISI

CATATAN PENULIS 9

SEKAPUR SIRIH 12
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

KATA PENGANTAR 14
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Part 1
PROLOG 21
Selayang Pandang Program Peduli Masyarakat Adat dan Lokal Terpencil yang Tergantung pada Sumber Daya Alam

Part 2
CERITA PERUBAHAN 41

Bab 1 43
Lika Liku Perjuangan Masyarakat Adat untuk Setara Bermartabat di Mentawai *(Yayasan Citra Mandiri Mentawai)*

Bab 2 63
Penjaga Rimba yang Terasing: Kisah Inklusi Suku Anak Dalam di Sepanjang Trans Sumatera *(Pundi Sumatera)*

Bab 3 85
Ritual Adat Suku Sawang Gantong: Berkah di Darat, Selamat di Laut *(LPMP Air Mata Air)*

Bab 4 99
Berdaulat dan Bermartabat di Tanah Adat Baduy dan Kasepuhan *(Rimbawan Muda Indonesia)*

Bab 5 123
Perempuan Nu Lingxiu, Agen Perubahan Inklusi Sosial dari Cina Benteng *(Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita Jakarta)*

Bab 6 137
Berdaya di Sungai dan di Pantai: Komunitas Dayak Kenyah dan Kangean di Era Kesetaraan *(Yayasan Desantara)*

Bab 7 155
Pataka, Syair Kekeluargaan Pengusir Keterasingan Suku Topo Uma Sigi *(Karsa Institute)*

Bab 8 175
Merdeka dari Belenggu Isolasi di Barru dan Bulukumba ala To Balo, To Garibo, Kahayya *(Sulawesi Community Foundation)*

Bab 9 193
Cerita Desa Inklusi Mekarsari, Mauramba dan Meorumba di Nusa Tenggara *(Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara SAMANTA)*

Bab 10 213
Boti & Bajo Bukti Keragaman dan Kesetaraan Budaya di Timur Indonesia *(Yayasan Tanpa Batas)*

Part 3
EPILOG 235
Pembelajaran & Potensi Keberlanjutan

MANTRA MASYARAKAT ADAT BUAT ORANG KOTA 248
Direktur Eksekutif KEMITRAAN

Daftar Pustaka Rujukan 252
Daftar Akronim & Istilah 254
Tentang Penulis & Kurator 258

CATATAN PENULIS

MENCATAT PERJALANAN SEBUAH program inklusi sosial ibarat mencatat ingatan para pelaku sejarah pengembangan program pemberdayaan masyarakat yang semula terpinggirkan menjadi berada di tengah lampu sorot. Buku ini hakikatnya adalah sebuah ruang refleksi bagi mereka yang pernah dan masih bekerja mengusung gagasan pemberdayaan dan menjaga keberlanjutannya supaya tak terhenti di tengah jalan, atau terkena kelembaman akibat merasa puas diri dengan capaian. Menelisik berbagai dinamika, mengurai beragam tantangan, dan menguak bermacam peluang dari agenda-agenda strategis inklusi sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama, buku ini sekaligus menjadi sebuah jendela terbuka bagi semua pihak untuk kembali mendiskusikan imaji, strategi dan aksi pemberdayaan masyarakat yang relevan dan aktual dengan konteks Indonesia di masa sekarang dan mendatang. Buku ini lahir sebagai ikhtiar menolak lupa, untuk memetik pembelajaran dan praktik terbaik yang terangkum dalam perjalanan Program Peduli selama periode akhir tahun 2014 hingga akhir 2020.

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Peduli terentang mulai dari persoalan pengelolaan program hingga operasionalisasi sebuah visi untuk mendorong terbangunnya kesetaraan sosial dan kultural, juga terwujudnya kesejahteran ekonomi dari jeratan kemiskinan struktural. Program Peduli didasarkan pada filosofi dan ideologi bahwa tidak ada satu kelompok masyarakat pun yang boleh dibiarkan miskin dan terpinggirkan hanya karena stigma sosial, keterbatasan akses terhadap sumber daya dan dana, lokasi geografis, orientasi seksual, diskriminasi jender, perbedaan warna kulit, suku, ras, maupun karena sistem kepercayaan yang liyan dari yang lain. Kelompok marjinal yang menjadi penerima manfaat Program Peduli adalah mereka yang terisolir baik karena berlokasi di pelosok negeri, maupun mereka yang tinggal di tengah kota namun tertutup aksesnya pada pemenuhan hak dasar sebagai warga negara. Buku ini menyajikan proses transformasi yang terjadi selama lima tahun lebih program berjalan, dengan harapan bahwa hal yang baik dapat dipertahankan dan ruang untuk peningkatan dapat diperhatikan dan dilanjutkan oleh para pemangku kepentingan kebijakan inklusi sosial terutama pemerintah daerah di area dampingan program.

Dalam proses mencatat dan mendokumentasikan Program Peduli, penulis berkesempatan untuk bertukar pikiran dengan para pelaku yang berkecimpung langsung dan tidak langsung di Program Peduli. Dari Manajer Pemberdayaan Masyarakat dan Staf Pendamping Masyarakat di CSO mitra, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, Kepala Desa/Lurah & Sekretaris Desa/ Kelurahan, Aparat Organisasi Pemerintah Daerah, Pengurus dan Anggota Koperasi, Tim Peduli di

KEMITRAAN, dan banyak informan lainnya. Mereka memilih tekun bergiat dengan perbaikan kinerja dan tata kelola. Dari sejak bernama PNPM Peduli, Program Peduli Pilar Masyarakat Adat mengalami transformasi penting dalam kinerja, paradigma, hingga problematika yang turut mempengaruhi dinamika dalam rangka mendorong terjadinya inklusi sosial di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Program ini pada awalnya berada di bawah koordinasi Kementeriaan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), yang juga diampu oleh kementerian teknisnya yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Desa PDTT). Program Peduli sendiri ditujukan bagi kaum marjinal yang selama ini sulit mengakses pelayanan dari pelaksanaan PNPM Mandiri. Partnership for Governance Reform, atau Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (disingkat "KEMITRAAN"), menjadi salah satu organisasi madani yang berperan sebagai pelaksana Program Peduli, mengkhususkan diri untuk bekerja pada pilar Masyarakat Adat yang Tergantung pada Sumber Daya Alam. Adapun bentuk inklusi sosial yang ingin didorong dalam Program Peduli adalah adanya pengakuan oleh negara atau pemerintah dan masyarakat, pemenuhan hak dasar masyarakat, dan terbukanya akses bagi kelompok marjinal terhadap pelayanan publik. Dengan kata lain, program inklusi sosial di sini bertujuan untuk mewujudkan rekognisi, interaksi dan partisipasi masyarakat marjinal dalam berbagai forum formal dan informal yang menentukan arah pembangunan, pendistribusian sumber daya, peningkatan layanan dasar dan bantuan sosial. Tujuan akhirnya adalah pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat sepenuhnya, baik oleh pemerintah maupun kelompok sosial lain.

Banyak tinjauan dan pembelajaran yang bisa kita simak dari beragam sudut pandang mereka yang terlibat dalam Program Peduli. Buku ini disusun guna menampung sebanyak mungkin perspektif itu, terutama perspektif masyarakat penerima manfaat program. Sebab, sebagai sebuah evaluasi dan pijakan, buku ini menandai undur dirinya lembaga penyandang dana dan lembaga swadaya masyarakat yang berperan sebagai *executing organization* supaya kerja pendampingan tetap berlanjut dan agenda pembaruan tetap terjaga. Harapannya, para agen pembaharu di tingkat tapak akan sepenuhnya memprakarsai, memiliki, dan memimpin agenda reformasi yang telah dicanangkan. Maka, meski menandai akhir perjalanan Program Peduli, buku ini bukan ucapan selamat tinggal. Justru buku ini semacam sambutan selamat datang kepada para pemangku kepentingan yang akan meneruskan praktik-praktik terbaik secara lebih luas.

Alhamdulillah, Puji Tuhan, akhirnya buku ini bisa terbit sesuai target. Meskipun dikerjakan dalam waktu singkat dengan tenggat yang ketat, buku ini semoga bisa membawa secercah cerah dan sejumput harapan bagi pembaca bahwa hal baik tetap terus diupayakan. Buku ini juga menjadi testamen tentang masih banyak pihak yang menyalakan

pelita, alih-alih hanya mengutuk gelap dan membelah cermin yang merefleksikan buruk rupa dan carut marut keadaan.

Penulis berterima kasih kepada bapak Laode Syarif, ibu Dewi Rizki, dan Tim Peduli (mas Yasir Sani, abah Efrizal Zein, mas Wahyu, mbak Ina, mbak Widya, mas Andhi, Sabrina, kang Odi, Tracy) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung di *injury time* dan menjadi bagian dari perjalanan panjang nan menantang untuk mendorong isu inklusi sosial supaya menjadi arus utama dalam aras kebijakan dan perilaku keseharian. Pengalaman singkat kunjungan ke lapangan, serial zoom meeting gladi presentasi dan penutupan program hibah, juga 'pengungsian' di akhir pekan yang seru, adalah proses *immersion* yang terasa seperti kelas akselerasi yang sangat bermanfaat untuk bisa masuk ke dalam isu ini secara cepat. Buku ini juga tak akan terwujud tanpa dukungan Tim Rene Book (mas Luqman, mbak Lisa, mbak Ratih) dan Tim Kurasi Foto (bang Oscar, mas Gun, Dedeo).

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca. Juga, menginspirasi para pegiat inklusi untuk terus menerus lakukan pembaruan tata pemerintahan dan tata kelola sumber daya alam secara lestari berkelanjutan, yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk masyarakat adat dan lokal terpencil. Selamat membaca!

Salam inklusi,

Elis Hart

SEKAPUR SIRIH

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

DALAM PIDATO PERTAMANYA sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada tanggal 14 Juli 2019, Ir. Joko Widodo menyebutkan lima tahapan besar yang akan dilakukannya bersama Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin dalam membangun Indonesia yang adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif dalam menghadapi perubahan di dunia. Beliau mengutarakan prioritas pemerintahannya lima tahun kedepan, diantaranya, meneruskan pembangunan infrastruktur, mengembangkan sumber daya manusia, membuka pintu investasi selebar–lebarnya, memajukan agenda reformasi birokrasi, dan mengatur penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Presiden juga berpesan secara eksplisit bahwa "tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak mau ber-Bhineka Tunggal Ika! Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak toleran terhadap perbedaan! Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak menghargai penganut agama lain, warga suku lain, dan etnis lain."

Esensi Pidato Visi Indonesia 2019-2024 ini sejalan dengan konsep inklusi sosial dalam program peduli dimana Kemenko PMK (pada saat itu Kemenko Kesra) turut membidani kelahirannya. Inklusi sosial selama ini dimaknai sebagai proses membangun hubungan sosial dan menghormati individu dan komunitas, sehingga mereka yang terpinggirkan dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan, kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan memiliki akses dan kendali yang sama atas sumber daya supaya dapat menikmati standar kesejahteraan yang dipersepsikan layak dalam suatu kelompok masyarakat tertentu.

Saya pribadi percaya bahwa manusia terlahir sama, apapun suku, agama ataupun rasnya. Tak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Perjuangan untuk mendapat pengakuan yang setara dan bermartabat bisa dimulai dari level mana saja, pusat atau daerah, sama saja.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan di Indonesia memang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terlebih lagi negeri ini terdiri dari 17.000 pulau lebih dengan hanya 30% - 35% pulau yang berpenghuni, sehingga ketimpangan dalam pembangunan masih sering dijumpai, terutama di area yang dikategorikan Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) yang lahir setelah berakhirnya periode program Tujuan Pembangunan Millenium (*Millennium Development Goals*/MDGs) di akhir tahun 2015 diharapkan untuk lebih menjangkau kepada kelompok yang rentan dan tertinggal dalam pembangunan, baik dari proses perencanaan

maupun pelaksanaannya. Dalam laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2016 oleh Perserikatan Bangsa–Bangsa dijelaskan bahwa untuk merealisasikan agenda SDGs yang akan berakhir pada tahun 2030, PBB menghimbau agar negara–negara anggota memenuhi hak seluruh masyarakat terutama mereka yang paling rentan dan tertinggal terlebih dahulu. Di dalam laporan itu, PBB juga menjelaskan tentang siapa saja yang termasuk dalam kelompok rentan tersebut, yaitu anak kecil, anak muda, orang dengan difabilitas, orang dengan HIV/AIDS, orang lanjut usia, masyarakat adat, serta pengungsi dan migran. Jan Eliasson, Wakil Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan bahwa inklusivitas universal dari agenda 2030 untuk SDGs adalah sebuah keharusan etis sehingga muncul slogan *'No One Left Behind'*, tak ada seorang anggota masyarakat pun yang tertinggal. Slogan ini selayaknya harus dijadikan acuan dalam setiap perencanaan pembangunan.

Saya menyambut hangat buku yang diterbitkan oleh KEMITRAAN yang pada tahap implementasinya dilaksanakan bersama dengan 10 mitra organisasi lokal se-Indonesia.

Saya ingin menutup kata pengantar ini dengan kembali mengutip Visi Indonesia yang ditegaskan oleh Pak Jokowi. Indonesia Maju adalah Indonesia yang tidak ada satu pun rakyatnya tertinggal untuk meraih cita–citanya. Indonesia yang demokratis, yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Indonesia yang setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di depan hukum.

Salam inklusi,

Muhadjir Effendy

KATA PENGANTAR

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

DESA MERUPAKAN RUANG teritori terkecil di Indonesia yang punya kompleksitas persoalan sosial-ekonomi, desa adalah basis *evidential* untuk mengidentifikasi berbagai problematika pembangunan. Apabila segenap permasalahan sosial-ekonomi di perdesaan teratasi, niscaya sebagian besar tantangan pembangunan di negeri ini dapat kita lewati. Karena itulah, pembangunan harus dimulai dari desa, desa harus menjadi beranda depan pembangunan Indonesia.[1]

Undang-Undang 6/2014 Tentang Desa menjadi titik mula pengembangan paradigma pembangunan dari desa. Pembangunan yang menjadikan warga desa sebagai subjek, bukan sekedar objek pembangunan. Pembangunan yang menitikberatkan pada upaya perwujudan kesejahteraan, kecukupan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, serta perlindungan dan pemenuhan hak bagi semua warga desa. Karenanya, dalam pembangunan desa diamanatkan juga penerapan nilai-nilai inklusi sosial.

Pembangunan dan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat desa harus memastikan keterlibatan penuh, serta distribusi hasil pembangunan secara adil, bagi seluruh warga desa, terutama bagi masyarakat miskin, rentan, perempuan, pemuda, difabel, serta kelompok terpinggirkan.

Pada Maret 2020, penduduk miskin Indonesia sebesar 26,42 juta orang, naik 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan naik 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, naik 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan naik 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Persentase kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari kemiskinan di perkotaan. Kemiskinan di perdesaan mencapai 12,82 persen, sedangkan kemiskinan di perkotaan sebesar 7,38 persen.[2]

Selain itu, saat ini data menunjukkan masih adanya kondisi memprihatinkan di dunia anak dan perempuan terutama di desa. Terlebih lagi, anak-anak keluarga golongan terbawah yang menjalani

1 A Halim Iskandar. 2020. Desa Beranda Depan Pembangunan. Jawa Pos. 11/07/2020

2 BPS. 2020. Berita Resmi Statistik. 15 Juli 2020. Badan Pusat Statistik

hidup lebih sengsara. Pada 2019, hanya 51,81 persen anak-anak desa golongan terbawah yang mendapatkan imunisasi lengkap pada umur 1-2 tahun. Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar di desa 97 persen sedang di kota 98,18 persen. APM sekolah menengah pertama di desa 74,98 persen, sementara di kota 81,89 persen. APM sekolah menengah atas di desa 49,6 persen, padahal di kota 59,3 persen.[3] Pun begitu dengan perempuan di desa yang mengalami kesulitan struktural dalam pekerjaan dan politik, bahkan ditimpali kasus-kasus kekerasan. Pada 2018 sebanyak 10,7 persen perempuan muda berumur 18-24 tahun di perdesaan mengalami pemerkosaan. Di kota proporsinya hanya berbeda sedikit, yaitu 9,8 persen. Namun, pelecehan seksual tanpa kontak yang dialami perempuan perkotaan mencapai 6,8 persen, sedangkan di desa 3,7 persen.[4]

SDGs Desa

Secara regulatif, Desa Inklusif merupakan mandate UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan pentingnya perlindungan kelompok rentan dan terpinggirkan

3 A. Halim Iskandar. 2020. Desa Peduli Anak. Media Indonesia. 11/11/2020

4 A. Halim Iskandar. 2020. Desa Ramah Perempuan. Republika. 30/10/2020

seperti perempuan, lansia, anak, masyarakat adat, penghayat, difabel dan lain-lain.

Pelaksanaan Desa Inklusif bisa ditempuh melalui tiga jalan yaitu jalan kebudayaan, jalan demokrasi, dan jalan pembangunan partisipatif; Jalan kebudayaan memastikan nilai-nilai inklusi sosial menjadi perspektif dan perilaku kolektif warga; Jalan demokrasi memastikan perluasan partisipasi kelompok rentan dan marjinal; dan Jalan pembangunan partisipatif memastikan keterlibatan kelompok tersebut dalam semua tahapan pembangunan dari perencanaan hingga evaluasi. Dalam konteks ini, penggalian nilai-nilai tradisi menjadi penting guna mengembalikan semangat bela rasa sosial. Siasat bela rasa ini diadopsi dari Program Peduli yang telah berhasil memfasilitasi lahirnya desa-desa inklusif.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi telah menyusun kebijakan untuk membangun 74.953 desa secara struktural, total, dan berkelanjutan, menjangkau seluruh warga (*no one left behind*), segenap lingkungan desa, serta wajib mempertahankan ragam kearifan setempat, yang terbungkus dalam SDGs Desa.

SDGs Desa merupakan upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 sebagai tindak lanjut dari tujuan pembangunan global yang disepakati 193 negara anggota PBB pada tahun 2015.[5]

SDGs Desa berturut-turut mencakup tujuan Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi. Tujuan berikutnya ialah Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan. Berikutnya tujuan Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat. Lalu tujuan Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. [6]

Desa inklusif yang merupakan gambaran dari kondisi kehidupan di desa yang setiap warganya bersedia secara sukarela membuka ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga desa yang diatur dan diurus secara terbuka, ramah dan meniadakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secara setara,

5 A. Halim Iskandar. 2020. SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Yayasan Obor Indonesia

6 A. Halim Iskandar. 2020. SDGs Desa. Kompas. 24/11/2020

saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan dalam pembangunan desa, akan dicapai dalam tujuan SDGs Desa nomor 1 (satu) sampai 5 (lima), serta tujuan nomor 16 (enam belas) dan 18 (delapan belas).

Tujaun akhir SDGs Desa adalah menghapuskan kemiskinan dan kelaparan bagi semua warga desa, menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang mampu mencakupi seluruh warga desa, memberikan ruang keadilan bagi keterlibatan perempuan dalam ruang publik, meciptakan inklusifitas dalam pembangunan desa, serta melestarikan budaya dan kearifan lokal desa.

Dengan mencapai tujuan SDGs Desa, maka Desa Inklusif akan terwujud. Namun, mencapai 18 tujuan SDGs Desa bukanlah hal mudah meski tidak mustahil untuk dicapai. Diperlukan kolaborasi banyak pihak dalam rangka pencapaian SDGs Desa hingga tahun 2030.

Karena itu, dengan senang hati saya menyambut dan meneruskan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk KEMITRAAN, demi mewujudkan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat yang tergantung pada sumber daya alam. Buku Perjalanan Program Peduli 2015-2020 ini hadir untuk kita yang memuliakan dan memberdayakan desa.

Salam inklusi,

Abdul Halim Iskandar

1

PROLOG

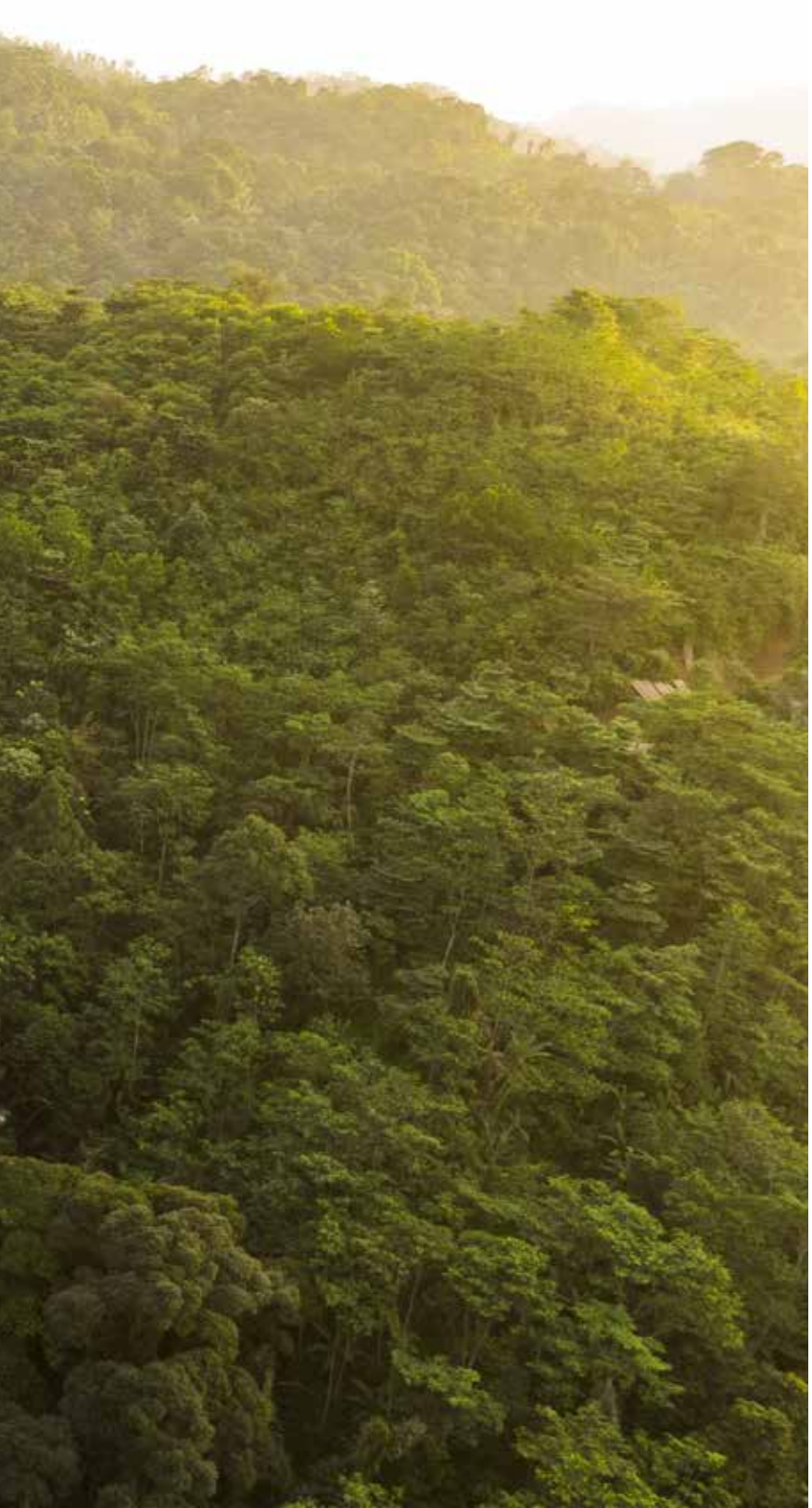

SELAYANG PANDANG PROGRAM PEDULI

Masyarakat Adat dan Lokal Terpencil yang Tergantung pada Sumber Daya Alam

TAK KENAL MAKA tak sayang. Peribahasa ini sangat tepat menggambarkan masyarakat adat di Indonesia. Sering disebut dalam obrolan, ditulis dalam laporan, dan dipidatokan oleh pejabat dan politisi, juga diadvokasi oleh para aktivis. Namun sekalipun begitu, masih banyak mitos, stigma dan prasangka yang melingkupi masyarakat adat.

Sekian lama terjadi upaya menyangkal kemajemukan Indonesia. Jika kita jujur pada diri sendiri dan peduli, sebenarnya masih banyak kelompok masyarakat adat yang mengalami diskriminasi dan menerima stigma negatif. Stigma yang identik dengan masyarakat adat tersebut adalah orang gunung, orang laut, orang hutan, atau orang dusun — yang semuanya berkonotasi merendahkan. Juga dianggap kotor, kumal, kucel, malas, bodoh, lugu, bau, bawa penyakit, sampah masyarakat, tak terpelajar, terbelakang, kampungan, kasar, primitif, penganut ilmu hitam, percaya klenik, dan semacamnya yang menyebabkan mereka tidak diterima secara wajar dalam pergaulan sosial. Mereka hidup mengelompok, tersekat oleh batas geografis

yang mengisolasi mereka, maupun terhalang garis imajiner akibat sekat-sekat sosial yang membuat mereka berbeda dengan kelompok lainnya.

Koalisi masyarakat madani, yang telah sepuluh tahun ini mendorong Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, menengarai setidaknya ada enam hak masyarakat adat yang terus-menerus dilanggar. Hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan dan melekat satu sama lain, serta harus diakui untuk pencapaian kemanusiaan hakiki bagi masyarakat adat. Hak-hak itu termasuk, namun tak terbatas pada: Hak atas Budaya Spiritual; Hak Perempuan Adat; Hak Anak dan Pemuda Adat; Hak atas Lingkungan Hidup; Hak atas Persetujuan Bebas Tanpa Paksaan, Didahulukan dan Diinformasikan (*Free, Prior, and Informed Consent*, disingkat FPIC), dan Hak atas Ulayat Adat.

Khusus terkait hak atas wilayah adat, hak ini merupakan ruang kehidupan yang menjadi tempat keberadaan entitas masyarakat adat, yang penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya diatur menurut hukum adat. Badan Registrasi Wilayah Adat sejauh ini telah mengidentifikasi luasan wilayah adat di Indonesia seluas 9,3 juta hektar. Salah satu basis legal formalnya adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa "*Identitas masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.*"

Deliniasi geografis terlihat secara kasat mata di peta, menyekat dan mengisolasi masyarakat adat yang banyak tersebar di lokasi terpencil. Dalam kondisi ekstrim, batas ini menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dan terabaikan hak-haknya sebagai warga negara. Di sisi lain, batas imajiner bersifat tersirat, tapi bisa lebih menindas. Ia bisa berupa penolakan yang brutal, ancaman, pengusiran, pengucilan, atau pun label negatif yang disematkan pada mereka.

Sekalipun hak-hak masyarakat adat telah nyata diakui dalam peraturan-perundangan, permasalahan masih kerap muncul terutama konflik terkait wilayah adat. Muhammad Arman, dalam bukunya *Negara: Sebuah Masalah Masyarakat Adat,* mengatakan bahwa situasi masyarakat adat dewasa ini tidak jauh lebih baik. Kecenderungan politik hukum peraturan-perundangan yang mengatur keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya telah menyimpang jauh dari semangat pembentukan NKRI, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Ahli hukum Satjipto Rahardjo menyebutkan sejumlah persyaratan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai bentuk kekuasaan negara yang hegemonial yang menentukan ada atau tidaknya masyarakat adat. Negara ingin mencampuri, mengatur semuanya, mendefinisikan, membagi, melakukan pengkotakan, yang semuanya dilakukan oleh dan menurut persepsi pemegang kekuasaan. Senada dengan itu, ahli hukum lainnya, Soetandyo Wignyosoebroto, persyaratan penentuan masyarakat adat secara *ipso facto* maupun *ipso jure* akan mudah ditafsirkan sebagai "pengakuan yang dimohonkan, dengan beban pembuktian akan masih eksisnya masyarakat adat itu oleh masyarakat adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui atau tidak mengakui secara sepihak berada di tangan kekuasaan pemerintah pusat". Padahal, menurut pandangan Guru Besar Hukum Agraria Prof Maria Sumardjono, makna "pengakuan" oleh negara adalah dalam arti "*declaratoir*" (menyatakan sesuatu yang sudah ada), tidak bermakna "*konstitutip*" atau pemberian hak baru. Untuk menghormati hak yang sudah ada, maka pendaftaran hak tersebut melalui penegasan atau pengakuan, yang berfungsi untuk menuntaskan proses adminsitrasi saja. Belum/tidak didaftartarkannya hak atas tanah itu tidak menafikan haknya. Bahkan dalam perkembangannya, melalui pendaftaran tanah sistematis pemerintah dapat mengambil inisiatif pendaftaran tanah hak masyarakat adat.

Kondisi carut marut ini tidak terlepas dari sejarah masyarakat adat dan lokal terpencil yang mengalami isolasi dan diskriminasi secara berlapis. *Lapisan pertama* adalah dikucilkan oleh kebijakan negara yang selama ini mengabaikan keberadaan masyarakat adat. *Lapisan kedua* adalah belum adanya penerimaan sosial dari komunitas lain yang secara pengetahuan

dianggap lebih modern. Dan *lapisan ketiga* adalah perempuan dan anak yang ada di masyarakat adat dan lokal terpencil yang selama ini terabaikan baik di dalam internal komunitas maupun dengan eksternal komunitasnya. Pada lapisan ketiga ini, kondisi terjadi karena pengetahuan masyarakat adat dan lokal terpencil sering kali menempatkan perempuan hanya sebatas pengelola sumber daya alam, yang tidak memiliki kewenangan dan dianggap tidak mampu membuat keputusan mengenai sumber daya alam di sekitarnya.

Jika dilihat dari sejarah masyarakat adat dan lokal, maka terdapat dua kencenderungan masyarakat adat dan lokal terpencil yang mengemuka, yaitu: komunitas adat dan lokal terpencil yang mengeksklusi komunitasnya terhadap perubahan dari luar (sebagaimana digambarkan oleh Suku Adat Baduy di Lebak, Banten), dan komunitas

lokal terpencil/terkucil yang berupaya untuk mengasimiliasi diri dengan komunitas di luar mereka (direpresentasikan oleh komunitas Cina Benteng, juga berlokasi di Banten). Keduanya mengalami kondisi yang hampir sama yaitu eksklusi sosial, terjadi ketidak-terimaan komunitas lain yang lebih dominan untuk mengakui keberadaaan dan hak-hak masyarakat adat dan lokal terpencil secara penuh.

Komunitas yang mengekslusi dirinya, mengalami kondisi semakin terjepit dengan gencarnya gempuran budaya tanding dari luar, derasnya arus informasi yang masuk, cepatnya perubahan teknologi yang terjadi, dan pesatnya perkembangan dunia pada umumnya. Sementara masyarakat adat dan lokal terpencil ketika berproses untuk berasimiliasi dengan dunia luar juga mengalami gagap dan gegar budaya serta krisis kepercayaan diri karena mereka dianggap berbeda. Perbedaan itu kadang terlihat eksplisit dan kontras, terlebih ketika identitas fisik dan bahasa/dialek yang digunakan oleh masyarakat adat dan lokal terpencil memang berbeda dari komunitas luar. Namun tidak jarang perbedaan itu samar dan tersirat, karena cara pikir, cara hidup, norma budaya, adat istiadat, dan sistem kepercayaan yang dianut tidak sepenuhnya kasat mata.

Padahal, Tidak Meninggalkan Satu Orangpun (*Leave No One Behind*) merupakan prinsip utama Tujuan Pembangunan Milenium (Sustainable Development Goals/SDGs). Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu, *Keadilan Prosedural* yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan *Keadilan Subtansial* yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Ciri-ciri tersebut dapat dilihat pada beberapa kelompok dampingan Program Peduli Pilar Masyarakat Adat dan Lokal Terpencil yang Tergantung pada Sumber Daya Alam.

Batas geografis menciptakan isolasi fisik, sedangkan batas imajiner menciptakan isolasi sosial. Keduanya menyuburkan kesenjangan dan kedzaliman. Untuk melintas batas dan menempuh jarak yang jauh ini butuh nyali dan stamina yang kuat, secara fisik dan psikis. Juga butuh waktu tempuh, kesabaran ekstra, tenaga dan dana yang tidak sedikit. Bersama-sama dengan 10 mitra CSO di daerah, Program Peduli berupaya mendekatkan jarak, meleburkan batas, meruntuhkan sekat, serta mengembangkan sikap saling menghargai dan memanusiakan manusia. Itulah yang dimaknai sebagai inti dari konsep inklusi sosial di Program Peduli.

Inklusi sosial adalah upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu/kelompok sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Inkusi sosial mencakup proses membangun hubungan sosial dan menghormati individu dan komunitas, sehingga mereka yang terpinggirkan dan mengalami prasangka dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan, kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, serta memiliki akses dan kontrol yang sama atas sumber daya demi memenuhi kebutuhan dasarnya, menurut standar kesejahteraan yang dianggap layak di dalam kelompok masyarakat yang bersangkutan. Melalui inklusi sosial, Program Peduli mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan

yang setara dan bermartabat, serta memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan apapun, tanpa kecuali.

Semula ada 14 mitra CSO lokal di 13 Provinsi dan 22 kabupaten/kota di Indonesia yang berkolaborasi dengan KEMITRAAN sebagai organisasi payung Program Peduli pada fase yang dimulai akhir tahun 2014 silam. Namun layaknya seleksi alam, empat lembaga (yang karena berbagai alasan dan atas kesepakatan bersama) kemudian berpisah jalan untuk menempuh rute dan tujuan lain. Mereka tetap menjadi bagian dari sejarah perjalanan Program Peduli dan berhasil menorehkan catatan unik masing-masing.

MPM Muhammadiyah berhasil mencapai tujuan program dalam hal pengakuan desa yang dihuni oleh Suku Kokoda di Sorong, Papua Barat secara definitif, yang dengannya akses terhadap kebijakan pemerintah dan layanan dasar terpenuhi.

Lalu, AMAN Maluku mengalami perubahan manajemen menyusul sebuah kejadian tragis yang diduga terkait dengan kegiatan advokasi di Maluku, namun ujung pangkal kasus ini tak pernah diketahui pasti sehingga tidak ada kesimpulan yang konklusif. Pergantian kepemimpinan AMAN Maluku ini mempengaruhi kinerja organisasi dalam mendampingi Suku Nuaulu di Maluku Tengah untuk sementara waktu.

Adapun AMAN Riau pada fase itu mengalami tantangan internal, selain ada faktor eksternal berupa peta politik di pemerintah daerah, yang berpengaruh terhadap program dampingan Suku Talang Mamak di Indragiri Hulu. Capaian program secara umum cukup baik namun diputuskan secara konsensus, dengan sedikit lelucon tentang penyelesaian secara adat, bahwa kolaborasi Program Peduli di Riau tidak berlanjut.

Terakhir, Kawal Borneo Community Foundation (KBCF) yang sedianya melakukan pendampingan Suku Dayak Ohokng di Desa Muara Tae, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Namun sayangnya, KBCF telat mengirimkan proposal. KBCF pun secara resmi tidak bergabung lagi dengan Program Peduli.

Dari awalnya 14, kisah perubahan dalam buku ini difokuskan pada jejak langkah sepuluh organisasi yang berjibaku melakukan transformasi di area dampingan mereka. Penulis menggali dan mengulik kembali nilai-nilai tradisional yang menjadi sumber pengetahuan otentik, kekayaan intelektual, dan kearifan lokal yang juga menjadi ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Penelusuran dilakukan melalui para informan, membaca laporan, riset dalam jaringan, selain turun ke lapangan (karena pandemi, hanya area yang berada di dekat Jakarta). Buku ini adalah upaya merekam lika liku perjuangan masyarakat adat untuk mencapai keadaan setara bermartabat dalam bingkai kebhinekaan.

Buku ini mengajak pembaca berkelana, mulai dari pedalaman Mentawai, Sumatera Barat hingga ketinggian negeri di balik awan Pipikoro, Sulawesi Tengah. Dari perkampungan kecil rombong Suku Anak Dalam di hutan yang tersisa akibat terkepung perkebunan sawit di Jambi, hingga kemeriahan lampu lampion dan tembang dayung sampan diiringi tehyan di perkampungan Cina Benteng, Tangerang. Sistematika penulisannya berdasarkan letak geografi area kerja Program Peduli, dimulai dari barat ke timur.

Di **Bab 1,** kita akan berkenalan dengan Masyarakat Adat Mentawai. Isolasi karena letak geografis yang dialami oleh masyarakat di Dusun Bekkeiluk, Salappa', dan Magosi di Kecamatan Siberut Selatan; Dusun Tinambu di Kecamatan Siberut Tengah; dan Kampung Gorottai di Kecamatan Siberut Utara telah menghalangi proses interaksi dan relasi yang baik dengan kelompok sosial lain dan pemerintah. Interaksi yang berlangsung sesaat, terkait dengan kepentingan yang bersifat sesaat, hanya akan membuahkan pola relasi yang transaksional dan superfisial. Interaksi dan relasi ini berdampak pada minimnya pemenuhan layanan dasar dan pembangunan di pedalaman kepulauan Mentawai. Kondisi keterbelakangan kemudian memunculkan stigma dan eksklusi dari kelompok sosial lain yang menggerus kepercayaan diri masayarakat adat untuk berdiri setara dan bermartabat dengan berbagai pihak. YCMM membantu kelompok marjinal ini untuk keluar dari persoalan-persoalan pengucilan yang mereka hadapi. Intervensi positif melalui program-program pemberdayaan dan pertautan dengan kelompok sosial lain termasuk pemerintah gencar dilakukan untuk memutus rantai eksklusi tersebut. Masyarakat adat di Bekkeiluk, Salappa', Magosi dan Gorottai kini tak asing dengan proses-proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, baik di tingkat dusun, desa, kecamatan, hingga kabupaten. Mereka berdaya mengelola sumber dayanya sendiri.

Lalu di **Bab 2**, kita akan berjumpa dengan para penjaga rimba yang terasing, yaitu warga Suku Anak Dalam (SAD) yang diyakini sebagai suku asli Melayu Jambi. Warga suku ini semula hidup dalam kelompok-kelompok kecil (rombong) secara nomaden, mengandalkan hidup dari hasil berburu dan meramu obat. Sebagian besar rombong SAD masih hidup berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain di sepanjang lintas tengah Sumatera, yang menyulitkan mereka untuk didata dan mendapat pengakuan legal sebagai warga negara. Seiring jumlah tutupan hutan yang jauh menyusut, berbagai rombong SAD ini terlempar ke pinggir dan hanya bisa menyaksikan gerak maju proses pembangunan. Mereka hidup tanpa kepastian tanah tempat tinggal sehingga terpaksa hidup menumpang di dalam kebun sawit milik perusahaan atau milik penduduk desa nyaris tanpa sumber mata pencaharian. Bersama dengan Pundi Sumatera, Masyarakat Adat Suku Anak Dalam di Sumatera Barat dan Jambi berjuang mengikis stigma dan mendapat rekognisi sebagai masyarakat minoritas yang perlu perlindungan dan pemberdayaan. Perlahan mereka menetap, berinteraksi dan berpartisipasi dengan komunitas lain, juga mendapat layanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan.

Beralih ke **Bab 3**, kita akan bersua dengan Masyarakat Adat Suku Sawang Gantong di Bangka Belitung. Ritual adat berkah di darat, selamat di laut, dilakukan untuk merawat eksistensi dan mengangkat taraf kehidupan masyarakat adat yang nyaris punah. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Penelitian Air Mata Air (LPMP Amair) bergiat mendorong inklusi sosial menuju peningkatan akses layanan dasar, penerimaan sosial dan kebijakan yang berpihak pada suku minoritas. Pendekatan pendidikan, seni budaya dan olah raga dipilih untuk menjangkau warga, termasuk pendekatan sinergi bersama dengan Pemerintah Desa Selinsing. Dalam satu tahun terakhir, tokoh masyarakat Suku Sawang Gantong kerap diundang dalam forum rapat dan pengurus Sanggar Seni Ketimang Burong sering dilibatkan pada acara seremonial di tingkat kecamatan dan kabupaten. Intensitas interaksi masyarakat sekitar dengan Suku Sawang juga meningkat, baik dalam

pergaulan sehari-hari maupun yang terkait hubungan jual beli hasil kerajinan, pengolahan makanan, dan kegiatan olah raga. Klub sepak bola Suku Sawang Gantong kini biasa tanding tandang atau kandang di berbagai ajang pertandingan persahabatan.

Bergeser ke pulau Jawa. Di **Bab 4**, kita akan bertemu Masyarakat Adat Baduy dan Kasepuhan di Kabupaten Lebak-Banten yang terus bergumul dalam dinamika sosial untuk mencapai kondisi berdaulat dan bermartabat. Mereka memiliki aspirasi untuk bebas mewujudkan eksistensi dan mengekspresikan diri dengan segala perbedaan dan keunikan mereka. Sumber penghidupan masyarakat adat Kasepuhan dan Baduy sangat bergantung pada pengelolaan Sumber Daya Alam khususnya hutan. Mereka sangat memegang teguh keyakinan dan menaati aturan yang telah diwariskan oleh *karuhun* (para leluhur/nenek moyang). Persoalan yang dihadapi masyarakat adat Kasepuhan antara lain konflik tenurial, adanya stigma negatif dari kelompok tertentu yang menganggap ritual Kasepuhan sebagai ajaran sesat, dan keterbatasan dalam akses kesehatan juga peningkatan ekonomi. Sedangkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Baduy yakni belum adanya pengakuan negara atas kepercayaan Sunda Wiwitan, terbatasnya lahan ladang pertanian bagi Baduy Dalam, dan minimnya pemasaran produk masyarakat Baduy. Masyarakat adat lalu berhimpun dalam SABAKI (Satuan Masyarakat Adat Banten Kidul) bersama dengan Rimbawan Muda Indonesia dan jaringan masyarakat sipil lainnya mendorong Pemkab Lebak untuk mengeluarkan Perda Masyarakat Adat. Hal ini dianggap krusial karena adanya pengakuan masyarakat adat melalui Perda diperlukan untuk

meningkatkan posisi tawar masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lahan dan sumber daya alam. Lahirnya putusan MK No. 35 tahun 2012 merupakan dasar untuk pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan atas kedaulatan masyarakat adat dalam mengelola hutannya yang secara tegas memandatkan pengelolaan hutan adat dapat dilakukan oleh masyarakat adat serta keberadaannya tidak lagi dalam kawasan hutan negara.

Masih di pulau Jawa. Masuk **Bab 5**, kita akan menyapa para perempuan hebat "Nu Lingxiu", sang Agen Perubahan Inklusi Sosial Cina Benteng dari Sungai Cisadane di Kota Tangerang, Banten. Cina Benteng ini merupakan satu-satunya masyarakat adat dampingan Program Peduli, bersama PPSW, yang berlatar perkotaan. Keadaan komunitas Cina Benteng ini sesuai dengan definisi Masyarakat Adat Indonesia menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Mereka adalah komunitas yang memiliki asal-usul leluhur dan menetap secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas, serta masih memegang nilai-nilai tradisi dalam sistem kehidupannya. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang RT RW Kota Tangerang, menyebabkan adanya konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan perumahan. Hal itu berakibat pada perubahan mata pencaharian komunitas Cina Benteng. Lahan sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk bercocok tanam. Namun, mereka tetap menjadikan Sungai Cisadane sebagai sumber utama mata pencaharian, bahkan sebagian warga yang tingkat ekonomi dan pengetahuan sanitasi relatif rendah hingga kini masih memanfaatkan sungai untuk mandi, cuci dan kakus.

Pada saat musim kemarau, masyarakat tergantung sepenuhnya pada air sungai untuk pemenuhan seluruh kebutuhan rumah tangga karena sumur atau pompa air mengering. Kemiskinan dan anggapan bahwa warga Cina Benteng kurang terdidik membuat mereka rentan terhadap praktik-praktik diskriminasi dan eksklusi. Di lain pihak, kelompok perempuan, menjadi bagian penting dari warga komunitas Cina Benteng yang mendorong terjadinya penerimaan sosial baik melalui pergaulannya dengan warga kebanyakan, sebagai buruh rumah tangga atau melalui kegiatan sosial dan perkawinan silang. Namun budaya asli Cina yang menempatkan perempuan sangat rendah menyulitkan bagi perempuan untuk mengambil peran sebagai aktor perubahan yang dapat mendorong terjadinya penerimaan sosial yang dapat melindungi warga Cina Benteng dari perlakuan diskriminatif dan eksklusi sosial. Lain dulu lain sekarang. Perjuangan PPSW mencetak dan mendampingi kader-kader perempuan Cina Benteng berbuah manis. Berkat ibu-ibu yang percaya diri dan luwes dalam berinteraksi dan berpartisipasi di berbagai forum formal dan informal, kini warga dapat mengakses berbagai layanan kesehatan dan pendidikan, dapat mencatatkan pernihakan mereka, dan di masa pandemi Covid-19 mereka dapat dengan mudah mengakses berbagai bantuan sosial, yang sebelumnya sulit diakses karena tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil seperti KTP, KK dan lainnya.

Bergerak ke Kalimantan. Di **Bab 6** kita akan menyaksikan Masyarakat Adat Dayak berusaha untuk terus berdaya di hulu dengan tetap dalam bingkai inklusi. Didampingi oleh Yayasan Desantara, Program Peduli difokuskan untuk menjamin kepastian ruang

hidup dan penghidupan Komunitas Dayak Kenyah Lepoq Jalan di Desa Lung Anai melalui tata kelola pemerintahan desa yang inklusif. Eksklusi sosial yang dirasakan oleh masyarakat Suku Dayak ini terkait erat dengan pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan usaha. Sebagian anak-anak usia sekolah tidak bisa bersekolah karena harus mengikuti orang tua bekerja di ladang/kebun. Tidak ada kepastian sumber penghidupan karena tidak ada jaminan kepastian lahan. Minim penerimaan sosial. Dianggap sebagai pendatang oleh masyarakat desa sekitar. Terjadi konflik lahan antardesa akibat masuknya perusahaan-perusahaan besar. Melalui dinamika yang tak mudah, semua tantangan ini perlahan dapat diatasi dan inklusi sosial kini menjadi norma yang berlaku di sana. Selain itu, Yayasan Desantara, didukung oleh Yayasan Naladwipa, berkolaborasi dengan Program Peduli bersama Pemerintah Desa Pajanangger, membangun basis data yang kuat dalam perencanaan pembangunan pada tingkat desa. Akhir bab ini mengetengahkan cerita perubahan di Kangean, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.

Berikutnya, kita menuju Sulawesi. Di **Bab 7** kita akan menikmati syair kekeluargaan pengusir keterasingan Masyarakat Adat Topo Uma di Pipikoro**,** Sigi. Dalam relasi dengan kekuasaan, keterbatasan isolasi fisik Topo Uma membuat mereka diremehkan dan terpinggir dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terlihat dari alokasi penganggaran pembangunan yang lebih kecil dibandingan dengan wilayah lain yang justru sudah lebih maju dan tak terlalu perlu dibantu. Hal ini juga dapat dilihat dari hampir tidak adanya program pemerintah baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, serta UMKM yang dilaksanakan di Pipikoro. Bersama Karsa, Topo Uma melawan stigma, diskriminasi dan eksklusi. Kini, hampir seluruh masyarakat Topo Uma telah memiliki KTP dan dokumen kependudukan sipil lainnya. Layanan kesehatan meningkat -- penempatan bidan per desa yang turut mengurangi angka kematian ibu melahirkan. Kesempatan pendidikan dan jumlah anak bersekolah meningkat. Pelatihan melalui sekolah lapang untuk petani kakao membuat kemampuan pertanian menjadi lebih canggih, termasuk kesempatan berusaha dengan keterampilan UMKM berikut pemasarannya. Jaringan komunikasi telah menjangkau wilayah pelosok, membawa kemajuan untuk masyarakat.

Selanjutnya, di **Bab 8** kita akan meresapi perjuangan merebut kemerdekaan dari belenggu isolasi ala Masyarakat Adat To Balo, To Garibo, To Bentong di Desa Bulo-Bulo Kabupaten Barru dan Desa Kahayya Kabupaten Bulukumba. Di dua lokasi ini, Sulawesi Community Foundation mendorong program "Sipakatau- Sipakalebbi" yang dalam bahasa Bugis memiliki makna filosofis yang sangat dalam. Sipakatuo-Sipakalebbi diindentikan dengan sifat yang tidak saling membeda-bedakan dan memandang manusia sebagai manusia. Hal ini sejalan dengan tujuan Program Peduli yaitu mewujudkan Desa Inklusi Sosial bagi masyarakat adat dan masyarakat terisolir demi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara partisipatif; peningkatan kualitas bantuan sosial dan layanan publik untuk masyarakat sekitar hutan; pengarusutamaan kebijakan inklusi dalam kegiatan ekonomi melalui ekowisata; juga implementasi pengurustamaan jender dan perlindungan anak dalam perencanaan pengelolaan desa.

Dari Sulawesi kita berangkat ke Nusa Tenggara. Bab 9 diisi cerita perubahan yang dialami oleh kelompok perempuan strata ekonomi dan kasta sosial

bawah di Desa Mauramba & Meorumba di Sumba Timur, juga masyarakat adat Gumantar di Lombok Utara. Program Peduli di NTB dan NTT, dengan pendampingan oleh Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara/Samanta, diarahkan untuk meningkatkan perbaikan kebijakan lokal yang mendukung hak akses layanan dasar dan bantuan serta jaminan sosial bagi kelompok tereksklusi, termasuk kelompok perempuan yang posisinya rentan dalam masyarakat adat yang masih ketat menerapkan tradisi dalam interaksi keseharian mereka.

Terakhir tapi bukan tujuan perjalanan paling akhir, di **Bab 10** kita akan mengenal lebih dekat Suku Boti & Suku Bajo yang menjadi bukti keanekaragaman dan kesetaraan budaya di timur Indonesia. Bersama Yayasan Tanpa Batas, gagasan mengenai rekognisi, interaksi dan partisipasi masyarakat adat secara penuh ingin direalisasikan. Masyarakat Boti dan Bajo ingin diakui sebagai bagian sah dari Indonesia dan mendapatkan hak yang sama dengan warga negara lainnya di luar sana.

Mengakui perbedaan seyogyanya bukan untuk mendiskriminasi dan mendiskreditkan, melainkan untuk mengapresiasi bahwa berbeda adalah sebuah berkah yang membuat hidup kita lebih kaya dan lebih berwarna. Membuat hidup lebih hidup. Dan sekalipun berbeda-beda, kita tetap satu, padu, setara, egaliter, semartabat. Sebagaimana semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara kita, Garuda Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.

Mari kita mulai lembar baru inklusi sosial masyarakat adat dan lokal terpencil dengan penghargaan kepada semua pihak yang mencintai, merawat dan membela negeri ini dengan caranya masing-masing.

Semoga sepuluh kisah jejak perubahan ini tidak hanya menginspirasi saya, tapi juga membuka cakrawala pikir kita untuk hidup setara dan bermartabat dalam sebuah negara.

TONG MA
CUP
2.0L

2

CERITA PERUBAHAN

BAB 1

LIKA LIKU PERJUANGAN MASYARAKAT ADAT UNTUK SETARA BERMARTABAT DI MENTAWAI

(Yayasan Citra Mandiri Mentawai)

ALAM LAKSANA SEORANG ibu. Ia menyusui, memberi makan dan melindungi. Ketika masyarakat adat kehilangan sumber daya alam, keadaan ini sama dengan kehilangan ibu.

Kehidupan masyarakat adat saat ini seperti keadaan anak piatu: gagap dalam masa transisi dan jauh dari kondisi sejahtera. Pembangunan ekonomi dan investasi di wilayah terisolasi kerap membawa dampak menyusahkan ketimbang menyejahterakan. Atas undangan pemerintah, pebisnis hadir sebentar, mengambil kekayaan alam di sekitar, lalu semua dibawa keluar. Hidup kelar. Berbanding terbalik kala masyarakat adat memanfaatkan sumber daya alam secara ala kadarnya. Kehidupan terus berdenyut.

Suku adat bukan anti pembangunan ekonomi atau investasi, tetapi investasi harus memperhitungkan kelangsungan dan kehidupan jangka panjang, terutama ekologi. Jangan sampai terjadi bencana kalabendu penuh sengsara. Masyarakat adat harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka, dari hak wilayah untuk mengelola sumber daya alam, sampai pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan dan kesempatan berusaha. Cerita ini tentang kemitraan masyarakat adat, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat madani yang mengupayakan penyusunan peraturan daerah perlindungan masyarakat adat suku Mentawai, tentang perjuangan untuk setara dan bermartabat.

Bagi masyarakat adat di kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, hutan, sungai dan laut serta segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, sangatlah penting. Tidak hanya untuk kebutuhan hidup primer seperti sandang, pangan, papan tetapi juga kebutuhan yang bersifat budaya dan religi.

Sadar bahwa sumber daya alam mereka terancam, mereka bertekad untuk melindunginya, dengan alasan yang sangat lugas dan jelas, yaitu karena kehidupan dan penghidupan mereka tergantung pada alam.

Cerita di Mentawai memperlihatkan, upaya warga dan pemerintah daerah tidak selalu mudah. Peraturan daerah pengakuan dan perlindungan masyarakat adat mutlak diperjuangkan supaya warga mendapatkan hak mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan tanpa keraguan. Sejak 1969, seluas 601.000 hektar daratan kepulauan Mentawai, sebagian besarnya menjadi bancakan untuk diusahakan. Negara dianggap abai dengan tanggung jawabnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, alih-alih penguasa malah menyerahkan pengeloaan SDA kepada pengusaha.

Berkat konsesi, perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan memperoleh pendapatan triliunan rupiah. Sebaliknya, dari sejak masih menjadi bagian dari kabupaten Padang Pariaman maupun setelah era pemekaran, Mentawai hanya mendapatkan alokasi dana pembangunan yang tak seberapa tapi harus menanggung berbagai risiko yang sering tak terhitung. Risiko itu mulai dari bencana alam seperti gempa, banjir, longsor, tsunami hingga konflik tenurial.

Kebijakan negara menggadaikan hutan kepada pengusaha akhirnya dikoreksi. Setelah usai masa hak pengusahaan hutan, atau dalam beberapa kasus terjadi pencabutan konsesi, pemerintah mulai mengakui dan mendukung masyarakat adat untuk mengelola hutannya. Masyarakat adat mendapat giliran untuk pegang kendali. Apalagi masyarakat adat memiliki peraturan adat dan kearifan local untuk menjaga hutan tetap lestari dan terlindungi. Hutan merupakan sumber

kehidupan, menyediakan bahan pangan, rumah untuk bernaung, ruang ekspresi seni, religi dan ritual adat.

Mentawai berpenduduk lebih dari 85.000 yang tersebar di empat pulau besar, yakni Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Secara administrasi, Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas 10 kecamatan dengan 43 desa. Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM), lembaga yang mendampingi dan mengadvokasi hak-hak masyarakat Mentawai, memilih lima wilayah sebagai area kerja yang diintervensi bersama dengan KEMITRAAN dalam Program Peduli. Wilayah tersebut adalah Areal Silaoinan Dusun Bekkeiluk, Salappa, Magosi, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan; Dusun Tinambu, Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah; dan Kampung Gorottai, Dusun Ukra, Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara.

Wilayah ini dipilih karena ada persoalan eksklusi sosial yang dialami oleh masayarakat, baik karena faktor geografis yang terpencil atau stigma sebagai orang pedalaman yang kolot. Penerimaan masyarakat adat dan pemerintah desa terhadap Program Peduli cukup terbuka. Mereka berkomitmen untuk bersama melakukan perubahan. Pemerintah Desa Muntei dan Malancan membuka ruang bagi masyarakat dampingan untuk terlibat aktif dalam berbagai forum perencanaan tingkat desa. Namun, sebagai bagian dari strategi implementasi program, setelah mencermati dinamika sosial dan politik lokal, maka satu wilayah dampingan di Tinambu-Saliguma dilepas karena menghendaki pergesaran prioritas program. Tahun 2018-2019, representasi masyarakat dampingan di Silaoinan dan Malancan lah yang makin sering terlibat dan dilibatkan dalam forum perencanaan tingkat desa.

Jika ditarik garis lurus, Kabupaten Kepulauan Mentawai berada sekitar 200 kilometer dari Padang, ibu kota provinsi. Kepulauan Mentawai terletak di Samudra Hindia, bisa ditempuh menggunakan jalur laut atau udara. Jalur laut menggunakan kapal cepat dengan waktu tempuh 4-5 jam tergantung cuaca atau dengan kapal milik PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) selama 10-12 jam. Sementara untuk pesawat terbang, bisa dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dengan jadwal terbatas setiap minggu. Dengan kata lain, jalur laut menjadi pilihan utama bagi siapa saja yang akan ke Mentawai. Jalur laut juga menjadi sarana transportasi utama di pulau ataupun antar pulau.

Tahun 2020, Mentawai menjadi satu-satunya wilayah yang masih masuk kategori 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) di Sumatera Barat.

Aksesibilitas memang masih masalah besar bagi warga daerah 3T. Ambil contoh penduduk yang tinggal di Dusun Bekkeiluk, Desa Muntei, berlokasi di pedalaman Pulau Siberut, sekitar 7 kilometer dari Muara Siberut. Meski memiliki perangkat pintar berupa telpon genggam dan tablet, masyarakat tak bisa berbuat banyak. Gawai direduksi fungsi utamanya hanya untuk mendengarkan musik, Warga pedalaman yang mayoritas menggantungkan hidupnya dari hasil bumi seperti pisang, rotan, dan pinang, kesulitan berkomunikasi dengan dunia luar. Menelfon atau mengirim pesan dengan gawai, sesuatu yang dianggap remeh temeh, mudah dan murah bagi orang kota, menjadi hal yang mustahil di Bekkeiluk.

Sinyal seluler tetap belum menjangkau desa-desa tetapi sudah mulai ada pembangunan BTS di

duliada
#inklusisos

kecamatan. Kabel optik bawah laut cukup baik tapi terbatas di pusat ibukota kabupaten dan kecamatan.

Dusun Bekkeiluk hingga kini belum terjangkau sinyal seluler dan aliran listrik. Untuk mengisi baterai gawai, warga memakai genset, dengan catatan ada bensin untuk menghidupkannya. Jika mau menelepon, warga harus ke Muara Siberut karena sinyal hanya ada di sana. Perjalanan ke Muara Siberut juga bukan hal sepele. Perjalanan darat awalnya tidak tersedia dan jalan mulai dibangun sejak 2019 ke Desa Muntei dengan dibiayai dari dana desa dan pembangunan infrastruktur perdesaan dari anggaran kecamatan di Pulau Siberut sehingga ada pilihan selain melalui sungai. Saat arus besar, perjalanan membutuhkan waktu 3,5 jam. Jika dangkal, dibutuhkan waktu 4 jam, bahkan lebih.

Warga yang memiliki sampan menghabiskan bensin 10 liter untuk perjalanan pergi-pulang, atau sekitar Rp 100.000 jika harga bensin Rp 10.000 per liter. Bagi yang tidak punya sampan, perlu biaya Rp 200.000 pergi-pulang untuk sewa sampan. Anggaran itu belum termasuk biaya makan. Untuk penginapan, biasanya mereka menumpang di rumah kerabat. Tidak hanya warga Bekkeiluk, warga Dusun Salappak, Desa Muntei, yang lebih jauh dengan Muara Siberut, juga melakukan hal serupa. Warga perlu bersampan selama lima jam ke Muara Siberut untuk menjangkau dunia luar. Sungguh boros ongkos dan menyita waktu. Akses adalah satu hal yang dianggap lumrah, mudah dan murah bagi warga kota.

Saat warga daerah lain bisa berkomunikasi dalam berbagai bentuk dari teks, audio, hingga video secara *real time*, di Kepulauan Mentawai komunikasi masih jadi masalah klasik yang tak kunjung tuntas. Kondisi serupa ditemui di Pagai. Satu-satunya wilayah yang sinyal selulernya bagus hanya di Sipora, pusat kabupaten. Karena terkendala sinyal, koordinasi lebih banyak menggunakan surat, terlebih bagi warga yang tinggal di hulu sungai. Warga akan menitipkan surat, atau pesan lisan, seminggu sebelum kegiatan atau hajatan diselenggarakan, kepada warga lain yang bepergian ke hulu sungai. Dan sebaliknya.

Jika jaringan seluler saja sulit, apalagi internet. Hanya ada beberapa desa dan kecamatan di Mentawai yang mendapatkan jaringan 3G dan 4G. Di pulau lain, yakni Siberut dan Pagai, hanya ada 2G atau EDGE. Jaringan internet yang buruk di Mentawai membuat kepala sekolah di Siberut Selatan harus ke Padang untuk mengirimkan laporan data pokok pendidikan, termasuk laporan dana operasional sekolah. Pergi ke Padang hanya perlu waktu tiga jam dengan kapal

Mentawai Fast, yang tersedia tiga kali seminggu. Ke Sipora, ibu kota kabupaten, perlu lima jam, itu pun dengan kapal kayu yang baru ada dua kali seminggu. Jaringan 3G di pulau 3T belum tersebar merata.

Untuk penerangan, Perusahaan Listrik Negara belum dapat menjangkau seluruh area 3T seperti Mentawai. Maka sejak 2017, Program Peduli, mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Awalnya usulan berupa PLTS terpusat namun ternyata tidak cocok dengan kondisi lapangan karena kerap terendam banjir yang menyebabkan perawatan tinggi dan mesin rusak. Lalu PLTS terpusat diganti PLTSE per unit sesuai jumlah KK. Tahun 2019 usulan itu terwujud. Kementerian ESDM, melalui pemerintah daerah, memberikan bantuan PLTSE kepada 205 KK di area dampingan Peduli, sebagai pewujudan Nawacita Presiden Joko Widodo.

YCMM mendukung pemerintah di keempat wilayah target untuk mencapai tujuan program inklusi sosial yang disepakati, yaitu:

Meningkatkan rekognisi, yaitu pengakuan dan penerimaan terhadap keberadaan masyarakat yang bermukim di hulu Sila'oinan dan Gorottai baik oleh pemerintah maupun kelompok sosial lain. Hal ini diwujudkan dalam penerimaan dan interaksi sosial kelompok marjinal dengan kelompok sosial lain;

Partisipasi masyarakat marjinal dalam forum-forum, terutama yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa;

Pemenuhan layanan sosial dasar dan penyaluran bantuan sosial.

Bicara mengenai Mentawai tak lengkap tanpa mengenal *uma*. Uma bisa berarti satuan adat dan bisa juga berarti rumah besar memanjang dengan arsitektur panggung yang ditinggali oleh beberapa keluarga dalam satu suku yang menjadi inti kehidupan masyarakat tradisional Mentawai. Pada uma inilah kebudayaan masyarakat adat Mentawai berpusat, melibatkan *Sikerei* (pemimpin seluruh upacara punen/adat) sebagai tokoh sentral, di samping *Sikebbukat* atau sesepuh masyarakat adat. Berbeda dengan saudara se-provinsi suku Minang yang bergaris keturunan ibu matrilineal, Mentawai menganut garis keturunan ayah patrilineal.

Pada uma pula ditemukan mitologi masyarakat adat Mentawai yang menjelaskan lelaku mereka sehari-hari. Kearifan lokal tentang bagaimana mencari tempat berlindung saat gempa terjadi dan rangkaian

setelahnya; berupa tanda-tanda alam yang dipakai untuk menentukan siklus pertanian dan segala hal berhubungan dengan kehidupan. Namun, kini, mendirikan atau memperbaiki uma adalah satu kemewahan yang sulit dijangkau. Bahkan saat ini uma hanya ada di sebagian pedalaman Pulau Siberut. Adapun di tiga pulau lain, yakni Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan, uma sudah sulit ditemukan.

Bangunan uma biasanya terdiri atas lima jenis kayu, yaitu meranti putih, gaharu, enau, bambu, rotan, dengan atap rumbia dan ribuh sebagai tiang penopang utama. Jumlah batang-batang kayu ribuh yang menjadi inti dalam setiap bangunan uma akan sangat bergantung dari besar atau kecilnya uma. Tiang-tiang pancang utama inilah yang menjadi muasal didirikannya uma dan berkaitan dengan legenda setempat soal dewa gempa yang disebut sebagai *Teteu Ka Baga* dan dalam versi lain disebut sebagai *Sigegegeu*. Legenda ini berkaitan dengan ritual pengorbanan dalam setiap pendirian uma yang berkaitan dengan mitologi masyarakat setempat tentang keberadaan dewa gempa.

Oleh karena mendirikan uma biasanya disertai pesta yang relatif mewah, biaya pun menjadi besar sehingga pembuatan uma menjadi relatif makin sedikit. Selain kerusakan yang membuat uma baru jarang didirikan, kebijakan pemerintah merelokasi masyarakat adat Mentawai di pedalaman menjadi salah satu sebab mengapa jumlah uma semakin berkurang. Sejak itu, fungsi uma berubah total. Uma baru digunakan jika digelar upacara adat atau pesta adat yang disebut punen dalam kehidupan tradisional orang Mentawai, termasuk berubahnya ritual pengobatan tradisional.

Pada masa Orde Baru, pemerintah melalui Departemen Sosial pernah berupaya mengubah cara hidup suku Mentawai. Proyek Depsos tahun 1975 bernama "Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing" ini menjadi penyebab perubahan tatanan masyarakat adat di Mentawai. Anjuran pemerintah ini berlanjut pada tahun 1980-an agar masyarakat Mentawai yang sudah menikah meninggalkan uma dan menempati rumah-rumah yang lebih kecil. Masyarakat yang dulunya hidup berkelompok dalam uma dipaksa meninggalkan uma supaya lebih dekat dengan pusat desa yang memudahkan penyediaan layanan dasar. Masyarakat suku Mentawai diberikan insentif ekonomi berupa uang makan dan bibit tanaman namun tanah diberikan kepada warga suku lain.

Pemerintah membangunkan pemukiman agar masyarakat suku Mentawai bisa menyesuaikan diri dengan standar kehidupan modern. Namun, hal itu tidak berhasil membuat warga bisa hidup beradab seturut selera pemerintah. Masyarakat yang dipaksa "merapat" ke tempat yang lebih dekat ke "pusat peradaban" oleh pemerintah justru hidup serba terbatas. Selain itu, mereka juga kesulitan hidup berdampingan dengan kelompok masyarakat lain yang telah lebih dulu menata hidup di desa yang baru. Terjadi konflik lahan dan ketidakpastian hukum. Tidak heran jika kebijakan *resettlement* ini tidak langgeng.

Selain soal pemukiman, pemerintah Orde Baru melanjutkan proyek mengubah masyarakat pedalaman menjadi lebih beradab. Waktu itu semua lelaki berambut panjang ditangkap dan dipotong paksa. *Kabit, luat, lekkeu* dilucuti. Kalau pakai cawat disuruh ganti celana.

Pemusnahan segala yang berbau adat dilakukan secara sistematis, massif dan terstruktur. Landasan pemusnahan aliran kepercayaan, termasuk Arat Sabulungan di Mentawai, dibuat pada masa Soekarno. Ali Sastroamidjojo, yang menjabat perdana menteri kurun 1953-1955 membentuk panitia inter-departemen untuk peninjauan aliran kepercayaan di masyarakat (interdep pakem) dengan SK No.167/PROMOSI/1954. RHK Sosrodanukusumo, Kepala Jawatan Reserse Pusat Kejaksaan Agung jadi ketua panitia. Melalui SK perdana menteri, pemerintah memberi mandat kejaksaan untuk mengawasi, menyelidiki, bahkan melarang semua kepercayaan yang tak sesuai dengan agama yang akui pemerintah: Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Aturan pemusnahan aliran kepercayaan terus berkembang sampai muncul UU No.1/PNPS/1965.

Dasar itu jadi alasan kuat bagi pemerintah memusnahkan Arat Sabulungan. Masyarakat adat Mentawai dipaksa meninggalkan budaya sikerei yang erat melakukan ajaran Arat Sabulungan.

Mereka diberi waktu tiga bulan untuk memilih agama—waktu itu hanya ada Islam dan Protestan di Mentawai. Jika menolak, budaya mereka akan dimusnahkan. Pada 1952, Islam masuk ke Siberut, namun baru populer era 1990an. Tiga tahun setelah itu, banyak misionaris Protestan dan Katolik menyebarkan agama di Siberut.

Rapat tiga agama menganggap Arat Sabulungan di Mentawai sama dengan aliran kepercayaan, karena percaya pada roh *Tai Kaleleu* (penguasa hutan), *Tai Kabagatpolak* (penguasa tanah), *Tai Kabagatoinan* (penguasa sungai), *Tai Kamanua* (penguasa langit), *Tai Kabagatkoat* (penguasa laut), dan *Ulau Manua* (penguasa alam semesta yang disebut Tuhan).

Sejak itu, budaya Mentawai perlahan menghilang. Masyarakat adat di sana banyak memeluk Katolik yang keras melarang kepercayaan lama. Meskipun begitu, budaya Mentawai terus hidup di pulau-pulau kecil yang jauh dan sulit dijangkau.

Pemerintah mengajak masyarakat yang dianggap primitif untuk memeluk agama yang resmi diakui oleh negara. Program Peduli tidak mengintervensi hal ini secara khusus karena mempertimbangkan skala prioritas, saat ini ada hal yang lebih mendesak untuk ditangani yaitu pemenuhan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pengurusan catatan kependudukan sipil. Salah satu hal yang penting dan mendesak adalah banyaknya warga terutama yang tinggal di bagian hulu menikah hanya secara adat dan tak tercatat. Pada tahun 2018, Program Peduli mendorong penyelenggaraan nikah massal oleh gereja supaya perikatan kontrak yang sudah sah secara agama dapat lebih dikuatkan oleh negara melalui pencatatan sipil.

Ihwal Rekognisi. Suku Mentawai sering dianggap sebagai orang hulu, udik, kotor, liar, primitif, tak beradab, tak berbudaya. Mereka juga dianggap jahat karena percaya dukun dan kekuatan magis. Padahal, kemampuan menyembuhkan orang sakit dengan metode tradisional itu didapat dari cara hidup yang akrab dengan alam. Awalnya, banyak yang percaya pada stigma tersebut. Namun, sering terlupa bahwa masyarakat adat adalah kelompok manusia yang terlahir sama. Suku, agama, ataupun ras tidak membuat yang satu lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang

lain. Bahkan, jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya masyarakat adat dapat dianggap lebih unggul.

Masyarakat pedalaman pulau Siberut, contohnya, memiliki cara unik untuk mencari pencuri atau pelaku tindak pidana ringan lain melalui upacara adat *bekeu malekbuk*. Ini merupakan sistem pengadilan masyarakat adat yang ada dan hanya digunakan untuk kejahatan kecil, bukan kriminal berat.

Pengadilan ini merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Mentawai dalam hal pelaksanaan hukum adat terhadap masyarakat yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap norma di daerahnya. Pengadilan ini dipimpin oleh *sikerei* sebagai wali hakim.

Upacara dilaksanakan dengan menggunakan kembang sepatu, *hibiscus*. Bunga dipakai sebagai alat untuk mengarahkan siapa pencurinya. Pemilihan bunga ini untuk memudahkan dalam melakukan upacara, dan bunga ini tumbuh subur di perkampungan.

Sikerei akan mengumpulkan orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku. Mereka disuruh duduk berkeliling menghadapi sebuah wadah yang berisi air. Di dalamnya diapungkan bunga hibiscus (warna dan bentuk tidak jadi masalah) dengan tangkai yang pendek. Bunga didorong oleh Sikerei dengan mencelupkan jari telunjuk ke cawan dan airnya diputar searah jarum jam, sehingga bunga berputar mengitari orang-orang yang duduk berkeliling tadi.

Bila usaha yang dilakukan untuk memutarkan bunga sudah mencapai tiga kali dan bunga selalu berhenti pada orang yang sama, maka orang itulah yang dianggap sebagai pencurinya. Tetapi kalau bunga itu tidak berhenti pada orang yang sama, hal semacam ini disebut dengan *Taiteukenia*, artinya bunga enggan disuruh atau tidak mau menunjukkan pencurinya.

Anggaplah bunga itu telah menunjukkan seseorang sebagai pelakunya. Maka semua orang akan arif dan diam-diam bangkit dari duduk dan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan aman dan tertib. Semua orang tidak boleh memberikan komentar apapun karena tidak sopan dan tidak mematuhi tata upacara. Orang yang tertuduh kalau benar-benar pencurinya, akan berusaha mengembalikan barang curian tersebut dengan diam-diam pada malam hari agar tidak diketahui orang lain. (Data ini diperoleh dari laporan pencatatan Warisan Budaya Tak Benda di Pulau Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013 oleh BPNB Sumatera Barat).

Terdapat banyak nilai-nilai budaya yang dipertahankan dalam pengadilan sederhana yang masih bertahan dan dijalankan oleh masyarakat adat di Desa Madobag sampai saat ini (bukan area kerja Program Peduli, namun tetap dampingan YCMM). Kesederhanaan ini dihormati oleh masyarakat sebagai milik dan kekayaan pengetahuan lokal.

Pertama, nilai menjaga alam. Tidak hanya menebang hutan, mengotori air juga merupakan suatu tindakan yang tidak bisa dibenarkan, bahkan bisa mendatangkan hukuman berupa denda adat. Denda itu setara dengan seekor babi, yang termasuk harta berharga bagi masyarakat Mentawai. Di sungai, buang air kecil saja dilarang, apalagi buang air besar, sangat tidak diperbolehkan karena air adalah sumber kehidupan. Dengan demikian, kelestarian hutan dan air di Mentawai tetap terjaga. Begitu selektif mereka terhadap alam dan lingkungannya.

Kedua, nilai praduga tidak bersalah, dalam hukum formal dikenal dengan azas praduga tak bersalah, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Penerapan nilai ini dilakukan pada saat pemanggilan individu yang diduga bersalah. Mereka dikumpulkan dan dihadapkan dalam pengadilan adat.

Ketiga, nilai kesadaran hukum. Kesadaran akan hukum bagi mereka sangatlah mulia. Mereka menghormati dan menghargai orang yang ditetapkan sebagai bersalah. Semua orang yang hadir dalam pengadilan tersebut tidak memberikan komentar apa-apa ketika seseorang diberi sanksi hukum. Komentar terhadap orang yang bersalah dianggap sebagai perilaku yang tidak sopan dan tidak mematuhi tata upacara adat ini.

Keempat, nilai kepastian hukum. Kepastian terhadap hukum perlu dipertegas dalam kehidupan bermasyrakat. Nilai kepastian hukum ini diperoleh oleh masyarakat dengan pengadilan adat *bekeu malekbuk*. Orang yang sudah ditetapkan bersalah dalam pengadilan ini, dengan sadar akan melakukan sanksi adat yang ditetapkan.

Nilai-nilai ini masih dijalankan dan dipelihara oleh masyarakat adat yang menjadi pembeda utama dengan masyarakat luar yang acap berprinsip bahwa peraturan ada untuk dilanggar. Masyarakat modern kerap dicirikan oleh perilaku yang kurang mengindahkan norma hukum, terlebih jika tidak ada upaya penerapan yang ketat dan berlaku pandang bulu.

Kembali ke ihwal peningkatan layanan dasar dalam hal pengurusan dokumen administrasi kependudukan (adminduk), yang menjadi salah satu fokus Program Peduli. Dulu, hanya ada 2 KK yang memiliki Kartu

BA 8465 BY
02-20

Keluarga dan 4 orang memiliki Kartu Tanda Penduduk di Gorottai. Dulu, 50 persen warga Silaoinan tidak memiliki dokumen Adminduk. Dulu, tidak ada unit pelayanan kesehatan di Bekkeiluk, Magosi dan Gorottai, sementara di Tinambu dan Salappa tidak ada petugas yang ditempatkan di Pustu. Dulu, hanya ada sekolah Uma YCMM dan Santa Maria Prayoga sampai kelas 3 atau 4. Dulu, tidak ada akses sarana air bersih dan penerangan. Dulu, masyarakat Gorottai bermukim di lokasi rawan banjir.

Lain dulu, lain sekarang. Kini, 198 orang warga dampingan memiliki Adminduk (KK, KTP, Akta Nikah, Akta Lahir, KIA). Kini, sudah ada tambahan tiga unit layanan kesehatan dan penempatan dua orang petugas kesehatan, dan ada minimal 210 orang mendapatkan akses kesehatan – jumlahnya tentu bertambah terus. Kini, ada tiga unit layanan sekolah yang dikelola oleh pemerintah, sehingga ada 147 anak mendapatkan akses Pendidikan. Kini, ada lima unit layanan air bersih dan 205 unit penerangan untuk 650 orang warga dampingan di Sialaoinan dan Gorottai, ada 265 warga dampingan dapat mengakses layanan kesehatan melalui JKN KIS dan 13 KK warga Gorottai mendapatkan akses bantuan perumahan di wilayah pemukiman baru yang bebas banjir, bahkan karena dokumen lengkap ada 94 orang warga dampingan dari Silaoinan dan Gorottai menjadi sasaran penerima bantuan sosial pada masa Pandemi Covid-19.

Melalui sebuah forum yang diselenggarakan dalam rangka penutupan hibah Program Peduli dan dihadiri oleh wakil pemerintah, warga penerima manfaat, dan kader serta mitra lain pada bulan Oktober 2020, tercapai sebuah konsensus bahwa program dampingan cukup berhasil membawa perubahan. Indikatornya, antara lain, dapat dilihat dari meningkatkan layanan adminduk dan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat Sila' Oinan dan Gorottai selaku kelompok masyarakat marginal dalam lingkup desa masing-masing. Peningkatan layanan adminduk dan bantuan sosial ini, memperlihatkan kebijakan program dan anggaran pemerintah desa Muntei dan Malancan telah memiliki keberpihakan kepada masyarakat di Sila' Oinan dan Gorottai. Peningkatan layanaan adminduk dan bantuan sosial juga memperlihatkan kepedulian dari pemerintah kecamatan, kabupatan dan provinsi terhadap kedua kelompok masyarakat marginal ini. Keberpihakan ini, berhasil dimunculkan melalui dialog-dialog yang difasilitasi YCMM antara masyarakat dengan pemerintah kecamatan dan OPD di Kabupaten. Dialog-dialog ini bisa produktif, karena dialog-dialog tersebut, didukung oleh data-data yang kuat dan relevan, sebagai hasil kerja kader-kader dalam membantu pemerintah desa mengumpulkan dan

menyusun data serta profil masyarakat yang diusulkan menerima layanan adminduk dan bantuan sosial.

Saat ini, harus diakui, inklusi masih belum menjadi paradigmna dan pendekatan utama dalam agenda-agenda pemerintahan. Karena itu, menjadi mitra pemerintah untuk terus memperkuat persfektif inklusi masih menjadi agenda penting. Keberlangsungan kebijakan dan program-program yang inklusif, sulit untuk terus menguat, jika tidak ada mitra pemerintah dalam tahap implementasi.

Selain itu, pengarusutamaan jender dalam pelaksanaan Program Peduli ditujukan untuk dapat melihat persoalan masyarakat dampingan secara holistik, juga untuk dapat merumuskan konsep dan program yang tepat dalam mengatasi persoalan-persoalan eksklusi yang dihadapi oleh kelompok marjinal. Salah satu strategi inklusi gender yang dilakukan adalah mendorong kemandirian kelompok perempuan dalam bidang ekonomi, melalui pelatihan pembuatan olahan pangan dari bahan pangan lokal dan hasil pertanian masyarakat. Juga dengan membuka akses dan partisipasi kelompok perempuan dalam setiap forum-forum perencanaan tingkat dusun dan desa.

Program Peduli juga mendorong terbukanya akses dan partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan dialog dan lobi pembangunan di tingkat Kabupaten. Pendekatan ini telah meningkatkan rasa percaya diri kelompok perempuan dalam menyuarakan kepentingan mereka.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan kelompok perempuan oleh Program Peduli membuat Pemerintah Desa Muntei mengalokasikan dana khusus pemberdayaan kelompok perempuan dari ADD Muntei tahun 2018. Partisipasi kelompok perempuan dalam forum-forum perencanaan pembangunan di tingkat dusun dan desa juga meningkat. Hasilnya, tahun 2018, pemerintah desa Muntei mengalokasikan dana khusus untuk kader-kader kesehatan perempuan dan pemerintah desa Malancan mengalokasikan dana ADD bagi pelayanan kesehatan khusus bagi perempuan dan anak.

Lebih jauh terkait pendidikan. Pendidikan lewat sekolah baru menyentuh kawasan pedalaman Mentawai, khususnya Siberut, beberapa tahun setelah Mentawai memisahkan diri dari Kabupaten Padang Pariaman pada 1999. Inisiatif mendorong sekolah bagi anak-anak di pedalaman Mentawai juga bukan datang dari pemerintah, melainkan dari masyarakat lokal, setelah mereka mendapatkan berbagai pelatihan peningkatan kemampuan. Di pedalaman Mentawai, pendidikan dimulai dari sekolah hutan yang dikenal juga dengan nama sekolah uma. Sekolah hutan memang berada di perkampungan di pedalaman hutan Mentawai. Sekolah pertama berada di Bekkeiluk, sekitar tiga jam melewati hutan dari lokasi Bekkeiluk saat ini. Sekolah tersebut berdiri pada 2004. Saat ini, sekolah tersebut sudah menjadi bagian dari SD Santa Maria milik Yayasan Prayoga yang berada di Muara Siberut, ibu kota Kecamatan Siberut Selatan.

Aksesibilitas dengan segala ancamannya menjadi salah satu kendala bagi pendidikan di Mentawai. Kondisi itu diperparah sarana dan prasarana seperti ruang kelas, guru, dan buku yang serba terbatas. Saat ini, tujuh SD termasuk filial, dua SMP, satu SMA dan satu SMK di Siberut Selatan masih kekurangan ruang kelas. Di Dusun Bekkeiluk, misalnya, kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya memanfaatkan gereja kini berpindah ke balai pertemuan. Di

pedalaman Siberut Selatan, sekolah rata-rata hanya ada sampai SD. Jika ingin meneruskan ke SMP hingga SMA, harus ke Muara Siberut. Melanjutkan sekolah juga sebenarnya tidak mudah karena artinya orangtua harus mengeluarkan biaya tambahan untuk kos dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Di tengah berbagai keterbatasan itu, masyarakat Mentawai menolak mengeluh. Mereka memilih tidak menangisi kondisi yang ada, tapi melawannya. Orangtua terus mendorong anak mereka sekolah dan anak-anak juga tidak kalah antusias. Karena pendidikan adalah jalan keluar dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan. Pendidikan juga membuka mata atas terjadinya eksploitasi alam Mentawai.

Masifnya eksploitasi hutan tidak berbanding lurus dengan pembangunan infrastruktur di Mentawai sehingga aksesibilitas masih menjadi persoalan utama masyarakat setempat. Selain itu, dampak lain adalah bencana alam, bukan hanya dari darat, melainkan juga dari laut. Sebagai wilayah kepulauan yang memanjang di sisi paling barat Pulau Sumatera dan dikelilingi Samudera Hindia, Mentawai rentan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Belum lekang dari ingatan ketika pada 25 Oktober 2010, bencana tsunami yang diawali gempa berkekuatan 7,2 Skala Richter melanda wilayah Kepulauan Mentawai. Tercatat korban meninggal dunia mencapai 456 jiwa, ditambah kerugian harta benda dan kerusakan fisik serta sarana dan prasarana umum. Sudah seharusnya pemerintah menetapkan Mentawai menjadi kawasan yang dilindungi ekosistemnya. Tujuannya agar masyarakat tidak berada dalam posisi yang lebih terancam lagi.

Kekhawatiran terbesar dari eksploitasi alam adalah konflik antara masyarakat pemilik ulayat dan pihak yang menggarap lokasi. Konflik antara klaim negara bahwa hutan adalah hutan negara sehingga negara bebas menyerahkan kepada pihak mana saja yang tertarik untuk menggarap dan klaim masyarakat bahwa itu adalah tanah ulayat yang *off limit* untuk digarap oleh pihak luar.

Kehadiran perusahaan-perusahaan pemilik konsensi tidak menyejahterakan masyarakat Mentawai. Hal itu terbukti dari sulitnya Mentawai keluar dari wilayah dengan kategori 3T. Mentawai bahkan menjadi kabupaten dengan jumlah desa sangat tertinggal paling banyak, yakni 12 desa dari 43 desa -- 20 desa lainnya masih tertinggal, 7 berkembang, dan hanya 4 yang dinyatakan maju. Pembangunan jalur Trans-Mentawai yang diharapkan bisa membuka ketertinggalan Mentawai belum kunjung selesai. Akibatnya, sebagian besar masih harus mengandalkan jalur sungai atau laut untuk menjangkau wilayah lain. Kondisi itu berdampak terhadap tidak terdistribusinya komoditas hasil ladang atau kebun masyarakat.

Tak semua masa dan rezim memberi peluang terbit perda yang mengatur masyarakat adat. Untunglah selama setahun terakhir, pemerintah mendorong kebijakan reforma agraria. Hasilnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan empat aturan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat, enam masih proses. Aturan itu berbentuk Surat Keputusan Hutan Adat. Masyarakat adat diberikan kewenangan mengelola selama 35 tahun. Kini sudah ada Perda Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bisa menjadi dasar pengakuan negara atas wilayah adat Mentawai.

Ke depan, YCMM mendorong inovasi desa melalui pengembangan wisata berbasis masyarakat untuk

GPS
GPSmap 60CSx
Slp3
Note
27-JUN-15 12:46:35
Location
S 01°32'41.7"
E099°06'44.1"
Elevation
23
From Current Location
N
3
Avg
Map
OK
GARMIN

membuktikan bahwa masyarakat Mentawai mampu mengelola potensi hutan yang mereka miliki. Apalagi hutan memang menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Mentawai. Tujuan lainnya adalah agar masyarakat bisa meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan jasa lingkungan ekosistem hutan.

YCMM juga berkomitmen menggerakkan individu dan jaringan organisasi LSM, akademisi, dan media yang bisa membantu pemerintah daerah untuk menumbuhkan dan memperkuat nilai-nilai inklusi dan pelembagaan kelompok marginal. Harapannya, sumber daya dan sumber dana pemerintah yang terbatas bisa dikolaborasikan dengan berbagai jaringan di daerah.

Ke depan, kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk 15 uma yang dituangkan melalui keputusan Bupati Kepulauan Mentawai diharapkan dapat diimplementasikan secara serius. Program Setapak Rainforest Norway terus menjadi mitra dalam implementasi masyarakat hukum adat yang wilayah adatnya diakui oleh negara. Masyarakat bisa menentukan pilihan terbaik dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Tak ada keraguan dalam hal ini karena masyarakat adat Mentawai dapat menunjukkan ikatan asal leluhur, hubungan kuat dengan tanah, pranata pemerintahan, dan tatanan hukum yang menjadi dasar pembuktian kuat atas teritori tanah yang tetap, dihuni dari generasi ke generasi.

Tantangan terus menanti. Sekalipun Surat Keputusan Hutan Adat Mentawai telah didapat, pengelolaan hutan harus bisa menghadirkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat adat.

Tantangan tak pernah berhenti. Sekalipun Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat telah dinyatakan berlaku, Perda ini harus menjadi modal sosial bagi masyarakat untuk merevitalisasi nilai-nilai adat dan budaya Mentawai yang kini tengah berada di ambang kepunahan, untuk bisa mempertahankan hidup masyarakat adat Mentawai yang setara dan bermartabat di nusantara, zamrud khatulistiwa bernama Indonesia.

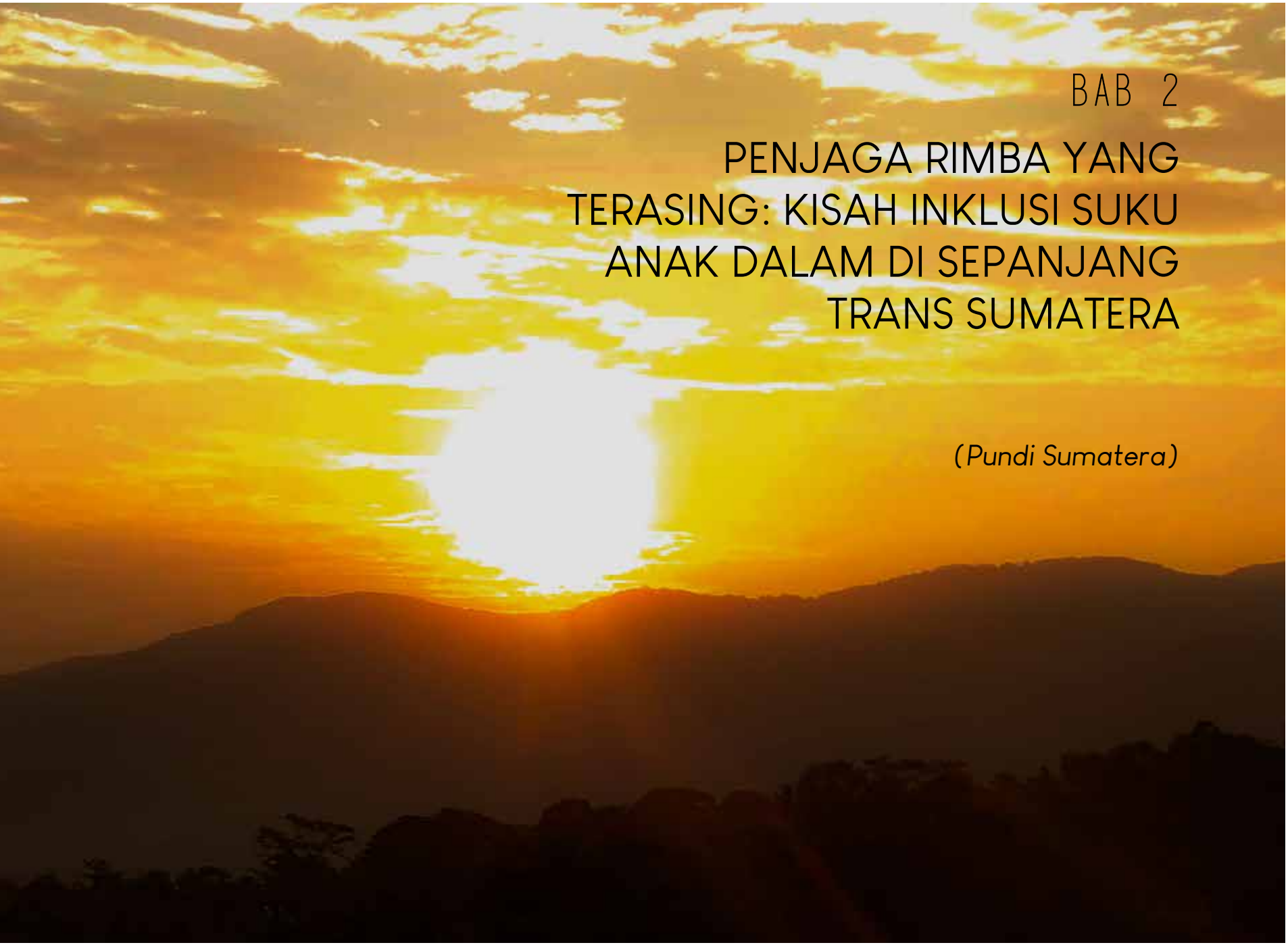

BAB 2

PENJAGA RIMBA YANG TERASING: KISAH INKLUSI SUKU ANAK DALAM DI SEPANJANG TRANS SUMATERA

(Pundi Sumatera)

HIKAYAT ORANG RIMBA hampir tamat. Orang Rimba didiskriminasi hanya karena mempraktikkan budaya nomaden demi merawat ruang hidupnya. Orang Rimba juga dieksklusi hanya karena mereka punya kepercayaan terhadap dewa-dewi yang berbeda.

Seperti tergambar dalam seloka Orang Rimba--puisi yang mengandung ajaran bagi masyarakat penganutnya – alkisah.. "*Piado rimbo, piado bungo. Piado bungo, piado dewo"*. Rimba tak lagi asri, bunga tak lagi berseri. Bunga tak lagi berseri, dewa pun tak lagi menghampiri.

Berburu dan meramu adalah DNA Orang Rimba. Secara genetik, sistematika keturunan, manual regenerasi, peta biologis, cetak-biru individu, berburu dan meramu telah menjadi corak unik masyarakat adat Orang Rimba. Hutan merupakan hal sakral dalam kehidupan mereka, yang disimbolkan dengan berbagai sebutan, seperti hutan adat, *imbo larangan, imbo pusako, imbo prabukalo, bukit bedewo*. Jagat keinsyafan ini memunculkan kearifan dimana hutan di hulu air tak ditebang, di lereng dijaga tegakan pohonnya, dan di tepi sungai tidak dibuka untuk kebun atau sudung pemukiman. Ketika mereka tersisih karena kalah jumlah dan tak lagi memiliki benteng pertahanan diri, tak ayal banyak Orang Rimba memilih menjadi 'orang terang' dan mengadu nasib ke 'rimba orang'. Dalam rimba orang yang terang, centang perenang, kehidupan alami tersingkir ke pinggir. Tapi jika itu menjadi opsi, Orang Rimba perlu dibekali setidaknya dengan pengetahuan dan kemampuan untuk berbaur dengan masyarakat luar, tanpa harus dimodernisasi.

Orang Rimba menjuluki masyarakat luar sebagai 'orang terang' karena hidup di ruang terbuka, bukan di bawah kanopi pepohonan rimbun seperti mereka.

Sebaliknya, masyarakat luar memberi label "kubu", dari kosa kata Bahasa Melayu *ngubu* atau *ngubun,* yang artinya bersembunyi dalam hutan. Sebutan ini tertera dalam buku-buku pelajaran sekolah menengah untuk merujuk pada suku yang tinggal di rimba pedalaman Jambi. Belakangan, bisa jadi untuk meneteralisir keadaan, pemerintah secara resmi memperkenalkan nama "Suku Anak Dalam" yang menyiratkan semua kelompok masyarakat adat dan lokal terpencil yang tinggal di dalam hutan belantara. Persoalannya, generalisasi bisa memicu pendekatan yang seragam untuk berbagai entitas yang sebenarnya majemuk dan butuh penanganan berbeda.

Tulisan ini memakai sebutan Orang Rimba dan Suku Anak Dalam (SAD) secara bergantian. Masyarakat ini diyakini sebagai suku asli Melayu Jambi, yang merupakan salah satu suku minoritas yang hidup dalam keadaan miskin yang sangat ekstrim di Sumatera. Perkebunan sawit, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur jalan lintas tengah telah memiskinkan Orang Rimba (hasil kajian Warsi, Cultural Survival International dan Universitas Indonesia, 1994).

Jangkauan ruang hidup Orang Rimba sangat luas karena mereka menerapkan budaya nomaden dan tradisi melangun. Melangun berarti hidup mengembara ke dalam hutan. Melangun ibarat menuntaskan air mata, mengutip kiasan indah Mardiyah Chamim di bukunya "Menjaga Rimba Terakhir". Melangun juga pernyataan cinta, kehilangan dan kenangan pada orang terkasih,

kerabat dan keluarga yang dihormati, yang meninggal dunia. Tak peduli pohon durian sedang berbuah lebat, ada hewan buruan lewat, getah karet siap disadap, atau ikan sedia ditangkap, semua itu akan ditinggalkan ketika ada anggota kerabat SAD yang mati. Itu tanda panggilan melangun tiba.

Konsep waktu seakan terhenti bagi suku asli seperti Orang Rimba. Pola genetika Orang Rimba yang menunjukkan tipe pemburu dan peramu berhenti pada pola genetika leluhur mereka ratusan tahun lalu. Hal ini dikonfirmasi melalui Riset Lembaga Biologi Molekuler Eijkman tahun 2015. Profesor Herawati Supolo-Sudoyo, ahli genetika dari Eijkman, menengarai suku asli seperti Orang Rimba hidup seperti dalam kepompong yang terlindungi dengan baik. Mereka mengisolasi diri dari kehidupan luar dengan berbagai ritual dan peraturan adat. Karena ada tabir berupa rimba lebat, perubahan yang terjadi di luar suku Orang Rimba seakan tak mempengaruhi mereka, sampai akhirnya perubahan memaksa singgah ke rimba yang semakin terbuka karena dibabat secara hebat.

Secara turun-temurun, Suku Anak Dalam hidup dalam kelompok-kelompok kecil (*rombong*) di dalam kawasan hutan dan sampai tahun 1970-an masih hidup dalam fase berburu dan meramu. Namun seiring dengan meningkatnya aktifitas pembangunan, situasi pun berubah menjadi tidak terlalu menguntungkan bagi komunitas Suku Anak Dalam. Jumlah tutupan hutan yang sangat jauh menyusut, membuat kelompok-kelompok Suku Anak Dalam yang belum bisa keluar dari fase berburu dan meramu ini terlempar ke lingkaran paling luar dari gerak maju proses pembangunan. Jika sebelumnya mereka dapat hidup semi nomaden dan menggantungkan kehidupannya dari hasil berburu dan meramu dalam suatu *home range* yang luas selama berabad-abad, saat ini mereka hidup tanpa kepastian tanah tempat tinggal (apalagi kepastian kawasan untuk berburu dan meramu). Suku Anak Dalam terpaksa hidup menumpang di dalam area kebun milik perusahaan sawit atau milik penduduk desa dan nyaris tidak ada sumber mata pencaharian. Kondisi ini kemudian menyebabkan kelompok-kelompok Suku Anak Dalam di jalur lintas tengah Sumatera ini mulai terpecah-pecah dalam sub-kelompok yang lebih kecil, terdiri dari 5-10 kepala keluarga dan hidup menyebar di dalam wilayah 5 kabupaten. Jumlahnya lebih kurang 319 Kepala Keluarga atau sekitar 1.500 Jiwa.

Komunitas Suku Anak Dalam yang hidup hari ini menerima warisan sejarah yang sangat panjang tentang stigma negatif keberadaan mereka di tengah masyarakat luas. Masyarakat di Sumatera yang mayoritas Melayu muslim menjuluki Orang Rimba/ Suku Anak Dalam, Kubu. Kubu sendiri artinya kotor, bau busuk, menjijikkan, persis seperti sampah. Kubu juga bermakna primitif, bodoh, terbelakang, kampungan. Intinya, Orang Rimba belum dianggap manusia, baru setengah manusia, evolusinya belum sempurna. Belum lagi cara hidupnya berbeda. Suka berpindah-pindah, interaksinya terbatas dengan orang di luar suku asli, ditambah tradisi 'melangun' (pergi jauh berhari-hari selama masa berduka cita), membuat mereka dituding kumuh dan sulit diatur.

Stigma yang melekat tersebut, baik secara sadar atau tidak sadar, terwujud dalam perkataan dan tindakan yang sangat merendahkan derajat mereka. Kondisi ini secara umum membuat hubungan sosial antara komunitas Suku Anak Dalam dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya menjadi tegang di bawah permukaan tetapi dapat meledak setiap saat.

Berbagai kejadian dan perselisihan sepele cenderung berujung pada penggunaan kekerasan, dan di beberapa kasus bahkan berakhir dengan pembunuhan.

Sebagian besar rombong Suku Anak Dalam di lintas tengah Sumatera masih hidup berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Karena kondisi ini, secara umum sangat sulit bagi warga Suku Anak Dalam untuk mendapatkan pengakuan legal seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), apalagi akta kelahiran. Kesulitan ini timbul dari dua sisi, baik sisi pemerintah maupun sisi warga Suku Anak Dalam. Dari sisi pemerintah, terdapat hambatan teknis untuk mendata keberadaan warga Suku Anak Dalam karena ketidakpastian tempat tinggal dan juga minimnya informasi mengenai data kelahiran. Ketiadaan dokumen kependudukan ini pada akhirnya berujung pada minimnya layanan dasar yang dapat diberikan pemerintah dan bisa diakses oleh Suku Anak Dalam, khususnya layanan dasar baik kesehatan maupun pendidikan.

Orang Rimba kini tinggal di hutan sisa-sisa, yang senyap tanpa bunyi-bunyian satwa. Rimba hilang, perkebunan sawit terbilang. Pembukaan hutan, untuk memulai lahan kebun monokultur, seringkali dilakukan dengan cara membakar. Guna menghindari api, sebagian besar anggota Suku Anak Dalam kabur ke desa terdekat. Lainnya *ngumpet* lari menjauh ke dalam hutan yang tersembunyi di kawasan taman nasional. Keputusan untuk mendekat ke kampung yang lebih tertata dan terlembaga namun asing tak biasa bagi Orang Rimba pasti terasa berat. Namun, pada banyak kasus, mereka tidak punya pilihan lain jika ingin tetap bertahan hidup. Di desa tempat mereka berlindung itulah, proses menjadi 'orang terang' dimulai.

Setelah beberapa lama menetap, mereka akan mengirim anak-anak yang telah masuk usia sekolah untuk menuntut ilmu melalui pendidikan formal. Tapi guru di sekolah ingin melihat akta kelahiran mereka. Untuk memperoleh akta kelahiran, harus ada akta perkawinan orang tua. Untuk mendapatkan akta perkawinan, pasangan suami istri Suku Anak Dalam harus memeluk agama resmi yang diakui oleh negara.

Masalahnya, negara hanya mengakui enam agama secara resmi, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, setiap warga negara harus mencantumkan salah satu dari enam pilihan pada kolom agama.

Kepada Orang Rimba dikatakan bahwa mereka perlu agama resmi agar bisa mendapat KTP, KK dan Akta Nikah agar anak-anak mereka dapat bersekolah.

Baru pada 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi memutuskan penghayat kepercayaan dapat mencantumkan kepercayaan mereka pada kolom agama di KTP dan KK. Namun nestapa tak berhenti di situ. Penghayat kepercayaan tetap mengalami kesulitan mendapatkan akta perkawinan, akta kelahiran, dan dokumen-dokumen lainnya. Bahkan, jika mau sepenuhnya *politically correct,* sebenarnya ada banyak sekali jenis kepercayaan yang dihayati oleh berbagai masyarakat adat se-nusantara dan itu perlu disebut lebih rinci.

Selama ini salah bila mengatakan Orang Rimba tidak beriman. Iman mereka teguh kepada kepercayaan leluhur. Mereka menyembah banyak dewa, dari dewa lebah, dewa burung rangkong, hingga dewa mata

air. Harimau adalah salah satu dewa yang terkuat, selain dewa dan dewi berbagai pohon yang memang lekat dengan kehidupan Orang Rimba. Jika Orang Rimba kehilangan rimba, maka mereka kehilangan cara hidup, budaya dan sistem kepercayaannya. Dewa-dewi mereka akan hancur. Padahal, dewa-dewilah yang melindungi perempuan dan anak-anak yang menjadi jaminan dapat berlangsungnya sebuah generasi. Dukun-dukun akan kehilangan kekuatan mereka, sebaliknya bencana akan meraja lela.

Para pegiat inklusi kini berjuang agar parlemen mengubah Undang-Undang Administrasi Kependudukan Tahun 2013. Perjuangan ini juga makin berat karena hingga hari ini, setelah sepuluh tahun berlalu, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat terus terkatung-katung tak jua disahkan di Senayan. Situasi ini kontras dengan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara, juga RUU Cipta Kerja, yang masuk jalur super express di Badan Legislasi dan melenggang tanpa halang rintang yang berarti untuk diketuk palu di Rapat Paripurna. Bagi mereka yang sinis, aturan perundangan di negeri ini selain tergantung pada UUD (Undang-Undang Dasar), nampaknya juga tergantung pada UUD (Ujung-Ujungnya Duit).

Kehadiran perusahaan hutan tanaman industri berskala besar secara perlahan telah menghilangkan kawasan hutan alam. Hal ini menimbulkan persoalan lahan yang menjadi ruang hidup Suku Anak Dalam. Komunitas yang ada sekarang terpaksa tinggal di tengah-tengah kebun sawit dan kebun karet di mana mereka semakin sulit untuk berburu, berkebun atau mendapatkan tanaman obat yang semula disediakan oleh alam. Krisis air bersih, sanitasi, kekurangan gizi, lelah fisik dan psikis akibat melangun, adalah masalah yang mudah mengundang infeksi berbagai jenis penyakit. Dalam kondisi rentan, ditambah kematian beruntun, membuat nasib Suku Anak Dalam – yang kadang disingkat SAD, dalam bahasa Inggris artinya sedih – sunguh menyedihkan dan memprihatinkan.

Mungkin karena hidup menyatu dengan hutan, makan dari hasil berburu dan meramu, mereka tidak terlalu paham konsep kepemilikan individu sehingga sering dituduh mencuri. Mereka menganggap buah dapat tumbuh dengan sendirinya di pohon dan bisa bebas diambil jika memerlukan. Padahal dalam kondisi masyarakat yang menetap, banyak komoditas memang sengaja ditanam oleh warga. Hanya yang menanam yang berhak memanen.

Orang Rimba juga dianggap menciptakan ketegangan ketika memburu dan menyantap babi hutan di kampung yang warganya mayoritas beragama Islam. Ketika warga muslim melihat darah babi berceceran atau sisa bangkai babi berserakan, warga akan merasa terganggu.

Pandangan ini adalah cerminan kontradiksi Orang Rimba dengan nilai-nilai yang dianut oleh 'orang terang'. Orang Rimba tidak memakan hewan ternak, seperti ayam, sapi, atau kambing. Mereka menganggap itu adalah bentuk pengkhianatan. Anda memberi makan hewan, tapi ketika hewan itu gemuk, Anda memakannya. Menurut Orang Rimba pengaturan untuk menentukan peruntungan yang adil adalah bertarung. Siapapun yang menang dapat menyantap yang kalah. Itu semacam *code of conduct* yang berlaku buat Orang Rimba.

Gaya hidup Orang Rimba dalam banyak aspek memang berbeda bahkan berkebalikan dengan orang kebanyakan. Perbedaan ini kembali tercermin

PUISI HUTAN

HUTAN KU YANG DULU LEBAT KINI HILANG
BERGANTI SAWIT
NYAWA KAMI PUN TERANCAM
KAMI DULU SANGAT SENANG HIDUP
DI HUTAN
TAPI SEKARANG KAMI HIDUP DI
KEBUN SAWIT BABI HILANG KAMI.
PUN TIDAK DAPAT MAKAN

WHITEBOARD MARKER

dalam seloka yang kerap diajarkan oleh Orang Rimba kepada generasi muda mereka, untuk meneguhkan tradisi. Seloka itu berbunyi, "*semenjak nenek puyang kami nio, Orang Rimbo beratap cikai, bedinding banir, berayam kuaw, bekambing kijang, bekebau tonuk.*" Seloka sederhana ini bermakna dalam. Ia menggambarkan pembagian ruang antara orang rimba dan orang terang, agar tidak saling ganggu dan bertoleransi dalam sebuah harmoni, sejak dahulu kala. Jika orang terang berumah dengan dinding tembok, maka orang rimba tinggal di rumah beratap anyaman daun cikai yang didirikan di antara pohon banir yang besar menjulang. Jika orang terang makan ayam, maka orang rimba makan burung kuo; jika orang terang konsumsi daging kambing, maka orang rimba konsumsi daging kijang; jika orang terang pelihara kerbau, maka orang rimba punya hewan yang ada di hutan bernama tonuk.

Ruang hidup Orang Rimba dijaga dengan penuh kehati-hatian, kesyukuran dan kecintaan. Banyak sekali aturan, bahkan penyakralan, terhadap alam. Berbeda dengan kebanyakan 'orang terang' yang kerap memandang alam sebagai sumber daya yang akan selalu tersedia untuk dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Benturan kebudayaan semacam itu terutama mengemuka dekade tahun 1980-an ketika Presiden Soeharto memberikan lahan kepada para transmigrant, termasuk para pengusaha, dari Pulau Jawa. Lahan yang dialokasikan untuk transmigrasi, yaitu Singkut, Pemenang, Air Itam, Kuamang Kuning, Rimbo Bujang, Bukit Duabelas, sudah diketahui adalah tempat hunian Suku Anak Dalam yang nomaden. Sejak saat itu, area hutan yang menjadi ruang hidup Orang Rimba, kian terbuka. Sejalan dengan langkah tersebut, perkebunan kelapa sawit, karet, dan kayu produksi leluasa merambah hutan tanpa berunding atau memberi kompensasi kepada penduduk asli. Namun tidak ada langkah antisipasi dari pihak pemerintah selain program *settlement.* Program ini nyatanya tak pernah berhasil, cukup mengikuti logika sederhana, mungkin karena Orang Rimba tak betah berumah di pemukiman tersebab habitat aslinya berada di rimba, *beratap cikai, bedinding banir.*

Tahun 1994, muncul Laporan Bank Dunia berjumlah 176 halaman yang membahas dampak pelaksanaan program transmigrasi massal gelombang I, II, dan III. Dalam laporan berjudul "*Indonesia Impact Evaluation Report*" ada empat halaman yang khusus menyoroti Orang Rimba. Menurut laporan tersebut, sedikitnya ada 670 orang, atau sekitar 14 persen dari total populasi Suku Anak Dalam yang diperkirakan berjumlah 4.750 jiwa saat itu, yang terusir dari hutan, mencari penghidupan dengan jalan kaki berombongan ke kampung-kampung sekitar, bahkan tak sedikit yang mengemis belas kasihan 'orang terang' di jalan raya trans Sumatera. Di tengah derap transmigrasi dan perkebunan massal, Orang Rimba terusir dari rumah dan kebunnya sendiri. Mereka kehilangan harkat martabatnya sebagai manusia, tercerabut dari akar budaya leluhurnya, dan termarjinalkan dari penenuhan hak-haknya sebagai warga negara.

Sejak masifnya pembukaan jalan dan lahan untuk HPH atau HTI, juga pembukaan lahan untuk pemukiman transmigrasi, Orang Rimba sudah jarang lagi menetap dan menghuni rumah. Mereka lebih suka tinggal di pondokan (biasa disebut sudung) beratap terpal atau plastik hitam untuk memudahkan mobilitas saat tiba panggilan melangun. Sudung dulunya beratapkan daun puar, tanpa dinding dan lantai.

Saat ini, penggunaan daun sebagai atap hanya dilakukan untuk efek pendingin, terpal dan plastik telah menggantikan daun puar sebagai bahan atap.

Kondisi-kondisi inilah yang melatarbelakangi Pundi Sumatera, dengan dukungan Program Peduli, melakukan pendampingan dan pemberdayaan untuk komunitas Suku Anak Dalam yang berada di sepanjang jalur lintas tengah Sumatera. Mereka hidup menyebar di sekitar Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Juga, Suku Anak Dalam di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Suku Anak Dalam yang terlunta-lunta di area perkebunan sawit dan terkatung-katung di jalan raya lintas tengah antara Sumatera Barat dan Jambi inilah yang menjadi masyarakat adat dampingan Pundi Sumatera. Kelompok sasaran ini berada di luar Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas, tepatnya desa Pulau Lintang di kabupaten Sarolangun; desa Pauh Menang, Pelakarjaya, Sialang dan Pematang Kancil di kabupaten Merangin; desa Dwi Karya Bakti di kabupaten Bungo. Ketiga kabupaten tersebut masuk ke dalam administrasi provinsi Jambi. Kelompok sasaran berikutnya adalah nagari Bonjol, Banai dan Sikabau di kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

Dengan pendekatan yang dinamakan "Sudung", Pundi Sumatera intens melakukan aktivitas pendampingan di sudung yang menjadi pusat aktivitas berbagai rombong Suku Anak Dalam. Rombong Suku Anak Dalam yang didampingi oleh Pundi terdiri dari rombong Nurani, Ngilo, Yudi dan Abas, Ganta, Sikab, Hari dan Badai, juga rombong Marni, Panyiram dan Bujang Rendah.

Pendekatan Sudung ditujukan untuk menciptakan situasi interaktif terutama dalam hal ekonomi (ternak, lahan dan kebun) antara Suku Anak Dalam dengan masyarakat sekitar, terciptanya kepastian hukum dan adat terhadap pengelolaan tanah dan sumber daya alam oleh Suku Anak Dalam, terwujudnya layanan dasar pendidikan dan kesehatan sesuai kondisi Suku Anak Dalam, yang terintegrasi dengan program pemerintah daerah. Sebagai hasilnya, Suku Anak Dalam sepanjang lintas tengah Sumatera ini mendapat pengakuan atas hak-hak dasarnya sebagai warga negara, dapat berinteraksi dengan komunitas lain secara setara, dan mendapatkan layanan sosial sesuai situasi sosial budaya Suku Anak Dalam.

Namun sejak hidup berkampung di desa, warga Suku Anak Dalam sudah tinggal di rumah-rumah yang dibuat oleh pemerintah. Sudung hanya dibuat dan digunakan ketika mereka harus pergi ke hutan.

Pemerintah terus mencoba hadir untuk memenuhi hak warga negara tanpa kecuali. Presiden Joko Widodo meresmikan kawasan permukiman dan lahan untuk Orang Rimba setelah bertemu dengan tetua suku. Ia menjadi Raja Godong kedua -- setelah Raja Godong Gus Dur yang pertama datang ke Jambi untuk mengesahkan Taman Nasional Bukit Dua Belas yang menjadi kawasan dilindungi dan ruang hidup khusus bagi Suku Anak Dalam. Namun, di era Presiden Jokowi, rumah-rumah untuk Orang Rimba banyak ditinggalkan untuk kembali ke hutan, dan alhasil berubah menjadi rumah hantu.

Petugas Dinas Sosial hingga Menteri Sosial terus gigih menawarkan bantuan rumah permanen bagi Orang Rimba – dinamakan program *settlement* sejak 1965. Bantuan ini kurang disambut oleh sebagian

anggota Suku Anak Dalam. Tanpa ada sumber nafkah untuk memberi makan keluarga mereka, warga yang sempat tinggal di rumah permanen kembali ke hutan. Mungkin mereka ingin hutan, bukan rumah.

Orang Rimba lalu berusaha mendaftarkan hutan mereka sebagai tanah ulayat menyusul putusan Mahkamah Konstitusi pada 2013. Melalui putusan itu, harapannya hutan adat dapat dikelola oleh masyarakat adat yang telah menempatinya sejak berabad-abad lalu.

Di tengah kondisi ini, Program Peduli-Pundi berupaya memfasilitasi penyediaan layanan publik, dalam hal ini Kesehatan, bagi komunitas Suku Anak Dalam yang menetap. Beberapa kali kegiatan pengobatan gratis dilakukan, yakni dengan menghadirkan tenaga medis dari rumah sakit dan puskesmas terdekat. Beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bagi komunitas Suku Anak Dalam juga mulai dijajaki. Program peningkatan ekonomi dimulai dengan pengembangan kolam ikan dengan terpal, ternak kambing, dan budidaya tanaman pangan seperti terong, ubi jalar, singkong, cabe, tomat, dan lain-lain. Semua komoditas itu ditanam di sekitar tempat tinggal komunitas. Kaum perempuan di komunitas Suku Anak Dalam sangat antusias menerima bantuan-bantuan tersebut, bahkan yang lebih banyak mengurusi ikan kolam, ternak kambing, dan tanaman sayur-mayur ini adalah kaum perempuan, ibu-ibu, atau induk-induk (mamak-mamak) yang memang punya waktu senggang cukup banyak. Dengan kegiatan ini, diharapkan masyarakat pemanfaat tidak hanya menggantungkan hidupnya dari hewan buruan yang semakin sulit didapat. Bahkan bila memungkinkan, kegiatan-kegiatan itu bisa meningkatkan kesejahteraan.

Ketika anak-anak Rimba mulai mengenal huruf dan angka, mereka lalu berani bercita-cita. Ini pun proses yang tak mudah. Kehadiran anak-anak Rimba di sekolah formal dianggap aneh dan rentan riksakan. Edukasi untuk kedua belah pihak, baik yang tereksklusi dan yang mengeksklusi, menjadi tanggung jawab bersama.

Program Peduli, melalui Pundi Sumatera, menjadi salah satu organisasi yang mengadvokasi kebijakan inklusi sosial oleh negara dan masyarakat lain. Hasilnya, SAD yang semula sangat tertutup, buta huruf, apatis, rasa percaya diri rendah, sulit berinteraksi dengan orang baru, apalagi pemerintah, melalui pendampingan dan pemberdayaan, kini perilakunya secara perlahan berubah. Begitu juga dengan sikap dan stigma negatif dari pihak luar perlahan terkikis. Suku Anak Dalam kini mau dan mampu berbaur, dapat diterima dan dilibatkan dalam berbagai

kegiatan sosial kemasyarakatan. Penerimaan juga muncul dari proses kegiatan ekonomi transaksional seperti jual beli produk dan penerimaan sosial seperti pernikahan, kelahiran dan pemulasaraan kematian.

Cukup melegakan karena pemerintah daerah di beberapa wilayah mulai memberikan perhatian dan komitmennya pada perbaikan kesejahteraan komunitas Suku Anak Dalam, meski porsi dukungan dan komitmen yang secara konkrit tertuang pada rencana kerja dan anggaran masih bersifat terbatas, namun itu jauh lebih baik dari kondisi 2-3 tahun sebelumnya dimana komunitas SAD betul-betul menjadi masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan dan sangat sulit untuk mengakses layanan dasar milik pemerintah.

Persoalan yang dahulu sangat mendasar adalah terkait sulitnya SAD mendapatkan pengakuan sebagai warga negara dalam bentuk administrasi dokumen kependudukan. Berpuluh-puluh tahun lamanya mereka dianggap sebagai warga kelas bawah, yang alien atau ilegal, akibatnya komunitas ini jauh dari haknya untuk mendapatkan program-program bantuan dari pemerintah; komunitas ini pun amat kesulitan untuk mengakses layanan dasar khususnya kesehatan mulai dari puskesmas hingga ke rumah sakit umum daerah. Kalaupun bisa diakses, komunitas ini kerap mendapatkan perlakukan atau pelayanan yang diskriminatif dari petugas. Begitupun dengan layanan dasar pendidikan. Anak-anak dari komunitas ini dahulunya sangat sulit untuk bisa masuk ke sekolah formal. Pihak sekolah akan memberikan seribu satu alasan agar anak-anak dari komunitas SAD ini tidak dapat bersekolah di sekolah yang sama dengan masyarakat umum lainnya. Kondisi tersebut dipersulit karena memang saat itu daerah belum mempunyai cukup perhatian dengan adanya kebijakan-kebijakan khusus yang berpihak pada komunitas tersebut.

Selama periode program, perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada komunitas Suku Anak Dalam merupakan salah satu bagian yang didorong oleh Pundi Sumatera, baik kebijakan yang tertuang dalam rencana kerja masing-masing dinas terkait, kebijakan di tingkat pemerintah daerah kabupaten, propinsi atau yang lebih luas lagi hingga di tingkat nasional. Kebijakan yang dimaksud adalah bagaimana komunitas ini juga mendapat perhatian, dukungan baik secara teknis serta pengalokasian dukungan anggaran pada APBD untuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan, memberikan layanan dasar serta meningkatkan kualitas layanan serta fasilitas pada komunitas tersebut.

Upaya mendorong perubahan kebijakan yang lebih responsif terhadap Suku Anak Dalam dilakukan dengan:

Secara intens advokasi dilakukan dalam bentuk membangun komunikasi serta koordinasi ke dinas terkait baik secara formal maupun informal, merancang program kegiatan bersama, lalu mulai memberikan usulan-usulan untuk program kerja rutin dinas yang menyangkut dengan pemberdayaan terhadap komunitas SAD.

Membangun hubungan baik secara personal dengan pejabat daerah, khususnya pada masing-masing dinas terkait yang terbukti lebih efektif untuk memberikan input pada perencanaan program-program dinas. Hubungan baik secara personal ini dibangun pada level pimpinan atau paling tidak pengambil kebijakan di instansi tersebut.

Mengajak perwakilan dari dinas ataupun pejabat daerah untuk melakukan kunjungan kerja ke lokasi pemukiman SAD untuk memberikan pemahaman yang berbeda pada level pengambil kebijakan. Dengan melihat realitas lapangan, paling tidak program ataupun kegiatan yang diperuntukan bagi SAD betul-betul berupa program yang dibutuhkan, sesuai dan tepat sasaran karena lahir dari proses 'melihat' dan 'mendengar' langsung kebutuhan dan kondisi komunitas.

Hasilnya, dalam durasi program, Peduli sudah memfasilitasi sebanyak 95 dokumen KK, 210 KTP, 162 Akta Kelahiran, 33 KIA, 3 KIP, 46 BPJS/KIS, 51 KK penerima BLT, 21 KK penerima PKH, 21 KK penerima BPNT, 12 KK/42 jiwa penerima KKS/E-Waroeng, dan 88 KK penerima BST Covid-19. Ini semua menjadi bukti terbukanya akses SAD pada berbagai layanan dasar dan program bantuan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan dari pemerintah.

Pendampingan memperkenalkan dan meningkatkan keterampilan teknis SAD dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan anyaman untuk *survive* dan memiliki sumber-sumber ekonomi lain. Ternak kambing berkembang baik di Rombong Ngilo dan Rombong Nurani, bahkan sudah proses jual beli, bukan hanya untuk konsumsi sendiri. Produk anyaman mulai masuk tahap pemasaran di Rombong Yudi. Budidaya ikan berkembang hingga pemasaran dan membuat produk olahan di Rombong Hari. Bertani palawija berhasil di Rombong Hari dan Abas.

Kini Rombong Ngilo, Yudi, Abas dan Ganta aktif mengikuti kebaktian di gereja desa. Ibu hamil dan balita di Pelakarjaya, Sialang dan Dwi Karya Bakti, rutin mengikuti posyandu. Rombong SAD kerap dilibatkan dalam rewang penyiapan pesta, diundang pada perayaan pesta, diajak bergotong royong, meronda siskamling, dan didengarkan pendapatnya dalam rapat-rapat sosialisasi. Komunitas SAD sudah mampu berkoordinasi dengan pemerintah, mengutarakan pendapat, dan berdialog aktif untuk memperjuangkan kepentingan komunitasnya.

Tidak berhenti di situ, mereka aktif menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden, anggota legislatif, kepala daerah, kepala desa, bahkan kini dua temenggung SAD menjadi perangkat desa.

Namun demikian, warga Suku Anak Dalam di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, masih menemui kesulitan mengurus administrasi kependudukan. Hal itu membuat mereka tidak dapat mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

PEMBANGUNAN RUMAH PINTAR
RUMAH PINTAR

Kini tercatat ada 23 keluarga atau 74 jiwa warga Suku Anak Dalam yang mendiami hutan Kabupaten Dharmasraya. Mereka tersebar di Hutan Bulangan, Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, dan di Hutan Jorong Padang Lalang, Nagari Banai, Kecamatan IX Koto. Semua warga Suku Anak Dalam di Dharmasraya juga tinggal di pondok. Lima pondok di Hutan Bulangan berada sekitar 90 kilometer dari jalur lintas Sumatera. Adapun di Hutan Padang Lalang ada dua pondok, yang berada 123 km dari jalan lintas Sumatera. Mereka hidup dengan berburu babi atau menjual tanaman hutan seperti jernang.

Keberadaan Suku Anak Dalam memang diakui oleh pemerintah nagari yang bertanggung jawab di wilayah tempat tinggal mereka. Tetapi, secara administrasi, mereka dianggap bukan penduduk nagari tersebut. Akibatnya, ketika mengurus kartu tanda penduduk, mereka ditolak.

Pencatatan sipil dalam administrasi pemerintah minimal ada rekomendasi dari wali nagari. Tetapi, wali nagari yang bertanggung jawab terhadap wilayah yang ditempati masyarakat Suku Anak Dalam tidak mau memberikan rekomendasi, di antaranya karena perbedaan kepercayaan.

Karena tidak memiliki kartu tanda penduduk, jaminan atau asuransi kesehatan seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau sejenisnya tidak didapatkan. Ketika mereka sakit atau melahirkan memang langsung dibawa ke Rumah Sakit Sungai Dareh. Tapi, biaya untuk berobat sulit diganti sehingga para karyawan rumah sakit pernah mengedarkan kotak donasi untuk membantu biaya persalinan salah seorang warga Suku Anak Dalam. Karena tidak ada pengakuan secara administrasi, warga Suku Anak Dalam juga tidak masuk sekolah formal. Padahal, sebagian anak-anak suku itu sudah masuk usia sekolah. Sejauh ini yang dapat dilakukan adalah pengenalan angka dan huruf melalui sekolah lapangan.

Selain akses terhadap layanan dasar, warga Suku Anak Dalam juga kesulitan pangan. Jika ada bantuan seperti beras diambil dari sisa program kebencanaan.

Untunglah, akhirnya ada terobosan untuk mencegah kebuntuan berupa hibah lahan dari ninik mamak di wilayah Nagari Bonjol seluas 18,81 hektar. Selanjutnya dilakukan pembentukan Tim Penyusun RENSTRA Pemberdayaan SAD 2017 dengan SK Bupati No.189.1/327/KPTS-BUP/2017 dan Dokumen Renstra SAD Kabupaten Dharmasraya tahun 2017-2023. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen terhadap inklusi dan partisipasi Suku Anak Dalam. Program pemerintah diarahkan untuk pemenuhan hak-hak dasar, pengakuan eksistensi, dan keberlanjutan Suku Anak Dalam, terutama pada instansi terkait, seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan catatan sipil.

Ke depan, Pundi Sumatera mengajak berbagai mitra pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah, terus fokus pada pengembangan ekonomi masyarakat dampingan. Produk lidi sawit, ikan asap, ternak kambing adalah sebagian peluang usaha yang masih sangat berpotensi untuk terus dikembangkan. Pemberdayaan kolaboratif dengan dukungan desa, kecamatan, kabupaten dirasa cukup kuat di Kabupaten Bungo-Merangin-Sarolangun dan Dharmasraya untuk menjadi modal sosial dalam pengembangan Desa Inklusi dan Wisata Budaya.

SURAT PENYERAHAN TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

N a m a : Surono
U m u r : 45 th
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sek Des / pelaksana harian P.J.S Kepala Desa Pauh menang.

Dengan ini kami memberikan /menyerahkan sebidang tanah restant yang beru - kuran sebagai berikut :
Panjang 300 meter dan lebar 100 meter dengan batas - batas
Sebelah Utara : Jalan poros ladang .
Sebelah Barat : Tanah saudara Martono
Sebelah Selatan : Tanh saudara Pardi
Sebelah Timur : Tanah Saudara Isa (karet kampung)
Tanah tersebut di atas diberikan kepada / di pakai untuk perumahan Suku Anak Dalam yang sudah mau di masyarakatkan .
Dalam hal ini sebagai penanggung jawab dan membina , saudara yang tersebut di bawah ini :

N a m a : R. Wiyono Saputra / Nano
U m u r : 43 tahun .
A g a m a : Kristen Protestan .
Pekerjaan : Swasta / Pembina Suku Anak Dalam.
A l a m a t : RT. 07 RW 03 Desa Pauh Menang.

Demikian surat pernyataan / penyerahan tanah ini kami buat agar bisa terlaksana program pengentasan kemiskinan terhadap Suku Anak Dalam .

Desa Pauh menang 1 Desember 1998
Yang menyerahkan
Sek Des pelaksana harian P.J.S.
Desa Pauh menang

Yang menerima
Penbina Suku Anak Dalam

(R.Wiyono Saputra / Nano)

(S U R O N O)

Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Masyarakat Suku Anak Dalam telah, tengah dan terus bertransformasi. Program Peduli percaya bahwa pasca pendampingan, masyarakat Suku Anak Dalam mempunyai pilihan. Mereka mampu merespon "*halom nio la berubah*", perubahan alam semesta ruang hidup mereka, dengan pilihan sadar. Mereka berdaya untuk memulihkan "*nguaran*", ruang hidup yang kian menciut, kendati sadar mereka tak mungkin merebut dan mengembalikannya utuh ke masa sebelum tersentuh. Menuntut pembatalan izin pembukaan hutan secara total adalah sesuatu yang mustahil. Karenanya, yang paling mungkin, mengajukan permohonan diwujudkannya hutan kemitraan kepada "*rajo-rajo*", yaitu pihak otoritas baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Masyarakat pemanfaat menitip pesan dan harapannya pada Program Peduli. Mereka ingin mimpi sebidang lahan hutan bagi komunitas Suku Anak Dalam menjadi nyata.

Pengetahuan Suku Anak Dalam yang terakumulasi dari generasi ke generasi janganlah hilang karena hilangnya hutan yang menjadi penyangga hidup mereka. Pengetahuan itu dari mulai jenis dan komposisi tanaman obat hingga teknik meracik obat berbahan dasar tanaman yang tumbuh di sekitar hutan. Akar marabin adalah obat untuk menyembuhkan batuk. Sekeduduk untuk menghentikan pendarahan. Kayu selusuh untuk memperlancar persalinan. Sengkrobong untuk menghentikan diare. Akar kepor untuk mengobati sesak nafas. Batang kareh untuk menyembuhkan sakit kepala dibarengi dengan

muntah-muntah. Itu hanya sekelumit dari luasnya pengetahuan mereka. Jauh sebelum komunitas Suku Anak Dalam mengenal Puskesmas, rumah sakit, atau obat-obatan ringan yang tersedia di warung, saat anggota rombong sakit, mereka selalu menggunakan tanaman obat sebagai pertolongan pertama.

Tradisi gotong royong, jaga sesama, juga tak asing bagi komunitas Suku Anak Dalam si Orang Rimba. Siapa pun yang beruntung mendapatkan hewan buruan, maka hewan tersebut akan dibagi rata ke semua anggota rombong. Begitu juga dengan kepemilikan bahan makanan pokok seperti beras, secara otomatis akan dikonsumsi bersama-sama. Komunitas yang dianggap primitif dan bodoh ini perlu menjadi teladan bagi masyarakat kota yang membanggakan dirinya maju tapi sudah tak lagi saling bantu, bahkan masa bodoh melihat orang lain serba kekurangan.

Perbedaan adalah berkah. Orang Rimba-Suku Anak Dalam memang berbeda gaya hidup dengan kebanyakan orang kota yang berbaju dan berdasi. Jangan sampai karena suka berbaju minim dan terbuka, lalu dipandang berbeda dan distigma. Sama seperti 'orang terang' yang punya kelebihan, Orang Rimba memiliki keunggulan berupa kearifan memahami hukum alam, memiliki kemampuan membaca hutan, memiliki kesediaan memperlakukan ruang hidup dengan penuh kesyukuran sehingga lahir ungkapan, "alam terbentang jadi guru". Itulah kekayaan intelektual Orang Rimba.

Harapannya, jangan sampai Orang Rimba-Suku Anak Dalam ini berubah karena terpaksa, termarjinalkan karena prasangka, dan lalu sama sekali tak berdaya untuk membuat pilihan terbaik bagi dirinya dan sukunya.

Tetapi keyakinan ini pun tak sepenuhnya melegakan. Keadaan ini masih menyisakan tanya, jika Orang Rimba tak lagi berburu dan meramu, terasing dari habitat asli mereka, siapakah yang benar-benar akan menjaga rimba dan amalan nenek moyang? Hanya warga yang percaya diri dan peduli yang dapat membebaskan dirinya dari belenggu isolasi dan diskriminasi. Suku Anak Dalam adalah penjaga rimba yang berdaya dan digdaya.

BAB 3

RITUAL ADAT SUKU SAWANG GANTONG: BERKAH DI DARAT, SELAMAT DI LAUT

(LPMP Air Mata Air)

INI CERITA MENGENAI upaya merawat eksistensi sebuah suku minoritas dan ikhtiar mengangkat harkat martabat serta taraf kehidupan masyarakat marjinal Suku Sawang Gantong di Belitung Timur. Program Peduli menggandeng Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Penelitian Air Mata Air (AMAIR), sebuah CSO yang berisikan kalangan akademisi muda Belitung Timur, untuk melaksanakan program yang ditujukan untuk mendorong inklusi sosial khusus pada suku yang nyaris punah di Kepulauan Bangka Belitung melalui peningkatan akses layanan dasar, penerimaan sosial dan kebijakan afirmasi untuk perlindungan suku asli. Fokus utama program bertemakan penyetaraan pendidikan formal bagi Masyarakat Adat Sawang.

Dengan meningkatnya motivasi, kepercayaan diri dan kemampuan Masyarakat Adat Sawang, diharapkan secara perlahan, stigma negative terkait 'Urang Sekak atau Urang Laut' akan berangsur hilang dan terjadi proses inklusi social terhadap Masyarakat Adat Sawang. Inklusi sosial yang ideal terjadi jika masyarakat adat dan masyarakat non adat Suku Sawang di sekitarnya mengalami pembauran yang setara, positif, dan produktif.

Masyarakat Suku Sawang di Kabupaten Belitung Timur ini memang biasa dijuluki Orang Laut atau Orang *Sekak*. Harap dicatat, sekak yang *ini bukan istilah permainan catur yang artinya Suku Sawang suka menyekak lawan main di permainan olah otak. Sekak di sini* secara harfiah berarti orang yang berbicara dengan suara keras. Sumber lain mengatakan bahwa sekak diambil dari kata "nyekak". Menurut para sesepuh, kata tersebut merupakan sebuah istilah untuk menyebutkan kebiasaan Orang Laut yang suka mengupas kerang kimak (nyekak) dan memakan isinya mentah-mentah. Kebiasaan ini dipandang primitive

karena memakan hewan laut tanpa dimasak sampai matang lengkap dengan bumbu terlebih dulu.

Suku Sawang mengetahui makna kata *sekak* dan menilai hal tersebut sebagai sebuah ejekan dan penghinaan. Mereka sama sekali tidak menyukai panggilan tersebut, dari dulu sampai sekarang.

Munculnya stigma dan diskriminasi semacam ini semakin memperlebar jurang perbedaan antara Orang Laut dan masyarakat umum. Akibatnya, pada era sebelum tahun 60-an Suku Sawang Gantong bertahan menjadi sebuah komunitas yang mengisolasi diri dari pergaulan luas dan membatasi interaksi hanya dengan sesamanya.

Namun entah siapa yang pertama kali memulai, Suku Sawang Gantong kemudian berangsur-angsur berbaur dengan masyarakat di sekitarnya. Kuat dugaan bahwa klub sepak bola Suku Sawang Gantong (SSG FC) adalah salah satu kanal bagi Suku Sawang di Kecamatan Gantong untuk mendekatkan diri pada masyarakat luas di Pulau Belitung. Kekuatan fisik lelaki Suku Sawang menjadikan mereka pemain sepak bola yang disegani sekaligus disenangi. Secara bertahap, pesepak bola Suku Sawang juga mulai diajak untuk bermain bersama di klub dari luar komunitas mereka. Bahkan, generasi Suku Sawang sekarang sudah ikut memperkuat kesebelasan persatuan sepak bola Belitung Timur (Beltim FC) di berbagai ajang sepak bola di tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun wilayah Sumatera, baik pertandingan persahabatan atau kompetisi penuh memperebutkan hadiah dan prestise tertentu.

Nama Suku Sawang tampaknya semakin menguat dan kondang pada abad ke-21 ketika nama tersebut diperkenalkan oleh novelis Andrea Hirata pada tahun 2005 dalam buku fiksi "*Laskar Pelangi*" yang sejatinya merupakan biografi komunitas Melayu di Bangka Belitung. Andrea Hirata memuat satu bab khusus mengenai Orang-Orang Sawang. Sawang sendiri dalam bahasa aslinya memiliki arti luas, atau suasana yang mencekam. Saat Orang Laut melihat samudera yang luas dan bergemuruh, keadaan itu yang mereka sebut 'Sawang'. Orang-Orang Sawang adalah mereka yang berani menghadapi samudera mencekam nan penuh kejutan tak terduga di lautan luas dan dalam. Kisah Orang-Orang Sawang dalam karya Andrea Hirata ini menyiratkan hubungan antara komunitas Melayu dan Suku Sawang di Pulau Belitung sudah berlangsung sejak lama.

Orang Laut disebut dengan nama berbeda-beda di berbagai literature dari masa ke masa. Secara garis besar sebagai berikut:

- 1800an Siekapas, Orang Sicca, Orang Sikka, Orang-Sekah, Orang-Laut, Orang Sekah, Orang Laut, Sekkahs, Sekka
- 1900an SukuLaut, Suku Ameng Sewang, Suku Ameng Sawang, Orang Sekak, Manih Bajau
- 2000an Suku Laut, Orang Sawang, Suku Sawang

Orang Laut di Pulau Belitung sekarang senang menamai dirinya dengan sebutan Suku Sawang. Selebihnya Suku Sawang Gantong menambahkan kata yang merujuk pada wilayah domisili. Contohnya seperti Suku Sawang Gantong, Suku Sawang Manggar, Suku Sawang Jalan Baru, dan Suku Sawang Seberang. Suku Sawang Gantong berpusat di RT 4 Dusun Seberang, Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Suku Sawang Manggar di Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Suku Sawang Seberang di Desa Juru Seberang,

Kecamatan Tanjung pandan, Kabupaten Belitung, dan Suku Sawang Jalan Baru di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Selebihnya sebagian warga Suku Sawang berbaur di dalam lingkungan masyarakat umum di berbagai desa di Pulau Belitung.

Menurut Asin Bahari (1987), sepanjang sejarah manusia, belum ada yang berhasil memastikan asal usul Suku Laut. Asal usul mereka masih simpang siur. Satu sumber mengatakan, leluhur Suku Sawang konon berasal dari Johor, lalu menyebar kebanyak pulau. Suku Sawang tidak pernah menetap terlalu lama di darat. Anak-anak Suku Sawang dilahirkan di laut, begitu lahir bayinya langsung dicelupkan kelaut agar kenal dengan sang pemberi kehidupan. Suku Sawang percaya, hidup dan mati mereka diberikan oleh laut. Sekarang sudah banyak orang Sawang yang tinggal di darat, ada yang jadi tentara, pedagang, sudah jarang yang berlama-lama tahan di laut.

Satu karakteristik Suku Laut yang menjadi konsensus para sejarawan baik dari luar maupun dalam negeri, Suku Laut atau Suku Sawang sejak dulu terkenal memiliki fisik yang kuat dan postur yang besar, serta sangat andal di lautan. Dokumentasi tertulis pertama tentang Orang Laut disebut-sebut muncul pada tahun 1668. Orang Laut telah berabad-abad lamanya menghuni laut dan pulau-pulau kecil di sekitar Bangka dan Belitung.

Mereka hidup terpencar dalam kelompok-kelompok kecil dan terkonsentrasi di "Kampung Laut" RT. 04 Dusun Seberang Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Hidup di komplek berletter U, di atas tanah yang bukan milik mereka.

Sebagian besar sudah tidak lagi mengamalkan adat budaya nenek moyang mereka yang pernah jaya di laut. Jumlah suku ini juga terus menyusut dan nyaris punah, yaitu tersisa 210 jiwa atau 68 Kepala Keluarga saja berdasarkan hasil *assessment* LPMP Amair tahun 2018. Padahal pada tahun 1851, *Staat Van De Bevolking Op Billiton* menyebutkan bahwa populasi komunitas suku ini ada 1.654 jiwa. Dari jumlah yang tersisa tadi hanya 20 persen saja yang masih menguasai bahasa Sawang. Setelah menetap di darat dan menjadi buruh pabrik timah milik Belanda di pulau Belitung yang bersalin rupa menjadi PT Timah di era pemerintahan Republik Indonesia, mereka mengalami banyak sekali perubahan baik secara social maupun budaya.

Perkampungan Orang Laut asli hanya tersisa di beberapa tempat di Bangka Belitung. Di Bangka, Orang Laut tercatat tinggal di Kuto Panji, Jebu Laut, Kudinpar, Lepar, dan Pongok. Sementara di Belitung, Orang Laut tinggal di Juru Seberang, Kampung Baru, dan Gantung.

Meski sudah empat generasi tinggal di daratan dan tidak jauh dari perkotaan, sebagian besar warga Suku Sawang tidak bersekolah. Menurut data Amair tahun 2016, dari 130 penduduk Desa Selinsing, 74 orang putus sekolah (berhenti sebelum lulus, tidak berijazah), 24 orang tidak sekolah (sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal), dan sisanya masih/belum usia sekolah. Adapun kepemilikan ijazah terbanyak adalah SD 32 orang, SMP 19 orang dan SMA 7 orang. Dengan rendahnya tingkat pendidikan mereka, tak heran jika belum banyak warga Suku Sawang yang menjadi pejabat publik di pemerintahan maupun sukses di bidang wiraswasta. Sampai saat ini hanya tercatat satu

TERSEDEK

orang saja yang bekerja menjadi pegawai negeri sipil/aparat sipil negara di Kabupaten Belitung.

Untuk mempertahankan hidup, mayoritas Suku Sawang bekerja menjadi buruh kasar, antara lain menjadi penjahit karung timah, penyelam timah yang bolak balik menyelam kedalam laut untuk mengumpulkan timah, pemotong besi bangkai kapal yang karam di laut, tukang pikul karung timah, serta kerja serabutan lainnya dengan upah rendah.

Karena terpisah dari laut, mereka otomatis tercerabut dari akar budaya leluhur dan kehilangan keahlian utamanya sebagai nelayan/pelaut. Mereka semakin terjepit di tengah-tengah peradaban dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Beberapa stigma yang sering dilekatkan kepada suku ini antara lain, dianggap sebagai orang bodoh, rakus, tidak mempunyai etika, miskin, percaya klenik, primitif dan biang kriminal di kampung. Secara kuantitas dan kualitas, eksistensi mereka terancam punah. Populasi yang kian merosot disertai semakin sedikitnya orang *Suku Sawang* yang paham adat istiadat sendiri. Generasi mudanya kini tidak lagi berbahasa ibu.

Kalau dirunut dari catatan sejarah yang ada, reputasi Suku Sawang cukup harum, tidak hanya di Sumatera namun juga Asia. Mereka adalah satu dari tiga kelompok besar suku laut di wilayah perairan Asia Tenggara yang sangat diperhitungkan, selain Suku Bajo di perairan Sulawesi-Nusa Tenggara dan suku Moken di perairan Myanmar.

Suku Sawang dulunya dikenal sebagai ahli laut. Dahulu kala, mereka menduduki posisi bergengsi sebagai pemandu kapal-kapal yang melewati perairan Bangka Belitung. Pesisir Babel yang berlumpur di masa itu membuat kapal membutuhkan peran juru seberang yang menguasai perairan setempat. Selain sebagai pemandu kapal, kebanyakan Orang Laut berprofesi sebagai nelayan.

Sekalipun bukan lagi masyarakat nelayan, tapi Suku Sawang Gantong masih menyimpan jejak kebudayaan bahari. Jejak itu tampak pada pelaksanaan tradisi yang dikenal dengan nama Buang Jong, sebuah tradisi tahunan yang bertujuan untuk menghormati leluhur dan keluarga yang telah mendahului mereka. Selain itu Buang Jong juga digunakan sebagai media penghormatan pada penguasa laut agar memberikan keselamatan bagi para nelayan di lautan.

Setiap tahun Suku Sawang melakukan upacara adat selamatan laut, perayaan ini diadakan sekali setahun untuk setiap "Kampung Laut". Suku Sawang menetap di Tanjung Pandan dan Gantung, sehingga acara ini diadakan dua kali di dua tempat berbeda setiap tahunnya. Satu kali di Tanjung Pandan dan satu kali di Kecamatan Gantung. *Buang Jong* atau *Muang Jong*, terdiri dari kata *Muang* yang berarti buang, dan *Jong* yaitu perahu.

Merujuk pada arah mata angin, Buang Jong akan dilakukan di Tanjung Pandan saat angin bertiup kearah selatan di bulan Agustus, dan dilakukan di bulan Februari saat angin bertiup kearah barat di Kecamatan Gantung. Semua itu diperhitungkan agar replika perahu yang berisi persembahan dapat mengarungi lautan. Namun tidak ada tanggal pasti penyelenggaraan Buang Jong. Dukun laut mereka menghindari hari-hari raya besar dan memperhitungkan hari-hari baik.

Upacara adat Buang Jong tidak melulu hanya prosesi membuang perahu namun juga ada rangkaian tarian dan drama yang mengiringinya. Perayaan ini adalah salah satu perayaan yang paling ditunggu-tunggu tidak hanya bagi Orang Laut Sawang Gantong, namun juga seluruh masyarakat Bangka Belitung.

Secara fisik, Suku Sawang sangat mudah dikenali karena perawakannya yang mencolok dan tampak berbeda dari kebanyakan penduduk lainnya di Bangka Belitung. Umumnya mereka berkulit hitam, postur tinggi besar, rambut keriting. Karena kondisinya tersebut mereka kerap mendapat perlakuan diskriminatif dan ditolak dalam pergaulan sosial. Apabila membuat hajatan, para tamu undangan yang hadir enggan memakan atau meminum hidangan yang disajikan oleh warga Suku Sawang.

Meski sudah 74 tahun lebih Indonesia merdeka, sangat sedikit perhatian pemerintah kepada suku ini. Sehingga nyaris tidak ada kebijakan dan layanan dasar yang dapat diakses secara khusus oleh Suku Sawang, terutama karena sebelum intervensi program, lebih dari 70 persen warga tidak memiliki dokumen administrasi kependuduk. Walaupun ada yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun partisipasi dan kesadaran Suku Sawang untuk mengakses layanan public sangat rendah. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mereka juga tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan program di level desa, dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat adat, selain dipanen suaranya selama pelaksanaan pemilihan umum.

Meskipun sesekali budaya Suku Sawang seperti *Muang Jong* dan *Campak Laut* ditampilkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Timur pada *event* pariwisata, namun hanya ditampilkan dalam artifisial saja tanpa disertai upaya pemberdayaan. Demikian juga publikasi mengenai nasib Suku Sawang sangat terbatas sehingga sedikit pihak yang bersedia membela kepentingan dan eksistensi mereka. Padahal zaman telah membuktikan bahwa Suku Sawang dapat diandalkan untuk menyukseskan berbagai agenda besar di sekitar mereka, sejak dulu hingga sekarang. Suku Sawang mampu menjadi angkatan laut dalam perlawanan terhadap aksi kolonialisme barat di masa kerajaan.

Mereka menjadikan roda pengelolaan timah di Pulau Belitung menjadi sempurna di masa Belanda hingga orde baru sehingga negara mendapatkan devisa yang bias diandalkan. Karena itu, seyogyanya Suku Sawang juga bisa berada di posisi yang strategis untuk mendukung agenda besar Pulau Belitung pada masa kini, terutama di sector pariwisata. Kehidupan Orang Sawang menjadi salah satu destinasi wisata yang memperkaya batin pengunjung tentang keanekaragaman budaya negeri ini.

Tentunya untuk mencapai hal ini dibutuhkan pemahaman mendalam para pemangku kepentingan tentang jiwa, karakter dan sejarah Suku Sawang.

Bantuan dari pemerintah selama ini disikapi dengan sangat hati-hati. Dua kali pemerintah mencoba

mengubah jati diri Orang Laut menjadi orang darat. Pada dekade 1970-an, pemerintah memukimkan Orang Sawang dari Gantung di "Kampung Laut". Alhasil, sekarang nyaris tidak ada Orang Sawang di kampung itu yang masih menggantungkan hiduphanya dari laut. Pada 1985, pemerintah kembali mencoba memukimkan Orang Sawang di Juru Seberang. Sebanyak 20 rumah semi-permanen dibangun dan sebagian masih dipakai hingga kini. Mereka diminta menyerap cara-cara hidup orang Melayu yang budayanya lebih berbasis daratan.

Intervensi Program Peduli pun dilakukan secara hati-hati, supaya program pendampingan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemanfaat program yang merupakan Orang Laut yang pada dasarnya lekat berbudaya bahari.

Setelah melalui proses pendampingan untuk mengembalikan harkat derajat dan rasa percaya diri Suku Sawang, kini mereka tak segan berhubungan langsung dengan pihak pemerintah dan kalangan masyarakat lain. Setidaknya ada tiga forum dimana Suku Sawang berinteraksi dan berpartisipasi secara signifikan, yaitu forum persatuan paguyuban masyarakat adat di Kabupaten Belitung Tmur. Anggota Suku Sawang terlibat aktif sejak rapat persiapan "Festival Kebhinekaan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019" hingga pelaksanaannya. Berikutnya, forum musyawarah dusun untuk pemilihan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selinsing, Terakhir, Suku Sawang bergabung di forum pertemuan persatuan dukun se-Belitung Timur, pada acara "Ngembarik De Belitong Timor" tahun 2019.

Bersama Program Peduli, tercatat beberapa capaian yang terkait akses layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, perumahan, dan pariwisata. Setidaknya 17 orang warga Suku Sawang menjalani proses belajar dan mengenyam pendidikan formal, difasilitasi melalui program kejar paket B (sekolah penyetaraan SMP). Warga didampingi mulai dari tahap proses belajar sampai ketahap ikut serta pada Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional Berbasis Komputer. Pada Agustus 2019, sebanyak 17 orang (7 di antaranya Suku Sawang) dinyatakan lulus dan dapat memiliki ijazah kelulusan sekolah menengah pertama.

Capaian yang terkait dengan penerimaan social antara lain semakin diakuinya eksistensi Suku Sawang baik oleh warga sekitar maupun pemerintah daerah. Dalam satu tahun terakhir, Sanggar Seni Ketimang Burong sering diundang untuk tampil pada acara di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Pengurus sanggar maupun tokoh masyarakat Suku Sawang Gantong sering dilibatkan dalam forum rapat dan acara seremonial di tingkat desa, kecamatan hingga kabupten.

Warga Pulau Belitung adalah potret konsistensi kearifan local untuk menjaga kelestarian alam yang lambat laun digerus oleh praktik pertambangan timah di laut. Mereka secara umum menolak beroperasinya kapal isap timah. Bahkan, beberapa waktu lalu, masyarakat mendemo pejabat setempat Karena mendengar ada pemberian izin bagi kapal isap timah di perairan Belitung. Walhasil, hingga kini, perairan Belitung aman dari eksploitasi timah di lautan yang mengganggu ekosistem laut. Warga mengandalkan perikanan dan wisata sebagai sumber pendapatan. Ikon sebagai "Negeri Laskar Pelangi" dimanfaatkan betul oleh warga Belitung yang mencoba menjual keindahan pantai dan keberagaman

kehidupan masyarakat Melayu dan Tionghoa yang digambarkan oleh novelis Andrea Hirata di Kecamatan Gantung, Belitung Timur. Warga Pulau Bangka juga banyak yang tidak sekadar menggantungkan hidup dari bisnis timah, terutama kapal isap timah yang notabene dikuasai segelintir pengusaha besar dan bermitra dengan oknum pejabat daerah dan pusat.

Suku sawang adalah sebuah antropologi hidup yang begitu nyata. Sayangnya saat ini tidak banyak Suku Sawang yang mengenal asal-usul asli mereka. Bahkan telah jarang yang memakai bahasa Sawang, banyak dari mereka telah berakulturasi dengan kebudayaan Melayu. Di kampung laut Kecamatan Gantung, mungkin kurang dari 10 orang yang masih berbicara bahasa Sawang.

Suku Sawang memendam impian untuk bisa tinggal di tepian pantai Gusong Cine, tapi lokasi itu berada di luar wilayah administrasi desa mereka saat ini. Pilihan lainnya Pantai Mudong, tapi lokasinya masuk dalam kawasan hutan lindung. Walau belum tentu terwujud, tapi setidaknya mimpi ini menjadi indikasi bahwa generasi Suku Sawang Gantong masa kini masih menyimpan jiwa asli mereka sebagai Orang Laut. Sekalipun sudah lama tinggal di daratan, mereka tetaplah Orang Laut yang senantiasa merindukan lautan. Dengan rutin mengirimkan sesajen di dalam replica perahu kelaut, ini menyimbolkan harapan supaya mereka selalu mendapat berkah di darat dan senantiasa selamat di laut.

Mengingat nenek moyang orang Indonesia konon adalah seorang pelaut, seharusnya suku asli yang lekat berbudaya laut terus diberikan kesempatan untuk tetap eksis sebagai Orang Laut.

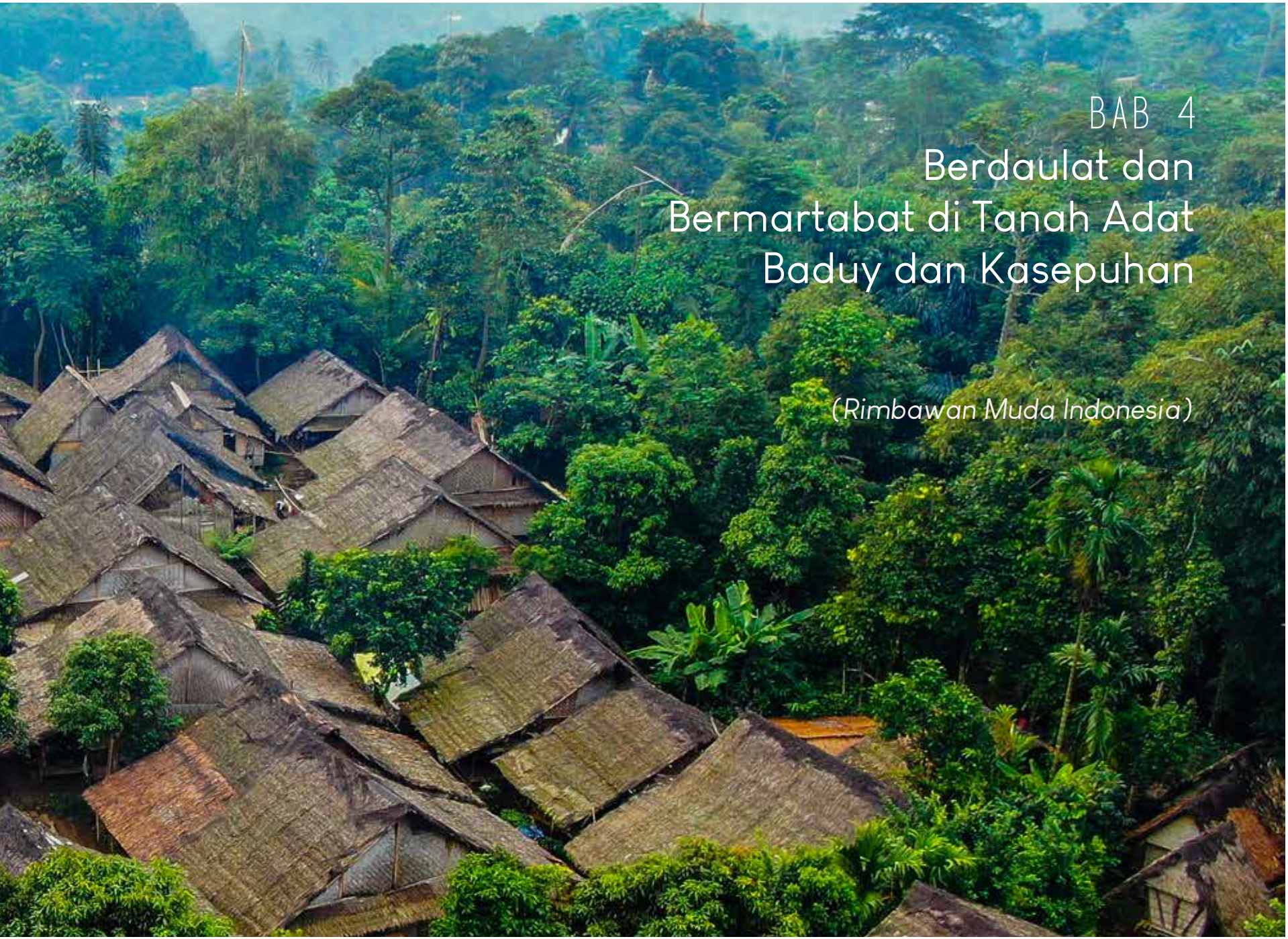

BAB 4
Berdaulat dan Bermartabat di Tanah Adat Baduy dan Kasepuhan

(Rimbawan Muda Indonesia)

MASYARAKAT ADAT ATAUPUN kelompok penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kerap kali mengalami kekerasan, pengabaian hak berkebudayaan, dan hak kewarganegaraan. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada mereka. Program Peduli, melalui Rimbawan Muda Indonesia (RMI), turut serta mempromosikan masyarakat yang damai dan

bebas mengekspresikan identitasnya dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, mendorong pemenuhan akses layanan dasar yang adil bagi semua, dan mendukung kelembagaan adat yang efektif, produktif, inklusif dan partisipatif.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat sekitar 190 organisasi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 254 orang penyuluh kepercayaan, dan 2.233 komunitas masyarakat adat yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Di antara data kementerian yang memiliki direktorat khusus untuk menangani urusan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat, terselip masyarakat adat Baduy dan Kasepuhan dengan kepercayaan Sunda Wiwitan yang masih dijaga kuat.

Mereka teguh memelihara hubungan yang harmonis dengan alam. Peran kelembagaan adat yang kuat, isolasi geografis, dan modal sosial budaya merupakan faktor-faktor yang mendukung keteguhan itu. Mereka tegar menjalani keyakinan dan menaati aturan yang telah digariskan dan diwariskan oleh *karuhun* (para leluhur/nenek moyang). Ketegaran itu perlu mendapat dukungan.

Lebak, Banten menjadi 'rumah' bagi masyarakat adat Baduy dan Kasepuhan jauh sebelum era kemerdekaan Republik Indonesia. Sumber penghidupan masyarakat adat Kasepuhan dan Baduy sangat bergantung pada pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya hutan, yang kondisinya relatif lebih terjaga dibanding area hutan lainnya di pulau Jawa.

Mereka akrab dengan konsep pengelolaan hutan yang lestari berkelanjutan, termasuk pengaturan area hutan menjadi *Leuweung Kolot/Tutupan* (Hutan Lindung), *Leuweung Titipan/Cadangan* (Hutan Produksi Terbatas), dan *Leuweung Cawisan/Garapan* (Kawasan Pemanfaatan).

Masyarakat adat Kasepuhan menerangkan bahwa *leuweung tutupan* adalah kawasan hutan yang tidak boleh diganggu, karena di kawasan tersebut terdapat sumber mata air. *Leuweung*

titipan adalah hutan yang di dalamnya terdapat lokasi yang dianggap suci, ditandai misalnya dengan adanya bangunan-bangunan bersejarah. Bagian hutan ini dicadangkan oleh masyarakat untuk mengantisipasi pertumbuhan di masa depan, sedangkan *leuweung garapan* merupakan kawasan yang di dalamnya terdapat sawah, kebun, serta perkampungan (*lembur).*

Dalam hal filosofi budaya, terdapat beberapa pepatah yang dipercayai oleh masyarakat adat di Lebak yang berhubungan dengan kearifan lokal dalam menata dan mengelola sumber daya alamnya.

'Gunung teu meunang dilebur, leuweung teu meunang diruksak, lebak kudu diriksa, sasaka ulah diobah', (gunung tidak boleh dihancurkan, hutan tidak boleh dirusak, lembah harus dijaga, pusaka terus dipelihara). Pepatah ini menyiratkan sistem pengelolaan sumber daya alam mengikuti kesadaran dan pemahaman bahwa manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem alam. Karena menjadi satu kesatuan utuh, jika sumber daya alam rusak atau dirusak, maka kehidupan manusia akan binasa. Pepatah lainnya adalah *'alam panyangga kahirupan, supaya hurip'*, (alamlah penyangga kehidupan supaya manusia bisa bertahan hidup). Alam berupa hutan dan air adalah penyangga kehidupan yang harus dijaga supaya hidup anak cucu selamat di dunia hingga akhirat.

Masyarakat adat meyakini sepenih hati ada kekuatan supranatural yang ikut menjaga *leuweung* mereka. Mereka percaya jika manusia merusak *leuweung* maka mereka akan tertimpa murka alam dan kemalangan tak terkira, atau sering diistilahkan *kebendon*. Penggundulan hutan di wilayah adat (*wewengkon*) misalnya, dipercaya akan menyebabkan penguasa alam marah dan menyebabkan kemarau berkepanjangan atau longsor banjir tak berkesudahan. *Kabendon* bisa juga turun dalam bentuk lain seperti gagalnya panen karena serangan hama atau kebakaran. Bencana ini bisa menimpa individu, atau kelompok. Mereka sangat taat pada karuhun. Percaya terhadap karma.

Di tatar Sunda yang subur makmur, *hegar manah,* membuat betah ini, masyarakat adat Kasepuhan menghadapi sejumlah persolan antara lain konflik tenurial, adanya klaim pengelolaan wilayah adat, adanya stigma negatif dari kelompok tertentu yang menganggap ritual Kasepuhan sebagai ajaran sesat, dan keterbatasan dalam akses kesehatan dan akses peningkatan ekonomi. Sedangkan persoalan yang dihadapi masyarakat Baduy yakni belum adanya

pengakuan negara atas kepercayaan Sunda Wiwitan, keterbatasan lahan, serta kesulitan pemasaran produk kerajinan dan komoditi hasil bumi masyarakat.

Inilah sebagian tantangan yang dihadapi oleh Suku Baduy dan Kasepuhan yang menjadi masyarakat pemanfaat dampingan RMI melalui Program Peduli. Kebebasan untuk mengekspresikan kepercayaan dan kebebasan untuk menikmati pembangunan belum sepenuhnya didapatkan oleh kedua kelompok masyarakat adat ini, padahal menurut Amartya Sen, pemenang Hadiah Nobel 1998, kebebasan adalah tujuan utama pembangunan sekaligus sarana utama pembangunan, dimana manusia adalah agen perubahannya.

Di bukunya, *Development as Freedom,* Sen berargumen bahwa pembangunan adalah proses meningkatkan kebebasan manusia yang memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang penuh makna. Oleh karenanya, pembangunan membutuhkan penghapusan sumber utama ketidakbebasan, yaitu kemiskinan dan tirani, peluang ekonomi yang tidak merata, deprivasi sosial yang sistemik, pengabaian hak publik, serta intoleransi.

Dalam konteks ini, ada lima jenis kebebasan yang saling terkait, yaitu kebebasan politik, fasilitas ekonomi, inklusi sosial, transparansi, dan keamanan. Negara seyogyanya berperan dalam mendukung kebebasan melalui pemenuhan hak dasar berupa pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial, kebijakan makroekonomi yang baik, produktivitas dan perlindungan lingkungan.

Hutan adat, juga Sunda Wiwitan, adalah sebagian hak-hak warga Baduy dan Kasepuhan yang harus diakui dan dilindungi oleh negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara sehingga negara wajib mengakui dan melindunginya. Mahkamah yang sama juga mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada KK dan KTP. Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata "agama" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan. Artinya, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.

Penulis beruntung bertemu dan berbincang dengan para pelaku aktif di balik perubahan signifikan yang terjadi di area kerja Program Peduli di Banten. Bab ini membagi sebagian transformasi yang dialami oleh Masyarakat Adat Baduy dan Kasepuhan dalam perjuangan mereka mencapai kondisi berdaulat dan bermartabat di tanah adat.

Kisah UMPAK, Upaya Mendorong Pengakuan Adat Kasepuhan

Masyarakat adat Kasepuhan menghadapi konflik yang telah diwariskan sejak lama oleh rezim terdahulu dan diperparah dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 175 Tahun 2003 Tentang Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Perluasan kawasan konservasi menjadi total ± 113.357 hektar ini semakin membatasi akses dan kontrol Kasepuhan terhadap wilayah adatnya.

Hasil pemetaan partisipatif di Kasepuhan Desa Cirompang menyebutkan bahwa dari luas desa yang mencapai 637,501 hektar, lebih dari 50 persen wilayahnya diklaim sebagai perluasan TNGHS. Begitu pula dengan Kasepuhan Karang Desa Jagaraksa, dari luas Wewengkon Karang yang mencapai 388,572 hektar, hampir 50 persen diklaim ke dalam perluasan TNGHS. Sebagai dampaknya, masyarakat Kasepuhan Cirompang hanya dapat mengelola lahan rata-rata 0,6 Ha/KK, sedangkan masyarakat Kasepuhan Karang seluas 0,38 Ha/KK.

Munculnya SK 175/2003 ini menyebabkan konflik tenurial antara negara dengan masyarakat adat, karena kawasan hutan Gunung Salak dan Gunung Endut yang status sebelumnya merupakan hutan produksi terbatas dan hutan lindung yang dikelola Perum Perhutani diubah fungsinya menjadi hutan konservasi. Konflik yang terjadi bukan hanya konflik fisik, akan tetapi juga tekanan secara psikis karena lokasi perluasan TNGHS masuk pada wilayah tanah *cawisan* yang diperuntukkan untuk pemukiman, garapan/produksi, tempat ibadah, sarana pendidikan dan kantor desa. Kondisi ini membuat masyarakat adat merasa seolah menjadi tamu di rumah sendiri.

Masyarakat adat Kasepuhan juga mengalami intimidasi terkait konflik budaya-agama yang terjadi di Kasepuhan Karang. Konflik ini terjadi April 2012, ketika masyarakat adat Kasepuhan akan mengadakan upacara adat *Seren Taun* dan diserang oleh organisasi massa keagamaan FPI karena dianggap melakukan ritual yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Serangan tersebut menyebabkan trauma psikologis sampai hari ini, meskipun Pemerintah Kabupaten Lebak telah mengeluarkan SK pengakuan masyarakat adat sebagai respon atas kejadian tersebut.

RMI memulai pendampingan atas permintaan masyarakat adat Kasepuhan, awalnya untuk penyelesaian masalah lahan dengan TNGHS. Pendampingan dilakukan melalui berbagai proses edukasi dan advokasi. Proses edukasi salah satunya berhasil meningkatkan kepercayaan diri masyarakat adat bahwa mereka punya kans yang sama dengan komunitas lain di luar Kasepuhan untuk memperjuangkan kepentingan adat. Proses ini juga ampuh meredam konflik-konflik kecil antara masyarakat Kasepuhan dan TNGHS yang berpotensi jadi konflik terbuka apabila tidak ada resolusi dan rekonsiliasi.

Gesekan-gesekan sudah sering terjadi antara kedua pihak, seperti pengusiran, perusakan tanaman warga, dan yang terparah adalah kasus pembakaran kandang kerbau warga Kasepuhan Cirompang beserta ladang rumput gembalaannya. Warga harus mengolah lahan garapan secara sembunyi-sembunyi. Tanaman siap panen yang telah ditanami dan diolah oleh warga juga seringkali diakui milik TNGHS. TNGHS juga 'mewajibkan' pajak natura tidak resmi sebesar 10persen kepada penggarap lahan dari Kasepuhan Cirompang melalui petugas-petugas yang ada di desa.

Permasalahan ini dinilai oleh tokoh-tokoh Kasepuhan se-Banten Kidul perlu diselesaikan secara politik. Gayung bersambut, saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak untuk periode 2014 – 2019, calon bupati Iti Oktavia Jayabaya mendekati masyarakat Kasepuhan, yang kemudian mengajukan H. Ade Sumardi sebagai calon wakil bupati. Pasangan ini kemudian memenangkan Pilkada Kabupaten Lebak.

Sebenarnya upaya untuk pengakuan Kasepuhan sudah diinisiasi sejak tahun 2006, ketika masyarakat adat Kasepuhan melalui SABAKI (Satuan Masyarakat Adat Banten Kidul) bersama dengan RMI dan jaringan masyarakat sipil lainnya mendorong Pemkab Lebak untuk mengeluarkan Perda Kasepuhan. Hal ini dianggap krusial karena adanya pengakuan masyarakat adat Kasepuhan melalui Perda diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat Kasepuhan dalam memperjuangkan hak atas lahan dan sumber daya alam. Lahirnya Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012 merupakan dasar untuk perlindungan dan pengakuan atas kedaulatan masyarakat adat dalam mengelola hutannya. Putusan ini secara tegas mengakui serta memandatkan pengelolaan hutan adat dapat dilakukan oleh masyarakat adat serta keberadaannya tidak lagi dalam kawasan hutan negara.

Rangkaian proses audiensi dengan Pemkab dan DPRD Lebak juga intensif dilakukan, memberikan kontribusi signifikan pada menguatnya isu masyarakat adat di tingkat lokal. Dorongan untuk mengeluarkan Perda Kasepuhan makin menguat pada dua tahun terakhir (2014-2015) dan akhirnya DPRD Lebak memasukkan Perda Kasepuhan dalam Prioritas Legislasi Daerah 2015. Dukungan jaringan masyarakat sipil organisasi masyarakat sipil yang tak pernah surut turut mendorong keluarnya Perda Kasepuhan ini.

Tahapan hingga keluarnya Perda Kasepuhan ini sangat panjang, melibatkan upaya penguatan kapasitas komunitas SABAKI, penguatan kapasitas DPRD Lebak, penyusunan naskah akademik dan Ranperda, konsultasi publik dengan pihak

Pemkab dan masyarakat Kasepuhan, hingga rapat Pansus dan Sidang Paripurna. Setelah melalui berbagai tahapan, akhirnya Perda Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kasepuhan disahkan pada 19 November 2015 oleh Pemkab dan DPRD Lebak, dihadiri oleh 50 perwakilan Kasepuhan dan jaringan LSM.

Keluarnya Perda Kasepuhan bukan proses akhir, masih banyak proses lain yang harus ditempuh warga Kasepuhan pasca Perda. Misalnya soal kepastian pengelolaan wilayah adat termasuk hutan adat di dalamnya. Kasepuhan harus membuktikan dirinya mampu mengelola wilayahnya secara lestari dan berkelanjutan. Maka Kasepuhan Karang dan Kasepuhan Cirompang pun bersepakat untuk melakukan proses perencanaan komunitas sebagai tindak lanjut dari peta partisipatif yang telah mereka miliki. Perencanaan komunitas ini penting sebagai alat negosiasi pada pihak lain soal tata kelola wilayah adat.

Kemenangan ini dinilai menjadi modal bagi Kasepuhan untuk menyelesaikan masalah pertanahan dengan TNGHS. Pada 2013, RMI bersama beberapa mitra berhasil mendorong terbitnya Surat Keputusan Bupati Lebak tentang Pengakuan Masyarakat Adat di wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul (Sabaki), yaitu SK Bupati Lebak No. 430/Kep. 298/Disdikbud/2013. Surat Keputusan ini menjadi modal lainnya, yang diperkuat dengan terpilihnya Junaedi Ibnu Jarta, sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lebak periode 2014-2019 – Jun, putra Kasepuhan asli Pasireurih, terpilih kembali sebagai wakil rakyat untuk periode berikutnya.

Ketiga kekuatan ini dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Kasepuhan. Melalui Program UMPAK, mereka berhasil mencapai cita-cita mereka untuk memperoleh pengakuan kesatuan adat dengan disahkannya Perda Kabupaten Lebak No. 8/2015 yang menjamin pengakuan masyarakat adat.

Masyarakat adat Kasepuhan menjadi lebih percaya diri dan memiliki alat negosiasi dalam memperjuangkan hak-haknya. Seperti pada riungan SABAKI di Kasepuhan Pasireurih, perwakilan baris kolot Kasepuhan menyepakati dan menandatangani Petisi 15 Pasireurih yang berisi tuntutan Kasepuhan pada Negara terkait hutan adat, tata ruang wilayah adat, dan usulan untuk merevisi peraturan pusat yang tak sesuai. Tuntutan ini menjadi bagian dari implementasi pasca Perda Kasepuhan No.8/2015 untuk mewujudkan kesejahteraan warga adat dan memberikan perlindungan dalam penghidupan warga adat Kasepuhan.

Dengan peraturan pemerintah berisi pengakuan resmi, masalah antara Kasepuhan dengan pihak TNGHS dapat diminimalisasi. Kini warga dapat menggarap lahan dengan aman dan nyaman tanpa ada halangan berarti.

Sunda Wiwitan dan Hal-Hal yang Belum Selesai

Masyarakat adat Baduy telah mendapatkan pengakuan atas hak ulayatnya dari pemerintah daerah, namun masih ada persoalan yang dihadapi. Mereka masih memperjuangkan pengakuan negara atas kepercayaan Sunda Wiwitan, sebagai agama lokal/kepercayaan dari budaya asli yang diwariskan dari leluhur Sunda sejak ribuan tahun lalu. Tidak terakomodirnya kepercayaan Sunda Wiwitan dalam KTP, mempersulit warga Baduy dalam mendapatkan kartu identitas sebagai

GROOVE
HARLEY-DAVIDSON
MOTOR
CYCLES

warga negara yang menjadi prasyarat utama agar dapat mengakses layanan dasar yang disediakan oleh negara dan beragam keperluan lainnya.

Problem Baduy dalam urusan adminduk tidak hanya soal pemenuhan blanko yang sempat langka, tetapi juga soal pengisian kolom agama dalam KTP. Ini merupakan simbol pengakuan negara terhadap identitas dan keyakinan adat. Kolom agama di blanko KTP warga Baduy seringkali kosong, sekalipun ada tulisan hanya berisi kata "Kepercayaan".

Menanggapi hal ini, RMI melakukan kajian tentang seberapa penting Sunda Wiwitan tercatat dalam kolom agama di e-KTP bagi warga Baduy. Putusan MK 97/2016 telah mengakui identitas masyarakat adat, di antaranya soal agama. Masyarakat adat Baduy ingin didukung untuk menindaklanjuti pencantuman "Sunda Wiwitan" di kolom agama, atau memilih dikosongkan jika belum "diakui". Hasil kajian kemudian dibahas dalam workshop yang menghadirkan narasumber dari Lakpesdam NU, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan terkait hasil kajian yang kemudian hasilnya disampaikan ke pilar adat untuk bahan advokasi kebijakan pemerintah.

Selain ke pilar adat, hasil kajian juga disampaikan ke pemerintah daerah kabupaten untuk diketahui bahwa ada keinginan kuat dari masyarakat Baduy untuk pengakuan Sunda Wiwitan sebagai agama yang tercantum dalam kolom KTP. Pemda Lebak melalui ASDA II menanggapi bahwa pihaknya belum dapat berbuat banyak, karena kebijakan ini ada di pemerintah pusat. Kendati demikian, pemda akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya untuk merealisasikan aspirasi ini.

Persoalan lain berkaitan dengan keterbatasan lahan untuk bercocok tanam bagi warga Baduy Dalam. Warga Baduy Dalam tidak memiliki kepemilikan tanah, semua lahan adalah milik komunal yang digunakan secara bersama-sama. Lahan adalah milik adat, sedangkan tanaman yang ditanam pada lahan tersebut adalah milik warga yang menanamnya. Pesatnya laju pertumbuhan penduduk Baduy menjadi pokok permasalahan pada ketersediaan lahan untuk bercocok tanam. Sebelum tahun 2000-an, warga Baduy terlingkup dalam 40 rukun tetangga. Menurut data Desa Kanekes tahun 2016, warga Baduy membengkak mencapai 60 RT mencakup 3.300 KK atau 11.667 jiwa.

Persoalan berikutnya adalah keterbatasan dalam akses pemasaran produk masyarakat Baduy. Jenis produk kerajinan tangan yang dihasilkan warga Baduy antara lain kain tenun, selendang, baju, celana, ikat kepala, sarung, golok, parang, koja, dan *jarog* (tas yang dibuat dari kulit kayu *teureup*), serta yang terakhir, produk budidaya lebah madu hutan, yang didukung oleh RMI. Kurangnya promosi dan akses pasar bagi produk-produk ini menjadi tantangan bagi warga. Sektor pariwisata yang mandek karena pandemi juga turut menambah beban namun belum ada kajian yang menganalisa dampaknya bagi warga. Saat ini nampaknya kehidupan masih baik-baik saja.

Sariah Potret Kesetaraan Perempuan Masyarakat Adat

Perempuan Baduy secara umum cenderung lebih tertutup dibandingkan kaum laki-laki. Mereka menutup dan membatasi interaksi dengan orang lain, terutama yang berasal dari luar Baduy. Perempuan Baduy selama ini hanya berkutat dengan persoalan di domain privat seperti mengurus rumah, mengasuh anak, dan melayani suami. Sebenarnya perempuan Baduy juga terlibat dalam urusan produksi dengan mengelola ladang, menenun kain dan berjualan. Ini menjadi bukti kuat bahwa mereka turut meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Namun adat mereka sangat ketat untuk tidak mengikutsertakan perempuan dalam urusan-urusan sosial pemerintahan, sekalipun banyak keputusan tersebut terkait dengan urusan perempuan dan keluarga. Sepertinya ada konsensus tak tertulis dan pembagian tugas berdasarkan jenis kelamin: perempuan cukup berkutat di ranah domestik dan laki-laki boleh bergiat di ranah publik.

Karenanya, dalam kehidupan sehari-hari, perempuan Baduy tidak banyak memiliki kesempatan terbuka seperti laki-laki, pun dalam isu-isu strategis baik di level kampung dan desa yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya tradisi adat yang membatasi peran perempuan yang tidak sama dengan peran laki-laki. Hal ini sangat berpengaruh pada pengetahuan perempuan terhadap proses upaya penambahan lahan yang diusulkan. Mereka tidak mengetahui upaya yang sedang diperjuangkan oleh masyarakatnya sendiri untuk menjawab kebutuhan lahan ngahuma.

Dari kondisi ini, RMI melakukan pendekatan terhadap beberapa perempuan di Baduy. Awalnya sulit melakukan interaksi dengan mereka. Biasanya perempuan yang didatangi cenderung menghindar

atau memilih masuk ke rumah ketika ada orang luar yang sekedar menyapa dan mengajak bicara. Namun, secara perlahan, pendekatan pun berhasil dilakukan ke beberapa orang. Setidaknya ada 13 perempuan Baduy yang bersedia berinteraksi dan berpartisipasi dalam proses pendampingan RMI.

Proses interaksi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana mereka tahu tentang kebutuhan lahan ngahuma juga tentang upaya yang sedang dilakukan. Dari interaksi dan diskusi yang dilakukan, ternyata perempuan tidak banyak mengetahui isu tersebut. Di tahapan proses berikutnya, 13 perempuan Baduy terinformasi soal kebutuhan lahan dan juga proses pengajuan yang sedang diperjuangkan. Hasilnya, didapat informasi menarik bahwa mereka sebenarnya sangat ingin untuk diberdayakan dan diajarkan pengetahuan dalam menjangkau akses pasar untuk penjualan produk hasil bumi dan kerajinan, baik secara online maupun offline. Adanya upaya khusus untuk menyasar perempuan Baduy Luar ditindaklanjuti dengan menyampaikan keinginan mereka yang tidak secara langsung berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan lahan huma melalui skema IPHPS atau KULIN KK. Hal ini merupakan temuan menarik bahwa perempuan yang selama ini tereksklusi ternyata memiliki kebutuhan khusus tersendiri yang perlu dipikirkan pemenuhannya oleh pihak desa maupun tetua adat.

RMI secara serius dan berkelanjutan mengupayakan penambahan jumlah perempuan untuk didampingi menjadi kader-kader rakyat yang kritis terkait isu lahan. RMI juga intens mengajak diskusi kader-

kader perempuan adat Baduy secara personal terkait pentingnya akses pelayanan kesehatan bagi mereka, sehingga para perempuan adat dapat mengakses layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah desa. Kebijakan afirmatif, inlusif dan partisipatif dalam pengarusutamaan dan kesetaraan jender ini telah menghasilkan seorang Sariah.

Perempuan yang juga disapa Minah ini fasih menjelaskan pentingnya ide-ide pembaruan di Baduy. Ia menggebu-gebu menekankan pentingnya perempuan menjadi mitra dalam pengambilan keputusan, tidak hanya di keluarga tapi juga di tingkat desa dan adat. Istri dari seorang perangkat desa bernama Sarpin ini berkukuh dengan niatnya untuk mendesakkan kemajuan, yang dimulai dari lingkup rumah tangga. Ia ingin ada sanitasi bersih di rumah untuk menggantikan MCK bersama di pinggir sungai. Ia memimpikan generasi penerus yang berkualitas melalui pendidikan formal, sekalipun hal ini mungkin melawan pamali (tabu menurut adat).

Ambu Sariah berusaha meyakinkan para tetangganya untuk terus mendidik anak, baik oleh orang tuanya di rumah maupun dengan mengirim anak ke sekolah. "Lamun teu nyakolakeun anak, maranehna teu bakal apal mana ajaran anu bener jeung mana anu salah" yang artinya, "jika tidak menyekolahkan anak, mereka tidak akan tahu dan mampu membedakan mana ajaran yang benar dan mana yang salah/tak sesuai". Sariah menambahkan bahwa pengetahuan yang didapat dari sekolah formal sebenarnya menguatkan kecintaan terhadap adat, karena kecintaan itu dilengkapi dengan sikap kritis bukan cinta buta yang mungkin menjerumuskan masyaraat adat pada ancaman ketertinggalan dan diskriminasi, tereksklusi dari partisipasi lebih di masyarakat luas, di tengah derasnya arus kemajuan yang akan semakin sulit dibendung ke depan.

Sariah dan Sarpin telah mengambil potensi risiko pengucilan oleh elite pembuat tafsir adat. Namun risiko ini dianggap setimpal dengan manfaat dan hasil yang kelak akan dipetik. Mereka berharap kemajuan komunitas adat Baduy akan datang melalui anak-anak muda seperti Mulyono yang kini mahasisa komunikasi di Universitas Terbuka di Serang dan Marno yang masih bersekolah di SMA 1 Rangkasbitung. Sungguh sebuah perubahan radikal, yang diperjuangkan tidak melulu secara frontal.

Tak Kenal Maka Tak Sayang: Pengenalan Adat di Jagat Maya dan Nyata

Tersebab adat yang berbeda, pihak tertentu menganggap Kasepuhan Karang menyimpang. Masalah ini menimbulkan kerentanan dan potensi konflik dengan masyarakat bukan kasepuhan. Warga Kasep uhan Karang menjadi apatis dalam memandang diri sebagai kesatuan adat dan takut untuk melakukan aktivitas adat. Kasus *Seren Taun 2012* dihentikan dan dibubarkan oleh sebuah ormas keagamaan dan ini membekas jadi trauma berkepanjangan.

Disahkannya perda pengakuan masyarakat adat Kasepuhan membuat warga lambat laun pulih. Warga mulai menerima kehadiran orang 'asing' dalam lingkungan mereka, upacara adat kembali diselenggarakan dengan nyaman di lingkungan Desa Jagaraksa. Upaya-upaya berorganisasi, berkumpul dan bergotong royong juga mulai bangkit.

Upacara adat Seren Taun dan Festival Pare *Gede* diselenggarakan kembali, walaupun kunjungan ke Situs Kosala yang menjadi tempat keramat warga Kasepuhan Karang harus dilewati guna menghindari munculnya potensi konflik baru. Acara adat didorong menjadi ajang pengenalan adat kepada masyarakat luar.

Setelah adanya pengakuan negara, RMI mendorong inovasi salah satunya melalui implementasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat. Pola tanam yang sebelumnya dilakukan secara tradisional dan tanpa perencanaan, kini mulai diubah dengan memanfaatkan setiap jengkal lahan dengan tanaman-tanaman produktif. Pengadopsian metode baru ini menjadi aksi yang membangkitkan kembali kepercayaan diri warga Kasepuhan Karang.

Kedekatan RMI dengan masyarakat Kasepuhan juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa membangun website desa untuk semakin menguatkan pengakuan masyarakat luar terhadap Kasepuhan. Kader-kader pemerintahan desa

dilatih untuk memanfaatkan teknologi informasi digital sebagai jalan penyebaran informasi yang efektif, seperti pembentukan situs jejaring desa, pelatihan jurnalisme warga, dan penulisan konten berita.

Ide ini awalnya terbangun ketika ada paparan Gerakan Desa Membangun (GDM) Jabar pada acara Konsolidasi Satuan Adat Banten Kidul tahun 2014 di Rangkasbitung, yang salah satunya membahas Desa Melek IT sebagai salah satu implementasi

Sistem Informasi Desa mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. GDM Lebak ini memantapkan niat Desa Cirompang mendaftarkan desanya untuk mendapatkan domain desa.id melalui Pengelola Nama Domain Internet Indonesia/PANDI. Akhirnya akun cirompang.desa.id pun didapat.

Pengelola situs yang juga staf desa, Angling dan Nurlaela, termasuk aktif dalam posting berita. Jaringan internet yang lelet dan jauh dari stabil, tidak menyurutkan semangat tim pengelola website desa. Postingan berisi seputar kegiatan warga desa, potensi desa, peraturan desa, program pembangunan, bahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. LPPD ini bukti keseriusan Pemdes Cirompang terhadap transparansi publik. Puisi dan foto kiriman warga, berikut beragam komentar yang masuk, dari dalam dan luar desa, tak luput ditampilkan sebagai bentuk apreasiasi dan keberpihakan. Hal ini sangat positif untuk meningkatkan rasa percaya diri warga.

Upaya Pemdes ini berbuah manis. Desa Cirompang mendapat penghargaan dari Kementerian Informasi dan Komunikasi sebagai salah satu desa terbaik dalam pengelolaan web desa se-Kabupaten Bogor dan Lebak. Penghargaan diberikan pada acara Festival Desa Melek IT Kabupaten Lebak pada April 2015 di aula Kecamatan Sajira-Lebak. Desa Cirompang yang mulanya tidak terdengar, sekarang dikenal orang lewat dunia maya bahkan bisa menginspirasi desa lain.

Desa Cirompang, diikuti Desa Jagaraksa, sudah memiliki situs jejaring masing-masing. Adanya penyebaran informasi di dunia maya membuat Kasepuhan dikenal oleh dunia luar. Kunjungan tamu domestik dan mancanegara adalah bentuk apresiasi terhadap masyarakat Kasepuhan

Cirompang dan Karang. Hambatan yang dihadapi hingga sekarang tetap terkait keterbatasan sinyal. Petugas pelaksana harus pergi ke kota kecamatan untuk mengakses internet guna mengupdate situs desa kepada dunia. Kemajuan memang bersifat *incremental,* kita mencicilnya setiap hari.

Jaro Siaga, Siap Antar Jaga, Demi Warga

Setelah terjadi kohesi di masyarakat adat, strategi RMI berikutnya adalah memastikan pelayanan dasar untuk warga terpenuhi. Masyarakat adat Kasepuhan, khususnya Kasepuhan Karang, sempat mengalami keterbatasan akses pelayanan kesehatan. Pra Program Peduli, belum ada puskesmas pembantu dan bidan desa hanya bertugas sekali dalam seminggu yaitu di hari Kamis. Untuk berobat, masyarakat harus ke puskesmas yang berada di ibukota kecamatan Muncang dengan perkiraan waktu tempuh 1,5 jam perjalanan dan biaya Rp 200.000 pulang-pergi karena belum adanya angkutan pedesaan.

Masuk ke kancah politik desa, dengan cara mendukung kader-kader Kasepuhan menjadi kepala desa, menjadi taktik jitu. Saat ini hampir semua desa yang terdapat Kasepuhan di dalamnya, kepala desa terpilihnya adalah warga Kasepuhan yang didukung untuk memastikan keberlangsungan program inklusi bahkan setelah Program Peduli terhenti. Hal ini disadari dari pembelajaran di tingkat kabupaten. Ketua DPRD dan Wakil Bupati Lebak petahana merupakan *incuputu* Kasepuhan, dan saat keduanya mengisi jabatan politik, kerja penguatan masyarakat adat menjadi lebih mudah.

Kurangnya perhatian pemerintah pada kondisi infrastruktur jalan dan sarana transportasi desa

berdampak pada kualitas pelayanan dasar berupa akses kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial kepada warga. RMI mendorong para kepala desa untuk mengadvokasi kepentingan warga mereka ke pemerintah daerah kabupaten dan provinsi. Hasilnya, sekarang di Kasepuhan Karang sudah ada puskesmas pembantu. Jika sakit, warga tidak perlu lagi diboyong ke Muncang. Namun jika diperlukan penanganan lanjutan, *Jaro* (Kades) siap sedia mengantar warganya yang sakit parah menggunakan mobil pribadi sebagai *ambulance* desa ke puskesmas utama atau rumah sakit umum daerah di Rangkasbitung.

Kini, sebagian besar warga desa yang tidak mampu sudah menerima layanan subsidi pemerintah seperti KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang diberikan pemerintah pusat. Beberapa keluarga tidak mampu juga sudah terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial. Hanya saja, penggunaan KIS dalam PosKesDes di Cirompang dibatasi hanya dua hari dalam satu minggu. Pada hari lainnya, apabila warga berobat ke PosKesDes akan dikenakan biaya sebesar Rp 30.000 s/d Rp 70.000, besaran yang cukup mahal bagi warga. Tak heran jika para kandidat kepala desa menyelipkan janji pemenuhan layanan dasar dalam visi misi mereka, seperti muncul gagasan Kartu (Cirompang/Karang) Sehat, yang biayanya menggunakan KIS. Ketika terpilih, mereka menjalankan komitmen dengan mengabdikan diri untuk melayani warga, termasuk menjadi jaro siaga, siap antar jaga. Mereka menyediakan dan mengendarai kendaraan pribadi untuk jadi ambulan dadakan bagi warga yang terkendala angkutan dalam keadaan darurat. Karena sejatinya, memimpin adalah menderita.

Tak Sekedar Latah Kedaulatan Pangan

Padi adalah hasil utama pertanian masyarakat Kasepuhan. Hampir semua kegiatan adat Kasepuhan berhubungan dengan padi dan sawah, utamanya Seren Taun yang menandakan syukur diri terhadap hasil padi yang diperoleh.

Dulu, tanaman-tanaman lain nyaris tidak ada yang ditanam di sawah seperti palawija dan sayur-mayur. Kebutuhan sayur-mayur warga Kasepuhan, khususnya Kasepuhan Cirompang diperoleh dari luar desa seperti dari Bogor dan Lebak melalui pedagang yang masuk ke desa. Itu pun tidak rutin.

Strategi yang diambil oleh RMI untuk kebutuhan ini adalah dengan melibatkan perempuan untuk

menganalisis kebutuhan-kebutuhan mereka. Langkah selanjutnya adalah dengan pengembangan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan seperti cara berorganisasi dan berkelompok, pelatihan teknik pengolahan tanah dan pertanian yang berbeda dari yang mereka tahu sebelumnya.

Awalnya RMI menanyakan kebutuhan warga. Warga lalu berkumpul di Kasepuhan untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka. Setelahnya, RMI menyarankan pembentukan kelompok. Sebelumnya sudah ada kelompok bapak-bapak untuk perikanan lele, PETAPA (namanya), tapi belum berhasil. Ibu-ibu punya pemikiran untuk berkelompok juga tapi mereka bertekad untuk tidak mengikuti kegagalan kelompok bapak-bapak. Lalu dibentuklah sepuluh kelompok, satu kelompok terdiri dari sepuluh orang. Mereka diberi modal satu juta rupiah per satu kelompok.

Perempuan menjadi subjek perubahan yang penting oleh RMI karena peran mereka di Kasepuhan seakan tidak terlihat. Padahal peran mereka dalam pertanian tidak jauh berbeda dengan laki-laki, apalagi kaum laki-laki Kasepuhan banyak keluar desa untuk mencari rezeki. Untuk kasus ini, peran laki-laki dalam pertanian dilakukan oleh perempuan. Namun dalam konteks pengambilan keputusan strategis baik di desa dan Kasepuhan, perempuan jarang dilibatkan.

Uniknya, perempuan Cirompang sendiri tidak merasa bahwa Kasepuhan dan desa mengabaikan mereka. Bagi perempuan Cirompang, peran yang dijalankan selama ini merupakan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang tumbuh organik.

"Sebelumnya (kami) tidak pernah diajak (rapat dan berkumpul dalam urusan desa dan Kasepuhan).

Untuk saya pribadi sebagai perempuan saat itu, saya merasa canggung, merasa malu, karena seorang perempuan untuk apa ikut campur urusan (desa) seperti itu. Karena di adat juga, perempuan cuma bantu-bantu saja kalau ada musyawarah di Kasepuhan, musyarawah pagar. Itu cuma bapak-bapak nya saja. (Sedangkan) Ibu-ibunya cuma di dapur bikin kopi dan bikin makanan. Ternyata, setelah ada RMI, perempuan itu juga harus ikut serta, harus angkat suara. Karena tidak hanya bapak-bapak, suara dan peran perempuan juga dibutuhkan. Kalau sekarang, (kami) ikut juga mendengarkan dan bapak-bapak juga melibatkan dan bertanya ke ibu-ibu... Bapak-bapak juga bukannya 'membelakangkan' perempuan, cuma belum ada pikiran kalau ibu-ibu itu harus dilibatkan dalam musyawarah. Karena kalau di sawah kan udah terbiasa kerja bareng." Demikian benang merah pendapat teteh-teteh yang ditemui, mulai dari Juheti, Wawat, Titin Yulianti sampai Een Suryani.

Melalui pemberdayaan ini, kini perempuan Cirompang dapat mengolah satu petak lahan dengan cara sewa. Lahan ditanami dengan sayur-mayur yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti timun, kacang panjang, buncis, caesin, kangkung, tomat dan lainnya dengan metode pengolahan yang diperkenalkan RMI. Beberapa keluarga juga mulai menanam sayuran sejenis dan taman obat keluarga seperti jahe, kunyit, dan lainnya dengan memanfaatkan pekarangan rumah masing-masing menggunakan media tanam pot, ember bekas, dan *polybag*.

Kini kebutuhan sayur-mayur lebih mudah diperoleh. Sayur-mayur hasil panen empat bulanan ini utamanya dikonsumsi untuk kebutuhan pribadi dan anggota kelompok. Hasil lebih dari panen kemudian dijual kepada warga desa yang keuntungannya

akan diputarkan kembali sebagai modal untuk penanaman selanjutnya. Sisa keuntungan disimpan sebagai tabungan dan dibagikan kembali kepada seluruh anggota pada saat hari raya lebaran. Bagi RMI, penargetan program pada perempuan juga suatu upaya untuk memberikan peran dan kontribusi perempuan pada pembangunan desa.

Tindak lanjut dari usaha ekonomi kelompok ini adalah dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu strategi keberlangsungan. Ide awal pembentukan BUMDes diharapkan sebagai wadah pengelolaan hasil baik natura ataupun non-natura dari seluruh usaha warga Kasepuhan termasuk hasil sayur mayur dari kelompok wanita tani.

RMI bersama masyarakat Desa Cirompang sudah menginisiasi pembentukan BUMDes di akhir tahun 2015. Susunan pengurus terbentuk Juni lalu.

Hanya saja implementasi dari BUMDes tersebut masih terkendala beberapa hal teknis seperti penentuan jenis usaha yang akan dijalankan karena kegagalan strategi di awal. Ini adalah pekerjaan rumah selanjutnya bagi RMI.

Terkait dengan tanaman pangan, terselip kisah tentang prinsip teguh Kepala Desa Jagaraksa, Jaro Wahid, yang ditawari dana sebesar Rp 500 juta oleh investor luar untuk mengembangkan tanaman porang. Porang, *Amorphophallus muellerie Blume*, adalah sejenis umbi-umbian talas Araceae yang mengandung karbohidrat dan kalsium oksalat buat bahan tepung campuran mie udon yang utamanya dikonsumsi oleh orang Jepang. Porang juga baik dijadikan bahan baku lem perekat yang dianggap ramah lingkungan. Porang kering dihargai Rp 100.000 per kilogram, sehingga dengan kepemilikan satu hektar lahan tanah bisa menghasilkan minimal Rp 800.000 per panenan, tiga kali panen dalam setahun. Suatu nilai yang menggiurkan ketimbang tanaman lainnya, termasuk padi sekalipun.

Namun demikian, Jaro Wahid menolak tawaran menggiurkan dari calon investor tersebut, karena ingat pesan almarhum kakeknya. Abah olot bernama kakek Saltum, yang semasa hidupnya gigih berjuang untuk kemerdekaan republik muda bernama Indonesia, menitipkan *lemah cai* untuk dijaga oleh cucunya. Tanamlah sesuatu yang dapat dimakan dan jangan sembarang menjual karena bisa saja orang banyak uang tapi kelaparan, sedangkan uang tak dapat dimakan. Makanlah untuk hidup, jangan hidup untuk makan, apalagi makan sampai sekenyang-kenyangnya, karena nanti hanya akan mati konyol karena kekenyangan. Jagalah lahan untuk menanam padi, tapi bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi kepentingan warga tanpa kecuali. Salah satu wejangan abah tercermin dalam peribahasa ini: *Pindah cai, pindah tampian. Tungkul kajukut, tanggah ka sadapan. Tonggoy ka lalakon, tekun ka agama.* Pohaci nyiscri. Padi dipupusti, tapi ulah dipigusti. Sungguh ajaran yang mengandung makna sangat dalam.

Contoh sukses porang di desa yang tadinya gersang biarlah menjadi cerita sukses masyarakat pengembangnya, tapi tidak untuk warga adat Kasepuhan. Teguh dengan tradisi yang sudah terbukti dari satu generasi ke generasi, tapi tak lupa berinovasi. Kopi adalah salah satu inovasi yang dikembangkan. Cobalah datang ke kedai Pesona Meranti di pinggir jalan Kasepuhan Karang, yang rimbun dan asri, menghadap sawah dan pegunungan. Temui pemuda Engkos untuk mendapat racikan kopi robusta khas Kasepuhan Karang bernama Kobaki, kepanjangan dari Kobi Banten Kidul.

Jaro Wahid, Engkos, juga abah Maman Sahroni yang ditemui berikutnya, adalah generasi baru Kasepuhan yang tidak lagi gagap dan latah dengan perubahan. Ada kesadaran dan kecerdasan di sini. Kita tidak

perlu silau dengan tren karena tren itu belum tentu sesuai dengan situasi kondisi dan kebutuhan lokal.

Pandemi tak ayal membuat berbagai sendi kehidupan yang sebelumnya berputar konstan kini nyaris membuat keseharian masyarakat terhenti total. Demikian halnya di dunia alit masyarakat adat Baduy dan Kasepuhan di Lebak. Pelbagai ritual adat dan perayaan yang mencakup tri tunggal *nagara, syara* dan *mokaha* yang biasanya secara berkala diselenggarakan dengan meriah mendadak harus ditunda karena pagebluk akibat merebaknya virus Covid-19.

Kalender acara seni budaya adat dan pesta demokrasi tahunan yang sudah tertata rapi terpaksa berantakan dan digantikan dengan bermacam pengumuman pembatalan. Siasat pun perlu dilakukan agar semangat masyarakat adat tetap dapat tersalurkan secara aman tanpa menimbulkan kekhawatiran.

Luwes dengan keadaan adalah penanda masyarakat adat di tengah iklim ketidakpastian masa pandemik dan krisis ekonomi politik. Masyarakat adat tak terlalu khawatir, mereka tahu mereka setidaknya akan aman dari ancaman paceklik yang mencekik. Karena kearifan lokal dan hamorni di alam adalah kunci.

NG IM BIO
A BINTARO - TANGERANG
at & Sukses
NAAN SEJIT
ENG SIN KE-190 TAHUN
ENG TEK BIO
EC. NEGLASARI, TANGERANG - BANTEN
崇德廟
TJONG TEK BIO

BAB 5

PEREMPUAN "NU LINGXIU", AGEN PERUBAHAN INKLUSI SOSIAL DARI CINA BENTENG

(Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita Jakarta)

SIANG ITU ANGIN bertiup kencang pertanda hujan akan datang. Mendung menggayut, perasaan melangut. Sepuluh ibu muda dan paruh baya semangat berlatih menunjukkan kepiawaian mereka memainkan alat musik tradisional tehyan. Latihan siang itu terjadi di bawah naungan pohon rindang di sebuah pojokan di dalam komplek Kelurahan Mekarsari yang menjadi markas para perempuan penggerak koperasi simpan pinjam Lentera Benteng Jaya (LBJ). Mengalunlah dua lagu berjudul "Kicir-Kicir" dan "Dayung Sampan" melalui suara merdu mendayu Henny Lim. Sembilan perempuan "Ni Lingxiu" lainnya menjadi *backing vocal* sekaligus pemain instrumen gesek yang aslinya berasal dari Tiongkok. Alat musik *sejenis rebab ini terdiri dari batok bulat dari* tempurung kelapa sebagai wadah resonansi, potongan kayu untuk tiang dan penggesek, dan terakhir senar. Ketiga komponen utama tersebut menjadi pelengkap kesenian gambang kromong *sebagai* bentuk akulturasi budaya warga peranakan Cina Tangerang dan Betawi.

Keberadaan tehyan di Indonesia saat ini sudah mulai langka akibat perkembangan zaman dan kurang diminati oleh generasi muda. Faktor lain yang mempengaruhi kelangkaan adalah cara memainkannya yang cukup sulit. Tidak heran jika Henny Lim dan kawan-kawannya rajin berlatih, karena berlatih membuat permainan musik menjadi makin ciamik. Kelompok seni ini sudah sering tampil dan luwes berpentas di berbagai perhelatan seperti Festival Cisadane, Flash Mob di Kota Tua, Dialog Nasional Indonesia Setara Semartabat, termasuk konser virtual secara *live* selama pandemi Covid-19 melalui platform Instagram.

Berlatih musik dan tari, juga membatik, menanam sayur dan membuat kue, adalah sebagian aktivitas penuh faedah pengganti kegiatan berjudi dan bergosip, yang ampuh meningkatkan kohesi sosial di antara ibu-ibu hebat "Ni Lingxiu". Sekitar 25 pemimpin telah muncul di Cina Benteng setelah giat berlatih keterampilan teknis, kemampuan manajerial, dan pengembangan diri lain. Sekalipun rata-rata berpendidikan formal rendah, mereka terbukti sadar kesetaraan dan keadilan jender, selain peduli dengan beragam persoalan riil dan struktural di sekitarnya. Merekalah sang pengorganisir, penggerak, dan agen perubahan di Komunitas Cina Benteng.

Tehyan hanyalah satu dari sekian simbol kultural yang menjadi ciri khas Henny Lim, Perak, Lie Lie, Lie Yen, Seri Asih, Indri Wijaya, Sorta dan mayoritas warga di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasasi, Kota Tangerang. Ciri khas ini yang mengilhami pemerintah daerah untuk mengembangkan

PERKUMPULAN
TJOENG TEK BIO
宗德庙
KLENTENG HOK TEK TJENG SIN
福德正神

kampung tematik yang dihuni oleh warga sepanjang Kali Cisadane. Kelurahan yang sepuluh tahun lalu menghiasi pemberitaan nasional karena unjuk rasa warga berujung ricuh menyusul rencana relokasi yang nampaknya kurang sosialisasi. Penggusuran paksa rumah warga Cina Benteng di Kampung Lebakwangi, Tangga Asem, dan Kokun di lingkungan Kelurahan Mekarsari, berujung bentrokan antara petugas dan warga pada tanggal 13 April 2010. Penertiban permukiman warga itu merupakan kebijakan Pemerintah Kota Tangerang. Alasannya, rumah-rumah warga tidak berizin dan menempati bantaran sungai yang terlarang sebagai area residensial. Penertiban didahului dengan pengiriman surat peringatan dan surat perintah bongkar yang tidak diindahkan oleh warga. Akhirnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang diperintahkan membongkar paksa permukiman di ketiga kampung yang sedianya merupakan jalur hijau. Namun, atas desakan warga, hasil advokasi oleh kelompok masyarakat madani, dan berkat dukungan dari wakil rakyat, penertiban itu ditunda hingga waktu yang tak ditentukan.

Salah satu LSM yang giat mendampingi warga di Kelurahan Mekarsari adalah Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, atau disingkat PPSW. Sejak Maret 2015 hingga September 2020, PPSW melaksanakan Program Peduli di Kampung Sewan Lebak Wangi khususnya di RW 04, 05 dan 06. Program ini bertujuan untuk mendorong pengakuan dan akses terhadap layanan dasar bagi WNI keturunan Tionghoa yang telah lama berakulturasi dan membaur dengan warga lain tanpa harus kehilangan identitas sosial kuturalnya. Proses intervensi oleh PPSW awalnya mendapat resistensi, terutama karena warga berprasangka bahwa para aktivis LSM ini adalah aparat pemerintah yang ingin kembali merelokasi warga ke tempat yang baru, yang belum tentu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga. Warga memang khawatir dengan unsur asing yang masuk ke dalam lingkungannya. Situasi ini sempat membuat mereka bersikap penuh syak wasangka dan tertutup terhadap dunia luar. Namun, setelah melalui upaya persuasi yang konsisten dan proses pendekatan yang partisipatif nan simpatik, akhirnya Titik Suryatmi dan Tim PPSW diterima bahkan dicinta oleh warga dampingan.

Lain dulu lain sekarang

Satu dekade berlalu, kampung-kampung di bantaran sungai ini tertata apik setelah menjadi kampung tematik yang menarik hati para pelancong. Jalanan kini dipasang *paving block* dan pagar rumah dicat warna-warni. Di sepanjang jalan utama,

bergelantungan lampion merah. Tanaman hijau menghiasi pagar dan pekarangan rumah warga yang 90 persen adalah peranakan Tionghoa yang dikenal sebagai Cina Benteng. Sebenarnya, istilah Benteng adalah sebutan lain dari Tangerang lama, sebelum memisahkan diri dari Kabupaten Tangerang. Di situ terdapat benteng pertahanan yang dibangun pemerintah kolonial Belanda di tepi Sungai Cisadane, guna menahan serangan Kerajaan Banten.

Masyarakat Cina Benteng yang unik dan menarik merupakan wujud akulturasi. Sejak turun-temurun, mereka berbaur dan lebur dengan kehidupan dan budaya lokal warga pribumi, tanpa melupakan tradisi leluhur. Dahulu kala, nenek moyang mereka datang ke Tangerang dari Tiongkok, lalu bermukim dan beranak-pinak di sini. Selama ratusan tahun, mereka menyatu dengan kebiasaan dan kebudayaan baru termasuk dalam hal kesenian, pakaian dan kuliner, sambil tetap mempertahankan dan melestarikan adat istiadat lama.

Di saat rezim Orde Baru, warga tidak mudah mengembangkan kesenian tradisional dan mengekpresikan identitas kultural mereka karena ada pembatasan tradisi yang berbau Tiongkok. Sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman "Gus Dur" Wahid, pembatasan itu dicabut dan warga dapat bebas mengekspresikan diri, bahkan kepercayaan Konghucu menjadi salah satu agama yang diakui resmi oleh negara.

Meski sudah membaur, namun dalam keseharianya, warga Cina Benteng ini masih menunjukan sifatnya yang asli. Di setiap rumah masih ditemukan tempat persembahyangan dan meja abu atau altar nenek moyang. Mereka masih mengusung tata cara upacara perkawinan dan kematian secara adat. Kesenian tradisional seperti musik gambang kromong dimainkan di setiap pesta perkawinan, ulang tahun klenteng dan upacara kematian. Berbagai tradisi leluhur seperti Cap Go Meh, Pek Cun, Tiong Ciu Pia, dan Pek Gwee Cap Go tetap dilestarikan. Dalam kuliner, beberapa simbol akulturasi pun muncul. Orang Cina Benteng selalu menghadirkan ketupat saat persembahyangan, terutama perayaan Imlek. Ada juga lontong, lepet, dan beragam makanan dan kudapan lainnya.

Identitas etnis inilah yang menyatu padu dalam panggunaan simbol-simbol budaya Cina Benteng, yang membedakan diri mereka dengan kelompok lainnya.

Proses akulturasi ini sudah pasti memiliki dinamikanya sendiri. Henny Lim cs dan warga Komunitas Cina Benteng tidaklah serta merta mendapatkan rekognisi, luwes berinteraksi secara erat dengan komunitas lain, dan dengan mudah berpartisipasi dalam berbagai forum untuk menentukan perencanaan pembangunan yang menentukan hajat hidup mereka.

Mari kita tengok lebih dekat apa yang terjadi dalam keseharian di lapangan, baik sebelum dan sesudah masa intervensi. Biasanya, hal tersulit bersembunyi di balik detail yang tak kasat mata.

Menurut PPSW, eksklusi sosial yang terjadi pada masyarakat Cina Benteng terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Stigma; dalam hal komunitas Cina Benteng, stigma tidak hanya berasal dari luar kelompok, juga berasal dari diri sendiri (*self-stigma*) yang merasa tidak dihargai untuk kemudian timbul sikap apatis dan naif terhadap lingkungan sosial-politik.
2. Peran jender perempuan Cina Benteng; budaya masyarakat Cina menempatkan

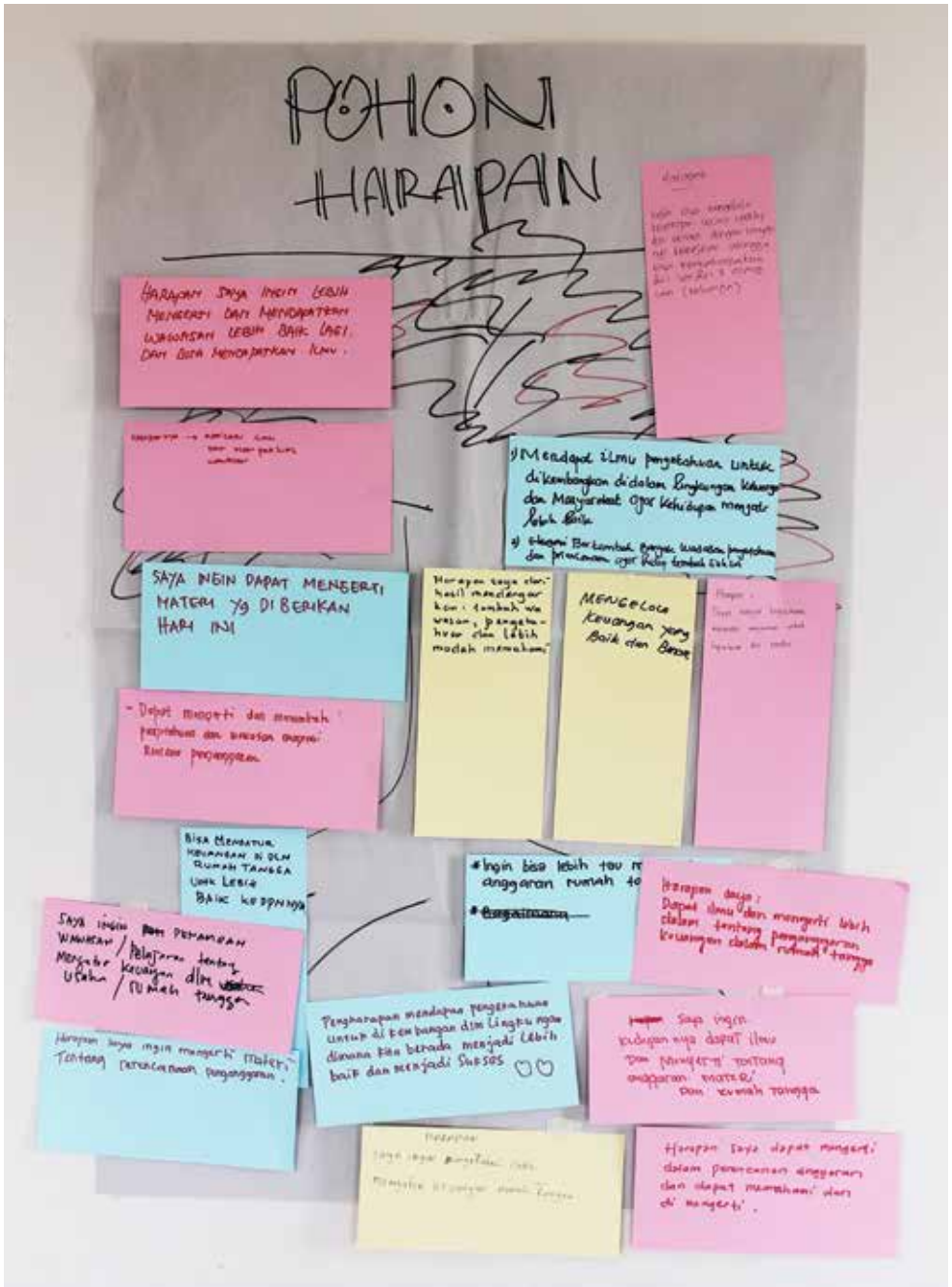

perempuan tidak saja disubordinasi tetapi juga dalam kedudukan yang selalu bergantung.

3. Pengakuan hak dasar sebagai warga negara; sangat terbatas dan minim untuk kemudian berimbas pada tidak terpenuhinya akses pada layanan dasar.

Berlandaskan pada hal-hal di atas, melalui Program Peduli, PPSW melakukan berbagai perubahan, yaitu:

1. Perempuan Cina Benteng mampu menyuarakan kepentingan dan gagasannya.
2. Adanya pengakuan oleh negara dan masyarakat atas keberadaan warga Cina Benteng.
3. Terpenuhinya hak-hak dasar dan pelayanan dasar warga Cina Benteng melalui kekuatan perempuan.

Perubahan yang terjadi

Pendekatan program yang dijalankan melalui kunjungan secara intensif ke individu-individu merupakan pendekatan yang efektif dalam membangun visi sekaligus memetakan posisi perempuan Cina Benteng terhadap PPSW sebagai pendamping dan pihak luar. Pengalaman PPSW mendampingi perempuan selama puluhan tahun juga merupakan modalitas dalam pendampingan dan pemberdayaan perempuan di Cina Benteng.

Dalam pendekatannya, PPSW menggunakan strategi kaderisasi dan pengorganisasian untuk menumbuhkan pemimpin perempuan yang kemudian akan menjadi mitra dalam mendampingi masyarakatnya sendiri. Dalam Program Peduli, kader-kader ini termasuk dalam 15 orang pengurus Koperasi LBJ yang berkomitmen sejak awal program.

Koperasi menjadi wadah perjuangan kelompok yang cukup efektif, karena melalui koperasi, perempuan dapat belajar meningkatkan kepercayaan diri serta peningkatan kapasitas kepemimpinan, pengetahuan, dan keterampilan yang bernilai guna bagi perempuan, keluarga, dan komunitas Cina Benteng.

Para kader ini didorong untuk membangun kerja sama dan sinergi dengan pemerintah kelurahan dan kota melalui serangkaian pertemuan guna mendiskusikan permasalahan Cina Benteng. Strategi ini berhasil memperoleh pengakuan pemerintah kelurahan dan kota sebagai awal proses pendampingan. Kegiatan koperasi juga bersinergi dan membantu program pemerintah seperti membantu pengurusan administrasi kependudukan sipil warga Cina Benteng di lingkungan RW 04.

Melalui peran seni tari Cokek Sipatmo, perempuan Cina Benteng juga mulai dikenal dengan adanya undangan-undangan di acara-acara pemerintah kelurahan, kecamatan dan kota. Perempuan Cina Benteng juga kembali mengaktifkan Posyandu di lingkungan RW 04. Layanan Posyandu walaupun rutin dilakukan setiap bulan di RW 04, namun hanya sedikit ibu-ibu hamil dan anak balita yang mengaksesnya karena ketidaktahuan terhadap manfaat dan informasi Posyandu. Dengan cara pemberitahuan ke setiap rumah oleh kader-kader Koperasi LBJ, saat ini hampir semua ibu-ibu dengan balita membawa anaknya ke Posyandu. Terhadap capaian-capaian ini, pemerintah kelurahan memberikan apresiasi dengan memberikan satu pojok kreasi di area kantor kelurahan sebagai sekretariat koperasi dan pusat aktivitas mereka.

Dalam pengorganisasian perempuan, perempuan Cina Benteng kini mempunyai posisi tawar baik dalam keluarga dan juga pemerintahan kelurahan. Suara mereka didengar dalam pertemuan-pertemuan warga seperti Musrembang di kecamatan. Koperasi LBJ juga merupakan kekuatan kolektif yang memungkinkan aktivitas-aktivitas pemberdayaan yang sebelumnya tidak terencana menjadi mengemuka, seperti Kelompok Wanita Tani. Sekretaris Kelurahan Mekarsari mengatakan:

> "Sebelumnya mereka (perempuan Cina Benteng) sibuk dengan urusan masing-masing. Sangat beruntung bagi kami, warga kami tersentuh dengan itu. Dulunya (RW ini) sepi. Hanya ikut arus aja, tidak bernadi. Dengan adanya (koperasi) Lentera mereka lebih berani tampil ke depan, lebih berani menyuarakan hati mereka untuk pembangunan."

Program-program pemerintah kini mulai dapat diakses dan dirasakan oleh warga Cina Benteng melalui perantaraan anggota-anggota Koperasi LBJ. Bermula dari pengurusan layanan administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Lahir, Akta Nikah dsb sebagai salah satu bentuk pengakuan pemerintah, kini program-program lain sudah mudah untuk diakses seperti KIP dan KIS. Keaktifan Posyandu dan undangan-undangan untuk menampilkan tari Cokek dan musik Tehyan di acara-acara pemerintah juga merupakan bentuk inklusi sosial yang dirasakan komunitas Cina Benteng. Bagi pemerintah kelurahan, Koperasi LBJ menjadi pintu masuk untuk pengenalan berbagai program di lingkungan Cina Benteng.

Peranan ekonomi Koperasi LBJ juga sudah dirasakan para anggota yang sebagian besar adalah warga Cina Benteng. Akses pinjaman untuk modal pembentukan dan pengembangan usaha serta

keperluan keluarga semakin mudah tanpa harus membuka rekening bank yang memerlukan syarat-syarat administrasi tertentu, seperti membeli mesin jahit baru untuk usaha menjahit, penambahan modal usaha, pembayaran SPP sekolah anak, dan juga pinjaman untuk keperluan upacara peringatan hari kematian anggota keluarga adalah salah satu contoh. Sebelumnya, warga Cina Benteng hanya mengenal rentenir keliling yang mengatasnamakan 'koperasi' dengan bunga pengembalian yang mencekik, karena bisa bunga berbunga.

Adanya pengakuan dari pemerintah dan masuknya program-program ke kampung juga meningkatkan kepercayaan diri sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia termasuk pencarian kembali identitas sosial warga Cina Benteng di RW 04 yang selama ini mulai tergerus. Salah seorang anggota Koperasi LBJ menyatakan bahwa saat ini:

> "Saya merasa lebih dekat ke pemerintahan. Lebih banyak juga program yang masuk ke kampung. Kami diberikan kesempatan untuk ikut kegiatan yang ada di pemerintahan. Kami lebih diakui dan lebih dilihat oleh pemerintah. Tadinya kami tidak pernah dilibatkan. Apalagi waktu (perkenalan) tari Cokek, itu miring sekali pandangan pemerintah dan masyarakat. (Tari) Cokek kami yang dulu itu tidak seperti itu, kami mau mencoba mengembalikan seni pada nilai aslinya."

Penguatan Kelembagaan

Ketika PPSW pertama kali melakukan pendekatan dengan Komunitas Cina Benteng, mereka masih mengalami pe-*liyan*-an dengan warga Tangerang dan suku bangsa lainnya di sekitar tempat tinggal mereka. Hal ini ditambah minimnya peran Pemerintah Kota Tangerang untuk menjembatani dan mempersempit jurang sosial di antara mereka. Hal ini menyebabkan munculnya *self-stigma* dari Komunitas Cina Benteng sendiri yang menimbulkan perasaan apatis terhadap negara yang membuat jarak sosial dengan suku bangsa, ras, etnis dan agama lain.

Dengan memanfaatkan pengalaman sebagai organisasi pendampingan perempuan, PPSW melakukan perubahan masyarakat melalui peningkatan peran perempuan dalam Komunitas Cina Benteng. Pembentukan Koperasi LBJ berhasil dimanfaatkan sebagai wadah berorganisasi dan berkumpul perempuan. Dengan teknik pendampingan ini, PPSW berhasil mendampingi perempuan-perempuan Cina Benteng dalam berorganisasi dan bertatap muka dengan Pemerintah Kota Tangerang, sehingga menjadi awal pengakuan pihak lain terhadap Komunitas Cina Benteng secara umum, sekaligus pengakuan kemampuan perempuan anggota komunitas di dalam Komunitas Cina Benteng itu sendiri.

Komitmen dari PPSW dan dedikasi staf dalam mendampingi dan memfasilitasi perempuan-perempuan Cina Benteng ke tataran pemerintah kota sangat berhasil. Hal ini terlihat dari pelibatan pengurus dan anggota koperasi dalam acara-acara pemerintah kota seperti upacara bendera Hari Kemerdekaan, *bazaar*, dan malam kuliner yang menampilkan seni budaya dan kekhasan tradisi Komunitas Cina Benteng.

Rekognisi, Interaksi, Partisipasi Cina Benteng melalui Pemberdayaan Perempuan

Saat masuk pertama kali dan melakukan analisis sosial terhadap komunitas Cina Benteng, PPSW menyadari hambatan-hambatan yang akan dihadapi selama program berjalan. Satu hal yang cukup sulit adalah membangun rasa percaya perempuan Cina Benteng. Ke-liyan-an Cina Benteng terutama perempuan terhadap orang lain (baik dengan warga Cina Benteng sendiri dan non-Cina Benteng) sangatlah dalam. Hal ini merupakan kondisi yang timbul dari pengalaman yang kemudian timbul sebagai usaha proteksi diri yang terbangun dari kondisi sosial selama ini, "Aku-Kamu-Berbeda". Hal ini ditambah dari sikap apatis dan pragmatis terhadap program-program pemerintah.

Di sisi lain, perempuan Cina Benteng sangatlah bergantung kepada laki-laki, kepada ayahnya, kepada suami saat dia berkeluarga, dan kepada anak laki-lakinya saat dia menjanda. Untuk itu peran mereka seakan hanya untuk melayani kebutuhan laki-laki di dalam lingkung sosial, seperti menjaga dan mendidik anak-anak, membuatkan makanan untuk orangtua dan suami, serta membantu keluarga anak laki-lakinya. Walaupun disadari bahwa peran perempuan Cina Benteng juga berkontribusi bagi perekonomian keluarga. Di RW 4, banyak perempuan yang bekerja dan bergerak pada usaha kecil seperti menjadi buruh cuci, asisten rumah tangga, penjahit, pemulung barang bekas dan rongsokan, juga pedagang (bubur, sayur mayur, kue, gorengan hingga pakaian).

Setelah intervensi, perempuan didorong untuk menggali berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar. Kini mereka juga membatik dengan beragam corak yang berasal dari hasil kreasi yang diilhami oleh berbagai obyek budaya dan atraksi alam di lingkungan Komunitas Cina Benteng. Di antara corak tersebut adalah kelenteng, pintu irigasi sungai, bunga sepatu, perahu pecun, alat musik tehyan, lampion, burung garuda, daun sirih dan ondel-ondel. Di masa pandemi, kerajinan batik khas Cina Benteng dikembangkan lebih lanjut menjadi mas ker yang laku dijual dan mendatangkan keuntungan ekonomi untuk keluarga.

Pemerintah daerah, kelurahan dan kota, tidak merasa bahwa ini adalah suatu permasalahan sosial yang membutuhkan pendekatan dan perlakuan yang berbeda sebagai bagian dari Kota Tangerang. Permasalahan yang timbul seperti minimnya pengaksesan warga Cina Benteng terhadap program sosial dan juga administrasi kependudukan yang tidak lengkap seperti Akta, KK, dan KTP dianggap sebagai suatu kemalasan warga untuk mengurusnya. Seorang anggota Koperasi LBJ mengatakan:

> "Dulu jangankan ketemu pemerintah kota, yang namanya lurah saja kami tidak tahu yang mana. Jadi kalau mau bikin (surat atau keterangan adminduk lain) apa-apa kami tidak tahu prosesnya. Kalau ada uang kami bisa menitip ke orang, kalau tidak ada (uang) ya tidak (bikin). Dulu perasaan kita juga tidak membutuhkan (adminduk), (karena) program-program dari pemerintah juga tidak sampai ke kita."

Pelibatan perempuan dalam sosial-politik di lingkungan dan kelurahan hampir tidak ada. Posyandu yang merupakan satuan kerja kelompok tidak terlihat aktivitasnya di lingkungan RW 04.

Kegiatan berkumpul dan berkelompok seperti arisan juga tidak ada (kecuali berjudi).

Budaya Cina Benteng juga seringkali terstigma baik dari masyarakat lain dan juga dari Pemkot sendiri. Sebagai contoh, tari Cokek, yang selama ini berkembang dianggap seronok dan mengumbar sisi seksualitas dari gerakan-gerakannya. Padahal hakikinya tari Cokek Sipatmo adalah tarian yang indah dengan banyak muatan budaya. Pada saat PPSW mendorong para perempuan Cina Benteng untuk merevitalisasi tari Cokek dan mengenalkannya kembali, ada resistensi dari Pemkot karena pandangan awal dan ketidaktahuan mereka tentang Cokek. Seperti yang dikatakan seorang staf kedinasan pemerintah kota:

> "Saya pribadi termasuk orang Tangerang, saya kenal dengan Tari Cokek. Tapi yang saya pahami tari ini (bersifat) hiburan. Dan saya tinggal di lingkungan Cina Benteng, yang notabene kalau mereka ada hajatan, itu ada 'cokeknya'. Itu sudah melekat di benak masyarakat. Artinya, kami kadang-kadang sama orangtua dilarang untuk melihat. Tapi belakangan setelah kehadiran PPSW ternyata cokek itu tidak hanya yang bersifat hiburan, setelah saya kenali ternyata ada yang sifatnya tari persembahan, gerakannya punya nafas-nafas tertentu yang punya *spirit*. Dulu memang tuan tanah yang menjadikan tari cokek untuk hiburan."

PPSW percaya bahwa pendekatan program yang dijalankan melalui kunjungan secara intensif ke individu-individu merupakan pendekatan yang efektif dalam membangun visi sekaligus memetakan posisi perempuan Cina Benteng terhadap PPSW sebagai pendamping dan pihak luar. Pengalaman PPSW mendampingi perempuan selama puluhan tahun juga merupakan modalitas dalam pendampingan dan pemberdayaan perempuan di Cina Benteng.

PPSW mulai mendampingi komunitas Cina Benteng tidak lebih dari lima tahun. Dalam waktu yang singkat, capaian-capain ini merupakan suatu bentuk efisiensi strategi implementasi yang dikembangkan oleh PPSW. Akselerasi capain program tidak dapat terjadi apabila strategi implementasi dilakukan tanpa adanya analisis sosial dan penilaian kebutuhan dari masyarakat dampingan.

Dalam hal ini, PPSW menerapkan peribahasa bahwa "Jika Anda mendidik seorang pria, Anda mendidik satu manusia. Jika Anda mendidik seorang perempuan, Anda mendidik seluruh bangsa." Ketika wanita berdaya, segenap komunitas ikut berdaya.

Bergerak ke depan

Sebelum Program Peduli dilaksanakan, penerimaan sosial belum sepenuhnya terasa oleh Komunitas Cina Benteng. Dua kelompok yang tereksklusi di Komunitas Cina Benteng adalah Komunitas Cina Benteng secara umum, dan kelompok perempuan Cina Benteng secara khusus.

Melalui Program Peduli, Komunitas Cina Benteng mengembangkan Koperasi LBJ, yang menjadi pembuka jalan perubahan bagi kedua masalah eksklusi sosial di atas. Melalui koperasi, kelompok perempuan

memiliki wadah untuk berekspresi secara sosial dan finansial, sekaligus membuka akses pengurusan KTP bagi seluruh anggota Komunitas Cina Benteng.

Perempuan juga baru mengalami kesetaraan jender secara penuh, melalui pelaksanaan Program Peduli. Sebelumnya, kelompok perempuan tidak hanya mengalami subordinasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, namun juga dalam kehidupan berkeluarga. Dengan dibangunnya Koperasi LBJ, peran perempuan mengalami peningkatan cukup tajam dan kesetaraan jender menjadi bagian dari kehidupan sosial kemasyarakatan dan keluarga di Komunitas Cina Benteng.

Hasil pendampingan pun berbuah manis. Koperasi LBJ kini memiliki aset sejumlah Rp 1,5 Milyar dan anggota sebanyak 700 orang. Koperasi ini menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi untuk perempuan dan keluarga di Cina Benteng, sekaligus menjadi pilar inklusi yang kokoh di kampung budaya tehyan.

Tantangan berikutnya adalah menjaga nyala perjuangan dan nyali kepemimpinan perempuan Cina Benteng tetap hidup supaya terus mandiri mengelola koperasi guna menyejahterakan anggota, keluarga dan komunitas sekitar pasca pendampingan dari Program Peduli usai. Program kaderisasi perempuan Cina Benteng untuk menyiapkan generasi kepemimpinan baru di masa mendatang juga mendesak dilakukan. Dalam konteks ini, mengembangkan kapasitas kader muda terutama aspek manajerial dan literasi media sosial di era digital cukup krusial diagendakan, demi keberlanjutan.

Dukungan dan pengakuan dari pemerintah terhadap kepeloporan perempuan Cina Benteng adalah modal sosial yang perlu terus dikapitalisasi. Ke depan, perlu penjajakan kemitraan publik dan swasta yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen (pemerintah, masyarakat dan perusahaan) dapat terwujud. *Champion* di ketiga lapisan itu harus terus menerus diidentifikasi supaya setiap pergantian kepemimpinan akan tetap terpantau dan konsolidasi/kolaborasi yang berkesinambungan bisa terus terjadi.

Berbagai kegiatan warga diwadahi. Kelembagaan diperkuat. Perempuan diberdayakan. Warga Cina Benteng kini sepenuhnya berdiri setara dan bermartabat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menyusuri kawasan Pecinan Benteng, kita akan menemukan roh kehidupan masa lalu yang masih lestari. Nikmatilah pengalaman berinteraksi dengan Henny Lim dan warga Cina Benteng yang mandiri, berdaya, berdikari. Saya undang Anda membuktikan sendiri transformasi yang terjadi yang dipelopori oleh para perempuan Cina Benteng.

BAB 6

BERDAYA DI SUNGAI DAN DI PANTAI: KOMUNITAS DAYAK KENYAH DAN KANGEAN DI ERA KESETARAAN

(Yayasan Desantara)

BAB INI BERISI cerita perubahan di dua lokasi yang berbeda namun lembaga pendamping yang sama. Yayasan Desantara, dengan dukungan Program Peduli, melakukan pemberdayaan Komunitas Dayak Kenyah Lepoq Jalan yang ruang hidupnya berada di kampung sepanjang Sungai Payang dan komunitas pesisir pantai di Pulau Kangean.

Cerita pendampingan Desantara bermula dari Lokasi Desa Lung Anai berada di Kecamatan Loa Kulu, sekitar 38 kilometer dari Kota Tenggarong. Desa ini ditempuh selama dua jam perjalanan dari Samarinda, ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Desa Lung Anai dilintasi Sungai Payang yang airnya melimpah sepanjang musim. Dulunya, Desa Lung Anai adalah bagian dari desa Sungai Payang. Namun tahun 2007, desa ini dimekarkan dan dinobatkan sebagai desa budaya oleh pemerintah kabupaten Kutai Kertanegara. Dengan penobatan sebagai desa budaya, mungkin banyak pengunjung akan mengira masyarakat Dayak yang tinggal di sini masih berpola hidup tradisional, yaitu berladang dan sesekali berburu. Sebelum kecewa, bayangan mengenai suku terasing di pedalaman perlu disesuaikan karena kondisi saat ini sudah berubah.

Masyarakat Suku Dayak Kenyah Lepoq Jalan sebelumnya tinggal di wilayah Apo Kayan yang berbatasan dengan Malaysia. Mereka akhirnya menetap di desa Lung Anai karena diharuskan pindah dari tanah leluhur atas perintah Jenderal Basri Pallaguna dan penggantinya, Herman Musakabe. Dua petinggi tentara di wilayah utara Kalimantan itu mendapat mandat dari Jakarta untuk mengungsikan orang-orang perbatasan karena konfrontasi yang dikenal dengan peristiwa "Ganyang Malaysia" pada tahun 1960-an. Saat itu, Pemerintah Orde Lama menyuruh komunitas Dayak keluar dari hutan dan mulai bertempat tinggal mendekati kota, memeluk agama yang diakui oleh negara dan meninggalkan ritual-ritual yang biasa dilakukan.

Agama Dayak Kenyah sebelumnya adalah kepercayaan lokal animisme, yang menghormati nenek moyang dan alam. Akan tetapi hal itu dianggap sebagai perilaku kafir oleh rezim yang berkuasa. Sehingga mereka harus diselamatkan dengan agama baru yang menjanjikan keselamatan di akhirat. Tradisi-tradisi yang selama ini dilakukan dipandang sebagai hal yang kafir dan harus segera ditinggalkan. Sehingga hal ini juga dapat menjadi penyebab semakin jauhnya orang-orang Dayak Kenyah dari tradisi dan kebudayaannya.

Apo Kayan sendiri selalu digambarkan sebagai surga yang dirindukan oleh orang-orang Dayak Kenyah. Tempat itu surga karena keindahan alamnya, tanahnya yang subur, dan airnya yang jernih. Namun, dengan terpaksa surga tersebut harus ditinggalkan demi mencari tempat yang lebih aman dari konflik.

Awalnya mereka mulai bergerak berpindah ke arah selatan. Perpindahan ini selain berbentuk memutar, mengikuti musim panen tanaman pangan tertentu, juga sesuai hasil observasi ketua kelompok, yang menginformasikan tentang kesuburan dan ketersediaan air dan pangan di suatu wilayah. Selama berpindah tempat tinggal, mereka membawa serta seluruh sanak keluarga, ternak peliharaan, peralatan rumah tangga, dan perangkat pertanian. Gerakan berpindah tersebut berhenti, setelah mereka menyadari, bahwa tinggal menetap akan memudahkan pendidikan anak-anak mereka, serta dapat memperoleh layanan dasar kesehatan yang lebih baik. Masyarakat Suku Dayak Kenyah Lepoq Jalan memilih untuk menetap di wilayah Desa Sungai

Payang, karena menurut mereka wilayah ini cukup layak menunjang kehidupan mereka selanjutnya.

Sayangnya, di wilayah Desa Sungai Payang, telah tinggal komunitas lainnya, yaitu komunitas Suku Dayak Punan, Banjar, Kutai, dan Bugis. Seluruh komunitas tersebut juga telah mengklaim wilayah lahan perkebunan mereka. Kebiasaan pengelolaan lahan Suku Dayak Kenyah Lepoq Jalan yang biasa berpindah dan memanfaatkan lahan yang sudah lebat kembali berbenturan dengan pengelolaan lahan suku-suku yang telah tinggal lebih dulu di wilayah Desa Sungai Payang. Meskipun kepemilikan tersebut belum menguasai seluruh lahan dan juga digunakan secara berpindah-pindah. Kehadiran perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan tambang batubara menambah rumit pengelolaan lahan, karena sebagian lahan yang dikelola oleh masyarakat Suku Dayak Kenyah Lepoq Jalan juga berada di dalam pengelolaan perusahaan HTI. Akibat dari pengelolaan lahan di atas, masyarakat Suku Dayak Lepoq Jalan tidak leluasa mengelola lahan mereka, termasuk untuk tempat tinggal.

Orang-orang Dayak Kenyah ini bermigrasi menyusuri sungai. Dimulai dari suatu tempat bernama Jong, sambil menyusuri Sungai Kayan dan Sungai Lamp menuju hilir, mereka mencoba mencari tempat tinggal dan tempat berladang dari satu tempat ke tempat lainnya, hingga pada akhirnya mereka menetap di Lung Anai. Ketika sibuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya inilah orang Dayak Kenyah semakin jauh dengan tradisi dan kebudayaannya. Padahal, ketika masih di Apo Kayan, permukiman lama itu telah menyediakan tempat hidup lengkap dengan suasana kosmologi kebudayaan orang Dayak Kenyah. Tanpa disadari, meninggalkan Apo Kayan berarti meninggalkan akar kebudayaan mereka.

Pada 2005, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, menyetujui pemekaran Desa Sungai Payang, menjadi Desa Lung Anai sebagai desa khusus tempat tinggal masyarakat Suku Dayak Kenyah Lepoq Jalan, dan menjadikannya Desa Budaya. Pengukuhan ini sangat mendukung masyarakat Suku Dayak Kenyah Lepoq Jalan untuk memperoleh ruang hidup. Namun demikian, pengukuhan ini masih menyisakan masalah, karena tidak disertai oleh kepemilikan lahan kebun, yang menjadi sumber pangan masyarakat Suku Dayak Kenyah Lepoq Jalan.

Program Peduli, melalui Desantara, mendorong kebijakan yang memberi kepastian ruang hidup

dan penghidupan Komunitas Dayak Kenyah Lepoq Jalan di Desa Lung Anai. Upaya ini dilakukan melalui tata kelola pemerintahan desa yang inklusif yang memungkinan terjadinya keharmonisan hidup antara masyarakat Dayak Kenyah Lepoq Jalan dan komunitas di desa-desa sekitarnya

Kondisi eksklusi sosial yang dirasakan oleh masyarakat Suku Dayak Kenyah Lepoq Jalan terdiri dari pelayanan dasar. Sebagian anak-anak usia sekolah tidak dapat bersekolah karena harus mengikuti orangtuanya bekerja di ladang dan kebun, namun di sisi lain, tidak ada kepastian sumber penghidupan karena tidak ada jaminan kepastian lahan. Adapun terkait penerimaan sosial, mereka dianggap sebagai pendatang oleh masyarakat desa sekitarnya, bahkan dianggap sebagai komunitas penyerobot lahan dan pembakar hutan.

Dalam pandangan orang Dayak Kenyah, lahan yang dapat digarap itu bagian dari *himba* (hutan rimba). Tentunya himba berdasarkan pandangan mereka adalah sesuatu yang tidak dapat dimiliki ataupun diklaim. Tetapi himba menurut orang Dayak Kenyah tetap dapat digunakan tanpa harus dimiliki ataupun diklaim. Hal ini jelas sangat berbeda dengan logika pemerintah, dalam hal ini hutan pun diklaim milik negara. Sejarah migrasi orang Dayak Kenyah di Lung Anai tampaknya menambah kerumitan mereka dalam mengakses lahan dan tradisi perladangan berpindahnya. Karena hingga saat ini mereka masih dianggap sebagai pendatang. Tentunya anggapan tersebut memiliki konsekuensi terbatasnya akses mereka terhadap lahan karena jauh sebelum mereka datang telah hidup kelompok-kelompok lain. Dayak Kenyah Lepoq Jalan di Lung Anai terjepit di antara

klaim-klaim atas tanah, dan karena posisinya yang lebih lemah, mereka dianggap sebagai penyerobot lahan.

Adapun hal itu menyebabkan orang Dayak Kenyah sering dituduh sebagai penyebab kebakaran hutan adalah perladangan berpindah yang melibatkan praktik *nutag*. Nutag adalah cara membuka lahan dengan membakar semak-semak dan pohon. Terdapat beberapa tahapan dalam praktik berladang berpindah yang dilakukan orang Dayak Kenyah. Pertama, menebas semak-semak dan pohon (lemidiq dan nepeng). Kedua, membakar semak-semak dan pohon (nutag). Ketiga, menugal dan menanam (nugan dan lemaha). Keempat, menjaga ladang dan menyiangi rumput (ma'boy), hingga yang terakhir tinggal panen. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan setiap bulan Juni hingga April di tahun berikutnya.

Sebelum orang-orang Dayak Kenyah Lepoq Jalan membakar lahan, mereka telah mempersiapkan semuanya. Dimulai dari membuat parit-parit untuk memisahkan lahan yang akan dibakar dengan lahan yang tidak akan dibakar, hingga menyiapkan air untuk mengantisipasi ketika kebakaran melampaui lahan yang direncanakan. Dalam konteks saat ini, persiapan itu termasuk dengan izin kepada perusahaan-perusahaan yang lahannya berdekatan dengan lahan warga.

Membakar lahan tampaknya menjadi satu-satunya pilihan orang Dayak Kenyah. Selain karena ekonomis dan praktis, membakar dapat meningkatkan kesuburan tanah yang sebagian besarnya adalah lahan gambut. Dengan membakar semak-semak dan sisa-sisa pepohonan yang telah ditebas, diharapkan unsur hara didapat dari abu bekas pembakaran. Pengetahuan ini telah diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Terdapat hukum adat terkait sistem berladang berpindah, termasuk jika lalai membakar lahan melebihi yang seharusnya. Kelalaian ini akan dihukum berat, termasuk dikucilkan. Selain itu, terdapat juga aturan yang mengharuskan setiap selesai panen ladang ditanami dengan tanaman keras dan baru dijadikan ladang lagi 20-25 tahun ke depan. Orang Dayak Kenyah biasanya akan mencari lahan lain untuk dijadikan ladang. Praktik perladangan berpindah hanya membuat penggarapnya saja yang berpindah-pindah, sedangkan rumah tempat tinggal tetap berada di satu titik.

Stigma terlanjur melekat pada orang Dayak Kenyah. Tuduhan seperti perebut lahan dan pembakar hutan akrab di telinga orang-orang Dayak Kenyah di Lung Anai. Ditambah lagi dalam pandangan pemerintah juga sudah lama orang-orang Dayak dianggap sebagai penyebab kerusakan hutan di Kalimantan. Masyarakat adat, lebih jelasnya orang-orang Dayak, dianggap mengancam ekosistem hutan, mengurangi kelestarian spesies, serta menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan. Padahal, dengan pola perladangan berpindah, yang mengharuskan orang-orang Dayak untuk menutup lahan dengan tanaman keras supaya terjadi regenerasi unsur hara, ini secara langsung telah menyumbang keberagaman tanaman di hutan Kalimantan.

Melalui Program Peduli, Desantara membantu masyarakat Suku Dayak Kenyah Lepoq Jalan untuk pengelolaan lahan kebun yang adil, baik dengan masyarakat Desa Sungai Payang, maupun dengan perusahaan HTI di sekitar Desa Lung Anai, yaitu PT Itchi Hutani Manunggal (PT IHM). Salah satu capaian yang diperoleh dari pelaksanaan Program Peduli adalah tercapainya nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara PT IHM dengan masyarakat Desa Lung Anai. MoU ini dibangun atas dasar saran dari pemerintah, yaitu dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

MoU tersebut berisi tiga hal, yaitu: *pertama*, PT IHM memberikan keleluasaan bagi masyarakat Suku Dayak Kenyah Lepoq Jalan untuk mengolah lahan kebun mereka yang berpindah dengan cara memutar, sesuai kesuburan tanah yang siap diolah Kembali. Dua, PT IHM memberikan bibit tanaman dan pupuk kepada masyarakat, untuk ditanami di sela-sela pohon kayu produksi yang dikelola PT IHM. Dan tiga, setelah ijin HTI habis, lahan HTI akan diserahterimakan kembali kepada masyarakat Desa Lung Anai.

MoU di atas dinilai sangat menguntungkan bagi masyarakat Desa Lung Anai. Mereka tidak lagi khawatir

tentang lahan usaha perkebunan mereka. Masyarakat Desa Lung Anai juga sepakat untuk tidak berpindah mengolah lahan di tempat yang jauh. Mereka hanya akan memutar di sekitar Desa Lung Anai.

Perjuangan untuk melanjutkan hidup di tengah pembangunan yang berderap menjadi strategi untuk beradaptasi. Proses adaptasi dengan adopsi cara hidup yang berbeda menyisakan problem eksistensial. Identitas suku Dayak yang melekat dalam cara hidup dan cara pandang perlahan semakin terkikis. Belakangan beberapa orang warga Lung Anai ini tergiur oleh iming-iming uang yang ditawarkan oleh korporasi yang beroperasi di desa. Warga masyarakat adat mulai meninggalkan ladang untuk bekerja di pabrik. Hal ini semakin mempercepat punahnya tradisi suku Dayak.

Guna mengantisipasi potensi makin teralienasinya anak muda masyarakat Dayak Kenyah Lepoq Jalan, dilakukan upaya penulisan *folklore* yang berkaitan dengan pengelolaan lahan. Sayangnya, *folklore* yang dikumpulkan masih berupa cerita-cerita lisan, yang tidak semuanya berkaitan langsung dengan cara pengelolaan lahan yang dilakukan sesuai tradisi masyarakat Dayak Kenyah Lepoq Jalan. Antologi cerita lisan tersebut tetap dinilai berfaedah bagi generasi muda Dayak Kenyah Lepoq Jalan karena banyak cerita tersebut sudah tidak dikenal lagi oleh generasi muda. Menulis adalah menolak lupa. Mencatat cerita rakyat adalah legacy yang ditinggalkan supaya anak muda mengingat asal usul leluhur sekaligus mengenal jati diri mereka.

Selain MoU dengan PT IHM, masyarakat Desa Lung Anai juga didampingi untuk membangun kerja sama dengan Desa Sungai Payang, yaitu membangun kesepakatan batas lahan kelola dengan masyarakat Desa Sungai Payang. Saat evaluasi ini dilakukan, kesepakatan batas lahan kelola tersebut, baru sampai pada tahap pelatihan penentuan lahan kelola menggunakan peta digital. Kepala Desa Sungai Payang masih menunggu kesepakatan masyarakat Desa Lung Anai untuk menentukan lahan kelola mereka, sebelum didiskusikan dengan masyarakat Desa Sungai Payang.

Konflik pun sebenarnya ada hikmahnya. Keberadaan perusahaan-perusahaan HTI dan tambang batubara di sekitar desa giat melakukan program pertanggungjawaban sosial perusahaan. Berbagai kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini disalurkan melalui Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu (FPMLK). Loa Kulu adalah nama kecamatan yang menaungi 15 desa, termasuk di antaranya adalah Desa Lung Anai dan Desa Sungai Payang. Melalui FPMLK, Desa Lung Anai saat ini memiliki bangunan sekolah dasar hingga 5 kelas, gereja, dan puskesmas pembantu dengan satu orang bidan desa.

Program Peduli banyak terlibat menyelesaikan masalah tenurial dan masalah eksklusi sosial. Masalah eksklusi sosial yang dirasakan oleh masyarakat Desa Lung Anai sudah mulai menipis, seiring dengan meningkatnya

layanan publik yang disediakan, sehingga yang sangat terasa saat ini adalah masalah pengelolaan lahan, yang diakui beberapa kali disangkutpautkan dengan stigma 'kaum pendatang' kepada masyarakat Desa Lung Anai. Namun pelabelan stigma tersebut tidak terkait langsung pada konflik lahan yang terjadi pada masyarakat Desa Lung Anai.

Penetapan Lung Anai sebagai desa mandiri secara definitif (padahal secara teritorial tidak layak menjadi desa karena populasinya terlalu kecil) dan pemberian gelar 'Desa Budaya' (karena identitasnya sebagai wilayah beretnis Dayak Kenyah) dapat menjadi modal sosial untuk lebih bebas mengekspresikan identitas adat dan melestarikan budaya. Dengan dijadikannya Lung Anai sebagai desa, berarti identitas orang Dayak Kenyah di Lung Anai sudah diakui keberadaannya. Dari sini upaya untuk mengenal kembali tradisi dan kebudayaan menjadi sebuah tuntutan untuk nama yang mereka sandang. Sejak didaulat menjadi Desa Budaya, kehidupan masyarakat terus berjalan normal. Akan tetapi, tradisi itu tampaknya sudah terlalu jauh mereka tinggalkan dibanding pada saat mereka masih ada di Apo Kayan. Keadaan serba dilematis. Melanjutkan tradisi artinya melanggar hukum dan menghentikannya akan membuat mereka kehilangan jati diri. Identitas Dayak yang melekat dalam cara hidup dan cara pandang perlahan semakin terkikis.

Setelah menyusuri sungai, kita tiba di pantai pesisir Pulau Kangean. Secara administratif, Kangean termasuk Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Kabupaten Sumenep terbagi menjadi dua wilayah, yaitu daratan (*dereden*) dan kepulauan (*polo*). Pembagian wilayah ini membentuk konstruksi sosial orang dari kedua wilayah itu, yaitu orang daratan (*oreng dereden*) dan orang pulau (*oreng polo*). Konstruksi ini menentukan persepsi dimana orang daratan dipandang lebih tinggi dari orang kepulauan, dan sebaliknya. Cara pandang ini berhubungan dengan interaksi antara pusat kekuasaan dengan wilayah kekuasaan. Pusat kekuasaan sejak Sumenep masih di bawah Kerajaan Singasari sampai saat ini berada di Sumenep daratan. Pernah satu masa, Pulau Kangean dijadikan sebagai tempat pembuangan lawan-lawan politik penguasa lokal dan kolonial serta narapidana.

Konstruksi tersebut sampai saat ini masih tersisa, yaitu stigma sosial terhadap orang Kangean. Setiap pejabat yang diangkat di Kangean dianggap dibuang. Orang Kangean dipersepsikan lebih rendah dan dinyatakan sebagai orang pulau (*oreng polo*) dan mereka menyebut orang dari daratan (*dereden*) sebagai orang kota (*oreng kotta*) dan orang negara (*oreng nagera*).

Penduduk Pulau Kangean berjumlah 78.468 jiwa dan 22.300 KK dengan kepadatan penduduk sebesar 173,11 orang per kilometer. Orang Kangean hampir seluruhnya beragama Islam. Ajaran Islam diinterpretasi dan diaktualisasikan dalam kerangka kebudayaan Kangean sehingga ada sedikit variasi.

Desa Pajanangger merupakan satu desa di Pulau Kangean yang menjadi wilayah dampingan Yayasan Desantara pada periode program 2017-2018. Berbasis pada penelitian pelayanan publik di wilayah terpencil yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, Yayasan Desantara memilih desa di ujung selatan Pulau Kangean yang menjadi potret buruk pelayanan publik di wilayah terpencil. Ironisnya wilayah ini tidak masuk kebijakan akselerasi pembangunan seperti yang dirasakan oleh pulau-pulau terluar walaupun kondisinya juga memprihatinkan. Jalan dari kota kecamatan ke desa ini begitu buruk sampai puncaknya pada musim penghujan ketika jalan sama sekali tak bisa dilalui. Warga harus menggunakan jalur sungai mengitari hutan bakau ke arah laut. Situasi ekonomi yang tidak begitu bagus dan persoalan infrastruktur yang tak kunjung mengalami perbaikan membuat lebih dari separuh warga usia produktif memilih untuk bekerja di luar desa, misalnya merantau ke Malaysia atau negara-negara Timur Tengah.

Tingginya arus migrasi dari Kangean ke kota-kota besar, bahkan ke Malaysia sudah lama menjadi kekhawatiran masyarakat. Pasalnya dari fenomena migrasi itu juga telah mengundang permasalahan lainnya seperti kenakalan remaja. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan pemuda di sana, bahwa Kangean menjadi wilayah rawan narkoba yang disalurkan dari Malaysia. Bagi anak-anak yang terbatas aksesnya kepada narkoba atau obat-obatan terlarang, mereka menyalahgunakan obat batuk yang dijual di warung-warung untuk dikonsumsi melebihi dosis. Selain itu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bukanlah pilihan utama para pemuda di Kangean, khususnya di Pajanangger. Terutama ketika kebutuhan untuk memenuhi biaya hidup semakin mendesak, maka menjadi TKI di Malaysia menjadi jalan keluar terbaik. Hal itu pula yang digunakan oleh kebanyakan guru honorer di Pajanangger untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yang seringkali tidak dapat dipenuhi hanya dengan upah dari mengajar di sekolah. Semua masalah tersebut berjalin kelindan layaknya benang kusut yang sulit untuk diurai.

Perkenalan dengan Program Peduli menjadi katalisator perubahan menuju perbaikan desa. Yayasan Desantara berkolaborasi dengan warga yang diorganisir oleh Kepala Desa Pajanangger menjalankan berbagai kegiatan dalam menerjemahkan ide inklusi sosial.

Kegiatan dikelompokkan ke dalam beberapa tahap, tapi yang pertama dan terutama dimulai dengan pengelolaan dan penguatan basis data desa. Bersama dengan beberapa pemuda desa, akhirnya data desa yang cukup akurat dapat diproduksi dan digunakan oleh berbagai pihak untuk berbagai tujuan.

Kedua, pengembangan potensi ekonomi desa. Hasil dari pemetaan, muncul ide pengembangan wisata pantai teluk Sapoong. Pada tahun pertama Program Peduli, telah terbentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang mengelola objek wisata ini. Belasan juta rupiah didapat dari tiket masuk dan retribusi parkir. Sebuah langkah terobosan yang membuka mata warga desa mengenai kerja keras dan kejelian menangkap peluang. Puncaknya ketika diadakan Festival Pesisir Kangean

I yang mengundang Dinas Pariwisata Kabupaten Sumenep, Universitas Trunojoyo dan berbagai lembaga lain. Warga begitu antusias menyambut lahirnya potensi ekonomi baru di desa mereka.

Tahap ketiga adalah advokasi kebijakan. Pengembangan wisata membawa perjalanan program pada kerjasama intensif dengan dinas pariwisata Kabupaten Sumenep. Dengan melakukan pendekatan pada dinas yang mengelola wisata di Kabupaten ini, pengelola program mencoba melakukan pendekatan yang berbeda untuk memperkenalkan ide inklusi sosial. Dalam satu kesempatan, Kepala Dinas Pariwisata Sumenep menyampaikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Yayasan Desantara dan berkomitmen untuk mengintegrasikan wisata pantai Teluk Sapoong dalam destinasi wisata Kabupaten Sumenep.

Adapun beberapa situasi yang masih menjadi catatan dan menjadi landasan program selanjutnya adalah belum adanya desain pengembangan wisata desa yang diakomodir dalam rencana pembangunan. Kemudian masih lemahnya kapasitas pokdarwis dan kurangnya promosi potensi ekonomi kreatif desa.

Oleh karenanya, Program Peduli dijalankan dengan menggunakan tiga strategi utama untuk mencapai tujuan program, yaitu melakukan penguatan kapasitas kader desa, penguatan data desa, dan mendorong kepedulian publik melalui pengembangan potensi desa, terutama pariwisata. Tiga strategi ini tidak selalu berjalan linear namun berpola maju-mundur sesuai dengan konteks situasi yang dihadapi di lokasi program.

Sejauh ini program memiliki dampak cukup signifikan pada penguatan layanan dasar dan

kebijakan inklusif di tingkat desa. Tercatat 78 warga desa dapat memperoleh kartu identitas dengan program jemput bola bekerja sama dengan Dukcapil Kecamatan Pajannangger. Sedangkan dalam RKP Desa Pajannangger telah menggunakan data hasil pemetaan sebagai acuan.

Fokus desa untuk mengelola potensi ekonomi alternatif desa menjadi penyemangat anak muda untuk terlibat di dalamnya. Satu cerita yang mengemuka terjadi pada pemuda Iqbal, warga dusun Pajen. Selepas SMA ia memutuskan untuk bekerja di Malaysia selama lima tahun di berbagai proyek konstruksi yang dikelola oleh para mandor dari desa Pajennangger. Selama di Malaysia, ia berkumpul dengan para sastrawan negeri jiran. Kegemarannya menulis puisi mengantarkannya ke beberapa forum diskusi sastra terpandang di Malaysia.

Setelah menghabiskan masa bertahun-tahun di Malaysia dan Batam, ia memutuskan untuk pulang ke Pajannangger. Tahun pertama ia gunakan untuk terlibat dalam kegiatan penanaman bakau di pantai sekitar desa. Bersama beberapa pemuda di desa Pajanangger, ia mengajak pemuda desa untuk menggali kembali kekayaan alam desa. Usaha ini mendapat respon negatif dari warga desa yang menganggap bakau sebagai tanaman pengganggu.

Tak patah semangat, Iqbal menginspirasi beberapa anak muda untuk menghidupkan kembali Karang Taruna. Melalui komunitas ini ia mempopulerkan kembali destinasi wisata lokal melalui media sosial. Ia berharap kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Desantara dapat menambah kecintaan anak muda desa untuk membangun desanya.

Dampak program terhadap pengarusutamaan jender dan perlindungan hak anak belum banyak terlibat. Ketimpangan relasi jender menjadi satu masalah yang pelik di desa ini. Perempuan harus menanggung beban untuk mengelola wilayah domestik dan mengurus anak ketika suami menjadi pencari nafkah keluarga. Persoalan menjadi lebih pelik, terutama bagi masa depan anak, ketika kedua orang tuanya bekerja di luar negeri. Yayasan Desantara bersama pemerintah desa melihat hal ini sebagai persoalan yang harus dicarikan solusi. Sejauh ini konsep yang akan dikembangkan oleh pemerintah desa adalah mengajukan Desa Pajannangger sebagai Desa Buruh Migran Kreatif (Desmigratif) ke Kementerian Tenaga Kerja.

Upaya inklusi sosial untuk masyarakat yang terpencil secara geografis memerlukan upaya yang programatik dari dua arah yaitu inisiatif dari pemerintah dan cara-cara persuasif dari komunitas. Dalam pengalaman Program Peduli ini, terlihat bagaimana Kabupaten Sumenep tidak cukup punya visi untuk mengelola daerahnya yang berupa daratan dan lautan karena termasuk wilayah kepulauan. Pengembangan wilayah dengan kondisi geografis yang spesifik seperti ini berbeda dengan kabupaten lain yang hanya memiliki wilayah daratan atau hanya lautan. Misalnya, dalam hal pengembangan komoditas perikanan, para nelayan Pulau Kangean harus menjual ikan ke Pulau Sapeken. Hasil laut yang melimpah di Pulau Kangean tidak dapat dilempar ke pasar secara efektif efisien karena ketiadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) lengkap dengan sarana prasarana penunjang seperti sistem pendingin.

Terobosan penggunaan teknologi informasi yang diharapkan dapat mengatasi persoalan jarak geografis tidak menjadi prioritas. Beberapa

layanan dasar yang harusnya dapat lebih efektif jika didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet masih saja dijalankan dengan cara konvensional. Seperti dalam pengurusan KTP dan Kartu Keluarga yang harus dilakukan di Kota Sumenep yang berjarak 10 jam perjalanan kapal. Hal ini mengakibatkan tertundanya pemenuhan layanan dasar bagi warga kepulauan seperti Kangean. Tak jarang situasi ini mengakibatkan terjadinya maladministrasi dan tindakan korupsi.

Perlu jalan panjang untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Dayak Kenyah Lepoq Jalan dan masyarakat di Kangean. Namun langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membangun identitas kolektif kesukuan melalui kerja-kerja kebudayaan jangka panjang. Kegiatan temu komunitas antar desa yang diinisiasi oleh anak muda untuk mengembangkan wisata lokal menjadi kegiatan yang perlu didukung. Melalui pertemuan dan kerja-kerja lintas komunitas yang diamplifikasi oleh media sosial seperti inilah kesadaran akan nasib Dayak Kenyah dan Kangean akan berhasil dirumuskan ulang. Selanjutnya, kerja advokasi guna mendorong upaya untuk mempersempit kesenjangan dan menjembatani upaya para pihak dalam penyediaan pelayanan publik perlu lebih gencar disuarakan.

SABUK NUSANTARA.51

BAB 7

PATAKA, SYAIR KEKELUARGAAN PENGUSIR KETERASINGAN SUKU TOPO UMA SIGI

(Karsa Institute)

"MAROHO ADA, MANIMPU Ngata". Ini prinsip hidup masyarakat adat di kawasan pedesaan di kecamatan Pipikoro dan Kulawi, kabupaten Sigi, provinsi Sulawesi Tengah. Arti ungkapan Kulawi yang kerap dituturkan oleh para totua adat itu intinya adalah adat yang kuat akan membuat negeri yang terletak di area pegunungan ini aman, damai, teratur, tertata, harmonis, inklusif, dan partisipatif.

Guna menguatkan kelembagaan adat yang membuat warga negeri di tepi awan ini aman, damai, sejahtera, dan terpenuhi semua hak-hak dasarnya, Karsa Institute menjalankan Program Peduli yang dikemas dengan konsep PATAKA, atau Penguatan Tata Kelola Kampung, di desa Lawe, Lonebasa, Porelea, dan Masewo di Pipikoro, plus desa Moa di Kulawi Selatan. Karsa adalah lembaga swadaya masyarakat yang giat mendorong pembaruan pedesaan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Pipikoro merupakan rumah besar bagi Topo Uma. Wilayah ini terpaut 160 kilometer di sebelah selatan kota Palu, ibukota provinsi. Pipikoro sekaligus menjadi pembatas antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

Kelompok sasaran utama Program Peduli adalah komunitas Topo Uma. Secara tradisional, komunitas ini bermukim di dataran tinggi pegunungan Pipikoro. Namun dalam pembentukan wilayah administrasi pemerintahan dewasa ini, beberapa kampung Topo Uma telah dipisahkan dari Pipikoro dan dimasukkan ke dalam satuan wilayah administrasi yang lain seperti kecamatan Kulawi Selatan dan Kulawi.

Pemukiman Topo Uma didirikan di punggung gunung yang landai, yang tidak terlalu jauh dari anak sungai. Lansekap perkampungan ini didominasi oleh permukaan lahan yang terjal, dengan tingkat kemiringan rata-rata 25-45 persen. Pada puncak ketinggian, awan seolah hanya sejengkal di atas kepala. Pemandangan awan putih yang berarak di hamparan langit biru terasa kontras dengan rimbunan hutan menghijau di kejauhan. Desa-desa itu dikelilingi oleh tutupan hutan, meskipun sebagian besar berupa hutan sekunder.

Di Pipikoro, status kawasan hutan terbagi menjadi hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Adapun area perladangan masyarakat berada di areal pemanfataan lainnya, namun ada sebagian kecil yang masuk dalam hutan lindung. Kebanyakan kebun yang berada di kawasan hutan yang masih memiliki tutupan lahan bagus dikerjakan dengan pendekatan agroforestri atau dalam bahasa lokal dikenal sebagai "pampa".

Pampa sederhananya adalah lahan yang ditanami bahan sayur-sayuran dan biasanya berjarak tidak jauh dari pemukiman, bahkan bisa di pekarangan depan atau belakang rumah. Umumnya, pengurusan pampa dilakukan oleh perempuan. Banyak pampa berubah jenis tanaman sejak serbuan kakao.

Adapun sistem pertanian ladang biasanya "gilir-balik", dimana lahan yang sudah ditanam dan dipanen beberapa periode akan ditinggalkan sementara waktu menunggu tanah melakukan pemulihan dan meregenerasi diri untuk siap diolah lagi pada masa tanam ke depan. Sistem ladang berpindah ini dalam istilah lokal disebut "berah", dimana petani menerapkan siklus penanaman untuk menunggu meningkatnya unsur hara tanah bekas tanam, yang siklusnya terjadi sekitar 3-5 tahun.

Sistem ini lekat dengan kearifan lokal dan sudah dipraktikkan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Mereka juga tidak mengenal pupuk penyubur dan cairan pembasmi hama berbahan kimia. Tak hanya memiliki keindahan alam dan gaya hidup alami, Pipikoro memiliki komoditas andalan berupa kopi, padi dan kakao, juga kerajinan tangan unik seperti kain kulit kayu (kumpe) dan anyaman dari pandan hutan. Di Pipikoro, mayoritas masyarakat hidup serasi dan selaras dengan alam.

Sayangnya, daerah yang sangat indah nan asri tak tertandingi ini terisolasi. Menurut penuturan mereka yang beruntung dapat berkunjung, perjalanan ke Pipikoro sungguh tak mudah dan tak murah. Selain harus menguras kantong, pengunjung pun harus siap bertaruh nyawa. Ada korban jatuh dari jembatan, mengalami patah tulang, dan beberapa mati tertimbun longsor.

Ada tiga akses menuju Pipikoro. Pertama, jalur timur melalui desa Tuwo dengan menyeberang jembatan gantung panjang 100-an meter. Jalur ini hanya bisa dilalui kendaraan roda dua. Kondisi jalan belum dirabat dengan beton, masih tanah gunung yang lebarnya tidak lebih dari 1,5 meter yang sesekali longsor. Jalur ini paling menantang adrenalin. Jalur kedua lewat tengah ke arah ibukota kecamatan. Ini jalur paling aman, bisa dilalui oleh roda dua dan sesekali roda empat kalau tidak sedang longsor. Yang terakhir, jalur barat melewati persimpangan desa pertama di wilayah Pipikoro. Kondisinya hampir sama dengan jalur timur, belum dapat dilalui oleh kendaraan roda empat.

Pengunjung harus mengucap perpisahan pada kendaraan roda empat di Gimpu, ujung jalan aspal yang bisa dilalui mobil. Kemudian, perjalanan disambung dengan menumpang ojek menuju Porelea atau Lonebasa, yang membutuhkan waktu 1,5 hingga 3 jam, tergantung medan dan kesiapan mental. Jurang menganga di sana sini. Penumpang perlu berkali-kali turun dari ojek untuk mengurangi kecepatan pada tikungan tajam dan kemiringan curam. Kalau tukang ojek kurang lincah menjaga keseimbangan, nyawa penumpang menjadi taruhan karena sepenuhnya ada dalam kendali Tuhan dan tukang ojek. Mungkin karena itulah tukang ojek memodifikasi motornya dengan gir yang dirancang khusus sebagai mekanisme antisipasi dan adaptasi dengan medan.

Ongkos ojek ini pun tak murah. Bayangkan, untuk perjalanan berjarak 24 kilometer, pengunjung harus merogoh kocek Rp 100-150 ribu per orang. Konon, jalan pendakian ini dulu hanya bisa dilalui dengan perjalanan setengah hari menaiki kuda. Sekitar awal tahun 2000an, motor mulai masuk ke Pipikoro diinisiasi oleh seorang Komandan Bintara Pembina Desa, yang merintis *start up* transportasi berarmada 12 buah ojek dengan modal awal Rp 80 juta rupiah. Sejak itu, warga mulai ramai-ramai menukar satwa peliharaan yang juga jadi tunggangan dengan mesin bertenaga setara kuda — empat ekor kuda ditukar dengan satu unit motor. Kuda dulu menjadi sarana tranportasi yang mengangkut warga dan hasil pertanian mereka. Sekarang jumlah motor melampaui jumlah kuda, hampir sebanding dengan jumlah kepala keluarga.

Pembukaan jalan trans Sulawesi jalur tengah Gimpu-Kalamanta kini menjangkau lebih dari setengah dari total 19 desa di kecamatan Pipikoro, terutama bagian tengah dan timur, namun bagian barat sama sekali tidak dilintasi jalan trans. Perjalanan ke bagian barat masih tetap mengandalkan ojek yang melintasi pinggiran jurang yang saking

curamnya akan menyebabkan *adrenaline rush* atau bagi sebagian penumpang lain, efeknya mendadak relijius karena sibuk merapalkan do'a-do'a keselamatan selama perjalanan.

Kondisi jalan buruk menjadikan akses kesehatan memburuk. Hanya ada tiga puskesmas pembantu, satu puskesmas terdekat di Gimpu. Perjalanan membawa orang sakit dalam waktu normal bisa tiga sampai empat jam menggunakan ojek, atau tandu.

Ilustrasi lain yang menggambarkan keterasingan ini adalah kegiatan posyandu. Perempuan-perempuan hamil serta ibu-ibu dengan batita dan balita (bayi di bawah tiga dan lima tahun) harus berjalan kaki sejauh 12 Km naik turun bukit, melintasi hutan dan anak sungai setiap bulan, hanya untuk mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan ibu dan penimbangan anak di puskesmas yang ada di Banasu. Demikian juga dengan warga Kulawi. Setiap bulan rombongan ibu hamil didampingi kepala desa berkonvoi dengan motor menuju Gimpu yang letaknya 42 Km dari Moa. Namun tidak semua ibu hamil bisa turut serta. Ibu hamil yang suaminya tidak punya motor dan tidak mampu membayar sewa ojek, mereka menunggu saat persalinan tanpa tahu kondisi medis bayi di dalam kandungannya.

Lagi-lagi hanya bisa berdo'a mengharapkan yang terbaik.

Karena terisolasi secara geografis, Topo Uma (komunitas yang berbahasa Kulawi dengan dialek Uma) secara sosial dianggap berbeda dan lalu distigma dengan sebutan *To Tole* yang secara harfiah berarti orang gunung. Sebutan ini diasosiasikan dengan orang-orang yang tertinggal, terbelakang, bodoh, udik, dan kampungan.

Lengkaplah keterasingan ini.

Stigma sarat prasangka yang sudah terlanjur melekat itu pada akhirnya mempengaruhi cara orang lain memandang dan memperlakukan masyarakat Topo Uma. Pada gilirannya, masyarakat Topo Uma, yang terdiri dari rumah tangga miskin dengan tingkat pendidikan rendah, mengalami *inferiority complex,* menjadi minder, tak memiliki kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan komunitas lain.

Kondisi geografis dan *prejudice* mempersulit inklusi sosial yang berkaitan dengan rekognisi atas kesetaraan Topo Uma selaku warga yang berhak mendapatkan layanan kebutuhan dasar; dan untuk berinteraksi dan

berpartisipasi penuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; sama seperti warga lain di wilayah NKRI.

Struktur sosial masyarakat yang terstrasifikasi secara ekonomi juga turut menyebabkan adanya sekelompok warga yang menjadi lebih terpinggirkan, lebih rentan terekploitasi, dan lebih lemah dalam mengakses layanan hak dasar yang tersedia secara terbatas di dalam desa, dan terlebih lagi di luar desa, dengan jangkauan fisik dan sosial yang sangat jauh jaraknya dari mereka.

Strata sosio-ekonomi di Pipikoro terdiri dari tiga lapisan. Pertama, Tosugi (orang *sugih*), ini lapisan warga dengan pemilikan tanah yang luas (>10 Ha), punya hewan ternak besar berupa kerbau, babi, sapi dalam jumlah banyak (>20 ekor) berikut penggembalanya, rumah beton, makan tiga kali sehari dengan menu bervariasi, mampu menyekolahkan anak sampai dengan perguruan tinggi, punya barang elektronik (TV, radio, kulkas) dan alat kendaraan pribadi (motor dan mobil), berpenghasilan tinggi dari tani, dagang, atau transportasi (> 5 juta/bulan).

Lapisan kedua, Nakariai (orang berkecukupan), yaitu warga dengan pemilikan tanah yang cukup luas, hewan ternak besar yang cukup banyak, rumah semi permanen, makan tiga kali sehari dengan menu daging dan ikan minimal seminggu sekali, mampu menyekolahkan anak minimal sampai jenjang SLTA, serta punya motor dan barang elektronik.

Lapisan ketiga, Tompeahi (orang miskin), yang meliputi mayoritas penduduk dengan pemilikan lahan ≤ 2 Ha, rumah dinding bambu dengan atap daun rumbia, berpola subsisten bekerja untuk makan hari

ini, bersekolah tapi tidak tamat SD, tidak memiliki tabungan, kendaraan dan barang elektronik.

Tompeahi inilah yang menjadi kelompok sasaran pemanfaat program secara langsung, sedangkan Nakariahi dan Tosugi menjadi sasaran tidak langsung.

Selain itu, terjadi juga diskriminasi berdasarkan jender. Akses dan kontrol perempuan dalam pemerintahan maupun dalam pengambilan keputusan di desa juga sangat rendah. Dalam struktur pemerintahan desa misalnya, di lima desa target tidak ada seorang pun perangkat desa perempuan.

Berlapisnya relasi kuasa dan struktur sosial yang ada, juga kondisi geografis yang terisolasi inilah yang menjadi dasar komunitas adat Topo Uma diperjuangkan untuk mendapatkan rekognisi

sosial kultural dan akses layanan dasar kesehatan, pendidikan dan usaha; termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.

Masa awal pendampingan, Program Peduli lebih fokus mengangkat isu layanan dasar dibandingkan dengan isu hak ulayat. Untuk itu, pendampingan dimulai dengan pendataan secara rinci, dari data keluarga sampai dengan data penguasaan atas lahan. Data tersebut belum sampai wilayah komunitas adat karena kondisi saat itu lebih menyuarakan bagaimana kondisi yang ada di masyarakat Topo Uma.

Data yang ada menunjukkan bahwa layanan dasar pendidikan dan kesehatan bagi perempuan dan laki-laki tidak ada pembedaan. Catatan khusus terkait sektor pendidikan, lokasi yang terisolasi menyebabkan tingginya kasus putus sekolah ketika anak-anak perlu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sarana pendidikan yang tersedia hanyalah tingkat SD, yang dibangun oleh Bala Keselamatan, sebuah organisasi gereja. Di pusat kecamatan yang jaraknya paling dekat 35 km, baru ada satu SMP. Namun, karena jauh dan sulit dijangkau, sangat sedikit anak sekolah yang mau melanjutkan sekolah di sana. Di samping itu, untuk dapat melanjutkan sekolah di Peana mereka harus punya kerabat, atau siapa pun yang bersedia memberikan tempat untuk tinggal.

Untuk mengatasinya, dilakukan rekrutmen sejumlah kader pendidikan yang bertugas di sanggar pendidikan yang bersifat swadaya dan swakelola. Sanggar ini komplementer dengan sekolah formal yang tersedia.

Sanggar yang difasilitasi oleh Program Peduli dianggap cukup berperan besar menumpas buta aksara di desa Lawe, Porela dan Lonebasa. Tidak kurang dari 140 warga, baik dewasa maupun anak-anak, telah mengikuti kegiatan belajar mengajar di ketiga desa itu. Mereka kini tak asing dengan calitung (membaca, menulis dan berhitung). Anak-anak itu adalah anak korban putus sekolah dan anak sekolah yang mencari tambahan jam belajar. Sebagian kader pendidikan yang berhasil direkrut di sanggar turut diperbantukan untuk mengajar di sekolah formal.

Integrasi kader pendidikan sanggar ke sekolah formal merupakan capaian penting Program Peduli. Integrasi ini memungkinkan terselenggaranya fungsi pendidikan secara berkelanjutan. Integrasi para kader ke sekolah formal, termasuk pendidikan usia dini, juga menunjukkan adanya pengakuan atas peran dan kemampuan para kader sebagai agen perubahan yang potensial di desa. Mereka dapat mengatasi problem sumber daya manusia di desa.

Upaya peningkatan akses layanan dasar melalui sanggar pendidikan dan sanggar Kesehatan, yang dimotori oleh kader-kader yang ada di desa, mulai mendapat jalan ketika UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 diimplementasikan. Kondisi ini menjadi siginifikan mengingat operasional kader yang selama ini diupayakan dibiayai oleh program, diharapkan dapat dibiayai dari Dana Desa.

Mendorong upaya ini tentu bukan pekerjaan mudah mengingat rendahnya pemahaman kepala desa dan perangkat desa tentang regulasi terkait penggunaan dana desa. Celah mulai terbuka ketika salah satu perwakilan Karsa Institute dilibatkan dalam pelatihan untuk para pendamping desa yang diselenggarakan

oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi. Peluang ini dimanfaatkan selain untuk melatih pendamping desa, juga untuk mengorganisir para kepala desa dan perangkat desa belajar bersama tentang UU Desa. Upaya ini kemudian disebut "bengkel desa", karena diisi dengan lokakarya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa.

Adanya proses pembelajaran bersama perwakilan desa-desa di Pipikoro dan Kulawi membuat ikatan emosional semakin erat. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan antara pemerintah desa dengan organisasi masyarakat sipil, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah khususnya BPMD kabupaten Sigi. Selain melakukan proses pembelajaran bersama, dilakukan juga asistensi dan pendampingan ketika dilakukan musyawarah desa. Kegiatan inilah yang mendorong partisipasi masyarakat untuk menemu-kenali berbagai kebutuhan yang menjadi usulan untuk diajukan dalam musyawarah desa. Upaya yang bersifat *bottom up* ini membuahkan hasil. Berbagai usulan sanggar kesehatan dan sanggar pendidikan menjadi lebih diperhatikan oleh pemerintah desa, terutama menyangkut pembiayaan untuk para kader melalui dokumen peraturan desa RKP Desa dan APB Desa.

Quick wins di sektor kesehatan dan pendidikan, meningkatkan semangat perjuangan masyarakat untuk meraih pengakuan wilayah adat Topu Uma. Program Peduli kemudian mendampingi masyarakat adat untuk mencapai kedaulatan pengelolaan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka.

Pada tahun 2016, seiring kebijakan hutan adat yang ada di dalam skema perhutanan sosial, skema ini mulai masuk dalam advokasi kebijakan. Perhutanan sosial merupakan salah satu program yang digaungkan pemerintah untuk melegalkan akses Wilayah Kelola Rakyat. Terminologi ini untuk mengurai beberapa skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. HKm sudah lebih dulu diimplementasikan sebagai solusi ketegangan konflik kawasan hutan negara karena sekitar 80 persen desa-desa di Sigi, termasuk Pipikoro, berada atau beririsan langsung dengan hutan negara. HKm dianggap efektif menangani konflik tenurial. Selama ini, penetapan hutan menghambat aktivitas dan akses masyarakat. Sebelumnya, tak ada kepastian hukum hak tanah masyarakat. Akses kelola hutan sangat terbatas. Areal HKm terbagi antara wilayah, memenuhi kebutuhan masyarakat seperti kayu, pandan hutan, dan rotan, serta wilayah perlindungan seperti daerah rawan longsor, sumber air dan hulu sungai. Skema HKm di Pipikoro difasilitasi sejak 2009. Izin pengelolaan keluar 2013 seluas 2.100 hektar di tujuh desa, yakni Kalamanta, Mamu, Banasu, Mapahi, Peana, Kantewu 1, Kantewu 2 untuk sekitar 900 keluarga.

Pemekaran menjadi 20 desa tentu berdampak pada pemetaan yang dilakukan komunitas untuk menentukan wilayah masing-masing. Upaya pemetaan kali ini terbagi ke dalam dua skema yaitu hutan desa dan hutan adat. Khusus untuk hutan adat, yang diajukan adalah dua lokasi yaitu Masewo dan Moa. Kedua desa tersebut memiliki karakteristik tersendiri: status Masewo masuk ke dalam kategori hutan lindung dan hutan produksi terbatas, sedangkan Moa terbagi ke dalam hutan konservasi dan hutan lindung. Untuk Masewo luasan wilayah hasil pemetaan seluas 12.526 Ha, sedangkan untuk Moa seluas 34.485 Ha.

Pembiayaan kegiatan pemetaan menjadi biaya yang ditanggung oleh desa dalam Peraturan Desa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, setelah pembiayaan kader desa.

Kegiatan survey lapangan memakan energi, waktu lama dan biaya besar. Dalam beberapa kasus, konsultasi peta berjalan alot, terutama jika ada ketidakjelasan letak maupun status batas wilayah. Dalam situasi seperti ini, konsultasi berkembang menjadi negosiasi. Misalnya, dalam kasus antara Masewo dengan Mamu, atau dalam kasus Mapahi dengan Tuwo. Dalam kondisi silang pendapat seperti itu, sangat penting untuk menghadirkan orang-orang tua karena sesungguhnya basis klaim setiap komunitas adalah sejarah, yang dikuasai betul oleh para sepuh. Dalam beberapa kasus, kebenaran sejarah tidak bisa dijadikan sebagai rujukan tunggal, karena biar bagaimanapun masyarakat telah berkembang secara dinamis, demikian halnya dengan teritori. Konsensus menjadi keniscayaan.

Dalam konteks ini proses pemetaan ruang telah berkembang menjadi proses resolusi konflik. Dalam perspektif yang lebih besar dan jauh ke depan, upaya ini sesungguhnya telah menjadi mekanisme mitigasi konflik, dengan menciutkan potensi konflik yang akan diwarisi oleh generasi mendatang. Setelah dinyatakan "clear and clean", barulah draft peta ruang dianggap paripurna.

Dari pemetaan tersebut, terselesaikan empat peta tata ruang desa, yaitu Mapahi, Masewo dan Pelempea. Masing-masing peta tata ruang itu telah ditetapkan menjadi perdes tata ruang desa, dengan berita acara kesepakatan batas-batas desa, yang ditandatangani

oleh para kepala desa, pimpinan lembaga adat, dan BPD dari setiap desa yang saling berbatasan.

Langkah partisipatif ini pun berbuah manis. Pihak otoritas balai Taman Nasional Lore Lindu, unit pelaksana tugas di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kini terlibat aktif berdiskusi dengan aparat desa/pemerintah daerah dan para pegiat isu pertanahan dan kehutanan dari organisasi masyarakat sipil yang ada di Sulawesi Tengah. Sebagai hasilnya, usulan Hutan Adat di Masewo mendapat persetujuan Menteri LHK seluas 934,6 hektar.

Dari semua proses yang terjadi, ada satu hal yang menarik tentang SDA dan jender, khususnya di Moa.

Pengelolaan sumber daya alam di masyarakat adat umumnya dipegang oleh perempuan, sedangkan

untuk keputusan strategis atas tanah menjadi domain laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa dalam relasi jender, peran perempuan masih terbatas namun ada potensi untuk dikoreksi dan diperluas. Atas temuan tersebut, dilakukan *assessment* untuk mengidentifikasi tanah adat yang diperuntukan bagi perempuan, yang disebut *Pampa*. Tanah tersebut merupakan tanah komunal yang dicadangkan khusus untuk dikelola dan dikendalikan penuh oleh perempuan.

Pampa memiliki peran strategis bagi komunitas perempuan adat yang ada di Moa. *Pertama*, pampa dilihat sebagai simbol kedaulatan perempuan dalam zonasi tradisional masyarakat adat To Kulawi Uma di Moa, yang otoritas pengelolaan dan pemanfaatannya menjadi milik kaum perempuan. *Kedua*, pampa dilihat sebagai simbol ketahanan pangan. Setiap rumah tangga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk kebutuhan pangan karena sebagian besar kebutuhan diperoleh dari pampa. *Ketiga*, pampa dilihat sebagai simbol sistem kerja sosial. Dalam mengelola pampa, perempuan Moa lebih mengutamakan sistem kerja berkelompok dan bergilir yang disebut dengan "mome ala pale." *Keempat*, pampa dilihat sebagai ruang eskpresi dan interaksi. Di pampa, kaum perempuan dapat saling bertukar informasi, pengetahuan, dan pengalaman mereka dalam membudidayakan berbagai jenis tanaman. Mereka saling berinteraksi dan bersosialisasi tanpa batas-batas hierarki. Pampa juga menjadi tempat perempuan mengaktualisasi diri dan membentuk jati diri sebagai sosok-sosok yang mandiri. Lebih dari nilai material dan sosialnya, pampa juga memiliki nilai spiritual. Dahulu, pembukaan lahan untuk pampa selalu dimulai dengan upacara adat yang dipimpin oleh *topo gane* atau tetua adat yang dianggap mampu berkomunikasi dengan Tope Hoi sang penguasa alam semesta.

Meski kaum perempuan adat Moa hingga saat ini masih tetap mempertahankan pampa, namun keterbatasan akses terhadap hutan dan lahan cepat atau lambat dapat menjadi ancaman terhadap pampa. Alih fungsi lahan pampa dari kebun palawija menjadi kebun kakao kemungkinan besar tidak dapat dihindarkan.

Ancaman terhadap pampa dan eksistensi perempuan adat Moa ini perlu segera diatasi lewat pengakuan negara terhadap hak adat atas tanah dan lahan yang saat ini diusulkan oleh komunitas adat Topo Uma. Ketimpangan agraria telah berkontribusi terhadap ketimpangan hak laki-laki dan perempuan atas tanah dan lahan yang semakin memarginalisasikan kaum perempuan Topo Uma.

Akibat perubahan sosial ekonomi masyarakat, Pampa desa mulai hilang tapi yang masih kuat bertahan adalah pampa desa Moa. Dalam beberapa pertemuan yang pernah terjadi, perempuan Moa mampu menyurakan aspirasinya dibanding desa-desa lain. Hal ini lagi-lagi menjadi bukti, partisipasi penuh anggota komunitas, pria dan perempuan tanpa terkecuali, perlu terus dijaga untuk memastikan tak ada eksklusi.

Adapun dalam relasi dengan kekuasaan, keterbatasan komunitas Topo Uma secara umum membuat mereka diremehkan dan dipinggirkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terlihat dari alokasi penganggaran pembangunan yang relatif kecil dibandingan dengan wilayah lain yang justru sudah lebih maju. Program pemerintah baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan UMKM masih minim dilaksanakan di Sigi.

Fasilitas pelayanan dasar di Pipikoro dan Moa masih terbatas. Ditambah lagi medan yang sulit dan formasi permukiman yang terdispersi menjadikan jangkauan terhadap layanan dasar menjadi sangat menantang, untuk tidak mengatakan sulit.

Tapi lain dulu lain sekarang.

Pengakuan pemerintah terhadap eksistensi Topo Uma dalam pengelolaan sumber daya alam hutan berdasarkan kearifan lokal telah ditetapkan melalui SK Bupati Sigi dan Menteri LHK pada tahun 2020 yang menjadi penanda adanya kebijakan reforma agraria. Perubahan positif lain di antaranya adalah terbukanya kesempatan dan promosi jabatan di lingkup Pemda dan LSM kepada komunitas Topo Uma. Terjadi peningkatan jumlah lulusan SMA yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, penempatan tenaga pengajar yang menerima insentif pada SD, SMP dan SMA, pembangunan SMP Satu Atap di Porelea dan SMA di Peana, juga pembentukan forum pelajar dan mahasiswa Topo Uma di Palu. Terjadi peningkatan anggaran dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan termasuk pembukaan jalan trans Sulawesi jalur tengah Gimpu-Kalamanta, pembangunan puskemas, penempatan tenaga dokter dan medis yang bertugas, dan penyaluran mobil ambulance. Terbentuknya forum kerja sama antar desa, kunjungan pemda dan pihak terkait semakin meningkat. Terjadi penegasan identitas kultural melalui event budaya di Festival Peduli Day dan Festival Kopi, yang dihadiri oleh perwakilan Kemendes Bupati, DPRD untuk pertama kalinya dalam formasi lengkap, dengan liputan media cetak dan elekronik dari lokal dan nasional.

Bicara Sigi, tidak lengkap jika tidak membahas kopi.

Sejak dulu, kopi tak asing bagi warga Topo Uma. Mereka memiliki kebun kopi, kebanyakan ditanam di sela-sela tegakan sebagai pokopia, sementara untuk ladang ditanami padi dan palawija. Mereka menyajikan kopi *sachet* untuk tamu dan kopi kebun untuk dikonsumsi sendiri. Ternyata jawabannya di luar dugaan. Mereka malu menyajikan kopi dari kebun sendiri kepada tamu dan menganggap kopi kemasan lebih baik. Keminderan ini dulu melekat kuat.

Di Pipikoro ada biji kopi yang dalam bahasa Kulawi dinamakan Toratima, berarti kopi yang dipungut. Kopi ini diperoleh dengan cara memungut atau mengumpulkan biji-biji kopi yang jatuh di tanah. Namun, tidak semua biji kopi yang ada di tanah merupakan Toratima. Toratima adalah sisa biji kopi yang telah dimakan dan *dilepeh* oleh sejenis kuskus kerdil Sulawesi, *Stigocucus celebencis*. Ini hewan mamalia marsupial, tangali menurut orang lokal, yang hanya memakan buah kopi tertentu, buah terbaik dari setiap tandan kopi. Kuskus ini memakan daging buah kopi dan membuang bijinya.

Toratima adalah kopi robusta murni berkualitas terbaik. Kopi organik ini dihasilkan dari areal Hutan Kemasyarakatan di dalam kawasan Cagar Biosfer Lore Lindu. Aroma dan rasa kopi ini tidak kalah dahsyat dengan kopi Luwak asal Gayo Aceh atau Toraja. Saat ini, Toratima merupakan komoditas unggulan di wilayah Pipikoro. Kopi ini dipersembahkan bagi para tamu adat dan menjadi hidangan utama dalam event penting di Sigi. Toratima juga dianggap

istimewa karena aman dikonsumsi anak-anak dan dipercaya bisa menyembuhkan demam tinggi.

Hanya saja pembinaan budidaya kopi ini kurang diperjuangkan nasibnya lantaran akses yang sulit serta rantai pasar yang panjang. Menemukan solusi terhadap peningkatan nilai tambah kopi di daerah terpencil dan terisolasi sepertinya membutuhkan jalan berliku.

Dalam Program Peduli, KEMITRAAN dan Karsa memakai pendekatan budaya, ekonomi, dan layanan dasar, kemudian mulai mengangkat beberapa potensi lokal seperti kopi. Kopi Toratima terangkat pamornya ketika ada Festival Kopi di Peana dan di ibukota Sigi yang dihadiri oleh ribuan peserta termasuk Menteri Desa PDTT. Berbagai cerita positif dan unik tentang kopi ini, termasuk bagaimana hewan tangali memakan biji kopi, menjadi pengetahuan baru dan memunculkan penerimaan masyarakat luar terhadap Pipikoro yang semula dipersepsikan negatif. Faktor ini yang menyebabkan Dinas Pariwisata Sigi berinisiatif menjalin kerja sama dengan pengusaha pengelola bandar udara Angkasa Pura untuk membuat gerai di Bandara SIS Al Jufrie. Tidak hanya itu, benih kopi robusta Pipikoro mendapat sertifikasi dari Kementerian Pertanian.

Dampak langsung bagi komunitas Topo Uma ketika Toratima naik daun adalah semua warga di Pipikoro menyajikan kopi mereka sebagai bentuk rasa percaya diri yang meningkat. Setelah gengsi terangkat, secara ekonomi juga meningkat dari semula harga Rp 20-25 ribu per kg naik menjadi Rp 35-40 ribu per kg.

Hampir semua wilayah bertarung dengan kemajuan dunia luar. Laju pembangunan jalan dan akses komunikasi, dengan masuknya jaringan internet, membuka kemungkinan terjadi pergeseran nilai di masyarakat. Pembangunan di satu sisi adalah usaha membuka akses masyarakat. Namun di sisi lain dapat menggerus nilai-nilai kebudayaan setempat. Pilihan paling rasional yang coba didorong oleh organisasi pendamping adalah memperkuat kapasitas dan memberdayakan komunitas dengan perpaduan nilai-nilai lama dan baru yang tumbuh berkembang dalam dinamika dan dialektika yang ada, selama kompatibel dengan cara pandang dan gaya hidup masyarakat.

Tingkat kriminalitas di Pipikoro tergolong rendah. Salah satu faktor utamanya karena masyarakat masih sangat taat dengan aturan-aturan adat. Di sana tidak ada polisi, jaksa dan hakim yang formal. Para tetua adat lah yang memutuskan jika terjadi pelanggaran atau sengketa di antara warga. Pertemuan adat dilakukan setiap ada persoalan, dan yang lazim terjadi adalah kasus hubungan pria dan wanita. Hukuman yang paling umum adalah denda berupa hewan dan balak kain.

Selain hukum adat, agama Kristen Protestan Bala Keselamatan cukup berpengaruh dalam kehidupan keseharian warga. Acara ritual panen secara adat kini dikombinasikan dengan biston, yaitu pengucapan

syukur dipimpin oleh pendeta. Masyarakat membawa hasil bumi ke gereja untuk dido'akan supaya hasil panen berikutnya melimpah ruah.

Ingin dijangkau dan disentuh oleh kemajuan adalah kerinduan masyarakat. Mereka berangan-angan dapat menikmati hasil pembangunan, aspirasi ini terutama tumbuh di generasi baru Topo Uma yang mengenyam pendidikan. Lain lagi dengan generasi lama yang terdiri dari orang-orang tua. Mereka berharap bisa terus hidup harmoni dengan alam dan manusia, dan dalam waktu bersamaan bisa memperoleh kemudahan berusaha dan mencari nafkah buat keluarga. Orang-orang tua berharap anak cucu hingga tujuh keturunan tidak kehilangan identitas sebagai Topo Uma yang teguh memegang prinsip adat kuat, negeri bermartabat. *Maraho ada, manimpu ngata.*

Inilah Pipikoro-Kulawi sang negeri di tepi awan, sebuah negeri yang semula terpinggirkan tapi lalu perlahan bangkit menyambut cakrawala baru. Pataka yang dibawa Karsa melalui Program Peduli menjadi syair kekeluargaan yang mampu mengusir keterasingan di Sigi.

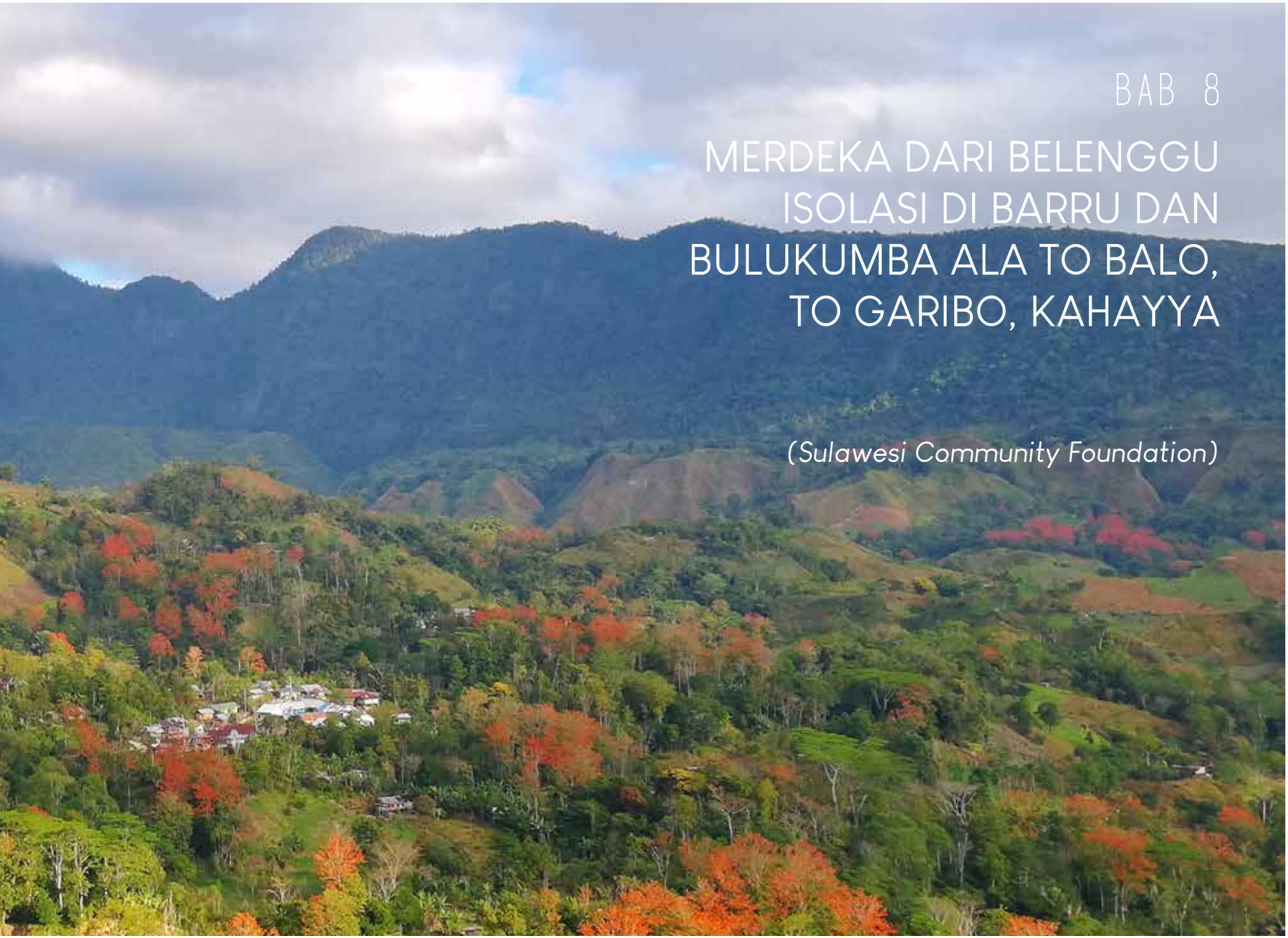

BAB 8

MERDEKA DARI BELENGGU ISOLASI DI BARRU DAN BULUKUMBA ALA TO BALO, TO GARIBO, KAHAYYA

(Sulawesi Community Foundation)

PROGRAM INKLUSI SOSIAL berupa dukungan kebijakan inklusif, penerimaan sosial, dan pemenuhan layanan dasar di Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Bulo-Bulo, Kabupaten Barru dan Desa Kahayya, Kabupaten Bulukumba terjadi di tengah upaya komunitas To Bentong, To Balo, To Garibo melepaskan diri dari belenggu isolasi. Di dua kabupaten ini, Sulawesi Community Foundation mendorong program "Sipakatau-Sipakalebbi" yang dalam bahasa Bugis bermakna filosofis yang sangat dalam. Sipakatuo-Sipakalebbi identik dengan sifat egaliter dan memandang manusia sebagai manusia, tanpa embel-embel bibit (asal-usul keturunan), bebet (status ekonomi), dan bobot (berat-ringan atau tinggi-rendahnya kualitas diri seseorang).

Filosofi ini sejalan dengan tujuan Program Peduli, yang dijalankan berkolaborasi dengan SCF, yaitu mewujudkan Desa Inklusi Sosial bagi masyarakat adat dan lokal terpencil demi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara partisipatif; peningkatan kualitas bantuan sosial dan layanan publik untuk masyarakat sekitar hutan; pengarusutamaan kebijakan inklusi dalam kegiatan ekonomi melalui ekowisata; juga implementasi pengarusutamaan jender dan perlindungan anak dalam perencanaan pengelolaan desa.

Isu eksklusi yang berusaha diatasi utamanya adalah akses terhadap pemanfataan sumber daya alam di kawasan hutan. SCF menerapkan *pendekatan multipihak*, dimana penerimaan sosial akan lebih berdampak jika semua elemen desa hingga kabupaten dapat dilibatkan dan berpartisipasi aktif serta merasa memiliki tanggung jawab untuk terwujudnya inklusi sosial. Pendekatan lainnya adalah landscape approach, *pendekatan bentang alam*. Kedua area

kerja Program Peduli di Barru dan Bulukumba tergolong wilayah strategis sekaligus sensitif terkait lingkungan hidup, cadangan air, ekosistem hutan, dan segala sumber daya alam penunjang lainnya yang memberikan pengaruh besar pada wilayah-wilayah yang berada di bawahnya. Untuk itu pendekatan bentang alam menjadi skema perlindungan sosial dan lingkungan *(social and environment safeguards)* yang paling pas untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang didorong tidak saling bertentangan.

Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan sangat terisolir dan warganya tak punya banyak pilihan hiburan setelah hari menjadi gelap. Pegunungan Bulu Pao di daerah ini menjadi rumah bagi Suku Bentong, komunitas lokal terpencil yang menggunakan bahasa Bentong.

Bentong merupakan campuran dari tiga bahasa Bugis, Makassar dan Konjo. Kawasan yang dihuni oleh ratusan warga komunitas To Bentong ini terbentang luas melintasi wilayah Kabupaten Barru dan Kabupaten Pangkep sejak ratusan tahun lalu.

Di area pegunungan tersebut, tinggal sebuah keluarga besar yang memiliki ciri tersendiri yaitu *To Balo* yang artinya belang. Keluarga To Balo hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar dan tidak membentuk sebuah kelompok tersendiri. Sistem kekeluargaan keluarga To Balo adalah sistem kekeluargaan patrilineal dan bilateral. Keluarga To Balo termasuk sistem keluarga patrilineal karena yang menjadi kepala keluarga adalah pihak laki-laki atau sang ayah. Keluarga To Balo juga termasuk sistem keluarga bilateral karena sistem kekerabatan masyarakat To Balo masih memegang peranan penting dalam membangun identitas dalam kehidupan bersama sebagai suatu kelompok masyarakat. Sistem kekerabatan masyarakat To Balo, berkembang dari suatu kelompok keluarga sebagai keluarga batih yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Masyarakat suku To Balo memperhitungkan garis keturunannya berdasarkan prinsip bilateral, yakni hubungan yang memperhitungkan garis ayah-ibu.

Tampilan fisik orang Suku To Balo unik. Setiap bayi mereka terlahir berkulit belang. Sekujur tubuh, khususnya kaki, badan, serta tangannya, dipenuhi dengan bercak putih. Sementara tepat di tengah dahi mereka, bercak itu terpampang hampir membentuk segitiga. Oleh karena itu, muncul sebutan manusia belang. Kelainan yang diidap oleh masyarakat Suku To Balo bukanlah penyakit menular, akan tetapi pembawaan gen. Namun, penduduk setempat meyakininya sebagai kutukan dewa.

Berdasarkan analisa DNA, kondisi kulit belang itu karena kelainan proses pigmentasi yang dalam dunia kedokteran dikenal sebagai *piebaldism* dan tidak menular. Pada *piebaldism*, belang didapatkan sejak lahir, tidak bertambah dan berpola. Tak ada cara untuk menghentikan dan tidak perlu pengobatan. Yang diperlukan adalah memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kondisi To Balo dan tidak menganggap mereka berbeda.

Selain To Balo, ada juga To Garibo sebagai bagian dari To Bentong. Mereka punya ciri fisik unik yaitu rambut keriting atau kribo. Perbedaannya, rambut To Garibo lebih halus menyerupai bulu musang. Konon, menurut sebuah cerita rakyat, ada seorang ayah yang beberapa kali dikaruniai anak tapi tidak ada yang selamat. Ayah tersebut menolong seekor musang yang terjepit. Ia berikrar, agar kali ini anaknya selamat, ia tak keberatan jika anaknya berambut seperti musang asalkan tidak dicabut nyawanya. Maka lahirlah To Karibo pertama bernama tuo, yang artinya hidup.

Mayoritas Suku Bentong adalah pemeluk agama Islam. Budaya Islam terlihat dalam setiap tradisi acara adat mereka. Pada masa dahulu, sebelum memeluk Islam, Suku Bentong menjalani kepercayaan leluhur mereka. Sebuah sistem kepercayaan yang memuja dan menghormati roh nenek moyang dan benda-benda yang dikeramatkan, seperti keris, tombak, perisai, payung, dan lain-lain. Benda-benda tersebut hanya dikeluarkan untuk dipuja pada saat pelantikan raja, perkawinan, bencana alam, dan peristiwa-peristiwa lain yang dianggap penting. Mereka percaya pemujaan terhadap barang keramat akan mendatangkan keselamatan dan harus dilakukan untuk menghindari kutukan. Kebanyakan warga Suku Bentong hidup dari hasil pertanian. Mereka membuat ladang di

dekat hutan sekitar perkampungan mereka. Mereka juga menanam padi, kacang, jagung dan sayur-mayur, serta buah-buahan. Di sekitar perkampungan mereka, banyak deretan vegetasi seperti pohon kelapa dan pohon aren. Selain itu, mereka juga kerap berburu binatang liar ke dalam hutan, dan sebagian lainnya ada yang memilih menjadi petani tambak ikan air tawar. Selain bertani, berkebun, bertambak ikan, mereka pula membuat gula merah dari aren yang menjadi sumber penghasilan tambahan.

Wilayah desa yang sangat terisolir secara geografis. Tersebab berbeda, Komunitas To Balo & To Garibo kerap mendapat cemooh, diriksak oleh masyarakat, dan dimanfaatkan untuk atraksi wisata. Faktor ini membuat Komunitas To Balo dan To Garibo cukup tertutup terhadap orang luar. Sebagai suku minoritas (secara jumlah), To Balo & To Garibo tidak lahir dari keterasingan. Mereka merupakan rangkaian dari sejarah panjang salah satu kerajaan besar yang ada di Barru yakni kerajaan Bulo-Bulo.

Inklusi sosial melalui Program Peduli mengubah persepsi tentang *To Balo & To Garibo. Komunitas ini* sudah makin terintegrasi dengan masyarakat lain dalam pergaulan dan terafirmasi dalam kebijakan pemerintah. Proses edukasi bahwa satu-satunya yang membedakan mereka dari komunitas To Bentong yang lain hanyalah warna kulit belang To Balo atau jenis rambut To Garibo. Selebihnya kita adalah manusia yang sama, lapar jika belum makan, haus jika belum minum, menangis jika susah atau tertawa jika sedang senang. Kepala Desa Bulo-Bulo menghimpun *To Balo*, *To Garibo*, dan *To Bentong* menjadi satu komunitas masyarakat utuh yang disebut sebagai masyarakat Bulo-Bulo. Mereka adalah manusia-manusia Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bukti nyata inklusi sosial ini, setidaknya ada lima forum diikuti oleh Komunitas To Balo dan To Garibo seperti forum musrenbang dan forum pertemuan dusun/desa lainnya untuk menyuarakan kepentingan. Mereka aktif terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti gotong royong, ronda siskamling, latihan gambus, perlombaan 17 Agustus dst. Mereka menjadi anggota kelompok tani dan mendapatkan bantuan sarana pertanian, produksi ekonomi, bantuan sosial dari desa. Mereka berpartisipasi penuh dalam pesta demokrasi baik pemilihan kepala desa, kepala daerah, anggota dewan perwakilan hingga presiden. Komunitas ini cukup eksis, melalui musik gambus To Bentong ikut tampil di event tahunan kabupaten Barru. Terakhir, Komunitas To Balo dan To Garibo sudah masuk dalam Basis Data Terpadu pemerintah desa sebagai prioritas penerima bantuan/jaminan sosial.

Dari Barru kita ke Bulukumba.

Desa Kahayya, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah daerah yang memiliki pesona luar biasa. Secara geografis, Kahayya terletak di sebelah barat Bulukumba. Belum genap satu dekade, Kahayya resmi menjadi sebuah desa yang berdiri sendiri berpisah dari Desa Kindang, induk lamanya yang kini menjadi pusat kecamatan. Kahayya adalah satu dari tiga belas desa yang ada di Kindang. Lanskapnya berupa perbukitan yang berlokasi di lereng Gunung Bawakaraeng, yang merupakan gunung tertinggi di Sulawesi Selatan. Kahayya berada di atas ketinggian 900 mdpl sampai 2.800 mdpl. Berbeda dengan daerah perbukitan pada umumnya, Kahayya begitu memukau karena dibentangi oleh gugusan gunung, bukit, dan hulu sungai. Sebagian besar masyarakat Kahayya menganut agama Islam yang secara kultural adalah orang asli Makassar yang berdialek Konjo.

Keindahan Desa Kahayya tidak seindah nasib warganya. Meskipun hasil buminya melimpah, tetapi desa ini sulit menjual komoditasnya ke luar. Di antaranya karena akses jalan yang buruk dan tidak adanya akses pasar kepada petani.

Keindahan ini tidak meniadakan kenyataan minimnya infrastruktur yang membuat masyarakat dirundung kepedihan. Hasil tanaman pertanian sulit dijual ke kota dan komoditas kota juga sebaliknya susah menjangkau pedesaan karena transportasi hampir tak ada sehingga menciptakan biaya tinggi. Bila ada warga sakit keras, akses tenaga kesehatan sungguh sangat sulit membuat warga desa lebih percaya dan mengandalkan dukun.

Saat itu Kahayya hanya bisa diakses melalui jalan setapak yang hanya bisa dilalui oleh motor, itu pun saat musim kemarau saja. Bila datang musim penghujan, jalanan tergenang air lalu ditumbuhi rumput ilalang yang bisa menenggelamkan anak-anak.

Pada tahun 2015 pemerintah mulai mengalokasikan anggaran pembangunan jalan dan infrastruktur desa.

Desa ini memiliki kelebihan dalam hal sumber energi listrik. Warga memiliki generator listrik mikrohidro yang dibangun secara swadaya dengan tenaga ahli dari warga sendiri. Ide menggunakan tenaga mikrohidro ini terinspirasi dari informasi yang didapatkan warga dari internet. Dengan tenaga listrik dari kincir air itulah warga mendapat penerangan di malam hari. Meskipun generator listrik mereka tak mampu menyuplai listrik sepanjang hari, namun setidaknya lampu-lampu menyala pada malam hari dan anak-anak bisa belajar.

Dahulu masyarakat setempat sering dikejar-kejar polisi hutan karena tidak memiliki izin akses ke tanaman kopi yang ditanamnya. Warga adat hanya tahu bahwa hutan yang mereka jelajahi selama ini adalah warisan nenek moyang. Sudah menjadi tradisi warga desa mengambil kayu dan memanfaatkan hutan sebagai sumber mata pencaharian. Warga tidak mengerti mengapa mereka harus menjadi buruan polisi hutan padahal hutan dan tanah ini adalah milik nenek moyangnya sejak dulu kala.

Saat itu belum ada pengakuan ruang kelola bagi masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan. Lokasi desa yang terisolir dari akses geografis, membuat pemerintah daerah tak bisa berbuat banyak karena memang tidak ada penganggaran khusus untuk membangun wilayah terpencil.

Karena inilah masyarakat Kahayya sering mendapatkan stigma sebagai "orang gunung", yang eksludernya dari masyarakat kota.

Dengan pendampingan SCF melalui Program Peduli, singkat cerita, warga mendapatkan izin kelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) selama 35 tahun. Kepercayaan masyarakat kepada para pendamping meningkat tajam. Dengan izin tersebut, kopi Kahayya yang ditanam warga di kawasan hutan negara telah mendapatkan perlindungan hukum secara legal. Masyarakat mendapatkan izin seluas 388 hektare yang dibagi ke dalam empat pemegang izin kelompok, yang seluruhnya sejumlah 122 kepala keluarga. Skema hutan kemasyarakatan merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menekan upaya laju deforestasi dengan mengajak masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) terdiri atas skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Salah satu komoditas favorit daerah ini adalah kopi Kahayya. Kopi ini pertama kali ditemukan pada tahun 1714 oleh orang bernama Tongan Daeng Manassa, kepala kampung pertama di Desa Kahayya. Kopi ini secara luas kemudian disebut Kopi Bugis. Nama Kahayya berasal dari dua suku kata, yakni kaha dan yya. Kata kaha berasal dari bahasa Arab qahwa atau kopi, sedangkan kata yya berasal dari bahasa Makassar dialek Konjo yang menunjuk pada sebuah tempat. Jika dua suku kata ini digabung menjadi kahayya dapat diartikan sebagai 'tempat kopi'.

Kopi menjadi yang paling diminati karena harganya yang bagus dan bertahan bertahun-tahun tanpa harus menanam kembali. Kopi Kahayya merupakan salah satu jenis kopi organik yang ada di Sulawesi Selatan. Jenis kopi yang mulai dari proses penanaman, pengelolaan, hingga pasca panen dilakukan secara organik dan tidak terpapar oleh penggunaan bahan kimia seperti pupuk sintesis dan pestisida ini telah dilakukan turun-temurun dari generasi ke generasi.

Kopi Kahayya menjadi pilihan paling diminati di pasar kopi. Di tengah kepopuleran kopi Toraja, kopi Kahayya terdongkrak harganya. Di daerah ini terjadi rantai perdagangan kopi mulai dari pengumpul tingkat desa, kabupaten, distributor, hingga eksportir yang semuanya diuntungkan. Setelah pertanian kopi menjadi legal, maka pasarnya menjadi bagus dan oleh karena itu pembinaannya menjadi meningkat. Ada beberapa ilmu yang diberikan kepada para petani Kahayya dari distributor kota. Misalnya pemisahan antara buah merah dan buah hijau. Di Kahayya pemetikan buah dilakukan secara bercampur tidak memisahkan antara buah masak (ceri merah) dengan buah yang belum matang (ceri hijau). Hal ini disebabkan karena rendahnya selisih harga jual antara biji merah dan campur di tingkat pedagang. Jika petani memanen biji buah merah kopi akan membutuhkan waktu relatif lama karena harus menunggu semua buah kopi matang, sedangkan petani harus memenuhi kebutuhan hidup yang terus berjalan setiap saat. Dengan medan yang berat, petani tidak mau bolak-balik dari rumah menuju kebun terlalu sering sehingga buah tua belum merah dipanen bersama ceri merah. Semangat warga desa yang didorong oleh para pendamping membuat kualitas hidup masyarakat desa menjadi semakin baik.

Desa Kahayya merupakan salah satu desa dengan produksi kopi paling besar. Desa Kahayya saat ini memiliki potensi mencapai 500 hektare lahan

khusus untuk tanaman kopi. Dengan jumlah lahan kopi setidaknya sebanyak 25.000 pohon, maka itu lebih dari cukup untuk menyejahterakan seluruh warganya. Selain itu, petani juga memanfaatkan lahan yang termasuk dalam kawasan hutan untuk menanam komoditas kopi. Terdapat 388 hektare lahan hutan menjadi HKM dan dikelola oleh 122 petani di Desa Kahayya. Total panen buah kopi diperkirakan sedikitnya bisa mencapai hingga 300 ton/tahun bahkan lebih dan harga jual biji kopi cukup bervariatif. Mulai dari harga Rp4.000 hingga Rp6.000. Jika 300 ton tersebut dikalikan dengan Rp4.000, perputaran ekonomi melalui tanaman kopi dapat mencapai RP1,2 miliar. Dalam rantai bisnis kopi terdapat beragam aktor ekonomi yang mengambil posisi masing-masing. Panjangnya proses pengelolaan kopi di mulai dari buah hingga menjadi bubuk kopi memungkinkan para aktor ekonomi terlibat di dalamnya. Peran para aktor yang terhubung di setiap mata rantai menjadikan harga semakin meningkat.

Pedagang pengumpul kopi Kahayya dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, pedagang pengumpul lokal dalam desa dan luar desa, yang membawa kopi ke kota. Kedua, pedagang pengumpul dari Malakaji, Kabupaten Gowa. Pedagang ini membeli kopi Kahayya untuk dibawa ke pedagang besar di Makassar dan diolah bersama kopi Malakaji. Kopi-kopi ini dimasukkan ke dalam peti kemas dan dikirim ke Surabaya sebagai kopi Malakaji. Sebenarnya di pasar tingkat akhir, kopi Kahayya dipasarkan tidak menggunakan label kopi Kahayya tetapi dengan nama kopi Toraja. Jaringan ekspor kopi ke luar negeri dilakukan oleh eksportir, di antaranya PT Toacro Jaya. Perusahaan ini membeli semua produk kopi lokal dari pedagang pengumpul, lalu di kemas dan diekspor dengan label Toraja Coffee. Bentuk penjualan biji kopi di tingkat petani sangat bergantung pada permintaan pedagang pengumpul. Jika masa panen telah tiba, pedagang pengumpul mulai berdatangan untuk meminang biji kopi petani. Petani akan menjual buah kopi mereka pada pembeli yang penawarannya paling tinggi. Mungkin saja satu dari puluhan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat akan terselesaikan satu per satu seiring berjalannya waktu dengan adanya pendampingan dari beberapa stakeholder.

Namun warga Bulukumba patut berbangga hati. Pasalnya, Kopi Kahayya asal daerah tersebut tahun 2017 silam bisa dinikmati di kota Bonn. Adalah Anggota Komisi IV DPR asal Fraksi PKS Akmal Pasluddin saat menghadiri Conference of the Parties ke-23 (COP 23) di Jerman, menyempatkan diri mempromosikan kopi hasil produksi petani asal daerah pemilihannya, Kabupaten Bulukumba. Di sela-sela COP 23, Akmal mengatakan, kopi Indonesia perlu menjadi identitas kebanggaan dunia. Sebab produk unggulan dari sektor pertanian

dan perkebunan ini bisa dikonsumsi oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat internasional.

Bukan hanya itu, kelompok tani Desa Kahayya kini tidak lagi hanya mengolah kopi secara tradisional. Akan tetapi, mereka pun telah melakukan inovasi membuat keripik yang terbuat dari kacang buncis dan sebentar lagi akan mendapatkan sertifikat halal sehingga dapat dipasarkan ke ruko-ruko dan supermarket di kota.

Masyarakat Kahayya awalnya tidak memiliki kelembagaan kelompok petani masyarakat Kahayya sebagai wadah ruang aspirasi. Masyarakat Kahayya juga semula jarang terlibat aktivitas kegiatan sosial kemasyarakatan – apalagi perempuannya tidak terlibat dalam kegiatan kelembagaan kelompok tani maupun desa.

Namun kini masyarakat Kahayya sudah cukup eksis. Lewat event tahunan "Senandung Kopi", masyarakat kota dan desa saling berinteraksi. Event ini sudah terdaftar di Dinas Pariwisata Bulukumba. Masyarakat juga aktif terlibat dalam berbagai forum pertemuan, tak canggung berinteraksi dengan pemda dan percaya diri untuk menyuarakan haknya. Program yang sering diusulkan adalah perbaikan jalan desa, penyediaan sarana ekonomi, penguatan SDM desa. Lewat Wisata Alam, saat ini Kahayya menjadi satu destinasi wisata pilihan masyarakat.

Sebelum Program Peduli, selaku komunitas terpencil, Kahayya kesulitan mengakses layanan dasar berupa pengurusan dokumen administrasi kependudukan, pendidikan dan kesehatan.

Kehadiran Program Peduli memberikan wawasan yang baik bagi warga desa untuk mengadvokasi kepentingannya. Berkat Kopi Kahayya dan Desa Wisata Kahayya sudah dikenal di tingkat kabupaten dan provinsi, nasional bahkan internasional. Diplomasi kopi ini berhasil membetot perhatian pemerintah daerah untuk memperhatikan kebutuhan komunitas marjinal Kahayya terhadap berbagai layanan dasar dan konektivitas ke desa mereka. Kelompok eksluder tidak lagi memberikan stigma sebagai orang gunung kepada masyarakat. Kahayya pasca adanya izin kelola hutan lewat skema Hutan Kemasyarakatan menjadi lebih percaya diri dalam bertindak dan berusaha. Izin ini memberi dampak perubahan terhadap aspek sosial dan ekonomi, masyarakat marjinal yang tidak memiliki lahan mendapatkan jatah 1 hektar/KK. Luas izin kelola sebanyak 310 hektar untuk empat KTH. Masyarakat dan polisi hutan tidak lagi berkonflik. Masyarakat menjaga kawasan hutan dengan menanam kopi dan sebanyak 200.000 bibit tertanam berkat bantuan sosial dari BPSKL/KPH.

Banyak perubahan yang dicapai Desa Kahayya ini selama empat tahun terakhir, di antaranya berkat peran SCF melalui Program Peduli. Setelah adanya pendampingan, desa mereka mulai lepas dari eksklusivitas. Mereka pun membenahi kebutuhan-kebutuhan dasar desa; mulai melakukan advokasi, koordinasi dengan pemerintah daerah, hingga akhirnya pemerintah daerah tidak lagi mengeksklusi

desa mereka. Semangat pemuda pemudi desa untuk melanjutkan pendidikan semakin tinggi, bahkan beberapa pemuda dan pemudi Kahayya ada yang melanjutkan sekolah hingga ke pulau Jawa. Mereka menyadari betapa pentingnya pendidikan dan pengetahuan untuk kemajuan hidup.

Sebagai rangkuman, berikut ini beberapa capaian pelaksanaan program baik yang telah direncanakan sebelumnya maupun yang terlaksana di luar Program Peduli:

1. Menfasiliitasi dua Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk mendapat bantuan sosial pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm). Tim fasilitator membantu kelompok melobi ke Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Makassar untuk mendapatkan bantuan ekonomi kelompok dalam pengembangan HKm. Adanya lobi tersebut, BPSKL mendukung empat kelompok tani hutan kemasyarakatan dan diberikan bantuan senilai Rp 50 juta/kelompok tani.
2. Desa Kahayya ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba sebagai Desa Wisata melalui Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-211 Tahun 2019 tentang penetapan Desa Wisata dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba. Selain itu, Kelompok Sadar Wisata Kahayya telah terdaftar di Dinas Pariwisata Bulukumba dan telah mendapatkan Surat Keputusan Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata No. 621/Dispar.5/IV/201 dari Kepala Dinas Pariwisata Bulukumba.
3. Terbentuk satu Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kahayya, adanya kelompok ini menjadi ruang interaksi untuk pemberdayaan kelompok perempuan di wilayah Kahayya.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan membuat pelatihan Pokdarwis di Bulukumba, salah satu peserta yang terbanyak diundang adalah Pokdarwis Kahayya.
5. Membangun kerja sama dalam melaksanakan Kemah Inklusi 2019 yang didorong oleh Pokdarwis Kahayya Hills. Banyak komunitas berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini seperti Kelompok Literasi, Komunitas Motor, Siswa, Mahasiswa, Pemuda Desa dll. Total peserta kegiatan ini sebanyak 600 orang.
6. Video Perencanaan Desa Wisata Kahayya menjadi salah alat advokasi bagi Dinas Pariwisata untuk melakukan lobi anggaran ke Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dari hasil lobi tersebut Pemerintah Kabupaten Bulukumba dijanjikan anggaran untuk pengembangan Desa Ekowisata Kahayya senilai 23 Milyar pada tahun 2021-2020.
7. Akses jalan desa Kahayya sudah proses pengaspalan tahun 2019, perbaikan akses jalan dimulai dari Dusun Tabbuakang sepanjang 1,2 kilometer untuk tahap pertama. Program ini berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Bulukumba.

Pasca pendampingan, masyarakat adat dan komunitas terisolir di Barru dan Bulukumba yang menjadi kelompok pemanfaat Program Peduli, kini telah mengorganisir diri menjadi satu kelompok tani hutan yang berdaya dan berdaulat

untuk mengakses sumber daya alam secara legal melalui skema Hutan Kemasyarakatan.

Terkait isu ekonomi, saat ini masyarakat petani kopi sudah merasakan dampak positif dari stabilnya harga jual kopi. Promosi produk Kopi Kahayya yang di-*branding* oleh Program Peduli sebagai kopi organik yang terkelola dan tersertifikasi dari skema hutan kemasyarakatan terbukti telah meningkatkan pendapatan petani penghasil kopi.

Selain itu, potensi Ekowisata Desa Kahayya yang menjadi materi kampanye inklusi sosial terbukti efektif menjadi daya tarik bagi berbagai organisasi pemerintah daerah, dari desa hingga kabupaten, untuk berkontribusi dan bersinergi membangun Kahayya.

Ke depan, SCF tertantang untuk menyusun bahan advokasi berbasiskan kajian masterplan desa wisata inklusif. Kajian ini akan disusun secara partisipatif dengan masyarakat desa juga difasilitasi oleh para profesional di bidang perencanaan wisata alam. Hasil kajian ini berpotensi menjadi bahan pembuatan film tiga dimensi perencanaan desa, wisata alam, secara inklusif. Materi multimedia ini bisa dijadikan usulan pemerintah daerah untuk melakukan advokasi *scaling up* pembangunan wisata alam ke pihak provinsi dan pusat via Kementerian Pariwisata dan Kementerian Desa, juga direplikasi oleh daerah lain selama cocok. Semua ini sangat menjanjikan dan menggairahkan.

WORKSHOP INKLUSI
Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan Berbasis
Desa Kahayya, Kindang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selat
21 September 2019

BAB 9

CERITA DESA INKLUSI MEKARSARI, MAURAMBA DAN MEORUMBA DI NUSA TENGGARA

(Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara SAMANTA)

BAB INI BERISI cerita perubahan di dua lokasi yang berbeda namun lembaga pendamping yang sama. Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara, atau Samanta, dengan dukungan Program Peduli, mendampingi Masyarakat Adat Gumantar dan kelompok pendatang di Desa Mekarsari, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat penerima manfaat lainnya adalah kelompok Ata di Desa Mauramba dan Desa Meorumba, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

Permasalahan eksklusi yang telah mendiskriminasi dan memiskinkan kelompok masyarakat paling rentan di kedua provinsi ini dapat diurai, antara lain, dengan penerapan sistem layanan dasar dan bantuan sosial terpadu yang menjadi rujukan pemerintah berikut organisasi pemerintah daerah. Program Peduli bantu memecah kebuntuan dengan mendorong berbagai dinas untuk mengurangi ego sektoral supaya layanan bisa menyasar pihak yang paling berhak. Di sisi lain, melalui program penguatan kapasitas organisasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat tereksklusi, kini mereka mandiri memperjuangkan hak akses layanan dasar dan bantuan-jaminan sosial. Secara pararel, terjadi pendekatan kepada kedua pihak.

Setelah terbuka akses terhadap layanan pengurusan dokumen kependudukan, berikutnya masyarakat pemanfaat terbuka akses pada penyaluran bansos berupa ternak, rehabilitasi rumah, dana kemanusiaan bagi korban gempa, serta pemberian jamsos (PKH, KIPBSM dan KIS). Hal yang dirasa paling krusial selanjutnya adalah hak akses pengelolaan hutan yang dibutuhkan sebagai ruang hidup dan sumber mata pencaharian bagi kelompok marjinal.

Berbagai capaian di area kerja bukan kontribusi satu pihak saja, melainkan berkat kolaborasi banyak pihak. Program Peduli menggalang kemitraan yang mendorong supaya masyarakat adat menjadi isu penting untuk diatasi bersama. Semesta rupanya mendukung. Beberapa lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah daerah saat itu sedang intensif membahas draf Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, pemerintah daerah juga sedang giat membentuk Majelis Krama Adat Desa. Di pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah aktif mempromosikan Kemitraan Kehutanan yang menjadi instrumen resolusi konflik antara masyarakat adat yang mengelola hutan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang juga mengelola kawasan hutan negara di tingkat tapak.

Dampak bencana alam yang meluluhlantakkan dan menggerus hasil pembangunan saat itu sigap ditangani karena ada kesamaan misi di antara berbagai lembaga masyarakat yang bekerja di provinsi NTB. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Lombok Utara, Somasi, Kompak, Lembaga Perlindungan Anak, Koslata, dan Samanta, contohnya, semua bersedia berbagi sumber daya. Tak beda dengan sikap instansi pemerintah yang mulai *legowo* melepas ego sektoral demi pencapaian tujuan bersama.

Lembaga pemerintah baik di desa, kecamatan dan kabupaten, memberikan dukungan pada program penerimaan sosial yang diusung Peduli dan mengintegrasikannya dengan isu kemiskinan juga kebencanaan. Ini semua modal sosial yang perlu dikapitalisasi demi kepentingan pemanfaat program.

Kerja pendampingan Samanta di Nusa Tenggara Barat, dimulai dengan masyarakat adat Gumantar di kecamatan Bayan, Lombok Utara. Sebagian masyarakat Lombok menyebut mereka sebagai masyarakat Islam *waktu telu* (waktu tiga). Islam *waktu telu* adalah sebutan bagi masyarakat yang Islamnya belum sempurna. Mereka dianggap belum menjalankan syariat Islam sepenuhnya. Mereka memiliki konsep kehidupan yang disebut *wetu telu*, yaitu *mentiok* (tumbuh), *betelok* (bertelur) dan *menganak* (beranak). Jumlah sasaran penerima manfaat masyarakat adat Gumantar sekitar 250 KK.

Proses eksklusi masyarakat adat *Gumantar* terjadi dalam tiga ranah, yaitu politik, budaya dan kebijakan pengelolaan hutan. Secara politik, eksklusi sosial mulai terjadi saat diundangkan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah. Kepemimpinan lokal digantikan dengan kepemimpinan formal, terutama di desa, digantikan dengan kepala dusun dan kepala desa. Selain itu, administrasi wilayah adat terpecah oleh wilayah adminsitrasi desa. Secara budaya mereka mengalami eksklusi saat adanya syiar Islam oleh ulama, terutama pada dasawarsa 1970-1980. Mereka mengalami koersi budaya untuk mengubah keyakinan tradisional mereka menjadi Islam. Proses pemaksaan ini kemudian memunculkan stigma Islam *waktu telu* dan kelompok *boda* atau *bode*.

Masyarakat adat *Gumantar* memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya hutan. Hutan bukan saja dianggap sebagai tempat memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi hutan juga sebagai tempat religi. Mereka menyebut hutan sebagai gawah (untuk kebutuhan ekonomi) dan pawang (untuk kegiatan religi). Selain memanfatakan hutan sebagai aktivitas ekonomi, mereka memiliki tempat pemakaman di hutan. Namun, sejak adanya tata guna hutan kesepakatan (TGHK) pada awal 1980-an, hutan adat mereka menjadi hutan negara.

Warga Gumantar sebagian besar adalah petani, pekebun, dan buruh. Sebagian kecil lainnya bekerja sebagai nelayan dan pegawai swasta. Tradisi pertanian cukup mendominasi, salah satunya hajatan Aji Lawat yang diadakan setiap tiba masa tanam. Hajatan ini telah dilakukan sejak zaman nenek moyang mereka sebagai bentuk syukur kepada Sang Khalik. Aji Lawat dimulai dengan pembersihan lahan secara berkelompok, menggambarkan kohesi sosial. Setelah ladang mereka siap untuk ditanami, warga memulai acara syukuran dengan mengumpulkan sanak saudara dan tokoh adat untuk berdoa dan makan bersama. Makanan sepenuhnya organik, berasal dari tanaman alam dan disajikan dengan peralatan berbahan alami seperti alas daun pisang, wadah ancak bambu, sama

sekali tidak boleh bersumber dari pabrik apalagi plastik.

Penerima manfaat kedua di NTB adalah kelompok sempalan suku Sasak yang tinggal di desa Mekarsari, Lombok Timur. Masyarakat di sekitar menyebut mereka 'pendatang'. Jumlahnya sekitar 75 KK, tinggal di pinggir hutan di dusun Tumpangsari. Meski sesama suku *Sasak*, kelompok ini disebut pendatang karena dianggap bukan berasal dari keturunan penduduk asli desa Mekarsari.

Kelompok Sasak pendatang berasal dari desa Masbagi dan Ketangga di Lombok Timur. Sekitar tahun 1980-an mereka bermigrasi ke dusun Tumpangsari dengan alasan ekonomi, yaitu mendapatkan lahan untuk bertani. Mereka mengharapkan kehidupan yang lebih makmur sebagai petani di tempat yang baru. Awalnya mereka tinggal berbaur dan diterima oleh warga desa yang telah lebih dulu bermukim. Seiring dengan makin tingginya kompetisi guna memenuhi kebutuhan hidup, mulailah terjadi eksklusi sosial, terutama terkait akses terhadap sumber daya lahan. Tanah merupakan problem laten di Lombok. Saat ini rata-rata kepemilikan tanah penduduk Lombok hanya 0,2 hektar/KK. Persaingan untuk mendapatkan tanah meningkat seiring dengan bertambahnya populasi dan kebutuhan ekonomi. Pada tahun 1999-2000, terjadi perambahan hutan di dekat desa Mekarsari. Kelompok pendatang kesulitan mendapat akses kelola hutan.

Tahun 2018, gempa berkekuatan 7 SR meluluhlantakkan Lombok. Sekitar 437 warga tewas, luka-luka 1.353 orang, dengan 783 luka berat dan 570 orang luka ringan. Korban luka-luka paling banyak terdapat di Lombok Utara, sejumlah 640 orang. Kabupaten ini daerah paling parah karena berdekatan dengan pusat gempa. Sebagian besar bangunan hancur, rata dengan tanah. Meskipun begitu, desa-desa adat yang kokoh mempertahankan kearifan lokal warisan leluhur, dari bangunan rumah sampai kedaulatan pangan, mereka selamat. Rumah utuh, bahan pangan tetap penuh.

Rumah warisan leluhur masyarakat suku Sasak dibangun dari bahan alam seperti kayu, bambu, dan ilalang. Ada berupa rumah panggung, ada rumah lantai tanah. Rumah panggung dibangun untuk menghindari binatang buas atau bagi yang tinggal di pesisir sebagai pertahanan diri dari bencana rob air pasang.

Dalam sejarah kebencanaan di Lombok, rumah-rumah warisan itu selalu utuh. Berdiri kokoh. Hanya rusak dimakan rayap seiring perjalanan waktu.

Bencana alam mengajarkan kita untuk kembali ke alam, termasuk dalam pembangunan rumah yang perlu disesuaikan dengan kearifan lokal. Jangan karena rumah tradisional panggung berbahan alami maka otomatis masuk kategori rumah kumuh dan lantas dianggap bakal bikin merah rapor pemerintah daerah. Rumah lusuh tidak boleh lagi menjadi salah

satu indikator tingkat kemiskinan suatu daerah, karena yang lusuh ternyata lebih tahan gempa.

Selain tahan gempa, warga masyarakat adat juga tanggap bencana. Mereka terbiasa memiliki cadangan pangan. Mereka menyimpan beras, gabah, dan lauk-pauk secukupnya. Karena lokasi kampung jauh dari pasar, sekali belanja bisa untuk setok beberapa hari. Selain cadangan dari rumah, cadangan terbesar bahan pangan ada di dalam kompleks permukiman adat. Sambik (lumbung padi) masih berisi padi. Padi yang dipanen dari ladang dan sawah mereka sebagian padi bulu, varietas padi lokal yang biasa dikeluarkan saat pesta adat.

Lumbung-lumbung padi mencukupi logistik warga. Mereka juga masih memiliki kebun yang ditanami aneka buah. Pisang, pepaya, nangka semua bisa dibuat lauk. Kelapa tak pernah kekurangan.

Sekalipun warga sudah terpenuhi layanan dasar dan cukup sandang pangan papan, masih ada persoalan pengelolaan SDA dan hak masyarakat atas pengelolaan kawasan hutan.

Juni 2018, Samanta mengadakan pelatihan Penganggaran dan Perencanaan Pembangunan Desa bagi para aparatur desa Gumantar. Dalam acara pelatihan tersebut didatangkan lima belas orang peserta yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun, dan staf desa. Kepala Desa Gumantar menganggap langkah Samanta memberikan pencerahan tentang tata kelola desa sebagai sesuatu yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa. Selama ini kalau ada pelatihan, yang diundang pemerintah kabupaten paling hanya kepala desa atau sekdes, sekalipun ada yang lain itu pun dari

hanya satu orang dari BPD. Pada bulan berikutnya diadakan Pelatihan PPAM (Partisipatory Poverty Assessment and Monitoring) yang mengutamakan keterlibatan masyarakat desa secara partisipatif dalam menentukan tingkat kesejahteraan keluarga.

Untuk menjawab persoalan masyarakat atas ketidakpastian pengelolaan kawasan hutan seluas 372.75 hektare di Desa Gumantar, Samanta mencoba melakukan pertemuan dengan semua pihak yang berkepentingan pada kawasan tersebut baik pemdes, masyarakat, dan KPH di Lombok pada bulan Agustus 2017.

Pertemuan tersebut dilaksanakan di gedung serbaguna yang berlokasi di Dusun Paok Gading, Desa Gumantar, tidak jauh letaknya dari rumah Kepala Desa Gumantar. Bangunan besar dan kokoh di tengah persawahan milik warga tersebut seketika penuh dan ramai dengan kedatangan warga desa yang menghadiri pertemuan. Pada acara itu hadir utusan dari pihak KPH, pemerintah desa, penyuluh kehutanan, dan warga penggarap. Dalam pidato yang disampaikan penyuluh kehutanan saat itu, warga desa yang menggarap hutan akan diberikan ruang sepenuhnya untuk mengelola dan masyarakat akan diberikan izin secara legal secara tertulis. Pihak kehutanan menjanjikan akan membantu dan memberikan izin pengelolaan hutan asalkan warga tidak merusak hutan yang ada demi kepentingan pribadi. Dalam pertemuan tersebut masyarakat menyepakati diterapkannya skema pengelolaan hutan dengan pola kemitraan.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pertemuan berikutnya diadakan untuk membentuk Gabungan Kelompok Tani Hutan yang diberi nama Gapoktan Sangapati. Sampai saat ini Gapoktan telah membahas isi perjanjian kerja sama dengan KPH. Perjanjian kerja sama pun sudah disosialisasikan kepada warga di lima dusun yang merupakan tempat para warga penggarap kawasan bermukim. Saat itulah warga sudah mulai nyaman bekerja sekalipun belum ada izin tertulis.

Hubungan warga penggarap hutan sudah mulai membaik dengan Kesatuan Pengelola Hutan Rinjani Barat, di mana selama ini KPH seakan seperti musuh bersama. Interaksi antara aparat KPH dengan warga saat pertemuan atau penyuluhan dari rumah ke rumah berdampak baik pada hubungan emosional kedua pihak. Dengan pertemuan-pertemuan sederhana, persoalan yang sudah dua puluh tahun lebih menjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah sudah mulai terlihat perubahannya. Masyarakat adat yang memang sudah lama mengelola hutan diberikan harapan untuk bisa membuat hutan negara aman dari pengerusakan.

Namun warga masih sedikit khawatir. Saat penanaman pohon sengon pertama di hutan Gumantar pada tahun 1996, pihak kehutanan berjanji kayu itu diberikan dengan pola bagi hasil, tetapi nyatanya tidak demikian. Makanya, pihak Gapoktan berupaya keras membuat kesepakatan kedua pihak dirinci dan tertulis. Dari bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2017, warga cukup sibuk dengan pertemuan-pertemuan. Masalah hutan dan adat selalu menjadi buah bibir saat kami bertemu warga.

Sejak terbentuknya KPH Rinjani Barat sampai dengan saat ini telah dilakukan sosialiasi tata batas hutan dan sosialisasi program kemitraan kehutanan secara intensif. KPH Rinjani Barat bekerja sama dengan banyak pihak termasuk dengan LSM di antaranya Kemitraan dan Samanta. Hasilnya, sebagian dari

pemegang sertifikat bersedia mengikuti program pembangunan kehutanan yang ditandai dengan adanya perjanjian kerja sama kemitraan KPH Rinjani Barat dengan Koperasi Kompak Sejahtera pada tanggal 26 Agustus 2015 dengan bentuk pemanfatan hutan tanaman di areal Hutan Produksi seluas ± 2.000 ha. Hal ini merupakan model kemitraan kehutanan pertama di indonesia.

Usai urusan tata kelola hutan, masyarakat mulai bergiat dengan Sanggar Belajar. Sanggar ini dibentuk khusus untuk mengajarkan adat Gumantar di dusun Tenggorong. Agenda pertama adalah sekolah tenun. Hal ini mengingat perajin tenun di Gumantar telah berkurang jauh. Saat ini hampir tidak ada dari generasi muda yang menguasai tenun tradisional. Hampir semua pelaku tradisi ini adalah para ibu yang sudah sepuh. Tanpa upaya regenerasi, tenun Gumantar akan punah. Maka sanggarlah media untuk menularkan keahlian tenun itu kepada anak cucu masyarakat adat supaya tetap lestari.

Dari Nusa Tenggara Barat, kita beralih ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya Pulau Sumba. Pulau ini terlihat seperti titik kecil di Samudra Hindia yang menjadi batas paling selatan wilayah Indonesia sebelum perairan Darwin, Australia. Jumlah penduduk pulau ini adalah 781.093 jiwa (Data Badan Pusat Statistik 2017) dan terbagi menjadi empat kabupaten: Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya. Pulau ini sering disebut pulau cendana karena pada masa lalu, sekitar abad ke-16, pernah menjadi pusat populasi pohon cendana kualitas terbaik. Orang-orang dari Eropa seperti Spanyol, Portugal, dan Inggris Raya telah tiba di Sumba untuk membeli produk lokal tersebut. Penyair Taufik Ismail menyebutnya Negeri Umbu, yang diambil dari sebutan lokal untuk pria bangsawan. Pulau Sumba juga sering disebut sebagai Kerajaan Maramba karena raja atau tuan tanah tradisional pulau itu disebut Maramba. Maramba sendiri merujuk pada kelompok keluarga bangsawan yang memiliki keistimewaan di masyarakat sejak lahir.

Area kerja Program Peduli dengan pendampingan oleh LSM lokal Samanta berlokasi di Desa Mauramba & Desa Meorumba, Kecamatan Kahaungu Eti, berjarak kurang lebih 65 kilometer dari Kota Waingapu, ibu kota Kabupaten Sumba Timur. Untuk menjangkaunya perlu waktu antara 3 sampai 4 jam dengan motor. Jalur lainnya ditempuh dengan jarak sekitar 80 km dalam waktu selama kurang lebih 8 jam dari kota Waingapu menggunakan kendaraan roda dua yang tentunya membutuhkan tenaga dan biaya ekstra. Jika menggunakan angkutan umum roda empat, waktu tempuhnya bisa lebih lama karena penumpang naik turun di sepanjang perjalanan.

Apa yang diperjuangkan di Desa Meorumba dan Mauramba adalah mengubah masyarakat dari semula eksklusif menuju inklusif. Alasannya, selain terisolasi secara geografis, dua desa tersebut masih tertinggal jauh dan terisolasi secara imajiner dari laju pembangunan dan ide kesetaraan. Masyarakat di sana sangat sulit mengakses pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, termasuk dokumen kependudukan sipil, juga masih sulit berpartisipasi secara egaliter di dalam interaksi keseharian.

Kepemilikan dokumen kependudukan merupakan salah satu penyebab sulitnya masyarakat mengakses jaminan sosial yang sudah disediakan oleh negara. Padahal persyararatan mendapatkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan

Kartu Keluarga Sejahtera harus berbasis Nomor Induk Kependudukan. Kondisi ini rentan dialami oleh masyarakat tereksklusi terutama kasta bawah dan lebih spesifik lagi kaum perempuan.

Ya, tidak banyak yang tahu bahwa masyarakat Sumba mengenal tiga tingkatan strata sosial, yaitu Maramba, Kabihu, dan Ata. Maramba adalah kasta bangsawan, Kabihu adalah orang-orang merdeka, dan Ata adalah golongan terbawah. Ata ini secara sosial ekonomi menjadi hamba bagi kalangan *maramba*. Ata sering disebut "anak/orang dalam rumah", sebuah eufemisme untuk menggantikan kata budak atau hamba sahaya. Praktik pengastaan berdasarkan keturunan ini menyebabkan sebagian masyarakat belum mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga negara.

Sumba Timur dianggap sebagai kabupaten paling feodal yang menerapkan klasifikasi kelas sosial dengan ketat di mana kabupaten lain secara bertahap meninggalkan praktik tersebut.

Fenomena hubungan tuan-budak di Sumba ini menggelitik karena dua alasan: Pertama, praktek ini berkelanjutan di desa-desa yang sebenarnya tidak lagi terlalu terisolasi dan orang-orangnya mulai terhubung dengan komunitas luar. Kedua, penduduk desa telah memeluk agama Kristen dan melepas sistem kepercayaan tradisional Marapu dimana sistem perbudakan berakar. Satu temuan yang menarik adalah fakta bahwa relasi kekuasaan antara Maramba dan Ata itu unik, rumit, dan tersamar. Praktik perhambaan di Sumba ibarat ada dan tiada. Ceritanya sulit diungkap, tetapi kenyataannya masih bisa disingkap.

Negara seakan tidak peduli dan menganggap sistem kasta di Sumba sebagai bagian dari budaya lokal. Karena skalanya kecil, jelas implikasinya lebih sedikit; karena itu negara kurang memperhatikannya. Sebagian kalangan, termasuk pengambil kebijakan, menganggapnya sebagai fenomena sosial sehingga pemerintah merasa tidak perlu ikut campur.

Sejauh ini, belum ada data akurat tentang jumlah Maramba, Kabihu, dan Ata di wilayah ini. Sudah pasti Badan Pusat Statistik tidak memasukkan data tentang status sosial dan kasta seseorang. Data cukup sahih didapatkan dari sebuah kajian oleh Ade Siti Barokah bertajuk, "Slavery' at the 21st Century: An Ethnographic Investigation of Master-Slave Relation in Sumba, Indonesia". Penelitian untuk tesis di International Institute of Social Studies pada The Hague Belanda bertarikh 2016 ini menyatakan bahwa persentase kelompok kasta di Pulau Sumba

sebenarnya dapat diperkirakan, khususnya bagi mereka yang tinggal di pedesaan. Perkiraan ini dimungkinkan karena asal muasal masyarakat dapat dengan mudah dilacak akibat rendahnya mobilitas di pedesaan. Misalnya, menurut salah satu pemimpin marga, ia memperkirakan dari 1.279 total penduduk desa (Statistik Indonesia, 2010) di Meorumba, 20 persen adalah Maramba, 40 persen adalah Kabihu, dan 40 persen adalah Ata. Sedangkan dari total 609 penduduk Desa Mauramba, diperkirakan 20 persen adalah Maramba, 30 persen Kabihu dan 50 persen Ata.

Di desa-desa di mana perbudakan masih dipraktikkan dengan ketat, tingkat pengucilan, pelecehan dan penindasan tinggi. Ata akan selamanya menjadi budak, baik sebagai tenaga kerja tidak dibayar maupun sebagai budak seksual. Ini karena Maramba memiliki mayoritas sumber daya ekonomi dan mata pencaharian. Mereka juga menempati hampir semua posisi sosial dan politik di desa, kecamatan dan kabupaten. Di sisi lain, Ata tidak memiliki hak kepemilikan; mereka bergantung pada Maramba dan diperlakukan sebagai properti. Mereka dapat dengan mudah ditransfer atau diperdagangkan (meskipun ini dilakukan dalam tingkat yang lebih rendah). Ata melakukan pekerjaan tanpa imbalan untuk keluarga Maramba, termasuk pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci baju dan lain-lain; pekerjaan produktif seperti bertani, berkebun, menganyam dan lain-lain; dan, tidak semuanya walaupun cukup umum, menjadi pasangan seksual bagi majikannya. Hubungan ‘selir’ atau ‘gundik’ semacam ini masih lazim di desa-desa pedalaman.

Kebangsawanan orang Sumba tidak selalu karena kekayaan. Di Sumba Timur banyak keturunan bangsawan yang melarat seperti masyarakat biasa.

Kebangsawanan orang Sumba berdasarkan asal usul atau hubungan darah turun temurun. Maramba diyakini "berdarah biru", yang dinyatakan suci, dan oleh sebab harus tetap murni. Karena kemurniannya, Maramba mengklaim diri mereka sebagai 'umat pilihan Tuhan' dan dengan demikian mendapat hak istimewa kasta tertinggi dalam masyarakat.

Gagasan tentang kemurnian darah menciptakan pemisahan dan karenanya, menegaskan keunggulan Maramba atas kelompok yang lebih rendah. Orang-orang percaya bahwa Maramba dilahirkan dengan keistimewaan dan pantas mendapat posisi terhormat di masyarakat. Lebih jauh, narasi arus utama menyatakan bahwa Ata tidak pernah setara dengan, atau di atas, Maramba. Selain itu, solidaritas antar Ata sangat lemah karena ketergantungannya pada tuannya. Di hampir semua siklus hidup, Ata dikendalikan oleh Maramba. Ata rawan menjadi sasaran perdagangan manusia sebagaimana terungkap dalam studi di mana gadis Ata dijual kepada majikan lain melalui mekanisme yang disebut belis.

Istilah belis atau mahar hanya dikenal untuk perempuan dan anak perempuan. Setelah belis dibayarkan, perempuan Ata menjadi milik suami dan keluarganya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belis seringkali berfungsi sebagai alat tukar/bayar tubuh manusia. Pengantin Ata wanita harus membayar kembali belis ini dengan ketaatan dan pengabdian tanpa syarat. Hal ini mengakibatkan praktik pergundikan dimana majikan laki-laki memiliki hubungan seksual (tanpa menikah) dengan budak perempuannya.

Praktik ini agak standar ganda karena adat sebenarnya melarang perkawinan campur antara Maramba dan Ata untuk menjaga kemurnian darah bangsawan. Sebaliknya, jika hubungan tersebut melibatkan majikan perempuan dan budak laki-lakinya, adat menganggapnya sebagai perzinahan dan oleh karena itu hukuman harus dijatuhkan. Dapat dikatakan bahwa alasan ekonomi politik telah berkontribusi pada praktik hukum adat yang diskriminatif ini. Karena ketika pria Maramba menghamili perempuan Ata, status sosialnya akan meningkat begitu pula dengan kekayaannya. Sebaliknya, "perzinahan" yang melibatkan perempuan Maramba dan pria Ata akan mengakibatkan penurunan status perempuan menjadi Ata, begitu pula putra-putri yang lahir dari hubungan tersebut. Dengan cara ini, diskriminasi jender sangat terlihat dalam memperlakukan jenis hubungan yang sama yang melibatkan subjek yang berbeda dari perspektif hukum adat.

Sebagai orang dari kasta terendah, Ata atau orang dalam rumah tak berhak bermimpi terlalu tinggi. Mereka tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Baru sebagian kecil kaum bangsawan Maramba yang merelakan Ata untuk menempuh pendidikan tinggi. Kebanyakan mereka yang berasal dari kasta bawah harus puas dengan pendidikan setingkat SD. Bahkan, sebagian besar buta aksara. Ada beberapa alasan Maramba mengekang Ata untuk menempuh pendidikan yang layak. Selain takut kekurangan tenaga kerja, ada semacam kekhawatiran dari kaum Maramba. Mereka merasa disaingi jika kelak kaum Ata memiliki sumber daya yang lebih mapan dari tuannya.

Status Ata tetap melekat sampai kapan pun walau kelak anak-anaknya menjadi pejabat atau pengusaha. Satu hal yang tidak boleh mereka lakukan, yaitu mengklaim diri sebagai Maramba atau Kabihu. Karena dalam tradisi Sumba, garis turunan dari nenek moyang

mereka tetap diingat sampai kapan pun. Orang Sumba sangat hafal dengan silsilah keturunan dan klan walau tidak tercatat dalam buku. Ketika mereka meninggal dunia, peninggian makam leluhur, misalnya, terus menjadi pengingat masyarakat tentang asal muasal kasta mereka. Kuburan menjadi penanda tentang 'siapa Anda' dan 'dari kasta mana Anda berasal'.

Fenomena ini mulai berubah seiring dengan keterbukaan dan kesadaran para tokoh tingkat lokal. Pemerintah daerah pun diharapkan bisa berperan untuk mempercepat perubahan.

Pada tahun 1998, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tentang hak asasi manusia yang diundangkan menjadi UU No. 39/1999. Praktik perbudakan dan pergundikan seperti tersebut di atas secara bertahap berkurang. Misalnya, penguburan budak yang masih hidup bersama dengan kematian tuannya tidak lagi ditemukan. Pada saat yang sama, lebih banyak orang Maramba mengirim budak mereka ke sekolah (kebanyakan sekolah dasar) dan generasi muda Maramba menyebut budak mereka sebagai "orang dalam rumah".

Namun, hal ini sulit dipahami oleh masyarakat lokal yang kulturnya masih sangat tradisional dan kurang berpendidikan. Terlebih lagi ada isu yang berkembang bahwa Program Peduli ingin membebaskan kaum Ata dari tuannya para Maramba.

Masalah ini sensitif. Isu ini nyaris membuat Program Peduli mendapat penolakan dari beberapa tokoh masyarakat di kedua desa tersebut. Tidak hanya itu, Harian Kompas pernah meliput isu kasta di Sumba dan mendapat layangan somasi -- jurnalisnya pun sempat dicari-cari oleh oknum tertentu. Mendudukkan

persoalan kasta bukanlah perkara mudah, apalagi mendobrak tradisi yang bagi kalangan Maramba justru membuat Sumba unik secara budaya dan oleh karenanya perlu dipertahankan.

Persoalan kasta dibahas di sini dengan harapan masyarakat memiliki narasi budaya yang kian lengkap ihwal sebuah alkisah peradaban mereka yang majemuk.

Tradisi leluhur seyogyanya hanya dipertahankan jika masih sesuai dengan semangat zaman dan tidak selalu harus diwariskan kepada generasi penerus ketika tidak lagi relevan. Masyarakat yang semakin terbuka terhadap informasi dari dan interaksi dengan dunia luar akan terus berdialektika untuk menimbang apakah sistem yang tidak adil dan mengeksklusi kelompok lain untuk hidup setara dan semartabat layak dipertahankan atau tidak. Mungkin saja sistem kasta ini hanya baik untuk didokumentasikan dan dikenang, tapi tidak untuk diawetkan dan diulang-ulang.

Namun, perubahan tak akan mungkin disegerakan dan direkayasa jika belum waktunya. Faktor lain yang turut mempengaruhi awetnya tradisi ini adalah ekonomi dan saling ketergantungan. Ada juga kasta bawah yang justru merasa nyaman dengan posisi terhegemoni karena segala sesuatu ada umbu yang jamin, dari mulai sandang, pangan, papan hingga pasangan. Namun demikian, meski nampaknya kehidupan Ata bergantung pada Maramba, dan gagasan ini sengaja dikonstruksi dan dipertahankan, namun sebenarnya saling ketergantungan ini terjadi di antara kedua pihak. Masyarakat percaya bahwa kehebatan Maramba diukur dari seberapa banyak Ata yang mereka miliki. Tanpa budak, Maramba hanyalah 'umbu', yang tidak punya kebanggaan dan kemuliaan. Artinya, jika seorang Maramba tidak memiliki Ata, ia hanya diakui namanya (umbu), tapi tanpa '*privilege*' yang melekat. Pada titik inilah, Ata berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai strata sosial Maramba di masyarakat. Ata tidak hanya menjadi tenaga kerja bagi Maramba, tetapi juga simbol status.

Sama seperti bentuk relasi lain yang jamak terjadi, kadang sekalipun timpang banyak yang menerimanya karena terjadi *trade off,* pertukaran yang tak terhindarkan. Meskipun tidak ada kebebasan, tapi ada jaminan perlindungan dan kesejahteraan. Sekalipun memberatkan, tapi gengsi status sosial harus dipertahankan. Bagi mereka yang kurang percaya diri, kemerdekaan berarti harus mau dan mampu mandiri berdiri di atas kaki sendiri. Atau, pemberdayaan adalah kemauan dan kemampuan berkompetisi berdasarkan sistem meritokrasi, bukan pengistimewaan. Hal ini tentu tidak gampang dan membuat gamang.

Sulit melakukan inklusi sosial tanpa upaya membongkar perbudakan yang terjadi karena ketimpangan dan stigma, yang notabene dimulai dari dalam masyarakat sendiri, sebelum memberantas stigma dari ekskluder, yaitu orang luar yang mengeksklusi masyarakat Sumba.

Menjalankan program inklusi sosial di wilayah yang sebagian besar tanahnya gersang namun luar biasa berpanorama indah ini, ibarat menyiram air di atas pasir. Basah sebentar lalu menguap. Namun Stepanus Paranggi, pendamping lokal dari Samanta, tak berkecil hati. Ia yakin transformasi sosial terkait praktik perhambaan bisa dilakukan jika ada keterbukaan dan kerja sama banyak pihak, terutama dari kalangan Maramba. Banyak orang dari kalangan kasta atas ini berpendidikan tinggi dan menempati posisi

penting sekaligus berwawasan terbuka. Kalau mereka semakin bergerak untuk kemajuan seluruh masyarakat Sumba, perubahan akan terjadi lebih cepat.

Program Peduli gencar mendorong para pihak untuk segera menerbitkan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat (PPHMA). Harapannya agar masyarakat adat di Indonesia mendapat pengakuan dan perlindungan yang sama termasuk masyarakat adat di Sumba Timur.

Penyusunan Dokumen RPJM Desa di Meorumba mulai dilakukan tahap demi tahap. Dimulai dari musyawarah dusun sampai musrenbag Desa. Kepala Desa Meorumba dan masyarakat begitu bersemangat. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat laki-laki dan perempuan cukup membanggakan. Sebagian besar kegiatan dibiayai atas swadaya masyarakat, misalnya konsumsi dan akomodasi bagi fasilitator. Visi kepala desa yang berbunyi, "Terwujudnya masyarakat Desa Meorumba yang sejahtera, adil, cerdas, sehat, dan bermartabat," dijabarkan secara mendalam dengan indikator misi realistis dan terukur. Misalnya indikator sejahtera adalah peningkatan pendapatan, indikator sehat yaitu mendekatkan pelayanan kesehatan, indikator cerdas adalah angka partisipasi sekolah dan sebagainya. Berdasarkan visi misi di atas maka berapa kegiatan penting yang termuat dalam dokumen RPJM Desa antara lain wajib pendidikan bagi anak usia sekolah (termasuk anak-anak kaum tereksklusi), pengusulan administrasi kependudukan, pengusulan jamsos bagi masyarakat miskin dan tereksklusi, dan pembentukan BUMDes. Setelah melalui tahapan dan proses akhirnya dokumen yang dimaksud selesai disusun. Ketika itu Desa Meorumba menjadi satu-satunya desa di Sumba Timur yang sudah menyusun RPJM Desa versi Permendagri Nomor 114/2014 sedangkan yang lainnya masih mengacu pada Permendagri Nomor 66/2007.

Dari aspek layanan dasar dan jaminan sosial, dari tahun 2016-2018 sudah tercatat 487 orang yang menerima Kartu Indonesia Sehat termasuk masyarakat tereksklusi dan penerima akta kelahiran sebanyak 319 orang. Pada tahun 2018 ada 56 jiwa melakukan perekaman E-KTP langsung di desa tanpa listrik itu. Sampai saat ini kepemilikan adminduk dan jaminan sosial di Desa Meorumba sudah mencapai 90persen dibandingkan tahun 2016 hanya 30-40 persen saja. Angka 10 persen itu sebenarnya hanyalah warga yang merantau ke luar daerah. Dari segi penerimaan sosial terhadap masyarakat kelas bawah, sudah ada perubahan yang signifikan.

Kini di Desa Meorumba tidak ada lagi anak usia sekolah yang kelayapan pada jam sekolah. Semuanya sudah diatur dalam dokumen RPJM Desa dan diperkuat dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang mewajibkan setiap anak usia sekolah dari berbagai stara mengikuti pendidikan. Gubuk-gubuk reot semakin berkurang berganti rumah layak huni beratap seng. Setiap tahun Pemerintah Desa Meorumba telah mengalokasikan dana bantuan rumah layak huni untuk masyarakat miskin dan tereksklusi. Kurang lebih 85 persen penduduk tidak lagi membuang air besar sembarangan karena sudah dibantu dengan bantuan jamban sehat. Masyarakat Ata mengaku sudah mendapat penerimaan sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Beberapa Ata yang berpendidikan mulai dipercaya memangku

jabatan seperti ketua RT, RW, atau staf desa. Tekanan dan stigma dirasa semakin berkurang.

Kader perempuan dari strata bawah juga ada. Awalnya mereka adalah orang-orang yang rajin ikut kegiatan Peduli termasuk pelatihan-pelatihan penguatan kapasitas. Setelah mereka memahami tujuan program, mereka bercerita kepada sesama perempuan apa itu inklusi sosial dan mendorong agar perempuan berpartisipasi dan bersuara dalam rapat yang mengatur hajat hidup mereka. Kader-kader tersebut cukup membantu pemerintah desa misalnya memfasilitasi kegiatan musrenbang, atau melakukan pendataan seperti pada masa Pandemi Covid 19. Mereka aktif menyelenggarakan kegiatan sosialisai dan aksi sosial lainnya.

Pendampingan kelompok marginal membutuhkan pendekatan dan strategi khusus, agar mereka dapat mengakses layanan dasar dan bansos/jamsos dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Perubahan kebijakan dari desa hingga kabupaten telah memberikan hak akses bagi kelompok marjinal mendpatkan layanan dasar dan bansos/jamsos dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Advokasi perubahan kebijakan Program Peduli cukup efektif sebagai instrumen legal bagi mitra Peduli untuk mengadvokai hak akses kelompok marginal mendapatkan manfaat layanan dasar dan bansos/jamsos dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Program Peduli juga memberi pengalaman baru dalam membangun jejaring melakukan advokasi kelompok marginal. Jejaring dilakukan antar CSO dan pemerintah lokal maupun antar tingkat pemerintah desa, kabupaten, provinsi dan nasional. Kemitraan cukup berperan di tingkat nasional untuk mendukung Program Peduli di daerah. Misalnya kegiatan Revolusi Mental Kementerian PMK dilakukan di Lombok Utara. Selain itu, jejaring di tingkat nasional mengakselerasikan penerima manfaat Program Peduli masuk dalam BDT penerima manfaat bansos/jamsos.

Selama ini, kader desa dan kabupaten sangat berperan dalam proses pelaksanaan program dan melakukan perubahan baik di desa dan kabupaten. Kader juga akan menjadi modal sosial untuk keberlanjutan paska Program Peduli.

Proses pendampingan yang memanusiakan adalah elemen kunci pengelolaan sumber daya alam bersama masyarakat. Akses pengelolaan hutan, baik hutan desa atau hutan negara, hutan kemitraan atau hutan adat, memungkinkan masyarakat menata diri dan lingkungannya. Berorganisasi. Menyusun aspirasi, asa dan mimpi. Menjalani proses, menyusun dan menyepakati juga meraih tujuan bersama. Rangkaian proses yang telah lama ditekan, perlahan menguap, lama-lama menghilang dari kehidupan bermasyarakat di masa Orde Baru. Masyarakat adat tidak selayaknya diperlakukan dengan belas kasihan dan diseragamkan, tetapi harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi secara setara dan bermartabat.

BAB 10

BOTI & BAJO BUKTI KERAGAMAN DAN KESETARAAN BUDAYA DI TIMUR INDONESIA

(Yayasan Tanpa Batas)

CERITA PERUBAHAN DI bab ini menampilkan Masyarakat Adat Suku Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Masyarakat Adat Suku Bajo di Kabupaten Kupang. Keduanya berlokasi di Nusa Tenggara Timur.

Suku Boti adalah penghuni asli Pulau Timor. Mereka tinggal di dataran tinggi pegunungan dan pedalaman hutan belantara. Mereka teguh memegang adat istiadat dan ketat mempraktikan aliran kepercayaan yang dianut.

Suku Boti merupakan segelintir yang tersisa dari pewaris tradisi suku kuno Atoni Meto. Area pusat kerajaan Atoni Meto berjarak 40 kilometer dari So'e, ibukota kabupaten. Situs bekas kerajaan itulah yang kini secara administratif menjadi Desa Boti, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kampung Boti ini terbagi menjadi dua, yakni Boti Dalam dan Boti Luar. Jumlah penduduk Boti Dalam sekitar 77 Kepala Keluarga atau 319 jiwa, sedangkan Boti Luar sekitar 2.500 jiwa. Hanya Kampung Adat Boti Dalam yang mewarisi dan mempraktikkan adat budaya dan aliran kepercayaan asli Halaika. Warga Boti Dalam tinggal di areal seluas 3.000 meter persegi yang dikelilingi pagar kayu. Sedangkan Boti Luar sudah beragama. Mereka menganut Kristen Protestan dan Katolik. Meski warga Boti memeluk kepercayaan dinamisme, mereka tidak melarang masuknya ajaran gereja. Hanya saja, bagi warga yang ingin memeluk agama lain harus keluar dari Kampung Adat Boti Dalam.

Suku Boti percaya pada dua penguasa alam yaitu *Uis Neno dan Uis Pah*. *Uis Neno* adalah papa atau bapak, sebagai penguasa alam baka yang akan menentukan seseorang bisa masuk surga atau neraka berdasarkan perbuatannya di dunia. Uis Neno menjadi Dewa Langit. Adapun *Uis Pah* merupakan mama atau ibu yang mengatur, mengawasi, dan menjaga kehidupan alam semesta beserta isinya termasuk manusia. Uis Pah disebut juga sebagai Dewa Bumi. Bagi Suku Boti, hidup ini diatur oleh tiga kekuatan besar, yakni *Uis Pah*, *Uis Neno*, juga roh arwah leluhur (*Nitu*). Roh-roh leluhur ini dipercaya mendiami pohon-pohon besar yang berada di hutan terlarang mereka.

Populasi Suku Boti yang relatif kecil ditambah lokasi yang terpencil membuat mereka tergolong sebagai komunitas minoritas, apalagi mereka juga taat menganut Aliran Kepercayaan Halaika dan terkepung di daerah yang mayoritas warganya beragama Kristen Protestan. Ketika seseorang sudah memeluk agama Kristen Protestan, maka atribut adat dan kepercayaan Halaika biasanya ditanggalkan.

Meski penerapan ajaran leluhur sangat kental, Kerajaan Boti tetap terbuka terhadap pendidikan. Namah Benu, Raja Boti saat ini, mengatakan warganya tetap bisa menyekolahkan anak-anaknya. Dia mencoba menyatukan pengetahuan dari pendidikan formal dan tetap memelihara ajaran-ajaran tradisi. Dengan demikian, warga Suku Boti tetap bisa melestarikan adat dan tradisi leluhur tanpa teralienasi dari kemajuan zaman.

Suku Boti ramah dan terbuka pada pihak luar. Tamu dianggap berkah dan kebaikan. Pantang bagi warga Suku Boti menolak tamu yang datang, mereka bahkan akan memberi sambutan yang paling meriah, salah satunya dengan upacara Natoni. Upacara ini berisi ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang disampaikan secara lisan oleh seorang penutur, *Atonis*. Petatah

petitih ini dilakukan bersama sekelompok pendamping yang dikenal dengan sebutan *Na He'en*. Kata-kata dalam Natoni adalah petuah bijak dan pengharapan yang ditujukan kepada manusia ataupun kepada arwah orang mati. Natoni juga sarana komunikasi tradisional yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan tertentu baik kepada sesama warga maupun kepada para leluhur. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat baik adat perkawinan maupun kematian, juga acara-acara seremonial lainnya; misalnya saat penyambutan dan pelepasan tamu. Jabat tangan erat dan cium hidung merupakan salam perkenalan dan perpisahan Boti yang khas, namun mungkin salam unik ini perlu disesuaikan dalam masa pandemi karena bisa membuka peluang penyebaran virus Covid-19.

Warga Kampung Adat Boti Dalam juga masih menjalankan aturan spesifik mengenai cara berdandan dan berpakaian. Salah satunya, para pria yang sudah menikah dilarang memotong rambutnya. Mereka harus menggelung rambut hingga berbentuk seperti konde. Konde dipercaya sebagai bentuk kerapian, kesopanan, keteraturan, dan sekaligus simbol kedewasaan. Konde juga penanda hubungan dengan yang ilahi dan leluhur. Konde menunjukkan identitas fisik kesukuan tanda penghargaan kepada para leluhur dan bukti ketaatan terhadap perintah Uis Pah.

Aturan adat Boti lainnya adalah pakaian sehari-hari yang ditenun sendiri. Pria dan wanita yang sudah beranjak remaja sampai usia tua harus mengenakan kain tenun yang mereka buat sendiri. Warga tidak boleh mengenakan celana, rok, atau daster.

Untuk membuat kain tenun, mereka memintal benang dari tanaman kapas yang tumbuh di lingkungan sekitar. Sedangkan untuk perwarnaan, mereka menggunakan dedaunan dari alam yang diproses secara tradisional. Namun belakangan ini, warga Boti juga menggunakan bahan pewarnaan dari pabrik meski dibatasi.

Kain tenun Boti menjadi salah satu hasil seni yang paling tersohor karena warna dan motif yang sangat cantik. Saking berharganya, kain tenun Boti ini dijadikan mas kawin. Proses menenun kain bisa memakan waktu berbulan-bulan karena dilakukan dengan alat tradisional. Harga kainnya sendiri bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Selain kain tenun, suku Boti juga terkenal dengan seni pahat, perhiasan, dan alat musiknya.

Suku Boti menjadi sasaran pemanfaat Program Peduli karena merupakan komunitas yang terpinggirkan baik secara sistem adat maupun sosial. Suku Boti menjadi satu-satunya kerajaan yang masih tersisa pada zaman ini. Konon, dahulu Timor Tengah Selatan dihuni oleh beberapa kerajaan kecil.

Namun, seiring berjalannya waktu, kerajaan lain luntur dan tergusur oleh modernisasi.

Kini, suku Boti dipimpin oleh seorang raja bernama Usif Nama Benu yang menggantikan ayahnya, Usif Nune Benu yang wafat pada 2005 silam.

Untuk terus menjaga adat dan kepercayaan, Suku Boti hanya memperkenankan sebagian anak-anak untuk bisa sekolah. Dalam satu keluarga, anak-anak dibagi dua kelompok, yaitu kelompok yang diizinkan sekolah dan kelompok yang tidak boleh sekolah.

Hal tersebut sebagai upaya untuk terus melestarikan adat istiadat mereka dan kepercayaan Halaika. Sehingga tak heran jika sebagian penduduk suku Boti tak bisa berbahasa Indonesia, termasuk Raja Boti. Mereka menggunakan bahasa daerah yang disebut bahasa Dawan untuk berkomunikasi sehari-hari.

Keunikan lain dari suku Boti adalah mereka memiliki kalender sendiri yang terdiri dari 9 hari. Masing-masing nama hari menyimpan filosofi masing-masing. Kesembilan hari tersebut, yaitu *neon ai* (hari api), *neon oe* (hari air), *neon besi* (hari besi), *neon uis pah ma uis neno* (hari dewa bumi dan dewa langit), *neon suli* (hari perselisihan), *neon masikat* (hari berebutan), *neon naek* (hari besar), *neon liana* (hari anak-anak), dan *neon tokos* (hari istirahat).

Mereka terpinggirkan karena budaya dan paham yang dianut. Agama asli Halaika tidak diakui oleh negara sehingga dalam kolom agama di KTP terpaksa harus dicantumkan Kristen Protestan. Populasi komunitas inipun terus berkurang karena warga yang bersekolah harus keluar dari naungan adat dan tidak boleh masuk kembali ke dalam suku setelah selesai mengenyam pendidikan formal. Warga Suku Boti juga sangat tergantung pada alam dan mempunyai kearifan lokal dalam memelihara sumber daya alam, namun sayangnya kurang diindahkan oleh warga di luar suku ini karena mereka dianggap tidak beragama.

Suku Boti termasuk dalam kategori minoritas etnis, bahasa, agama/ kepercayaan. Tipe *triple minority* seperti ini paling sering dibahas dalam kajian minoritas. Membahas isu ini tidak serta merta membuat kita terkena pasal suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Hal ini penting ditegaskan untuk menghindari kerancuan.

Human Rights Watch menunjukkan bahwa persoalan minoritas agama di Indonesia lebih banyak didukung oleh peraturan-peraturan yang justru dikeluarkan oleh pemerintah sendiri, baik di tingkat lokal maupun nasional. Suku Boti menerima diskriminasi dalam bentuk yang berbeda. Memang tidak ditemukan kasus kekerasan berupa penyerangan fisik terhadap Suku Boti. Akan tetapi eksklusi terhadap mereka dilakukan oleh organisasi-organisasi keagamaan dan bahkan pemerintah daerah dengan mengeluarkan aturan-aturan yang mengikat sehingga sulit diakses oleh Suku Boti yang menganut kepercayaan Halaika. Salah satu contoh, anak dari Suku Boti berpaham Halaika jika bersekolah di institusi Kristen maka harus memiliki akta lahir dan surat baptis.

Integrasi sosial, politik dan ekonomi masyarakat adat merupakan bagian tak terpisahkan dari inklusi kebijakan. Dengan demikian, upaya meningkatkan pemahaman dan keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada

kelompok minoritas Suku Boti menjadi sangat dibutuhkan untuk mengubah sudut pandang dan sikap dalam menyelesaikan masalah-masalah ini.

Pelaksanaan Program Peduli di Desa Boti ditujukan untuk memastikan lahirnya sikap inklusif dan penerimaan sosial bagi kelompok minoritas yang selama ini kurang menerima manfaat optimal pembangunan. Perlakuan eksklusi kepada masyarakat adat, antara lain, disebabkan karena kuatnya prasangka negatif atau bias tentang mereka. Inklusi masyarakat adat pada gilirannya akan meningkatkan akses terhadap layanan dasar dan bantuan sosial serta kebijakan afirmatif yang berpihak pada komunitas Suku Boti. Ketiga hasil ini diharapkan membawa kelompok yang didampingi mampu keluar dari jerat kemiskinan melalui sinkronisasi data terpadu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Proses verifikasi dan validasi data terkait erat dengan kesediaan warga untuk dinyatakan masuk ke dalam kategori miskin.

Masyarakat timor, terutama warga suku Boti, sangat enggan dikatakan miskin karena sejatinya mereka memiliki tanah kebun dan hewan peliharaan yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga walaupun tinggal di rumah yang dikategorikan miskin (beratapkan ilalang, berdinding pelepah gewang dengan bagian terluas lantai rumah terdiri dari tanah, bukan beratap genting dan dinding tembok berplester). Tinjauan semacam ini mungkin bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan untuk mengubah tolok ukur kemiskinan supaya tidak bersifat mutlak atau berorientasi hanya pada standar tertentu yang *biased* kepada masyarakat desa yang menyesuaikan arsitektur rumah supaya selaras dengan alam/kondisi cuaca dan ketersediaan bahan baku di lingkungan sekitar.

Basis Data Terpadu menjadi pintu masuk utama dalam program ini. Data BDT yang telah terverifikasi menjadi acuan untuk melakukan advokasi ke pemerintah daerah jika masih ada warga yang belum memiliki legalitas dokumen namun masuk dalam kategori keluarga miskin. Data yang terverivikasi terdapat 109 warga Suku Boti yang belum memiliki KTP dan Kartu Keluarga. Bahan advokasi ini disampaikan langsung ke Dinas Kependudukan dan ternyata sangat efektif dalam mendorong keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga mereka melakukan pendataan langsung kepada 109 orang warga Suku Boti untuk masuk dalam daftar prioritas untuk memperoleh Kartu Keluarga dan KTP dengan rincian; laki-laki 78 orang, perempuan 31 orang.

Setidaknya ada 30 orang Perangkat Desa, Tokoh Adat dan kader Suku Boti dengan rincian 9 orang perempuan dan 21 laki-laki yang menerapkan ketrampilan teknis yang telah difasilitasi oleh Program Peduli melalui diskusi advokasi pemanfaatan Dana Desa bersama kader muda dan perempuan desa serta teknik verifikasi dan validasi data BDT yang disepakati melalui Musyawarah Desa. Pelibatan warga Suku Boti dalam mengawal pemanfaatan dana desa merupakan hasil perjalanan panjang proses penguatan kapasitas terkait dengan strategi advokasi. Saat ini mereka sudah dapat terlibat dalam proses secara aktif dengan menyampaikan langsung usulan saran untuk memanfaatkan dana desa melalui BUMDes.

NUSA TENGGARA TIMUR
Mitra Polri
POLRES TTS

RUIT

Salah satu usulan dari salah satu Tokoh Adat Suku Boti yaitu agar aparat desa dapat mensosialisasikan ke setiap dusun dan RT terkait dengan mekanisme mengakses dana desa untuk pengembangan ekonomi keluarga sehingga warga bisa mengerti dan dapat mengaksesnya.

Selain itu peran perempuan dan pemuda desa pada saat ini sudah mulai dioptimalkan. Keadaan tersebut dapat dilihat dari berbagai kegiatan dan proses pembangunan di desa. Desa sudah melibatkan peran perempuan dan pemuda secara menyeluruh dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah desa terutama dalam penetapan data KK miskin di Desa Boti dan penggunaan dana desa.

Aparat Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Perwakilan Perempuan Boti dan Kader Peduli di Desa Boti juga dapat melakukan proses advokasi dengan menggunakan data BTD yang sudah diverifikasi dan divalidasi kepada Pemerintah Daerah. Hasilnya, Pemerintah Daerah merespon dengan melakukan pelayanan pendataan adminduk secara langsung bagi warga Suku Boti. Selain itu Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan berkomitmen untuk memasukkan warga Suku Boti dalan data BDT di tingkat kabupaten dan akan diusulkan ke tingkat pusat. Laki-laki dan perempuan Boti tidak luput dilatih untuk menerapkan ketrampilan teknis

Proses pelaksanaan program lebih bersifat kolaboratif lintas sektor sehingga sangat memudahkan komunitas dalam berinteraksi dengan Pemerintah Daerah antara lain;

- Workshop tentang Basis Data Terpadu bersama stakeholder di tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan,
- Diskusi advokasi pemanfaatan Dana Desa bersama Kader Muda dan Perempuan Desa melalui Musyawarah Desa,
- Pelatihan Sistem Pendataan bagi Staf YTB, Kader Peduli dan Aparat Desa (Basis Data Terpadu),
- Pertemuan penyesuaian data BDT di tingkan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Musyawarah Desa penetapan data BDT dengan melibatkan BAPPEDA dan Dinas Sosial.

Dalam berbagai forum ini, warga Suku Boti dapat berinteraksi dengan berbagai pihak antara lain; aparat pemerintah di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Melalui forum-forum tersebut, komunitas Suku Boti dapat memberi masukan maupun turut mengambil keputusan.

Ada hal yang menarik bahwa saat ini sudah terbentuk Forum Kader Orang Muda Peduli Boti. Forum ini terbentuk atas inisiatif pemuda dan pemudi Boti saat melakukan pertemuan pembahasan pembentukan Kader Orang Muda Peduli Boti. Forum ini sudah langsung terlibat dalam proses advokasi di tingkat desa dengan melakukan advokasi pemanfaatan dana desa.

Pelibatan komunitas dalam forum-forum sering terkendala pada waktu karena komunitas Suku Boti memiliki sembilan hari kerja dengan ritual yang berbeda-beda sehingga butuh penyesuaian waktu dan restu dari Raja Boti. Namun karena Raja Boti sudah berpikiran terbuka dan cukup percaya dengan CSO sehingga walaupun dalam hari kerja yang tidak bisa diganggu pun, ia akan memerintahkan komunitas untuk terlibat.

Pemikiran yang terbuka ini berhasil mendobrak kebijakan lama yang melarang anak-anak bersekolah formal. Dulunya Raja Boti tidak memperbolehkan warganya bersekolah. Akan tetapi, saat ini sudah diperbolehkan, meskipun masih terbatas untuk tingkat SD-SLTP. Pada kenyataannya, yang terus bersekolah sampai SLTA juga tidak dipermasalahkan. Lambat laun sekat tradisi dalam hal ini semakin terbuka saja. Bahkan, saat ini sudah ada kebijakan khusus dari Raja Boti bahwa anak-anak yang bersekolah formal di Boti masih boleh mengikuti ritual adat dan keagamaan. Ini merupakan hal baru karena dahulu anak-anak yang bersekolah formal langsung dicoret dari kegiatan ritual keagamaan. Bahkan, dahulu anak yang masuk sekolah formal akan dikeluarkan dari suku Boti. Namun sekarang aturannya sudah berbeda, sepanjang mereka masih bersekolah di daerah Boti, maka masih dianggap masyarakat adat Boti. Akan tetapi, apabila mereka melanjutkannya ke jenjang yang lebih tinggi dan harus bersekolah di luar Boti, anak tersebut harus keluar dari Suku Boti.

Dinamika yang terjadi di Suku Boti sulit dilepaskan dari kerja sama dari pemegang otoritas desa yang memberi dukungan penuh dengan cara menyiapkan administrasi desa dan legalitas dokumen sebagai persyaratan masuk sekolah. Bahkan, saat ini perangkat desa dan adat sedang mempersiapkan langkah-langkah advokasi bersama-sama dengan Yayasan Tanpa Batas dalam Program Peduli guna mengajukan usulan ke kabupaten dan provinsi untuk pendirian sekolah menengah atas di Boti dan mengembangkan sanggar anak dengan berbasis kearifan lokal, terutama bagi anak-anak yang tidak ingin bersekolah formal.

Ciao
Ciao

Pemangku adat bukan tidak menyadari dampak pembangunan adalah pengabaian tatanan sosial dan budaya masyarakat adat Suku Boti. Namun mereka tercerahkan bahwa semakin terdidik seseorang, pada dasarnya ia akan semakin peduli terhadap budaya dan tradisi yang menjadi kekayaan Suku Boti. Boti tidak lagi mempertentangkan antara adat dan pembangunan. Keduanya bisa seiring sejalan demi kemajuan.

Selain sekolah formal, Desa Adat juga menjadi pembicaraan serius sebagai rencana keberlanjutan Program Peduli. Masyarakat Adat Boti perlu kelembagaan yang kuat dengan pengakuan negara yang pasti untuk terus memegang teguh adat istiadat dan budaya leluhur mereka. Struktur maupun infrastruktur budaya Boti masih tetap dipegang teguh walaupun pemerintah pada tahun 70-an membuat aturan *regrouping* desa, dimana struktur pemerintahan tradisional yang tersebar di seluruh nusantara banyak yang berubah menjadi pemerintahan desa.

Keluarnya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjadi peluang emas bagi masyarakat adat di desa untuk mengelola dan menghidupkan kembali budaya mereka. Untuk itu perlu pandangan dan kajian bagaimana peluang Desa Adat bisa diwujudkan oleh Masyarakat Adat Boti dengan bantuan masyarakat sipil serta dukungan pemerintah daerah dan kementerian desa di level nasional.

Desa Adat dan Hutan Adat dikembangkan untuk diperjuangkan dalam satu paket sekaligus. Para pihak saat ini sibuk mempersiapkan dokumen-dokumen terkait kearifan lokal pengelolaan hutan adat sebagai bagian dari kelengkapan pembuatan Peta Desa secara menyeluruh yang menjadi bahan advokasi kebijakan ke berbagai tingkatan pemerintahan.

Dari ketinggian pegunungan asri Desa Boti, kita tengok sebuah daratan cantik di sebelah barat Kota Kupang bernama Pulau Kera yang telah menjadi tempat keturunan Suku Bajo berlabuh. Seluruh jengkal pulau ini hanya pasir halus. Kondisi bawah lautnya berhias terumbu karang dan ikan melimpah. Keindahan alamnya dan keramahan penduduknya menjadi buah bibir para wisatawan.

Ada beberapa versi asal usul nama pulau ini. Konon kata kera berasal dari kata *kea* yang dalam bahasa Rote artinya penyu. Dahulu, pulau ini berfungsi sebagai lokasi penangkaran penyu. Mungkin karena pelafalan yang bergeser sehingga namanya berubah dari kea menjadi kera. Ada juga yang percaya bahwa kata kera berasal dari *takera* yang dalam bahasa Solor, Flores artinya timba. Mungkin karena dahulu di pulau ini ada sebuah sumur yang airnya hanya bisa diambil dengan menggunakan takera atau timba.

Masyarakat Pulau Kera berjumlah sekitar 416 jiwa dari 114 Kepala Keluarga yang menghuni pulau kecil seluas 48,17 hektar. Sekalipun berjarak relatif dekat dari Kota Kupang, sekitar 35 menit perjalanan ditempuh dengan perahu, masyarakat Pulau Kera terisolasi dari dunia luar.

Pembangunan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, hingga akses pendidikan nyaris tidak pernah dirasakan oleh warga. Sekitar 70 anak usia sekolah yakni dari umur 6 hingga 12 tahun terpaksa harus mengurungkan niatnya untuk bersekolah karena tidak ada fasilitas sekolah sama sekali. Sebagian besar penduduk memilih tetap tinggal di Pulau Kera karena sejak tahun 1911, nenek moyang mereka, Suku Bajo asal Sulawesi Tenggara, sudah mendiami pulau ini.

Secara administratif Pulau Kera masuk wilayah Desa Ulasa, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang.

Pemerintah tak kunjung memberikan status kewarganegaraan dan tidak memenuhi layanan publik bagi penduduk Pulau Kera. Mereka berkilah bahwa Bajo adalah suku nomaden yang selalu berpindah-pindah dan sekalipun sudah bermukim di Pulau Kera selama bertahun-tahun, hal ini dianggap sebuah ketelanjuran. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 18/KPTS-II/1993, pemanfaatan Pulau Kera adalah daerah wisata berbasis konservasi dengan status Taman Wisata Alam Laut yang seharusnya tak berpenduduk. Penduduk liar tak pantas mendapatkan hak-hak dasar. Demikian pangkal masalah yang sepatutnya menuntut penyelesaian dari pihak yang berwenang.

Ratusan warga Pulau Kera, entah liar atau tidak, merasa gundah dengan masalah identitas dan eksistensi mereka. "Kami memang Suku Bajo tapi siapakah sebenarnya kami ini?" Pertanyaan ini berkecamuk mewakili kegelisahan warga.

Tak ada sekolah di wilayah ini karena warga dilarang mendirikan fasilitas umum permanen di sana. Satu-satunya fasilitas umum yang dibolehkan adalah sebuah masjid sebagai tempat peribadatan sekaligus tempat bermusyawarah untuk membicarakan kepentingan-kepentingan warga. Untuk menggantikan sekolah, ada sebuah sanggar belajar anak ala kadarnya yang dikembangkan oleh warga bekerja sama dengan para aktivis sosial dari Yayasan Tanpa Batas.

Proses belajar anak-anak di Pulau Kera hanya digelar melalui Program Peduli yang basisnya sekolah alam. Di dalamnya melibatkan unsur bermain, bergerak, dan bernyanyi yang tak membutuhkan ruangan khusus. Semuanya menyatu dengan alam tanpa dinding penyekat.

Namun di pangkuan ibu pertiwi, pendidikan formal tak pernah menginjakkan kakinya. Di tempat ini agama menjadi satu-satunya ilmu pengetahuan yang diajarkan kakek-nenek dan pemuka masyarakat. Selain itu, hanya ada ilmu tentang laut. Tak usahlah ditanya pengetahuan mereka tentang laut karena mereka lahir dan besar di tengah gelombang samudra.

Warga Pulau Kera juga tidak mengenyam akses layanan kesehatan. Suku Bajo di Pulau Kera terbiasa berjuang sendiri dan bertahan dengan segala keterbatasan yang mereka miliki.

Meskipun demikian, orang Bajo tidak mau disebut kaum tidak jelas. Pada kenyataannya mereka tinggal di wilayah negara Indonesia dan ingin diakui keberadaannya secara hukum.

Keinginan Suku Bajo di Pulau Kera sederhana tapi rumit. Mereka ingin menjadi bagian dari Indonesia dan mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia, namun rumit karena birokrasi dan politik.

Hidup di pulau ini penuh misteri. Semua seperti nyata karena warga dapat melihat keindahan Pulau Kera, tetapi itu tak seindah harapan masa depan mereka. Suku Bajo Pulau Kera seperti ada tapi tiada karena tak dianggap ada. Berita-berita miring kerap kali mampir di telinga warga Pulau Kera yang membuat kegelisahan makin membuncah. Berita miring itu seputar kabar kabur bahwa makam leluhur akan digusur, bahwa pulau ini akan dijual, dan semacamnya.

Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Kupang santer dikabarkan berencana untuk merelokasi semua warga pulau Kera ke Pariti, Kecamatan Sulamu. Namun kondisi lahan di daerah baru yang disediakan pemerintah jauh lebih buruk karena berlokasi cukup jauh dari laut, sehingga akan menyulitkan kehidupan warga yang terbiasa menyatu dengan budaya laut. Suku Bajo merupakan orang Same atau orang Laut. Di mana ada perairan, maka di sanalah Suku Bajo membangun kehidupan. Mereka meninggali pulau-pulau kosong dan daerah-daerah tak bertuan lainnya. Laut merupakan sumber mata pencaharian utama Suku Bajo sehingga di pulau mana pun mereka bisa hidup. Mereka adalah pengrajin perahu dan nelayan penangkap ikan yang baik. Mungkin lagu Kolam Susu dari grup Koes Plus sebenarnya menjelaskan Suku Bajo.

"Bukan lautan hanya kolam susu
Kail dan jala cukup menghidupimu
Tiada badai, tiada topan kau temui
Ikan dan udang menghampiri dirimu
Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman.."

Kembali ke nasib masyarakat Suku Bajo di Pulau Kera, mereka ingin diakui menjadi bagian dari Indonesia dan mendapatkan hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya di luar sana. Di Pulau Kera sekarang telah terbentuk sistem sosial, yaitu dua RT dan satu RW. Namun sejauh ini RT dan RW tersebut belum diakui sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Kupang.

Pemerintah Kabupaten Kupang sebenarnya mengakui keberadaan Suku Bajo di Pulau Kera. Namun, untuk menerbitkan legalitas kependudukan bagi mereka masih ada hambatan administratif yang menghadang. Pulau Kera lokasinya ada di tengah laut yang kawasannya sudah ditetapkan oleh KLHK sebagai Kawasan Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang. Secara *de jure* seharusnya tidak ada penduduk di kawasan ini. Berdasarkan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, salah satu fungsi taman wisata alam laut adalah sebagai kawasan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan

wisata, bukan permukiman. Namun, bagi Suku Bajo Pulau Kera, yang diperlukan hanya niat untuk menyelesaikan. Rintangan berbentuk apa pun akan dapat dipecahkan. Sayangnya, seberkas cahaya terang belum terlihat dari titik terindah di laut Kupang ini.

Jika diringkas, ada tiga hal utama yang menjadi permasalahan inklusi di Pulau Kera, yakni pendidikan, kesehatan dan air bersih. Untuk pendidikan, banyak anak tidak bersekolah. Terkait kesehatan, banyak anak balita terkena gizi buruk. Terakhir, ketiadaan air tawar yang menyebabkan warga terpaksa menyeberang pulau menggunakan perahu untuk membeli air seharga Rp 2.000 per jerigen. Memang ada sumur, namun semua airnya asin tidak dapat digunakan untuk masak dan minum.

Masyarakat Adat Suku Bajo di Pulau Kera ada. Absennya dokumen administrasi kependudukan tak lantas membuat mereka hilang asa dan merasa tak nyata.

Mungkin karena filosofi hidup tersebut, sanggar kreasi anak yang terbentuk di Pulau Kera diberi nama "*Sanggar Sama Turu*" yang artinya "Kebersamaan" sedangkan sanggar di Boti diberi nama "*Sanggar Ta Fena' Kuan*" yang artinya "Membangun Kampung". Sanggar Anak di Pulau Kera sekarang sudah ditingkatkan jadi Sekolah Jarak Jauh (filial) dari Madrasah Ibtidaiyah di Sulamu, sedangkan anak-anak Boti sudah bebas bersekolah, mengenyam pendidikan formal dan non-formal tanpa ketakutan akan dieksklusi dari tatanan adat.

Demikian cerita Suku Boti dan Suku Bajo yang penuh warna. Mereka menjadi bukti kemajemukan dan kesetaraan budaya di Timur Indonesia. Meski banyak aturan dan tradisi yang dijalankan oleh Suku Boti, juga meski banyak halangan dan rintangan yang menghalangi inklusi Suku Bajo, warga tetap betah tinggal di kampung dengan segala adat istiadat dan budayanya. Ini warna warni jalan kehidupan umat manusia. Mereka merasa cukup dengan yang ada dan teguh menjaga alam supaya alam baik kepada mereka. Sesuatu yang dapat ditiru oleh warga kota yang sering merasa tak puas diri dengan keadaan sekalipun diberkahi dengan banyak kelimpahan rezeki dan kemudahan.

***

3

EPILOG

PEMBELAJARAN & POTENSI KEBERLANJUTAN

LAPORAN TAHUNAN KANTOR Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia 2020, yang merekam kinerja pemerintah dan menjadi sarana evaluasi tahunan lembaga kepresidenan kepada publik, sekilas menyinggung komitmen Pemerintah untuk memastikan pembangunan merata di semua wilayah. KSP menyatakan bahwa negara hadir untuk memastikan terwujudnya apa yang disebut "Indonesiasentris". Laporan yang bertajuk "Bangkit untuk Indonesia Maju" ini juga menyoroti pandemi sebagai kekuatan seismik yang mengubah tatanan dunia namun diharapkan tak menyurutkan iktikad negara untuk hadir di segenap pelosok tanah air. Pemerintah memastikan pembangunan terus berjalan di segala sektor hingga terwujudnya keadilan yang merata. Daerah pinggiran bahkan menjadi prioritas percepatan pembangunan.

Dalam konteks itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diberikan mandat untuk mengawal revolusi mental. Kemudian, perangkat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah dua periode kabinet kepresidenan disiapkan. Tujuannya supaya mesin birokrasi dapat meningkatkan kapasitasnya untuk dapat mewujudkan Nawa Cita menjadi realita. Harapannya desa/kelurahan se-Indonesia yang berjumlah 83.813, berdasarkan data BPS tahun 2019, bisa diorkestrasi untuk berswadaya membangun perekonomian pedesaan. Setiap tahun, desa-

desa itu diberikan insentif modal yang memadai dan difasilitasi oleh para pemandu yang terdiri dari cendekiawan muda yang direkrut untuk setiap desa. Dana yang digelontorkan oleh pemerintah hingga tahun 2020 sudah mencapai Rp 72 triliun (sumber: Bappenas diolah dari data BPS).

Banyak potensi besar yang dimiliki oleh desa dan daerah tertinggal kini bertambah dengan daya dorong Dana Desa (DD). Pemerintah mengklaim bahwa program ini mampu menurunkan persentase kemiskinan menjadi 12,6 persen. Dalam lima tahun terakhir, pemanfaatan DD dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, seperti akses terhadap air minum dan sanitasi layak, persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan akses jalan, jembatan dan telekomunikasi yang menghubungkan desa-kota, yang juga membuka berbagai peluang usaha, dan masih banyak lagi.

Pemerintah melakukan percepatan pembangunan di daerah pelosok, wilayah marjinal, dan desa tertinggal sebagai bentuk keadilan sosial. Tak hanya terpusat di pulau Jawa, tapi juga di daerah tertinggal di luar Jawa. Tahun 2015 ada 122 daerah tertinggal, kini tinggal 62 daerah.

Perlu banyak inovasi untuk percepatan dan pemerataan pembangunan daerah tertinggal. Pemerintah menjawabnya dengan pembangunan infrastruktur fisik guna mendekatkan produsen di daerah tertinggal dengan konsumen di seluruh nusantara. Pemerintah dengan bangga menawarkan transformasi digital sebagai solusinya. Saat ini, data menunjukkan ada 8.876 produk telah terjual lewat *marketplace* dan 84 pusat layanan bisnis *online* telah dibangun.

Temuan di lapangan membuktikan masih banyak daerah tertinggal di berbagai penjuru negeri yang masih merasakan kesenjangan. Jangankan akses ke platform *e-commerce* yang membutuhkan perangkat dan literasi teknologi canggih, nyatanya penyediaan layanan dasar masih jauh panggang dari api.

Pertanyaan yang cukup menggelitik selanjutnya adalah, apakah jawaban untuk mengatasi masalah kesenjangan pembangunan selalu harus pembangunan fisik?

Konektivitas dan aksesibilitas, berkah yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur, idealnya diharapkan segera menjadi daya ungkit ekonomi daerah yang berdampak secara lokal ataupun regional. Transportasi, logistik, pembangunan kawasan industri, jasa, dan pariwisata menjadi semakin mudah untuk perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, ada sisi lain berupa efek samping pembangunan fisik yang muncul terutama ketika pembangunan ekonomi tidak melalui proses perencanaan matang yang mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Banyak terjadi program pembangunan menyebabkan alih fungsi lahan. Banyak lahan yang awalnya hutan, atau pesawahan, kini menjadi area pemukiman atau industri. Hal ini tentu akan mengurangi jumlah lahan pertanian dan lahan terbuka hijau yang dibutuhkan untuk menjaga daya dukung lingkungan. Pencemaran dimana-mana, kegiatan pembangunan khususnya industri masih banyak yang belum memenuhi kaidah lingkungan. Limbah dibuang ke sungai dan mengalir ke laut tanpa diolah dulu secara memadai, sehingga

meracuni air, tanah dan udara. Hal ini memicu polusi dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Di banyak desa, seiring dengan gerak pembangunan, kini tingkat kepadatan penduduk menjadi lebih tinggi. Peredaran uang, modal, barang, dan jasa di pedesaan sayangnya belum diiringi dengan kesadaran sosial dan lingkungan hidup. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah desa yang keluarga-keluarga di dalamnya membuang sampah sembarangan di sungai, dari 8.033 desa pada 2014 menjadi 9.673 desa pada 2018 (data Potensi Desa).

Masih menurut data Potensi Desa, perubahan kesejahteraan sosial telah meningkatkan lokasi peredaran narkoba, dari 5.931 desa pada 2014 menjadi 12.579 desa di 2018. Persoalan sosial lainnya, terjadi peningkatan tindakan pencurian, dari 33.739 desa pada 2014 menjadi 37.778 desa pada 2018. Disrupsi di desa seperti ini jika tidak diantisipasi bisa

berpotensi mengganjal pertumbuhan desa, walau dampak fisik dan sosialnya saat ini belum signifikan.

Pembangunan fisik di pedesaan – mengikuti anjuran pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya lokal– mulai terlihat dampak negatifnya pada lingkungan. Terjadi peningkatan hilangnya jenis pohon keras dan buah berusia panjang. Kayu yang didapat dari penebangan pohon-pohon ini digunakan sebagai bahan bangunan, baik sebagai bahan sementara maupun bahan permanen bangunan. Selanjutnya, lahan kosong lalu dikonversi, dari fungsi hutan menjadi area pemanfaatan lain seperti perkebunan, pertanian atau pemukiman. Bukit Karst dan pasir pun dikeruk, mengubah bentang alam. Padahal, keberadaan alam yang tak terganggu – berikut segala kekayaan intelektual dan kearifan lokal masyarakat adat penghuninya, serta keanekaragaman hayati juga jasa lingkungan yang terkandung di dalamnya – sangat dibutuhkan untuk menopang kualitas hidup manusia yang menjadi prasyarat kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan warga planet bumi yang kini makin terkoneksi, tak beda dengan sebuah satuan desa, hanya lebih besar dan lebih sesak.

Selanjutnya, masifnya pembangunan fisik juga mulai menimbulkan masalah sosial dalam bentuk perebutan sumber daya alam, baik antar warga maupun antara warga dan negara. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat 410 kasus (807.177,6 Ha) letusan konflik agraria yang masih berlangsung tanpa penyelesaian. Catatan Akhir Tahun KPA menunjukkan eskalasi konflik tenurial yang terus meningkat. Diawali masa transisi dari era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo, pada 2014 tercatat terjadi 472 kasus konflik, tahun 2015 terjadi 252 kasus, 2016 terjadi 450 konflik, lalu pada tahun 2017 terjadi 659 kejadian konflik agraria.

Peminggiran, atau ekslusi, terhadap masyarakat adat dan lokal terpencil menjadi faktor pertama dan utama ketika berbicara tentang upaya mendorong inklusi sosial, sebagaimana amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang ke-16: *Peace, Justice and Strong Institutions*. Tujuan SDGs ini secara lengkap menyebut pencapaian tujuan untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, juga menyediakan akses terhadap keadilan untuk semua, serta membangun lembaga yang inklusif, akuntabel dan efektif di semua tingkatan.

Problem sosial dan kerusakan lingkungan sangat mungkin dimitigasi dalam proses pembangunan ekonomi, selama masyarakat dan lembaga yang inklusif terus dijaga. Sudah banyak kajian akademis dan kertas posisi kebijakan terkait pembangunan

yang lestari dan berkelanjutan, yang dicirikan dengan *triple bottom line People-Planet-Profit*. Yang diperlukan hanyalah kemauan politik dan kebijakan afirmasi untuk masyarakat adat dan lokal terpencil.

Presiden Joko Widodo berinisiatif untuk membalik paradigma berpikir menjadi membangun ekonomi desa sebagai penyangga ekonomi kota. Mungkinkah itu?

Pandangan klasik bahwa sumber daya di desa hanya cocok untuk mengembangkan bahan baku seperti produk pertanian pangan, hortikultura, ternak atau ikan, itu perlu diperbarui. Transformasi sebuah desa pertanian yang miskin menjadi area industri yang hebat pernah ada yang berhasil. Salah satunya Desa Huaxi di Provinsi Yansu, Tiongkok. Dulunya, seperti desa-desa lain di Tiongkok, Huaxi adalah desa miskin yang kelebihan tenaga kerja tetapi kekurangan lahan pertanian. Namun, kisah sukses sebuah transformasi ekonomi pedesaan terjadi di sana. Adanya intervensi modal terutama berupa energi listrik, jasa logistik, teknologi, dan kepemimpinan lokal membuat Huaxi bertransformasi menjadi desa penghasil tekstil dan produk baja yang kompetitif. Huaxi pun berubah menjadi makmur dan sejahtera.

Salah satu kunci keberhasilan cerita perubahan ini adalah kepemimpinan Wu Ren Bau, sang kepala desa. Wu Ren Bau memastikan transformasi itu berjalan efektif, efisien, kompetitif dan melibatkan SDM setempat. Usaha unit desa juga turut diberdayakan. Pendidikan dinomorsatukan. Penanaman kedisiplinan warga dilakukan dengan keras. Mereka yang terbukti merusak fasilitas publik, semisal tong sampah atau halte bis, akan dihukum denda berat. Jika warga meninggalkan Desa Huaxi, maka segala haknya

(berupa subsidi sewa rumah, tunjangan kendaraan, fasilitas asuransi, dan bantuan sosial lainya) dicabut. Dengan begini urbanisasi dapat dicegah.

Presiden Park Chung Hee di Korea Selatan juga menjadi legenda dalam pembangunan desa di negaranya. Pada tahun 1960-an, Presiden Park mulai menginisiasi gerakan pembangunan desa. Desa-desa di negeri ginseng ketika itu miskin dan tidak produktif. Gerakan yang dikenal "Saemaul Undong" (pembangunan berawal dari desa) itu menekankan etos kerja keras dan budaya gotong royong, dipandu oleh keteladanan pemimpin lokal.

Pelajaran penting yang bisa dipetik di kedua negara Asia tersebut adalah penerapan konsep LPC (*leadership, people, culture* atau kepemimpinan, sumber daya manusia, budaya), yaitu ada kehadiran pemimpin di tingkat akar rumput yang mampu membangun budaya *sense of crisis* dalam melakukan

perubahan ke arah perbaikan harkat dan derajat warganya. Tahap berikutnya membangun koalisi dan kolaborasi sehingga ada gerakan sosial yang massif. Intinya, sumber daya manusia di pedesaan dididik, dibentuk, diajak berpikir dan diberdayakan untuk menyelesaikan persoalan bersama. Mengutip Tan Malaka, pahlawan nasional Indonesia yang juga sosok enigma karena kisah hidupnya cukup misterius, "terbentur, terbentur, terbentuk". Proses transformasi untuk membentuk masyarakat supaya berbudaya unggul haruslah dilakukan secara konsisten dan persisten, terus menerus, sampai menjadi.

Mendekat ke negeri sendiri, Program Peduli, yang menjadi prakarsa para pihak, terus menerus berproses dalam upaya pendampingan dan pembentukan untuk menjadi desa inklusif di 10 provinsi, 18 kabupaten, 26 kecamatan, 50 desa, 16 komunitas adat/lokal terpencil, 10 CSO mitra, dan setidaknya 14.355 masyarakat pemanfaat program. Sejak awal, Program Peduli menerapkan kombinasi model pengelolaan program bernama teori perubahan (*theory of change*) dan pendekatan kerangka logis (*Logical Framework Approach)* yang terus menerus dicek relevansinya selama program berlangsung, sehingga program berjalan lebih efisien dan efektif.

Keunikan Program Peduli terletak pada pendekatan kontekstual, bisa berupa sosio-kultural atau ekonomi-kewirausahaan melalui penguatan kelembagaan adat dan bangkitnya marwah masyarakat adat yang tereksklusi karena stigma dan diskriminasi. Terjadi upaya mengelaborasi masyarakat adat yang tereksklusi dan pihak dari luar masyarakat adat yang mengeksklusi secara menyeluruh sehingga kegiatan intervensi bisa dilakukan secara tepat sasaran. Juga ada dukungan fasilitasi terkait penguatan hak dan suara masyarakat ekskluder untuk berbicara keberpihakan terhadap komunitas yang terpinggirkan.

Keunikan lainnya terletak pada pola pendampingan CSO mitra yang difokuskan pada peningkatkan komunikasi yang proaktif dan produktif dengan pemerintah daerah, supaya program inklusi masyarakat adat dapat diarusutamakan secara mulus. CSO mitra memanfaatkan kedekatan dengan masyarakat adat dan pemerintah daerah yang menjadi target melalui proses yang cukup panjang dan waktu yang cukup lama. Kedekatan ini menjadi faktor pendukung keberhasilan program.

Selama periode program, setidaknya ada 152 forum yang memungkinkan masyarakat adat berinteraksi dengan pemerintah dan masyarakat sekitar, juga setidaknya ada 80 unit layanan pemerintah yang mengalami peningkatan. Sebagai hasilnya,

setidaknya ada 2.241 warga masyarakat adat yang telah mendapatkan dokumen identitas legal dan 2.960 warga yang telah menikmati layanan publik dasar dan bantuan sosial yang turut meningkatkan taraf hidup mereka. Modal sosial yang ada turut melancarkan pencapaian target program, contohnya penerbitan Peraturan Daerah Pengukuhan Kasepuhan dan Hutan Adat setelah melalui proses fasilitasi panjang dan tanpa lelah oleh RMI di Kabupaten Lebak, Banten. Contoh lain, Desantara yang memiliki jejaring kuat dengan mitra lokal termasuk pemerintah setempat, berhasil membuka cakrawala masyarakat Suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur untuk membuat nota kesepahaman pengelolaan lahan dengan pihak swasta. Ini sebagian contoh berhasil yang sangat berpotensi untuk direplikasi di tempat lain yang memiliki kesamaan konteks.

Kembali kepada ambisi Presiden Jokowi. Desa-desa di Indonesia, termasuk di sepuluh area kerja Program Peduli, sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai percontohan penerapan program pembangunan fisik dan non-fisik yang bersifat inklusif.

Jika pemerintah mulai menggaungkan program satu desa satu produk unggulan, desa-desa dampingan Program Peduli telah memulainya. Sebagai contoh, tenun dan pala menjadi potensi pengembangan ekonomi masyarakat yang ada di Boti. Lalu kopi toratima yang menjadi kebanggaan masyarakat Pipikoro Sigi. Tenun dan kerajinan tangan Ibu-Ibu Suku Anak Dalam di Jambi dan Baduy di Lebak. Setelah mendapat pengakuan eksistensi dan kemudahan layanan hak-hak dasar, kini perempuan Cina Benteng giat memajukan perekonomian keluarga dan komunitasnya melalui koperasi simpan pinjam dengan aset yang sudah berbilang milyar, sambil terus

merambah ke berbagai inovasi seni budaya guna memaksimalkan potensi yang ada di sekitar mereka.

Pada tahun terakhir Program Peduli, setidaknya 25 kecamatan dan desa telah meningkatkan kebijakan untuk lebih inklusif terhadap masyarajat adat. Kebijakan afirmasi ini tidak hanya bagus dalam teori karena terbukti pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp 3,5 miliar dari APBD untuk pembangunan inklusif, dimana 429 laki-laki dan perempuan masyarakat adat terlibat secara intensif dalam proses penyusunan kebijakan tersebut. Ketika masyarakat pemanfaat merasa berdaya, tidak semua kebijakan yang disodorkan kepada mereka diterima mentah-mentah tanpa sikap kritis. Sejak masyarakat adat sering berembuk dan berorganisasi mengatur ruang hidupnya secara inklusif dan partisipatif, mereka mulai terbiasa menyatakan pendapat.

Walhasil, ketika satu waktu ditawari bantuan padi dengan varietas yang kurang cocok dengan karakter alam, atau ketika ditawari investasi untuk penanaman komoditas yang tak dikonsumsi oleh warga, masyarakat bisa menolak dengan argumen yang masuk akal. Sikap asertif ini sebelumnya tak terbayangkan dalam imaginasi mereka.

Inilah sebagian pewujudan visi Desa Inklusi, Negeri Inklusi.

Tak mengherankan jika setidaknya ada 160 pihak dari kalangan pemerintah, universitas dan swasta menggunakan data dan pengetahun yang tergali selama Program Peduli untuk berbagai tujuan, ada 72 hajatan besar yang diselenggarakan untuk mempromosikan konsep inklusi sosial, dimana ada sekitar 987 komunitas adat di luar area kerja Program Peduli yang turut berpartisipasi.

Semua investasi dan segala capaian ini bisa saja hilang atau harus diulang ketika krisis menghantam. Sikap rendah hati karenanya dibutuhkan. Vandana Shiva, aktivis lingkungan dari India mengatakan, "kita tak sepantasnya melawan kehidupan. Kita seharusnya menciptakan harmoni dalam kehidupan". Hidup harmoni dan penghormatan terhadap alam, sebagaimana yang dicontohkan oleh beragam masyarakat adat di area dampingan Program Peduli, terbukti menciptakan ketahanan pangan, imunitas tubuh dan daya lenting komunitas menghadapi pandemi. Praktik diversifikasi pangan lokal masyarakat Suku Boti dan sistem cadangan pangan berupa *pare gede* di *leuit* Suku Baduy-Kasepuhan adalah sebagian contohnya.

Lima tahun masa pendampingan Tim Program Peduli – KEMITRAAN dan kesepuluh mitra lokalnya – berisi proses saling belajar dan mendengar, dengan kesadaran penuh dan kehadiran utuh. Dari hasil interaksi yang terjadi, satu hal yang sulit dibantah adalah tidak benar kalau yang dibutuhkan oleh masyarakat adat dan lokal terpencil selalu harus jalan mulus untuk menembus hutan, gunung, sungai, danau dan laut yang mengisolasi mereka, atau jembatan kokoh yang memungkinkan mobil dan motor melintas, listrik benderang untuk menerangi gubuk tanpa jendela, tembok beton dan genting untuk mengganti saung dan sudung, atau jaringan internet dengan kuota tanpa batas. Tentu, jika kemewahan fasilitas itu tersedia, mereka mungkin akan berbahagia.

Namun yang sering dilupakan, masyarakat adat membutuhkan sesuatu yang lebih hakiki, yaitu didengar dan dilibatkan, serta direkognisi yang bukan hanya basa-basi, caranya yaitu dengan memberikan kesempatan berinteraksi dan berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka ingin diperlakukan sama sebagaimana manusia lainnya. *Active citizen*. Mereka berhasrat menjadi warga negara yang aktif, yang mengorganisir diri, yang menentukan nasibnya sendiri, karena sejatinya mereka paham tata cara bertahan hidup yang selaras alam, bagaimana mengelola sumber daya alam secara lestari, serta sadar hak dan kewajiban sebagai warga yang setara dan bermartabat di dalam negara.

Melangkah ke depan tidak akan mudah. Bahkan, setelah badai pandemi Covid-19 berlalu suatu hari nanti, berbagai tantangan masih akan mengintai. Jika dan ketika pemerintah lewat kebijakannya

FORUM
FORUM

luput hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan lokal terpencil, satu-satunya cara adalah terus bersuara. Masyarakat madani perlu terus berupaya mendengar dan memberi suara kepada mereka yang tak memiliki akses dan '*privilege*' untuk membangun daya tawar yang lebih kokoh secara kolektif agar suaranya lebih didengar.

Kolaborasi multi-sektor dan multi-stakeholder menjadi kunci keberhasilan dalam upaya mengarusutamakan inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat adat. Penting diingat, tidak semua yang adat dan tradisional harus dibuat modern dan 'beradab', karena ini menyiratkan sikap jumawa superioritas peradaban modern. Tak perlu kontestasi antara modernitas dan adat, karena jalan kebudayaan memungkinkan pembagian ruang hidup penuh harmoni dan toleransi terjadi. Energi kita seyogyanya diarahkan untuk mengakui, melindungi dan mengintegrasikan pengetahuan dan kearifan masyarakat adat untuk membentuk paradigma kebudayaan yang inklusif adat dan berwawasan kesetaraan/keadilan jender. Penting juga menguatkan pengetahuan dan pendidikan yang berasal dari masyarakat adat, oleh masyarakat adat dan kembali ke masyarakat adat, dengan semua pihak mulai mendengar secara *suwung*, tanpa pretensi dan pre-konsepsi.

Terakhir, inklusi sosial untuk masyarakat adat dan perempuan adat tidak bisa hanya dilakukan oleh kelompok yang tereksklusi melalui penguatan kapasitas mereka, tetapi juga membangun kepedulian dari pihak yang selama ini secara sadar atau tidak sudah menstigma dan mengeklusi mereka. Itu artinya kita perlu berkaca dan orang yang berada di cerminlah yang perlu memulai perubahan.

Program Peduli mengangkat harkat martabat masyarakat adat dan memanusiakan manusia yang terlibat di dalamnya. Karena masyarakat adat dan lokal terpencil adalah sumur pengetahuan. Sudah terbukti bahwa masyarakat adat kuat menjaga tradisi agar terus lestari, melampaui satu dua generasi. Kita perlu berguru pada mereka yang gigih dan setia menjaga jati diri dan ruang hidupnya. ***

kemitraan
partnership
peduli
TOWARDS INCLUSIVE INDONESIA
D 116

peduli
kemitraan
TOWARDS INCLUSIVE INDONESIA
D 116

peduli

MANTRA MASYARAKAT ADAT BUAT ORANG KOTA

Direktur Eksekutif KEMITRAAN

KEMITRAAN MERASA TERPANGGIL untuk mendokumentasikan masyarakat adat dan orang-orang terpinggirkan karena kami sadar bahwa merekalah pemilik asli dan pemegang pusaka leluhur negeri ini. Merekalah yang turun-temurun merawat alam nusantara melalui mantra, legenda, lagu, dan adab berperilaku dengan sesama manusia dan alam semesta. Sungguh suatu ladang ilmu dan harta karun yang perlu dipelajari, dikaji, dilestarikan, dan dihormati oleh 'anak kota' yang sering merasa jauh lebih pintar walaupun sering salah dalam 'membaca' tanda-tanda alam.

'Orang kota' sering menganggap remeh mantra leluhur karena terpesona dengan kemampuan rekayasa yang ditawarkan 'ilmu baru' sehingga kehidupan dan pembangunan pun sering melupakan kearifan lokal (*local wisdom*) yang telah diuji oleh zaman dan terbukti telah menyelamatkan negeri dari bencana alam 'buatan manusia'.

Sadar akan kenyataan tersebut dan fakta makin terdesaknya masyarakat adat dan suku asli anak negeri dalam proses pembangunan, KEMITRAAN merasa berhutang budi dan berkewajiban untuk mendengar dan memahami denyut nadi dan pergolakan pikiran kelompok yang sering dikatakan tertinggal dan terpinggirkan oleh pusaran kekuasaan dan keuangan. Indonesia tercinta makin sering mendapatkan ujian dari Tuhan semesta alam yang hadir dalam bentuk kekeringan, banjir, longsor, hama dan wabah penyakit sebagai akibat dari kelalaian kita mendengarkan pesan leluhur akan pentingnya menghormati alam baik dalam tutur maupun perbuatan. Bencana adalah pesan alam yang nyata bahwa tangan-tangan kita telah merusak rumah dan taman kehidupan kita sendiri.

Demi memastikan adanya pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat dan lokal terpencil, juga untuk mencegah berlanjutnya perusakan alam, KEMITRAAN melalui "**Program Peduli**" berusaha untuk mendengarkan dan mengajak masyarakat adat dan kelompok-kelompok yang terisolasi dari kehidupan modern kota untuk terlibat dalam menentukan arah pembangunan negeri. Hal ini didasari oleh filosofi bahwa masyarakat adat dan kelompok-kelompok yang termarjinalisasi memiliki pengetahuan dan pengalaman yang kaya dalam menjaga dan mempertahankan alam yang menjadi ruang hidup mereka dari kerusakan.

KEMITRAAN sadar bahwa pembangunan nasional akan berhasil jika pemerintah memperhatikan dan mengajak masyarakat adat turut berpartisipasi dalam merumuskan strategi pembangungan nasional, khususnya yang bersinggungan langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari. Masyarakat adat dan kelompok yang terisolasi harus didengarkan suaranya agar terjadi dialektika pembangunan yang mengedepankan inklusi sosial (*social inclusion*) dan bukan model pembangunan yang bersifat *top down* dan dipaksakan oleh pemilik kekuasaan dan keuangan.

Para pengambil kebijakan dan pemilik modal sering menganggap masyarakat adat dan lokal terpencil sebagai "penghambat pembangunan" tapi **Program Peduli** menemukan bahwa jika masyarakat adat dan kaum terpinggirkan didengarkan dan dihargai dalam proses penyusunan strategi pembangunan, maka akan menghasilkan solusi yang baik dan bermanfaat. Program pembangunan yang baik tidak saja mengandalkan 'ilmu rekayasa' tetapi juga memperhatikan berbagai kearifan lokal yang telah teruji ratusan bahkan ribuan tahun. Oleh karena itu, inklusi sosial adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar jika kita menginginkan Indonesia yang maju, sejahtera dan terpelihara alam dan lingkungannya.

Sesuai dengan cita dasar pendirian KEMITRAAN yang mengusung pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

dan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, demokratisasi dan pembangunan yang berkelanjutan, **Program Peduli** betul-betul dapat menjahit tujuan-tujuan mulia di atas. KEMITRAAN sadar bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh menegasikan pentingnya pelestarian lingkungan hidup dan nilai-nilai keadilan bagi sesama anak negeri. Oleh karena itu, **Program Peduli** berupaya sekuat tenaga untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi kaum yang sering terpinggirkan. **Program Peduli** berusaha memfasilitasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat adat dan kelompok marginal lainnya agar tercipta kesetaraan, keadilan, dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Melalui **Program Peduli Pilar Masyarakat Adat yang Tergantung pada Sumber Daya Alam** 2014- 2020 (yang juga merupakan kelanjutan dari Program PNPM Peduli), KEMITRAAN berhasil meletakkan fondasi inklusi sosial lima tahun sebelumnya dan mewujudkan transformasi sosial yang signifikan di lokasi intervensi program. Perlu dijelaskan bahwa bentuk inklusi sosial yang didorong oleh **Program Peduli** adalah: (i) adanya pengakuan oleh negara untuk pemenuhan hak dasar masyarakat dan membuka akses bagi kelompok marjinal terhadap pelayanan publik; dan (ii) terbangunnya kerja sama yang efektif dengan semua kelompok masyarakat agar terjadi integrasi sosial yang solid.

KEMITRAAN berusaha untuk mendorong terjadinya inklusi sosial pada masyarakat adat di 13 provinsi bersama dengan 14 organisasi lokal di setiap provinsi, namun hanya 10 provinsi yang berjalan hingga akhir program. Program ini juga memberikan pembelajaran berharga pada KEMITRAAN bahwa niat baik harus terus menerus diupayakan bersama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Berbagai permasalahan yang menjadi temuan program meliputi: (i) ketiadaan pengakuan mulai dari hal yang paling dasar terkait eksistensi hingga ketiadaan pengakuan hak pengelolaan atas sumber daya alam (hutan atau pesisir), (ii) adanya anggapan bahwa masyarakat adat adalah kelompok primitif yang tidak memiliki sistem kepercayaan, (iii) minimnya pelayanan dasar yang bisa diakses terutama karena lokasi geografis yang terpencil dan sulit dijangkau, hingga (iv) permasalahan isolasi/pengucilan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Pengalaman-pengalaman tersebut kemudian kami bukukan dengan judul "***Inklusi Sosial: Sepuluh Kisah Peduli Masyarakat Adat & Lokal Terpencil Nusantara***". KEMITRAAN percaya bahwa buku ini dapat memberikan inspirasi bagi 'masyarakat kota' dan masyarakat internasional karena sepuluh cerita yang disajikan memaparkan informasi yang menarik, unik, dan belum banyak dibahas oleh pengambil kebijakan bahwa masyarakat adat pun sedang mengalami perubahan di berbagai pelosok negeri.

Buku ini juga diharapkan dapat membuka mata hati masyarakat kota yang selalu merasa lebih pintar dan akhirnya mengucilkan masyarakat adat pewaris leluhur negeri. **Program Peduli** menemukan bahwa sekurang-kurangnya terdapat tiga bentuk pengucilan sosial (*social exclusion*) yakni: (i)

pengucilan dari sisi penerimaan sosial, (ii) pengucilan dalam pelayanan publik, dan (iii) pengucilan dalam pembuatan kebijakan. Dari segi penerimaan sosial, masyarakat adat/masyarakat terpencil sering dikaitkan dengan stigma dan *stereotype* yang melekat dalam masyarakat adat, seperti terbelakang, kampungan, sehingga menyebabkan mereka sukar membaur dengan masyarakat sekitar. Dari sisi pengucilan pelayanan publik, kelompok masyarakat adat banyak terkendala permasalahan identitas, diskriminasi pelayanan kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur karena banyak lokasi mereka terpencil dan berada di pulau-pulau terluar yang sulit dijangkau. Dari segi kebijakan, masyarakat adat kerap menjadi korban dari kebijakan yang tidak memihak kebutuhan mereka dan bahkan tidak sedikit yang tidak mengakui keberadaan kelompok masyarakat adat. Hal seperti ini banyak merugikan masyarakat adat dan mengancam keberlangsungan masyarakat adat dan alam tempat kehidupan mereka, karena pemerintah sering sekali lebih berpihak pada pengusaha yang merusak alam dibanding pada masyarakat adat yang menjaga alam mereka.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada masyarakat adat yang telah relah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam menjaga alam nusantara. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga Pemerintah Daerah lokasi Program Peduli, DFAT- Australia, Asia Foundation, dan organisasi masyarakat sipil mitra di lapangan, serta semua staf KEMITRAAN yang menjalankan Program Peduli ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang tulus pada penulis, kurator foto, fotografer, narasumber dan semua pihak yang terlibat dalam penerbitan buku ini.

Kami berharap buku yang ada di haribaan pembaca ini dapat menginspirasi dan menggerakkan aksi nyata untuk inklusi sosial dalam pembuatan kebijakan di masa mendatang. Semoga pembaca dapat mengambil hikmah melalui suguhan gambar dan cerita yang dirangkai dari kekayaan dan kearifan lokal nusantara. Adalah benar, *Indonesia is a string of emeralds on the equator* (Indonesia adalah untaian manikam di khatulistiwa). Jangan dirusak dan mari kita rawat, demi negeri, demi alam, demi kemanusiaan.

Salam Inklusi,

Laode M Syarif, Ph.D.
Direktur Eksekutif

DAFTAR PUSTAKA RUJUKAN

Arifin, Lukman Hakim (editor). *Cerita dari Negeri Inklusi: Sebuah Kidung untuk Keragaman Indonesia*. Tim Pendamping Program Peduli. Jakarta: Renebook & Kemitraan, 2018

Arifin, Lukman Hakim (editor). *Mereka yang Tak Pernah Menyerah, Kisah Para Pendamping PNPM PEDULI*. Tim Pendamping PNPM Peduli. Jakarta: Kemitraan, 2014

Arman, Muhammad. *Negara Sebuah Masalah Masyarakat Adat*. Yogyakarta: Penerbit Lamalera, 2020

Chamim, Mardiyah. *Menjaga Rimba Terakhir: Kisah Masyarakat Lokal, Indigenous People, Berjibaku Menjaga Hutan. Rekaman Perjalanan 30 Tahun Warsi Menjaga Hutan*. Warsi, 2020

Hernawati S, Tarida. *Uma, Fenomena Keterkaitan Manusia dengan Alam*. Padang: Yayasan Citra Mandiri, 2007

Ismunandar, Kelik. *Cerita Rakyat Dayak Kenyah Lepoq Jalan*. Samarinda: Pustaka Horizon, 2016

Imron, Jhoni. *Bekampung di Kelukup Beadat ke Rimbo: Suku Anak Dalam Batang Pelepat*. Jambi: Pundi Sumatera, tanpa tahun

Kartodihardjo, Hariadi. *Merangkai Stanza Lagu Kebangsaan. 73 Esai-Esai Reflektif dalam Kuasa Pengetahuan, Politik Sumber Daya Alam & Problematika Kebijakan*. Bogor: Forest Watch Indonesia, 2018

Kartodihardjo, Hariadi. *Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia*. Bogor: Forest Watch Indonesia, 2017

Lilik HS. *Para Pembuka Jalan: Harkat Korban untuk Martabat Bangsa*. Jakarta: Indonesia untuk Kemanusiaan, 2019

Manurung, Butet. *The Jungle School*. Jakarta: Sokola, 2012

Sen, Amartya. *Identity & Violence: The Illusion of Destiny*. London: Penguin Books, 2006

Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York: First Anchor Books, 2000

Supriyanto, Agus, Bisro Sya'bani, Aldila Paramita & Syaiful (editor). *Kemitraan Konservasi: Kompilasi Peraturan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan di Kawasan Konservasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem-KLHK, 2018

Tim Penulis. *Masyarakat Adat dalam Pusaran Perubahan (Cerita Suku Nuaulu, Sawang, Kokoda, dan Sumba Timur)*. Jakarta: Kemitraan, 2018

Tim Penulis. *PEDULI Adat dalam Bingkai Inklusi - Esai Foto*. Jakarta: Kemitraan, 2018

Tim Penulis. *Menyibak Yang Tidak Terlihat, Menyuarakan Yang Tidak Terdengar: Perempuan dan Komunitas Cina Benteng*. Jakarta: PPSW, 2020

Tim Studi. *Studi Efektivitas Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Selama Periode Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla*. Jakarta: Walhi, 2019

Wardojo, Wahjudi. *Inspirasi dari Gunung Gede Pangrango*. Jakarta: Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem-KLHK, Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan Wildlife Conservation Society Indonesia, 2020

Wiratno. *Sepuluh Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia: Membangun "Organisasi Pembelajar"*. Jakarta: Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem-KLHK, 2018

Evaluasi Akhir Proyek Program PEDULI Pilar Masyarakat Adat 2014-2016, Ratnayu Sitaresmi, 2016

Final Report TAF & UGM on Social Inclusion and Adat, 2019

Laporan Penyelesaian PNPM PEDULI Fase 1, Tim Kemitraan, 2011-2014

Laporan Akhir Program LPMP Amair. Merawat Eksistensi dan Mengangkat Taraf Kehidupan Suku Sawang Gantong Berbasis Seni dan Budaya 2018-2019

Laporan Program Pembelajaran Penguatan Masyarakat Karsa Institute. Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Hutan dalam Menjamin Pemenuhan Hak-Hak Dasar Topo Uma di Wilayah Terisolir di Pedesaan Pipikoro, Sigi, Sulawesi Tengah dalam Himpitan Keterbatasan Akses, 2018

Laporan Akhir Program Pundi Sumatera. Strategi Mendukung Kehidupan dan Sumber Daya Alam Suku Anak Dalam di Sepanjang Jalan Lintas Tengah Sumatera 2018-2019

Laporan Akhir Program RMI. Tanah untuk Kelestarian Penghidupan dan Budaya Baduy 2018-2019

Laporan Akhir Program SCF. SIPAKATAU SIPAKALEBBI Masyarakat Adat To Balo & To Garibo Bulukumba, Sulawesi Selatan 2018-2019

Laporan Akhir Program SAMANTA. Meningkatkan perbaikan kebijakan lokal yang mendukung hak akses layanan dasar dan bantuan/jaminan sosial bagi kelompok tereksklusi di Sumba Timur NTT & Lombok Utara NTB 2018-2019

Laporan Akhir Program Yayasan Desantara. Kangen Kangean 2019 dan Laporan Narasi Program Peduli: Langkah Aksi Menuju Masyarakat Inklusif (LAMMIN 3) 2018

Laporan Akhir Program YCMM. Inisia*Si K*edaulatan dan *R*ekognisi *I*nklusif (SiKeReI) 2018-2019

Laporan Akhir Program YTB. Program Peningkatan Keberpihakan Pemerintah Daerah kepada Warga Suku Boti 2018-2019

Laporan Tahunan Kantor Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia 2020 Bangkit untuk Indonesia Maju

DAFTAR AKRONIM & ISTILAH

ADD : Anggaran Dana Desa
Adminduk : Administrasi Pelayanan Kependudukan
AMAN : Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APM : Angka Partisipasi Murni
BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPS : Badan Pusat Statistik
BUMDes : Badan Usaha Milik Desa
CO : *Community Organizer*
CSO : *Civil Society Organization*
DD : Dana Desa
Dukcapil : Kependudukan dan Catatan Sipil
FPIC : *Free, Prior, and Informed Consent*
HKM : Hutan Kemasyarakatan
Kemendes PDTT : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemenko PMK : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KK : Kartu Keluarga
KKG : Kesetaraan dan Keadilan Gender
KPA : Konsorsium Pembaruan Agraria
KSP : Kepala Staf Kepresidenan
KTP : Kartu Tanpa Penduduk
KWT : Kelompok Wanita Tani
KWPS : Koperasi Wanita Pengembang Sumberdaya
LFA : *Logical Framework Approach*
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
LPMP Amair : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Penelitian Air Mata Air
NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
PS : Perhutanan Sosial
PUHA : Pengarusutamaan Hak Anak-Anak
PUG : Pengarusutamaan Gender
RAPS : Reforma Agraria-Perhutanan Sosial
PNPM Mandiri : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
PPSW Jakarta : Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita Jakarta
PPRG : Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
PKK : Program Kesejahteraan Keluarga
Pokdarwis : Kelompok Sadar Wisata
Posyandu : Pos Pelayanan Terpadu
Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJMDes : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RKPDes : Rencana Kerja Pembangunan Desa
RMI : Rimbawan Muda Indonesia
RT : Rukun Tetangga
RW : Rukun Warga
SARA : Suku Agama Ras dan Antar Golongan
SCF : Sulawesi Community Foundation
SAD : Suku Anak Dalam
SDA : Sumber Daya Alam
SABAKI : Satuan Masyarakat Adat Banten Kidul
SDGs : *Sustainable Development Goals*
TOC : *Theory of Change*
TPB : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TORA : Tanah Obyek Reforma Agraria
UMKM : Usaha Mikro Kecil Menengah
UUD : Undang-Undang Dasar
YCMM : Yayasan Citra Mandiri Mentawai
YTB : Yayasan Tanpa Batas

Diskriminasi: Merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Perlakuan diskriminatif terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang diperlakukan secara tidak adil dan sewenang-wenang hanya karena suku, golongan, jenis kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karateristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi.

Gender/Jender: Konstruksi sosial mengenai gagasan yang mendefinisikan peran, sistem kepercayaan dan sikap, bayangan, nilai serta harapan mengenai maskulinitas dan femininitas dalam suatu masyarakat tertentu. Gender juga didefinisikan sebagai jenis kelamin sosial untuk menentukan peran seseorang karena sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.

***Gender mainstreaming*/Pengarusutamaan Gender**: Strategi pembangunan untuk mencapai adanya kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki-laki ke dalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan. Strategi ini telah diformalisasi melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu arus utama dan strategi lintas bidang yang harus dilaksanakan dalam pembangunan di samping pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Inklusi Sosial: Upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Melalui inklusi sosial, Program Peduli mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan bermartabat, memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, dan terlepas dari tindakan diskriminatif dalam bentuk apapun.

Marginalisasi: Sikap/perilaku masyarakat atau negara yang membatasi peran individu atau kelompok tertentu yang berakibat pada pemiskinan atau peminggiran terhadap mereka. Marginalisasi juga diartikan sebagai proses pengabaian hak-hak yang seharusnya didapat oleh pihak yang termarginalkan namun hak tersebut diabaikan dengan berbagai alasan demi suatu tujuan, biasanya berupa peminggiran ekonomi atau hak berusaha.

Perubahan Sosial: Dinamika perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sosial masyarakat. Perubahan-perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain, perubahan sosial terjadi karena dorongan dari usaha-usaha masyarakat guna menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu dan tempat tertentu.

Stereotipe: Penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan dan diasosiasikan. Stereotipe dapat berupa prasangka positif dan juga negatif, serta kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif.

Stigma: Tidak diterimanya seseorang pada suatu kelompok karena kepercayaan bahwa orang tersebut melawan/tidak selaras dengan norma yang ada dan umum diterima. Stigma sosial sering menyebabkan pengucilan terhadap individu ataupun kelompok.

INKLUSI SOSIAL

Sepuluh Kisah Peduli Masyarakat Adat dan Lokal Terpencil Nusantara

Teks oleh Elis Hart
Kurasi foto oleh Oscar Motuloh

Bersama:
YAYASAN CITRA MANDIRI MENTAWAI: Roberta Sarogdok, Rifai, Reza Fernanda, Tarida Hernawati, Pinda Tangkas Simanjuntak, Bambang Sagurung, Suwendi Salaisek, Oreste Mandui, Kornelius Sagulu, Albertina, Maria Yuniarti, Siska, Fransisca Sagurung.

PUNDI SUMATERA: M Sutono, Mahendra Taher, Dewi Yunita Widiarti, Dewi Surya Armayani, Haris Munandar, Syamri, Wahyu Fedora, Dian Roma Dianto, Romi Heriadi, Damsir Chaniago, Haryo Tamtomo, Jon Hardy, Riza Umami, Mukhtar Alif, Dessy Riski, Widia Reni Anggraini.

LPMP AMAIR: Wahyu Epan Yudhistira, Riska, Fikri Firdianto, Eko Dwi Putra, Edo Yulanda, Heru Briantino, Justian, Dedy Hidayat, Suci Anggraini, Hendri Gampang, Bil Muamar.

RIMBAWAN MUDA INDONESIA: Marda Tillah, Slamet Widodo, Aji Panjalu, Indri Guli, Rojak Nurhawan, Eman Sulaeman, Yosfi Aldi, Fahmi Rahman, Ratnasari, Cindy Julianty, Indra Hatasura, Wardatul Zanna, Fauzan Adima, Lukmi Atie, Siti Nursolihat, Siti Marfu'ah, Novita Zakiah.

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA WANITA JAKARTA: Tri Endang Sulistyowati, Titik Suryatmi, Naswirda, Wigaya Ridhati Fidarina, Deni Kurniawan, Iqbal Yusti Ekoputro, Tiyas Widya Anggraini, Esti Puji Lestari, Rossy Aprilliani, Linda Darmayanti, Desty.

YAYASAN DESANTARA: Mokh Sobirin, Asman Azis, Firstda Harin Regia, Muhammad Azka Fahriza, Fredy Torang Widiyanto, Kelik Ismundandar, Kasmani, Muhammad Salim, Syaifullah Fadli, Rusdin, Yurni Li, St Yomi Rohmah, Muhammad David, Lutsfi Siswanto, Abdul Fitrah, Surono, Tamam, Endang, Esti Nurhayati.

KARSA INSTITUTE: Rahmat Saleh, Syaiful Taslim, Budiansyah, Florensius, Jimmy Methusala, Alpius Nore, Desmon, Sulaeman, Eliyanus, Moh Rul, Hadiyanto, Bardi, Arfan, Yultri Yunita, Linda Biki, Sulastri.

SULAWESI COMMUNITY FOUNDATION: Antonius J Sanjaya, Arham, Muliadi Makmur, Naufal Achmad, Muhammad Sultan, Nurhaji Majid, Ackbar, Hudi, Rusman, Namira Arsa, Sulasiyem, Rafiqah Ulfah Masbah , Suryana, Hasmawati Masidung.

YAYASAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA - SAMANTA: Dwi Sudarsono, Stepanus Landu Paranggi, Alloysius Tao, Lalu Khaerul Anwar, Yopi Hardi, Haiziah Gazali, M Juani, Maidianto, Herman, Lalu Musnal, Mustaan, Muhizam, Putradi, Yohanis Lay Ria, Asmuniarti, Siti Nurhidayati.

YAYASAN TANPA BATAS: Liliane P Amalo, Denimars Manain Sailana, Melkianus Laiskodat, Simeon ME Liunome, Cornelius Ratuwalu, Hermina Mau, Egenius Epy Goleng, Hamdan Saba, Yugers Sasi, Sari Kedoh, Abriana G Tunliu.

TIM PEDULI KEMITRAAN: Monica Tanuhandaru, Dewi Rizki, Ade Siti Barokah, Moch Yasir Sani, M Bustom, Asriyadi Alexander Mering, Widya Anggraini, Rinto Andhi Suncoko, Efrizal Zein, Wahyu Pamuji, Ina Desilia Fridayanti.

TIM PEDULI PILAR ADAT THE ASIA FOUNDATION: Abdi Suryaningati, Natalia Warat, Nurul Firmansyah, Harliani

Tim Artistik: Dwi Oblo, Dedeo Kurniawan, Gunawan Widjaja, Ridwan Jainal

Tata Letak Isi: Tim Renebook

Huruf sampul depan diambil dari Puisi Suku Anak Dalam, halaman 70

Cetakan 1, 2020

Buku ini dipersembahkan oleh KEMITRAAN melalui Program Peduli dengan dukungan dari The Asia Foundation dan Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari pihak penerbit.

Perpustakaan Nasional Dalam Katalog (KDT)

ISBN 978-602-1616-86-4

TENTANG PENULIS & KURATOR

Elis Hart

Seorang pembelajar-pengelana penuh waktu dan konsultan paruh waktu yang lahir pada Hari Bumi di Tanah Pasundan. Elis memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman profesional sebagai praktisi komunikasi, peneliti, dan penulis tentang masalah demokrasi, konservasi, antikorupsi, pembangunan dan keberlanjutan. Pernah bekerja di lembaga internasional dan nasional seperti United Nations Development Programme, United States Agency for International Development, Development Alternatives Inc., The Nature Conservancy, the World Bank, RARE, ICRAFT, Komisi Pemberantasan Korupsi, WWF-Indonesia dan KEMITRAAN. Sebagian tulisannya dimuat oleh *The Jakarta Post, Media Indonesia, Panorama* dan *Pantau*. Elis memperoleh gelar master bidang Linguistik Terapan Bahasa Inggris dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dan gelar sarjana dari Fakultas Hukum Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, keduanya di Jakarta. Di waktu luangnya, Elis suka membaca, bercerita, bersepeda, bertani, naik gunung dan bertarung tanding bela diri.

Oscar Motuloh

Selama tiga dekade, Oscar Motuloh menekuni semesta citra, dan cahaya. Ia sudah melakoni bermacam peran, mulai dari pewarta foto, mentor, dosen, juri hingga kurator. Oscar memulai dan mengakhiri karirnya di Kantor Berita ANTARA, termasuk membangun dan di kemudian hari memimpin Museum dan Galeri Foto Jurnalistik Antara. Di sini, Oscar turut membidani lahirnya lokakarya foto jurnalistik yang telah menelurkan 23 angkatan selama 26 tahun. Alumninya telah malang melintang dan mewarnai fotografi jurnalistik Indonesia. Atas dedikasinya untuk fotografi, Oscar dianugerahi gelar Empu Ageng oleh Institut Seni Indonesia Yogyakarta tahun 2019. Gelar ini setara dengan gelar doktor honoris causa yang lazim dikenal di dunia akademis. Sebelumnya, Oscar mendapat "Penghargaan Kebudayaan" dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015), "Press Card Number One" dari Komunitas Hari Pers Nasional (HPN, 2013), "30 Most influential Photographers in Asia" dari Invisible Photographer Asia (IPA, 2014), dan "Anugerah Sepanjang Hayat" atau Lifetime Achievement saat Anugerah Pewarta Foto Indonesia (APFI, 2018).

"

Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya, merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya.

"

— Abdurrahman Wahid

Australian Government

The Asia Foundation

kemitraan
partnership

PROGRAM peduli

ISBN 978-602-1616-86-4